



**WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2013-2018**



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pertengahan jalan (*midterm review*) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian kebijakan nasional dan daerah yang harus diakomodir dalam RPJMD, sehingga RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 50 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 284 harus dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pegendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 73);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2013-2018.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 7 Seri E.6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
 - d. Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis
 - e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
 - g. Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
 - h. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
 - i. Bab IX : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
- (2) Merubah Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII pada Lampiran Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 1 Agustus 2016

WALIKOTA PADANG PANJANG,


HENDRI ARNIS

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,


EDWAR JULIARTHA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 5 SERI E. 47
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA
BARAT : (5/2016).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada dasarnya pembangunan dapat dipandang sebagai upaya atau proses untuk mewujudkan kehidupan suatu daerah atau negara kearah yang lebih baik. Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka diperlukandukungan perencanaan pembangunan yang komprehensif, responsif, efektif dan efisien. Dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dilihat dari aspek waktu perencanaan, maka perencanaan pembangunan daerah terdiri atas 3 (tiga), yakni : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, dan (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan untuk periode 1(satu) tahun. Masing-masing perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, serta menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top-down* dan *bottom-up*.

Dalam kaitan ini, RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, sesuai dengan periode kepemimpinan Kepala Daerah terpilih masa jabatan tahun 2013-2018. Pada dasarnya substansi RPJMD ini memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan disusun mengacu pada RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2005-2025. Dengan demikian RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 merupakan RPJMD kedua dari pelaksanaan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 73);
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, tentunya mempunyai keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota terpilih, dengan memperhatikan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005 – 2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional.
2. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, merupakan dokumen perencanaan yang bersifat strategis, yang proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032, RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RTRW daerah *hinterland*, sebagai upaya untuk mengintegrasikan rencana pembangunan Kota Padang Panjang.
3. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).
4. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 menjadi pedoman penyusunan RKPD tahun 2014 sampai dengan RKPD tahun 2018, serta Rencana Kerja (Renja SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang tahun 2014 sampai dengan 2018.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu-Isu Strategis Daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta kebijakannya.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta program pembangunan yang dikelompokkan kedalam agenda dan prioritas pembangunan daerah.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta pencapaian target indikator kinerja per urusan disertai kebutuhan pendanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat indikator kinerja makro pemerintah daerah dalam pencapaian *outcome* tahunan selama periode 2013-2018.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat ketentuan peralihan untuk penyusunan RKPD transisi

tahun 2019, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dari rencana yang telah disusun.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 disusun dengan maksud untuk menyediakan pedoman bagi pemerintah Kota Padang Panjang, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder pembangunan lainnya dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Padang Panjang dengan visi, misi dan program pembangunan dari Walikota terpilih, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan saling bersinergi, koordinatif, dan komprehensif. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2013-2018 antara lain sebagai berikut :

- a. Menjabarkan visi dan misi Walikota terpilih kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 sampai dengan 2018, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan berpedoman pada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.
- b. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan Kota Padang Panjang dalam 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun kedepan.
- d. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2014-2018.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Wilayah dan Lokasi

a. Kondisi Geografis

Kota Padang Panjang terletak pada posisi 100° 20' dan 100° 30' Bujur Timur serta 0°27' dan 0°32' Lintang Selatan di bagian tengah Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayah secara keseluruhannya adalah 2.300 Ha atau 23 Km². Luas wilayah Kota Padang Panjang mencapai 0.05% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Posisi Kota Padang Panjang sangat strategis karena terletak pada lintasan regional yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Solok dan Kota Batusangkar. Di samping itu Kota Padang Panjang juga berada di jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.

Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Kemudian, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, maka Kota Kecil Padang Panjang memiliki status sejajar dengan daerah kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan Keputusan DPRD Peralihan Kota Praja tanggal 25 September Tahun 1957 Nomor 12/K/DPRD-PP/57, maka Kota Praja Padang Panjang dibagi atas 4 wilayah administratif yang disebut dengan Resort, yaitu Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982, Kota Padang Panjang terdiri atas 2 Kecamatan dengan 16 Kelurahan, di mana masing - masing Kecamatan terdiri dari 8 Kelurahan dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan Kecamatan XKoto Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Timur Berbatas dengan Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Barat Berbatas dengan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Adapun gambaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.1
Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kota Padang Panjang

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
A.	<u>Kecamatan Padang Panjang Barat</u>	<u>975</u>	<u>42,39</u>
	1. Silaing Bawah	261	11,35
	2. Silaing Atas	54	2,35
	3. Pasar Usang	59	2,57
	4. Kampung Manggis	316	13,74
	5. Tanah Hitam	72	3,13
	6. Pasar Baru	23	1,00
	7. Bukit Surungan	121	5,26
	8. Balai-Balai	69	3,00
B.	<u>Kecamatan Padang Panjang Timur</u>	<u>1.325</u>	<u>57,61</u>
	1. Koto Panjang	133	5,78
	2. Koto Katik	101	4,39
	3. Ngalau	145	6,30
	4. Ekor Lubuk	280	12,17
	5. Sigando	140	6,09
	6. Ganting	310	13,48
	7. Guguk Malintang	190	8,26
	8. Tanah Pak Lambik	26	1,13
Jumlah/Total		2.300	100,00

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2015

b. Topografi dan Geologi

Secara topografis Kota Padang Panjang memiliki dataran tinggi bergelombang dengan ketinggian antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut. Topografi Kota Padang Panjang yang tidak rata mengakibatkan sebagian besar lahan yang ada tidak mungkin dimanfaatkan untuk pemukiman. Kondisi fisik permukaan tanah Kota Padang Panjang terdiri dari mikro relief yang miring dari Utara ke Selatan dan sebagian terdiri dari lembah yang curam dan perbukitan. Tanahnya merupakan tanah jenis andosol yang subur dan sangat baik untuk usaha pertanian.

Hasil Kajian Penilaian Resiko Bencana Gempa Bumi dan Bahaya Gunung Berapi di Kota Padang Panjang tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Padang Panjang bekerjasama dengan Pusat Survei Geologi, Bandung, menunjukkan secara umum formasi geologi Kota Padang Panjang terdiri dari batuan malihan, batuan tufaan aliran piroklastik, batuan tufaan, dan lahar II. Kemudian dari struktur geologinya terdapat satu sesar aktif

yang melewati Kota Padang Panjang yaitu sesar Bukit Jarat dan satu lagi berdekatan dengan Kota Padang Panjang (pada bagian timur) yaitu Sesar Sumatera.

c. Iklim dan Hidrologi

Letak Kota Padang Panjang yang berada pada dataran tinggi, maka Kota Padang Panjang beriklim sejuk dengan suhu maksimum mencapai 26,1⁰ C dan minimum 21,8⁰ C. Curah hujan tahunan juga cukup tinggi rata-rata berkisar 270 hari per tahun atau 4.822 mm. Kelembaban udara paling tinggi adalah 100⁰ C dan terendah rata-rata 60⁰ C.

Rata-rata temperatur udara di Kota Padang Panjang adalah 21,88⁰ C. Selama tahun 2012, curah hujan di Kota Padang Panjang adalah 4.190,7 mm dengan total hari hujan 266 hari. Curah hujan tertinggi terjadi bulan November dengan jumlah curah hujan 614,7 mm dengan total hari hujan 28 hari. Curah hujan terendah terjadi bulan Juni dengan jumlah curah hujan 156,5 mm dengan total hari hujan 13 hari.

Kota Padang Panjang mempunyai tekanan udara rata - rata 945,07 mbar dan penguapan air rata-rata 2,88 mm. Penyinaran matahari di Kota Padang Panjang selama tahun 2012 mencapai 45,70%. Kecepatan rata - rata angin adalah 4,30 knot dengan rata - rata arah angin 199,7 derajat. Sedangkan petir yang terjadi di Padang Panjang untuk tahun 2012 yang terekam oleh alat dari Stasiun Geofisika adalah 10.716.442 kali.

d. Potensi pengembangan wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Padang Panjang dibuat berdasarkan hasil analisa daya dukung fisik Kota Padang Panjang. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah overlay antara peta potensi pengembangan perkotaan dan peta potensi rawan bencana alam. Selanjutnya dilakukan pendekatan dengan membuat matriks keterkaitan antara kedua aspek tersebut yang menghasilkan empat kelas daya dukung.

Berdasarkan analisa RTRW Kota Padang Panjang, potensi pengembangan perkotaan di wilayah Kota Padang Panjang secara ideal tidak terlalu besar, hanya meliputi \pm 31,09% dari luas wilayah Kota Padang Panjang (daya dukung tinggi dan sedang). Namun dengan adanya rekayasa teknologi bangunan dan infrastruktur, maka masalah keterbatasan daya dukung fisik ini bisa diatasi, sehingga potensi pengembangan perkotaan Kota Padang Panjang semakin besar.

Sesuai dengan RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032, terdapat beberapa potensi pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan pelayanan, antara lain :

1. Pusat pelayanan kota meliputi:
 - a. Kawasan Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang berlokasi di sebagian Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Usang dan Kelurahan Balai-Balai, dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa; dan
 - b. Kawasan Kantor Walikota Padang Panjang yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota.
2. Subpusat pelayanan kota bertujuan untuk meningkatkan pelayanan internal yang tersebar di 5 (lima) lokasi, meliputi :
 - a. Kawasan Bukit Surungan yang berlokasi di Kelurahan Bukit Surungan dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa serta simpul transportasi berupa terminal;
 - b. Kawasan Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kelurahan Ganting dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan kesehatan;
 - c. Kawasan simpang objek wisata tematik yang berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah dengan fungsi utama sebagai pusat wisata serta perdagangan dan jasa;

- d. Kawasan GOR Bancah Laweh yang berlokasi di Kelurahan Koto Panjang dengan fungsi utama sebagai pusat olahraga dan wisata;
 - e. Kawasan Simpang Gunung yang berlokasi di Kelurahan Ekor Lubuk dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan serta perdagangan dan jasa.
3. Pusat lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan lingkungan tersebar pada 8 (delapan) kelurahan, meliputi:
- a. Pusat lingkungan di Kelurahan Ganting;
 - b. Pusat lingkungan di Kelurahan Sigando;
 - c. Pusat lingkungan di Kelurahan EkorLubuk;
 - d. Pusat lingkungan di Kelurahan Ngalau;
 - e. Pusat lingkungan di Kelurahan Guguk Malintang;
 - f. Pusat lingkungan di Kelurahan Koto Katik;
 - g. Pusat lingkungan di Kelurahan Pasar Usang;
 - h. Pusat lingkungan di Kelurahan Kampung Manggis.

e. Wilayah Rawan Bencana

Hasil kajian penilaian resiko bencana gempa bumi dan gunung berapi di Kota Padang Panjang tahun 2006 (Kerjasama Pusat Survei Geologi Bandung dengan Bappeda Kota Padang Panjang) dan hasil observasi lapangan, maka potensi bencana alam di Kota Padang Panjang terdiri dari :

1. Bencana Gempa Bumi

Kota Padang Panjang dapat dibagi atas lima zona kerentanan yakni :

a. Zona I (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi sangat tinggi)

Bentang alam lajur ini merupakan bagian dari bentang alam struktural vulkanik (gunung api) dengan kemiringan lereng 2 – 15° yang secara dominan berlokasi di Kelurahan Silaing atas, Kampung Manggis, Pasar Usang, Balai-Balai, Tanah Pak Lambik dan Guguk Malintang.

b. Zona I A (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi tinggi)

Bentang alam lajur ini merupakan bagian bentang alam struktural vulkanik (gunung api) dengan kemiringan lereng bervariasi 0 – 15% yang secara dominan berlokasi di Kelurahan Ganting, Sigando dan Ekor Lubuk.

c. Zona IB (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi tinggi – sedang)

Bentang alamnya merupakan bagian dari bentang alam bentukan asal vulkanik (gunung api) dengan kemiringan lereng bervariasi antara 0 – 12% dan 2 – 15% yang secara dominan berlokasi di Kelurahan Ganting, Sigando dan Ekor Lubuk.

d. Zona II (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi sedang)

Zona II ini secara dominan berlokasi di Kelurahan Silaing Bawah, Kampung Manggis, Pasar Usang, Bukit Surungan, Pasar Baru, Balai-Balai, Guguk Malintang, Ganting, Ngalau dan Koto Panjang.

e. Zona III (Kerentanan resiko bahaya gempa bumi sedang – rendah)

Zona III ini secara dominan berlokasi pada seluruh Kelurahan di Kota Padang Panjang, kecuali Silaing Atas dan Tanah Pak Lambik

2. Bencana Letusan Gunung Api

Sebagian besar wilayah Kota Padang Panjang termasuk dalam kawasan III (radius 8 – 14 Km) bencana letusan gunung api berupa aliran lahar dan abu vulkanik. Daerah potensi resiko bahaya aliran Gunung Marapi yang akan datang ditentukan berdasarkan kondisi

bentang alam wilayah yang dicerminkan konfigurasi topografi masa kini. Daerah-daerah tersebut dicirikan oleh lembah-lembah sungai yang berhulu langsung dari puncak Marapi. Di Kota Padang Panjang daerah-daerah potensi tersebut dapat dijumpai di sepanjang aliran Sungai Batang Anai (DAS Anai), Sungai Pasar Baru dan Sungai Tanang (DAS Andok), Sungai Kendangan-Sibunian (DAS Rupit), Sungai Batang Gadis dan Sungai Batang Sikakeh (DAS Sikakeh).

3. Bencana Longsor (Gerakan Tanah)

Bencana longsor di Kota Padang Panjang cukup sering terjadi terutama pada saat musim hujan pada daerah dengan kemiringan > 40 %. Kemudian berdasarkan data wilayah potensi gerakan tanah di Provinsi Sumatera Barat bulan Maret 2010 (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), wilayah Kota Padang Panjang terbagi atas 2 potensi gerakan tanah yaitu potensi menengah – tinggi di Kecamatan Padang Panjang Barat dan potensi menengah di Kecamatan Padang Panjang Timur. Daerah yang mempunyai potensi menengah untuk terjadi gerakan tanah akan mengalami pergerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Daerah yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadi gerakan tanah, akan mengalami pergerakan tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

2.1.2. Demografis

Dilihat dari aspek demografis, dapat dikemukakan bahwa jumlah penduduk Kota Padang Panjang secara fluktuatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2010 penduduk Kota Padang Panjang adalah 47.069 jiwa. Sedangkan menurut BPS, tahun 2011 penduduk Kota Padang Panjang naik menjadi sebanyak 47.619 jiwa. Selanjutnya hasil Sensus Penduduk tahun 2012, jumlah penduduk Kota Padang Panjang adalah sebanyak 48.187 jiwa, serta meningkat menjadi 49.539 jiwa pada tahun 2013. Sedangkan tahun 2014, sesuai dengan proyeksi BPS, jumlah penduduk Padang Panjang adalah sebanyak 50.208 jiwa. Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk dari tahun 2010 sampai tahun 2014 rata-rata bergerak dari 2.357 jiwa per km² tahun 2010, menjadi 2.095 jiwa per km² tahun 2014.

Berikut gambaran perkembangan jumlah penduduk Kota Padang Panjang dan tingkat kepadatannya dari tahun 2008-2012 seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel.2.2
Jumlah Penduduk Kota Padang Panjang dan Tingkat Kepadatannya
Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Ket.
2010	47.069	2046	
2011	47.619	2070	
2012	48.187	2095	
2013	49.539	2154	
2014	50.208	2183	

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2015

Dilihat komposisi penduduk Kota Padang Panjang menurut jenis kelamin, ternyata dari tahun 2010 - 2014 jumlah penduduk perempuan di Kota Padang Panjang lebih banyak dari penduduk laki - laki. Adapun rinciannya seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Jenis Kelamin
Tahun 2010-2014

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2010	23.399	23.670	47.069
2011	23.664	23.955	47.619
2012	23.946	24.241	48.187
2013	24.616	24.920	49.539
2014	25.019	25.189	50.208

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2015

Untuk sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin, per Kecamatan dan Kelurahan pada tahun 2013 dan 2014, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.4.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2013-2014

No	Kelurahan	2013			2014		
		Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
1	Silaing Bawah	2.335	2.517	4.852	2.425	2.577	5.002
2	Silaing Atas	1.107	985	2.092	1.082	964	2.046
3	Pasar Usang	1.860	2.195	4.055	1.807	2.136	3.943
4	Kampung Manggis	2.824	2.654	5.478	2.842	2.659	5.501
5	Tanah Hitam	1.604	1.627	3.231	1.582	1.598	3.180
6	Pasar Baru	693	649	1.342	678	637	1.315
7	Bukit Surungan	1.128	1.076	2.204	1.139	1.081	2.220
8	Balai-Balai	2.666	2.766	5.432	2.613	2.703	5.316
	Kec. Padang Panjang Barat	14.217	14.469	28.686	14.168	14.355	28.523
1	Koto Panjang	1.753	1.687	3.440	2.181	2.069	4.250
2	Koto Katik	444	439	883	435	429	864
3	Ngalau	1.423	1.420	2.843	1.379	1.385	2.764
4	Ekor Lubuk	1.049	1.009	2.058	1.161	1.115	2.276
5	Sigando	727	707	1.434	744	721	1.465
6	Ganting	1.043	1.098	2.141	1.029	1.079	2.108
7	Guguk Malintang	2.665	2.839	5.504	2.988	3.170	6.158
8	Tanah Pak Lambik	935	868	1.803	934	866	1.800
	Kec. Padang Panjang Timur	1.039	10.076	20.106	10.851	10.834	21.685
	Kota Padang Panjang	24.256	24.536	48.792	25.019	25.189	50.208

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2015

Sedangkan komposisi penduduk Kota Padang Panjang menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012-2014

Kelompok Umur	2012	2013	2014
0 – 4	4.964	4.924	5.329
5 – 9	4.877	4.892	4.863
10 – 14	5.078	5.049	5.275
15 – 19	4.646	4.806	5.358
20 – 24	3.801	3.885	4.035
25 – 29	3.618	3.586	3.905
30 – 34	3.619	2.634	3.644
35 – 39	3.379	3.442	3.496
40 – 44	3.014	3.087	3.390
45 – 49	2.707	2.749	2.826
50 – 54	2.476	2.510	2.395
55 – 59	2.045	2.135	1.992
60 – 64	1.334	1.461	1.290
65 – 69	930	933	912
70 – 74	758	759	686
75+	940	940	812
Total	48.187	48.792	50.208

Sumber : BPS Kota Padang Panjang

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dalam aspek ini dipaparkan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga. Indikator yang terdapat dalam ketiga fokus tersebut pada dasarnya adalah indikator yang termuat dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dicapai oleh daerah dan target-target *Millenium Development Goals* (MDG's) yang pencapaiannya juga harus didukung oleh daerah.

Sampai tahun 2014 ada 15 bidang SPM yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Evaluasi pencapaian target indikator SPM Kota Padang Panjang Tahun 2012 - 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Evaluasi Pencapaian Indikator SPM Kota Padang Panjang

Tahun 2012 dan 2014

NO	BIDANG	Capaian (%)		
		2012	2013	2014
1	Bidang Kesehatan	81.40	78.98	88.38
2	Bidang Sosial	50.58	58.21	154.82
3	Bidang Lingkungan Hidup	31.25	66.53	90.90
4	Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	103.89	133.86	171.92
5	Bidang Perumahan Rakyat	-	-	-
6	Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	82.29	41.67	134.08
7	Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	71.88	75.57	100.00

8	Bidang Pendidikan Dasar	88.30	50.00	98.18
9	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	27.19	35.63	14.46
10	Bidang Ketenagakerjaan	27.51	29.88	31.08
11	Bidang Kominfo	58.07	63.16	68.00
12	Bidang Ketahanan Pangan	-	118.23	114.14
13	Bidang Kesenian	171.01	99.32	298.00
14	Bidang Perhubungan	0.71	-	49.11
15	Bidang Penanaman Modal	87.14	87.14	55.00
	RATA-RATA	67.79	72.17	97.20

Sumber : Laporan Capaian SPM Kota Padang Panjang Tahun 2015,

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Padang Panjang selama periode tahun 2010-2014 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB, baik melalui pendekatan harga konstan maupun harga berlaku, PDRB per kapita, dan juga Indeks Pembangunan Manusia karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam pertumbuhan angka melek huruf, rata-rata lama sekolah.

a. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

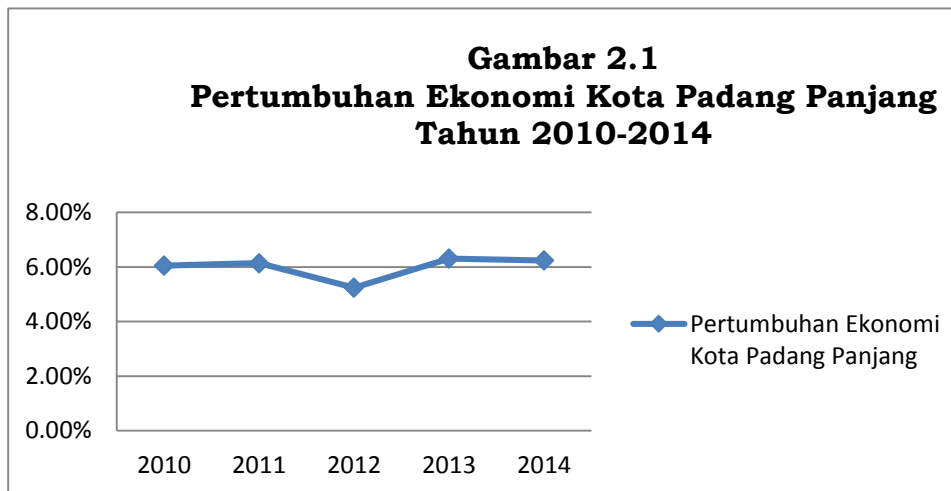
Secara makro, perkembangan perekonomian Kota Padang Panjang cukup baik dan kecenderungannya menunjukkan peningkatan atau trend positif dari tahun - tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2010 sebesar 6,05%, naik menjadi 6,14% pada tahun 2011. Pada Tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang naik menjadi 6,31% dan pada tahun 2014 perekonomian Kota Padang Panjang Mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar 6,10%.

Adapun gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2010-2014 dapat dilihat pada 77able 2.6 dan gambar 2.1 berikut:

Tabel.2.7
Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Panjang
Tahun 2010 – 2014

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2010	6,05
2011	6,14
2012	6,24
2013	6,31
2014	6,10

Sumber : BPS Kota Padang Panjang



Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat juga dilihat pada pertumbuhan PDRB, yang merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan non ekonomi pada suatu daerah. Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000, dapat dilihat bahwa PDRB Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2010 PDRB adalah sebesar Rp.1,5 Milyar, naik menjadi Rp.1,6 Milyar pada tahun 2011. Selanjutnya terus mengalami kenaikan menjadi Rp.1,7 milyar pada tahun 2012. Pada Tahun 2013 naik menjadi Rp.1,8 milyar dan Tahun 2014 naik menjadi Rp.1,9 milyar. Dengan adanya peningkatan ini, tentu saja menggambarkan secara absolut telah terjadi kenaikan nilai tambah dari tahun ke tahun. Tingkat kemajuan ekonomi Kota Padang Panjang juga meningkat seiring dengan tumbuhnya secara positif PDRB Kota Padang Panjang Atas Dasar Harga Konstan.

Peningkatan PDRB Kota Padang Panjang juga terlihat atas dasar harga berlaku. Peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh PDRB tersebut tahun 2014 tercatat sebesar Rp.2,3 Milyar, naik dari tahun 2013 yang hanya Rp.2,09 Milyar. Sedangkan tahun 2012 PDRB Kota Padang Panjang Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp.1,9 Milyar dan tahun 2011 hanya sebesar Rp.1,7 Milyar. Perkembangan dan peningkatan PDRB tersebut dapat diartikan bahwa secara absolut PDRB Kota Padang Panjang tumbuh rata - rata sebesar 10,15%.

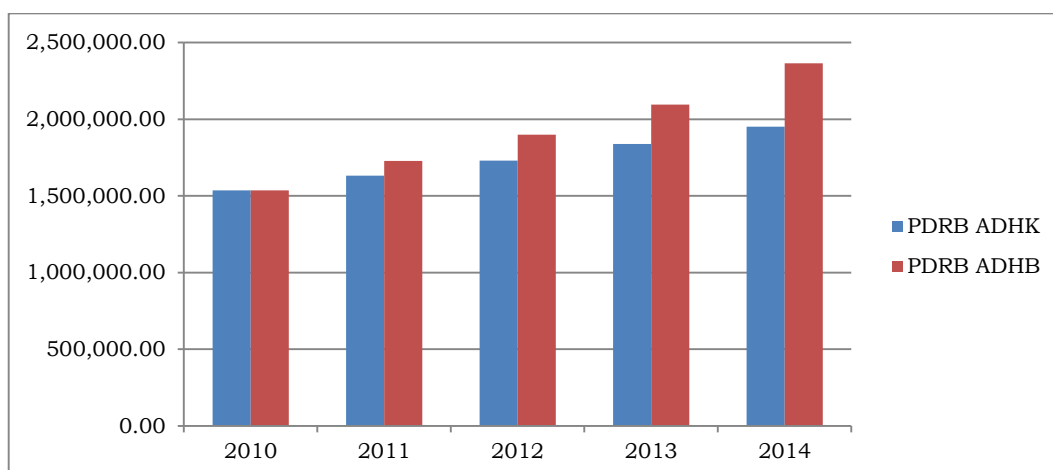
Adapun gambaran perkembangan PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014 (ADHK dan ADHB) seperti terdapat pada Tabel 2.8 dan Gambar 2.2. berikut ini:

Tabel 2.8
PDRB ADHK dan ADHB serta perkembangannya
Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014

No	Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	
		Jumlah (x Rp. 1 juta)	Perkembangan (%)	Jumlah (x Rp. 1 juta)	Perkembangan (%)
1	2010	1.535.883,9		1.535.883,9	
2	2011	1.632.846,9	12,55	1.728.606,5	6,31
3	2012	1.730.276,4	9,89	1.899.567,7	5,97
4	2013	1.839.393,1	10,32	2.095.550,1	6,31
5	2014	1.951.674,2	12,82	2.364.261,8	6,10

Sumber : PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2015 (data diolah)

Gambar 2.2
PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Kota Padang Panjang (data diolah)

Jika dilihat dari sektor ekonomi, seluruh kegiatan sektor perekonomian di Kota Padang Panjang berdasarkan harga berlaku, menunjukkan adanya peningkatan yang cukup bervariasi. Sektor Jasa-jasa merupakan sektor ekonomi yang paling besar peningkatannya dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya yaitu dari nilai tambah yang dihasilkan pada tahun 2010 sebesar 1.5 milyar rupiah menjadi sebesar 1.7 milyar rupiah pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan sebesar 0.2 milyar rupiah.

Sektor lain yang juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah Sektor Angkutan dan Komunikasi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Bangunan, dan Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, Sektor Industri dan Sektor Pertanian. Adapun gambaran perkembangan sektor perekonomian Kota Padang Panjang berdasarkan harga berlaku tahun 2010-2014 seperti terdapat pada tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.9
Perkembangan Sektor Perekonomian PDRB Kota Padang Panjang
ADHB Tahun 2010-2014
(dalam juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	96.340,2	106.624,4	112.732,1	123.713,6	138.138,7
B	Pertambangan dan Penggalian	4.623,9	4.897,4	5.339,2	6.243,6	7.918,6
C	Industri Pengolahan	175.967,9	200.281,4	217.838,9	235.125,8	256.604,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	857,5	861,0	904,3	914,9	1.231,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.868,9	5.126,5	5.486,5	5.908,0	6.379,4
F	Konstruksi	130.598,1	147.531,5	165.808,6	193.406,6	224.164,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	297.470,7	329.930,9	353.931,4	381.069,3	424.891,3
H	Transportasi dan Pergudangan	192.381,7	219.611,0	230.976,0	257.570,5	297.255,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32.265,5	36.781,3	41.561,0	47.527,8	56.596,0
J	Informasi dan Komunikasi	132.157,0	147.197,1	168.530,2	175.559,5	199.350,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	61.739,9	69.463,7	80.190,3	90.049,3	102.124,5
L	Real Estat	60.476,3	64.611,9	69.518,5	76.922,5	87.311,7
M,N	Jasa Perusahaan	1.127,5	1.229,6	1.435,2	1.634,4	1.874,1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	157.891,7	180.196,7	202.181,7	212.151,1	231.815,2
P	Jasa Pendidikan	103.643,8	120.971,2	138.675,0	165.085,8	189.209,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19.504,1	22.543,0	26.001,9	29.512,5	33.036,8
R,S,T,U	Jasa Lainnya	63.969,4	70.747,8	78.456,9	93.155,0	106.360,9
PDRB		1.535.883,9	1.728.606,5	1.899.567,7	2.095.550,1	2.364.261,8

Sumber : PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2015

Selanjutnya jika dilihat atas dasar harga konstan tahun 2000, berperannya Sektor Jasa-jasa terhadap perekonomian Kota Padang Panjang semakin dipertegas dengan tingginya peningkatan nilai tambah yang dicapai Sektor Jasa-jasa. Pada tahun 2013 nilai tambah Sektor Jasa-jasa mencapai 1,13 milyar rupiah sedangkan pada tahun 2014 tercatat sebesar 1,20 milyar rupiah atau mengalami peningkatan nilai tambah sekitar 67 juta rupiah. Tingginya peningkatan nilai tambah Sektor Jasa-jasa pada PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan tingginya produksi yang dihasilkan oleh Sektor Jasa-jasa. Meskipun demikian, Sektor Angkutan dan Komunikasi juga tetap menunjukkan sektor ekonomi yang tinggi peningkatan nilai tambahnya dibandingkan sektor ekonomi lainnya yaitu dari nilai

tambah yang dihasilkan pada tahun 2013 sebesar 407 juta rupiah menjadi sebesar 442 juta rupiah atau mengalami peningkatan 35 juta rupiah pada tahun 2014. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan tahun sebelumnya 491 juta rupiah menjadi 519 juta rupiah pada tahun 2014, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran tahun sebelumnya sebesar 345 juta rupiah menjadi sebesar 406 juta rupiah pada tahun 2014, Sektor Bangunan tahun 2013 tercatat memiliki nilai tambah sebesar 166 juta rupiah dan meningkat menjadi sebesar 176 juta rupiah pada tahun 2014, Sektor Industri Pengolahan tahun 2013 tercatat memiliki nilai tambah sebesar 209 juta rupiah dan meningkat menjadi sebesar 224 juta rupiah pada tahun 2014.

Adapun gambaran perkembangan sektor ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014 berdasarkan harga konstan tahun 2000, dapat dilihat pada Tabel 2.10 dan berikut ini:

Tabel 2.10
Perkembangan Sektor Ekonomi PDRB Kota Padang Panjang
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2014
(dalam juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	96.340,2	100.017,2	102.584,9	104.922,3	108.455,3
B	Pertambangan dan Penggalian	4.623,9	4.663,9	4.980,1	5.326,5	5.716,3
C	Industri Pengolahan	175.967,9	184.996,9	197.551,7	209.269,2	224.816,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	857,5	912,4	1.052,7	1.113,9	1.377,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.868,9	4.995,4	5.032,7	5.475,0	5.708,9
F	Konstruksi	130.598,1	138.409,2	148.468,2	165.941,5	176.536,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	297.470,7	310.940,2	324.513,6	345.216,9	364.634,3
H	Transportasi dan Pergudangan	192.381,7	209.592,6	220.497,8	240.286,9	258.684,0
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32.265,5	34.262,6	36.483,7	38.364,4	41.660,0
J	Informasi dan Komunikasi	132.157,0	144.378,7	160.603,4	167.526,2	184.239,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	61.739,9	66.291,0	72.465,5	77.181,9	82.627,9

L	Real Estat	60.476,3	62.385,9	65.130,2	67.759,4	70.961,8
M,N	Jasa Perusahaan	1.127,5	1.211,1	1.316,7	1.428,3	1.551,9
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	157.891,7	169.620,4	173.359,6	176.383,8	178.087,7
P	Jasa Pendidikan	103.643,8	112.094,0	122.452,0	132.604,2	141.669,0
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19.504,1	20.959,5	22.468,0	24.232,0	26.084,3
R,S,T,U	Jasa Lainnya	63.969,4	67.116,0	71.315,9	76.331,7	78.831,6
PDRB		1.535.883,9	1.632.846,9	1.730.276,4	1.839.393,1	1.951.674,2

Sumber : BPS Kota Padang Panjang

Adapun gambaran pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2010-2014 seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Padang Panjang
Tahun 2011-2014

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,82	2,57	2,28	3,37
B	Pertambangan dan Pengecilan	0,87	6,78	6,96	7,32
C	Industri Pengolahan	5,13	6,79	5,93	7,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,40	15,38	5,81	23,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,60	0,75	8,79	4,27
F	Konstruksi	5,98	7,27	11,77	6,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,53	4,37	6,38	5,62
H	Transportasi dan Pergudangan	8,95	5,20	8,97	7,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,19	6,48	5,15	8,59
J	Informasi dan Komunikasi	9,25	11,24	4,31	9,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,37	9,31	6,51	7,06
L	Real Estat	3,16	4,40	4,04	4,73
M,N	Jasa Perusahaan	7,41	8,72	8,48	8,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,43	2,20	1,74	0,97

P	Jasa Pendidikan	8,15	9,24	8,29	6,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,46	7,20	7,85	7,64
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,92	6,26	7,03	3,28
PDRB		6,31	5,97	6,31	6,10

Sumber : BPS Kota Padang Panjang

Dilihat dari struktur perekonomian Kota Padang Panjang, terlihat bahwa pada tahun 2014, sektor ekonomi yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan PDRB adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 17,97 persen.

Tahun 2013 sektor Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi sebesar 12,57 persen dan menempati urutan kedua dalam pembentukan PDRB. Pada tahun 2014 ini kontribusi sektor Transportasi dan Pergudangan dalam PDRB Kota Padang Panjang mengalami peningkatan yaitu naik menjadi 12,57 persen.

Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2014 menempati urutan ketiga dalam hal kontribusi yang diberikan pada pembentukan PDRB yaitu sebesar 10,85 persen padahal pada tahun 2013 nilai tambah sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 11,22 persen terhadap total PDRB Padang Panjang.

Perkembangan kegiatan ekonomi di sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, terjadi penurunan peran dalam struktur perekonomian Padang Panjang. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 9,80 persen. Dibandingkan dengan tahun 2013 kontribusi sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami penurunan dimana pada tahun 2013 sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 10,12 persen terhadap PDRB Kota Padang Panjang. Meskipun demikian sektor ini tetap menjadi penyumbang terbesar keempat pada PDRB Kota Padang Panjang.

Sektor Konstruksi yang tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 9,23 persen dan pada tahun 2014 nilai tambah sektor Konstruksi mampu memberikan kontribusi sebesar 9,48 persen terhadap total PDRB Kota Padang Panjang. Dengan demikian kontribusi sektor Konstruksi terhadap perekonomian Kota Padang Panjang mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen. Sedangkan Sektor Jasa Pendidikan pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 8 persen pada PDRB, naik dari tahun 2013 yang hanya mampu menyumbang 7,88 persen. Sehingga menempati urutan ke lima dalam kontribusi terhadap PDRB Kota Padang Panjang.

Sektor lain yang ada dalam struktur perekonomian Kota Padang Panjang tahun 2014 yang memberikan kontribusi pada PDRB Kota Padang Panjang adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Tahun 2013 kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 5,90 persen yang mengalami penurunan pada Tahun 2014 sebesar 5,84 persen.

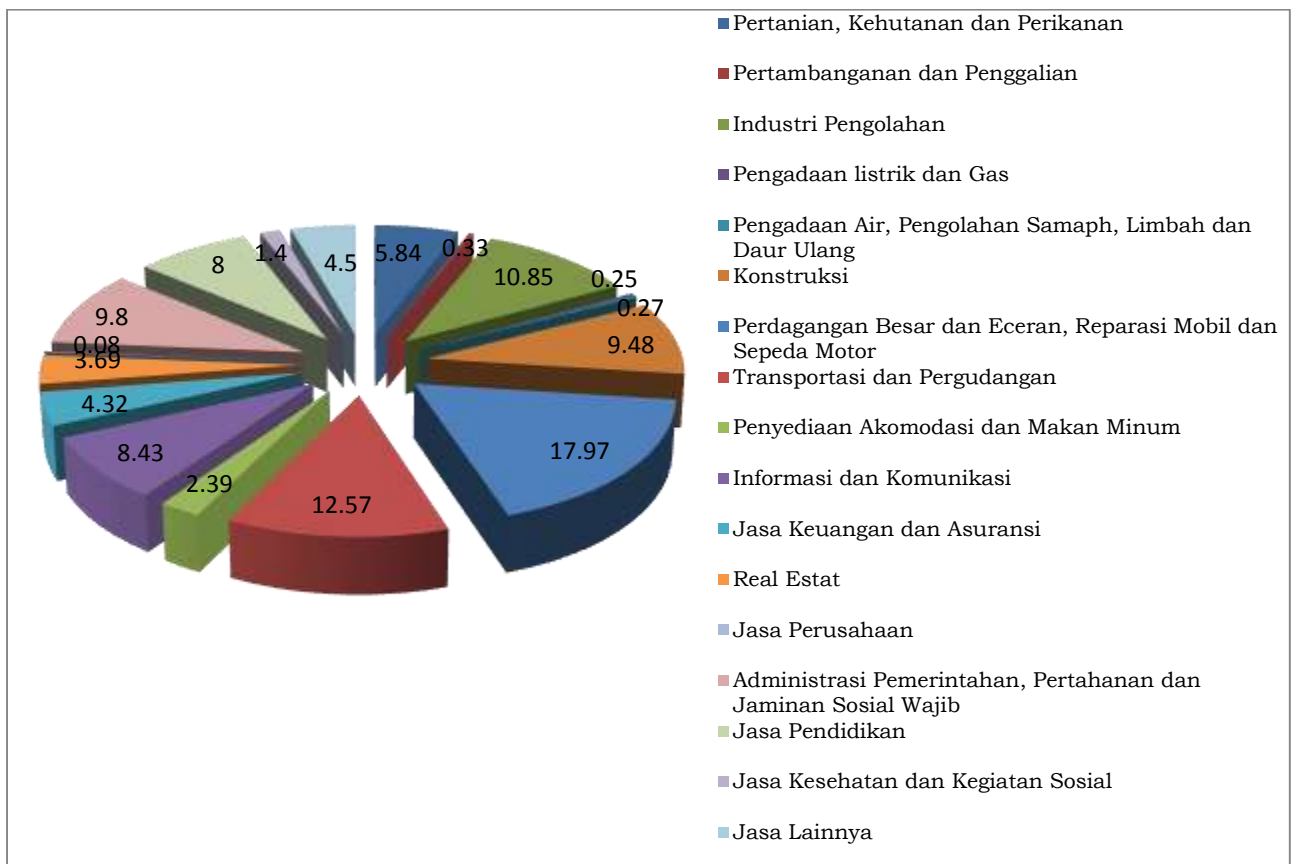
Perkembangan distribusi PDRB Kota Padang Panjang periode Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.11 dan gambar 2.4. berikut ini:

Tabel 2.12
Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Panjang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014

No	Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,27	6,17	5,93	5,90	5,84
B	Pertambangan dan Penggalian	0,30	0,28	0,28	0,30	0,33
C	Industri Pengolahan	11,46	11,59	11,47	11,22	10,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,05	0,05	0,04	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,32	0,30	0,29	0,28	0,27
F	Konstruksi	8,50	8,53	8,73	9,23	9,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,37	19,09	18,63	18,18	17,97
H	Transportasi dan Pergudangan	12,53	12,70	12,16	12,29	12,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,10	2,13	2,19	2,27	2,39
J	Informasi dan Komunikasi	8,60	8,52	8,87	8,38	8,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,02	4,02	4,22	4,30	4,32
L	Real Estat	3,94	3,74	3,66	3,67	3,69
M,N	Jasa Perusahaan	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	10,28	10,42	10,64	10,12	9,80
P	Jasa Pendidikan	6,75	7,00	7,30	7,88	8,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,30	1,37	1,41	1,40
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4,16	4,09	4,13	4,45	4,50
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2015

Gambar 2.3
Distribusi Persentase PDRB Kota Padang Panjang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014



Sumber : PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2015, data diolah

Dilihat dari PDRB perkapita yang merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang menunjukkan nilai rata-rata pendapatan dari seluruh sektor produksi, maka perkembangan nilai PDRB perkapita penduduk Kota Padang Panjang secara umum sejak tahun 2010 sampai 2014 tetap menunjukkan terjadinya peningkatan. Berdasarkan atas harga berlaku, dapat dikemukakan bahwa pada tahun 2011 PDRB perkapita Kota Padang Panjang adalah Rp.1.728.606,5,- meningkat dari tahun 2010 yang hanya sebesar Rp. 1.533.883,9,-. Sedangkan Tahun 2014, PDRB perkapita Kota Padang Panjang meningkat menjadi Rp.2.364.261,8,-. Dengan kata lain selama 5 tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2014, terjadi peningkatan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku Kota Padang Panjang sebesar 12,82%.

Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan (PDRB Perkapita ADHK), dapat dikemukakan bahwa pada tahun 2014 PDRB perkapita AHK Kota Padang Panjang adalah Rp.1.951.674,2 meningkat dari sebesar Rp.1.839.393,1 untuk tahun 2013. Tahun 2012, PDRB perkapita ADHK Kota Padang Panjang adalah sebesar Rp.1.730.276,4, meningkat dari tahun 2011 yang hanya Rp. 1.632.846,9, Apabila dirata - ratakan selama tahun 2010 sampai tahun 2014, maka akhir tahun 2014, terjadi peningkatan 6,10% dari tahun 2010. Berikut ini adalah tabel pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Padang Panjang Tahun 2010 sampai tahun 2014.

Tabel.2.13
PDRB Perkapita Kota Padang Panjang
Tahun 2010 - 2014

Tahun	PDRB Perkapita ADHB (Rupiah)	Kenaikan (%)	PDRB Perkapita AHK (Rupiah)	Kenaikan (%)
2010	1.533.883,9	13,83	1.535.883,9	4,60
2011	1.728.606,5	12,55	1.632.846,9	6,31
2012	1.899.567,7	9,89	1.730.276,4	5,97
2013	2.095.550,1	10,32	1.839.393,1	6,31
2014	2.364.261,8	12,82	1.951.674,2	6,10

Sumber : PDRB Kota Padang Panjang Tahun 2015

b. Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

1) Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan tantangan yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu menurunkan tingkat kemiskinan selalu menjadi tujuan Pemerintah Kota Padang Panjang. Tujuan dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diukur dari penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan meningkatnya pendapatan per kapita rakyat.

Sasaran penurunan angka kemiskinan diarahkan pada pengintegrasian setiap program dan kegiatan pemerintah. Dengan adanya integrasi program dan kegiatan tersebut, diharapkan dari tahun ke tahun masyarakat miskin Kota Padang Panjang dapat dikurangi. Secara umum, angka kemiskinan di Kota Padang Panjang pada tahun 2014 adalah sebesar 6,4%, menurun dari tahun 2010 yang sebesar 7,59%. Walaupun 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, angka kemiskinan mengalami penurunan, namun angka kemiskinan tersebut masih di atas 6%. Berikut ini tabel angka kemiskinan Kota Padang Panjang dari tahun 2010 - 2014.

Tabel.2.14
Angka Kemiskinan Kota Padang Panjang
Tahun 2010 - 2014

Tahun	Angka Kemiskinan (%)
2010	7,59
2011	7,25
2012	6,50
2013	6,66
2014	6,40

Sumber : Susenas Kota Padang Panjang, BPS 2010-2014

2) Angka Pengangguran

Secara umum, pengangguran dapat digambarkan sebagai sesuatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Pengangguran adalah permasalahan yang selalu muncul di banyak negara dan daerah. Begitupun halnya di Padang Panjang, pengangguran tidak dapat dipisahkan dari permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, sehingga banyak kebijakan dan program yang diluncurkan untuk mengurangi angka pengangguran.

Pengurangan angka pengangguran juga merupakan bagian dari arah kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam RPJMD Tahun 2008 - 2013 guna mendukung misi

mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berbasis masyarakat. Sesuai dengan kondisi yang ada, angka pengangguran dapat ditekan dari 9,75% pada tahun 2010 menjadi 8,29% pada tahun 2014. Berbagai program dan kegiatan yang berbasis masyarakat diluncurkan untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Padang Panjang. Berikut ini tabel kondisi angka pengangguran di Kota Padang Panjang Tahun 2010 - 2014.

Tabel.2.15
Angka Pengangguran Kota Padang Panjang
Tahun 2010 - 2014

Tahun	Angka Pengangguran (%)
2010	9,75
2011	8,56
2012	7,37
2013	7,07
2014	8,29

Sumber : Sakernas Kota Padang Panjang, BPS 2010-2014

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial antara lain dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup dan rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disampaikan gambaran perkembangan beberapa indikator tersebut antara lain :

a. Angka Melek Huruf

Dilihat bahwa Angka Melek Huruf di Kota Padang Panjang, dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan dan dapat dikatakan sudah cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Angka melek huruf di Kota Padang Panjang pada tahun 2011 sebesar 99,31 % naik menjadi 99,32%. Tahun 2012 dan terus meningkat menjadi 99,33 tahun 2013. Ini mengindikasikan hanya 0,68% penduduk yang tidak bisa membaca huruf latin. Indeks ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka provinsi yang hanya sebesar 97,23% tahun 2013. Adapun gambaran perkembangan melek huruf Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16

Angka Melek Huruf Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2014

Nama Daerah	Angka Melek Huruf (persen)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kota Padang Panjang	99,30	99,31	99,32	99,33	99,34
Sumatera Barat	97,09	97,16	97,23	97,23	97,24

Sumber : Publikasi BPS

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah setidaknya menunjukkan bawa rata-rata lama penduduk suatu daerah mengikuti pendidikan. Dalam konteks ini dapat diamati bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kota Padang Panjang mengikuti pendidikan terus meningkat, yakni 10,23 tahun pada tahun 2010 naik menjadi 10,79 tahun pada tahun 2014. Ini berarti, rata-rata penduduk Kota Padang

Panjang mengikuti pendidikan selama lebih kurang 10,74 tahun. Angka ini di atas rata-rata lama sekolah provinsi Sumatera Barat yang baru mencapai 8,29 tahun pada tahun 2014. Sebagai gambaran perkembangan angka rata-rata lama sekolah penduduk Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.17

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014

Nama Daerah	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kota Padang Panjang	10,23	10,73	10,74	10,76	10,79
Sumatera Barat	8,48	8,57	8,60	8,63	8,29

Sumber : Publikasi BPS

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sebagai contoh APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing - masing jenjang pendidikan.

APK Kota Padang Panjang secara umum sudah diatas 100% dan ada kecenderungan mengalami peningkatan. Tahun 2014, APK jenjang SD Kota Padang Panjang adalah sebesar 121,64%, meningkat dari tahun 2010 yang hanya 101,05%. Berikut gambaran perkembangan APK Kota Padang Panjang dari tahun 2010 - 2014 sebagai berikut:

Tabel.2.18

APK Kota Padang Panjang Tahun 2010 - 2014

Jenjang Pendidikan	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
SD	101,05	121,09	117,17	117,85	121,64
SLTP	141,36	134,12	131,34	134,32	140,26
SLTA	225,04	240,31	216,74	240,11	227,13

Sumber :Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang

Dari tabel di atas, dapat disampaikan bahwa tahun 2014 untuk jenjang SD,SLTP dan SLTA, APK Kota Padang Panjang sudah diatas 100%. Bahkan untuk SLTA, APK Kota Padang Panjang sudah diatas 200%. Kondisi mencerminkan bahwa secara umum penduduk Kota Padang Panjang yang berusia sekolah, sudah menikmati bangku pendidikan.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan antara APK dengan APM, maka APM

sebagai indikator daya serap yang lebih baik dari APK, karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Memahami angka partisipasi dalam pendidikan tentu sangat penting bagi semua pihak. Sebab dengan mengetahui angka partisipasi maka kita akan mengetahui sejauh mana upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan telah dicapai. Dengan angka partisipasi kita dapat mengetahui pada karakter atau variabel apa saja, ketidakmerataan atau kesenjangan dalam memperoleh akses pendidikan itu terjadi. APM Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tahun 2014, APM jenjang SD Kota Padang Panjang adalah sebesar 109,64%, meningkat dari tahun 2010 yang hanya 87,48%. Dengan demikian, secara umum tahun 2014, semua penduduk Kota Padang Panjang yang memiliki usia pendidikan SD, sudah menikmati bangku sekolah. Adapun gambaran perkembangan APM Kota Padang Panjang dari tahun 2010 - 2014 yaitu sebagai berikut:

Tabel.2.19

APM Kota Padang Panjang Tahun 2010 - 2014

Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
SD	87,48%	110,43%	96,95	107,46	109,64
SLTP	104,89%	96,12%	96,11	104,13	108,741
SLTA	156,61%	122,3%	151,47	172,87	165,79

Sumber : Profil Pendidikan Kota Padang Panjang tahun 2010-2014

Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tahun 2014 untuk jenjang SD, SLTP dan SLTA, APM Kota Padang Panjang sudah diatas 100%.

e. Angka Usia Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Angka Usia Harapan Hidup pada suatu umur X adalah rata - rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gisi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Selanjutnya, semakin meningkat kesejahteraan masyarakat dan status sosial masyarakat, juga berpengaruh positif terhadap angka harapan hidup atau usia masyarakat. Berbagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang, dimana pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan angka usia harapan hidup masyarakat. Pada tahun 2010 angka harapan hidup masyarakat Kota Padang Panjang 71,47 tahun,

naik menjadi 71,73 tahun pada tahun 2011, kemudian terus meningkat menjadi 72,01 tahun pada tahun 2012 dan 72,44 tahun Pada tahun 2014. Capaian angka usia harapan hidup masyarakat Kota Padang Panjang lebih baik dari angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat. Gambaran perkembangan angka usia harapan hidup masyarakat Padang Panjang seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20

**Angka Usia Harapan Hidup Kota Padang Panjang
dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014**

Nama Daerah	Angka Harapan Hidup (Tahun)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kota Padang Panjang	71,47	71,73	72,01	72,08	72,44
Sumatera Barat	69,50	69,55	70,02	70,09	68,32

Sumber : Publikasi BPS

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gambaran aspek pelayanan umum di Kota Padang Panjang dapat diuraikan atas focus pelayanan urusan wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan.

Dalam kaitan ini, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib merupakan Urusan Pemerintahan yang memang harus diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan Urusan Pilihan meliputi Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Berikut ini disampaikan hasil gambaran pelaksanaan urusan urusan pemerintahan di Kota Padang Panjang sebagai berikut:

2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, maka pembangunan bidang pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat di Kota Padang Panjang. Pelaksanaan urusan pendidikan di Kota Padang Panjang, secara umum dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan didukung oleh beberapa SKPD terkait lainnya.

Beberapa gambaran pelaksanaan pembangunan urusan pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan seperti APM, APK, dan Rata-rata Lama Bersekolah sudah dikemukakan pada sub bab sebelumnya. Berikut akan dikemukakan

a. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan maka ketersediaan sarana pendidikan merupakan faktor pendukung yang sangat menentukan. Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan dalam rangka menunjang program wajib

belajar 12 tahun. Dinamika ini dapat dilihat dari rasio dalam melayani penduduk usia sekolah sebagai berikut: Adapun ketersediaan sarana sekolah dapat dilihat perbandingannya pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.21
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2010 - 2014 Kota Padang Panjang

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	39	39	39	39	39
1.2.	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	6679	7003	5907	6 131	6051
1.3.	Rasio	0.0058	0.0056	0.0066	0.0064	0.0064
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	17	17	17	17	17
2.2.	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	3595	3459	3690	3 830	3266
2.3.	Rasio	0.0047	0.0049	0.0046	0.0044	0.0054
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah gedung sekolah	20	20	20	20	20
3.2.	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	4281	3453	3040	3156	3267
3.3.	Rasio	0.0047	0.0058	0.0066	0.0063	0.0061

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka 2010-2015(data diolah)

b. Rasio Guru/Murid

Disamping ketersediaan sarana sekolah, ketersediaan guru sebagai tenaga pengajar merupakan faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pendidikan. Perkembangan perbandingan jumlah guru dengan murid dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.22
Rasio Guru dan Murid Tahun 2010 - 2014

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru (orang)	496	494	529	539	536
1.2.	Jumlah Murid (orang)	6880	6956	7105	7133	7211

1.3.	Rasio (%)	7.21	7.10	7.45	7.55	7.43
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru (orang)	554	550	573	586	556
2.2.	Jumlah Murid (orang)	4641	4809	4978	4878	5301
2.3.	Rasio (%)	11.94	11.44	11.51	12.01	10.49
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Jumlah Guru (orang)	778	775	799	795	778
3.2.	Jumlah Murid (orang)	6060	6176	6693	6983	7604
3.3.	Rasio (%)	12.84	12.55	11.94	11.38	10.23

Sumber : Padang Panjang Dalam angka 2010-2015 (data diolah)

c. Angka Melek Huruf dan Putus Sekolah

Angka melek huruf setidaknya menunjukkan seberapa besar penduduk Kota Padang Panjang yang mampu membaca huruf latin, sedangkan angka putus sekolah menunjukkan jumlah dan persentase siswa untuk setiap tingkatan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK) yang tidak menyelesaikan pendidikannya. Berdasarkan data yang ada, maka angka melek huruf dan angka putus sekolah di Kota Padang Panjang periode 2010-2014 seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.23
Perkembangan Indikator Fokus Kesejahteraan Sosial Bidang Pendidikan
Kota Padang Panjang Tahun 2010 - 2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Melek Huruf (%)	99,30	99,31	99,31	99,35	99,36
Angka Putus Sekolah					
SD (%)	0,05	0,21	0,39	0,36	0,00
SLTP (%)	0,17	0,19	0,25	0,24	0,10
SLTA (%)	2,41	1,13	0,95	0,90	0,87

Sumber : BPS, dan Profil Pendidikan Kota Padang Panjang

Tabel di atas menunjukkan perkembangan rata-rata angka melek huruf Kota Padang Panjang sudah tinggi yaitu dan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yakni 99,30 tahun 2010 menjadi 99,36 tahun 2014.

Sedangkan angka putus sekolah di tingkat SD dan SMP kembali menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2010. Angka Putus Sekolah tingkat SD tahun 2011 naik sebesar 0,16 persen menjadi 0,21 persen. Angka Putus Sekolah tingkat SLTP

tahun 2011 naik sebesar 0,02 persen menjadi 0,19 persen. Sementara itu Angka Putus Sekolah tingkat SLTA turun sebesar 1,28 persen menjadi 1,13 persen pada tahun 2011.

d. Angka Kelulusan

Untuk melihat keberhasilan proses belajar dan mengajar juga dapat dilihat dari angka kelulusan yang menggambarkan tingkat kelulusan berdasarkan jenjang pendidikan. Secara umum angka kelulusan sekolah di Kota Padang Panjang secara flutuatif terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya pada berbagai jenjang pendidikan. Adapun gambaran perkembangan angka kelulusan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.24

Angka Lulusan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Tahun 2010 - 2014

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI					
1.1.	Peserta UN (Orang)	1003	1016	996	1097	1070
1.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	1003	1016	996	1097	1070
1.3.	Persentase Lulusan	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs					
2.1.	Peserta UN (Orang)	1515	1496	1438	1539	1539
2.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	1295	1426	1399	1539	1539
2.3.	Persentase Lulusan	85.48	95.32	97.29	100	100
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	Peserta UN (Orang)	1875	1785	1871	1943	2026
3.2.	Jumlah Lulusan (Orang)	1740	1683	1853	1943	2026
3.3.	Persentase Lulusan	92.80	94.29	99.04	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan (data diolah)

e. Perkembangan Perguruan Tinggi

Di Kota Padang Panjang telah berkembang beberapa Perguruan Tinggi. Tabel berikut menggambarkan kondisi perguruan tinggi di Kota Padang Panjang, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25**Perguruan Tinggi di Kota Padang Panjang**

No	Uraian	Jumlah dan Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Perguruan Tinggi	5	5	5	5	5
2	Jumlah Pengajar	418	431	431	424	384
3	Jumlah Mahasiswa	2.177	2.231	2.425	2206	2130
4	Jumlah Lulusan	212	240	307	344	506

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2010-2015

Keberadaan perguruan tinggi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat di Kota Padang Panjang (multiplier effect) baik dari segi peningkatan kualitas manusia, peningkatan taraf ekonomi dan sosial budaya.

f. Perkembangan Sekolah Agama

Keberadaan dan perkembangan Sekolah Agama yang cukup banyak direpresentasikan oleh Pondok Pesantren di Kota Padang Panjang, tidak terlepas dari kesejarahan kota yang berjuluk Kota Serambi Mekah. Berbagai sekolah agama yang ada di Kota Padang Panjang tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.26**Banyaknya Sekolah, Murid, Guru dan Kelas****di Lingkungan Departemen Agama di Kota Padang Panjang Tahun 2013-2014**

No	Nama Sekolah	2013			2014		
		Kelas	Murid	Guru	Kelas	Murid	Guru
I	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	28	743	50	30	787	55
1	MIS Rahmah El Yunisiah	12	313	25	12	309	25
2	MIS Thawalib/MIUT	16	430	25	18	478	30
II	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	56	1626	186	63	1671	194
1	MTs Negeri	25	884	56	27	920	63
2	MTs Thawalib Putra	7	173	31	8	160	31
3	MTs Thawalib Putri	4	78	24	5	74	18
4	MTs Muhammadiyah	6	160	20	6	146	18
5	MTs Thawalib Gunung	3	72	21	5	88	21
6	MTs DMP Diniyyah Putri	11	259	34	12	283	43
III	Madrasah Aliyah (MA)	87	2079	345	87	2762	282
1	MAN Koto Baru	32	1015	78	32	1735	76
2	MAN Gunung	11	399	46	14	397	45

3	MAN Balai-Balai	11	191	34	10	168	28
4	MAS KUI Thawalib Putra	4	46	24	3	51	24
5	MAS KUI Thawalib Putri	3	16	25	3	17	13
6	MAS KMI Diniyyah Putri	12	199	39	12	169	38
7	MAS KUL Muhammadiyah	10	177	36	9	190	35
8	MAS Serambi Mekah	4	36	24	4	35	23
	Total	183	4469	562	180	5220	531

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2015

Sama halnya dengan keberadaan, perguruan tinggi, maka keberadaan sekolah agama juga sangat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Padang Panjang, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun dari aspek perkembangan kehidupan keagamaan, khususnya perkembangan pendidikan agama Islam.

2. Kesehatan

Penyelenggaraan urusan dan pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang sudah menjadi perhatian, bahkan menjadi program strategis. Sepanjang tahun 2010 - 2014 akses dan pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang sudah baik dan menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, sehingga telah memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap peningkatan angka harapan hidup dan IPM Kota Padang Panjang. Beberapa capaian indikator umum pada pelayanan kesehatan sudah dikemukakan pada bagian sebelumnya. Berikut ini juga disampaikan gambaran capaian indikator kesehatan lainnya :

Tabel 2.27
Perkembangan Indikator Kesehatan,
Kota Padang Panjang Tahun 2010 s.d 2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	5,67	7,22	6,38	5,93	15,52
Angka Kematian Balita (per 1000 KH)	1,89	1,03	1,06	0,99	2,07
Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 1000 KH)	0,94	0	0	0,99	0
Prevalensi Balita Kurang Gizi (%)	6,40	6,23	6,20	5,95	5,10

Sumber. : Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang,
BPS Kota Padang Panjang

Dari tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa angka kematian bayi tahun 2014 sebesar 15,52 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini meningkat dari tahun 2013 sebesar 5,93 per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu angka prevalensi bayi kurang gizi sudah berhasil ditekan menjadi 5,10 persen pada tahun 2014. Capaian ini sedikit menurun yaitu 1,30

persen pada tahun 2010. Sedangkan untuk angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup meningkat di tahun 2014 sebesar 2,07 dibandingkan tahun 2013 sebesar 0,99 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian ibu melahirkan sepanjang tahun 2010-2014 hanya terdapat kasus 1 orang pada tahun 2013. Angka prevalensi gizi buruk setiap tahunnya terus menunjukkan penurunan sehingga pada tahun 2014 hanya mencapai 5,10%.

Upaya penciptaan lingkungan sehat terus menunjukkan peningkatan dengan terus berkembangnya akses sanitasi layak sudah mencapai 77,90 persen pada tahun 2014 naik 9,86 persen lebih dari tahun 2013. Peningkatan akses air minum layak juga mengalami kenaikan, yaitu mencapai angka 97,20 persen. Hal ini sangat erat kaitannya dengan penambahan jumlah rumah tangga pelanggan air minum yang mencapai 7.004 rumah tangga pada tahun 2014. Adapun gambaran perkembangan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28
Lingkungan Sehat Kota Padang Panjang
Tahun 2010 s.d 2014

Uraian	Padang Panjang				
	2010	2011	2012	2013	2014
Akses Sanitasi Layak (%)	66,40	66,8	67,5	68,04	77,90
Akses Air Minum Layak (%)	85,21	86,12	90,00	94,06	97,20
Banyaknya rumah tangga pelanggan air minum PDAM	5181	5288	5740	6014	7.004

Sumber :Dinas Kesehatan, Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2010-2015

Sebagai kota yang terletak dipersimpangan, Padang Panjang tidak luput dari kejadian penyakit menular seperti TBC, Demam Berdarah, Diare dan penyakit menular lainnya. Kasus ini timbul karena adanya pengaruh lingkungan, pola hidup masyarakat, perubahan iklim perubahan vektor penyakit. Tahun 2012, 99% kasus penyakit menular di masyarakat Kota Padang Panjang sudah tertangani dengan baik dan cepat.

Dengan meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat, terjadi pula perubahan gaya hidup, pola hidup dan mobilisasi. Kondisi ini menyebabkan timbulnya kecenderungan peningkatan kejadian penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, borak dan penyakit lainnya. Untuk mengantisipasi kejadian ini, tahun 2012 telah dioperasionalkan sebanyak 22 posbindu.

Seterusnya, untuk cakupan pelayanan kesehatan sampai tahun 2012, angkanya mencapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh masyarakat Kota Padang Panjang sudah terlayani dibidang kesehatan melalui berbagai program seperti Jamkesmas, Jamkesda, JPKM-PP dan lain - lain. Kesehatan merupakan faktor penting yang sangat mendukung untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kota Padang Panjang. Keberhasilan pencapaian indikator sebagaimana yang dikemukakan tersebut didukung oleh keberadaan sarana pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan tenaga medis, para medis dan tenaga lainnya. Berikut ini gambaran perkembangan sarana pelayanan kesehatan di Kota Padang Panjang Tahun 2010 - 2014 seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel.2.29

Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Padang Panjang

Tahun 2010 - 2014

Sarana Kesehatan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1
Rumah Sakit Swasta (RSI. Ibnu Sina)	1	1	1	1	1
Poliklinik	3	3	3	2	2
Puskesmas	3	4	4	4	4
Puskesmas Pembantu	7	7	7	7	7
Balai Pengobatan	-	-	-	-	-
Tempat Praktek Dokter	34	34	34	35	37
Pos Kesehatan Kelurahan	16	16	16	16	16
Apotik	7	7	16	16	17
Toko Obat	6	6	6	6	5

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2015

Adapun gambaran perkembangan tenaga pelayanan kesehatan seperti tenaga medis, para medis dan tenaga lainnya di Kota Padang Panjang Tahun 2014, termasuk pada pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah daerah seperti terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.30

Jumlah Tenaga Medis, Para Medis dan Tenaga Lainnya pada

Pelayanan Kesehatan Tahun 2012-2014

Jabatan	2012			2013			2014		
	RS. Umum Daerah	RS. Swasta (RSI.Ya rsi)	Puskesmas	RS. Umum Daerah	RS. Swasta (RSI.Ya rsi)	Puskesmas	RS. Umum Daerah	RS. Swasta (RSI.Ya rsi)	Puskesmas
Dokter Spesialis	12	7	-	11	13	-	12	-	-
Dokter Umum	5	3	12	4	4	12	8	1	13
Dokter Gigi	3	1	4	3	1	3	3	-	4
Apoteker	5	1	-	5	1	0	8	1	1
Perawat	118	34	38	80	35	22	87	29	18
Pranata Laboratorium Kesehatan	10	-	8	-	-	6	7	-	5
Psikolog	1	-	-	1	-	-	1	-	-
Sanitarian	6	-	1	-	-	-	-	-	-

Nutrisionis	7	1	7	-	-	-	-	-	-
Radiografer	5	1	-	-	-	-	-	-	-
Perekam Medis	12	2	7	11	3	3	11	4	8
Teknisi Elektromedis	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Fisioterapi	4	-	-	6	1	-	6	1	-
Bidan	19	3	22	7	7	23	6	7	21
Perawat Gigi	4	1	4	4	1	8	4	1	8
Asisten Apoteker	22	6	5	22	7	5	25	7	6
Lain-Lain	44	29	11	49	36	8	36	35	9
Jumlah	280	89	118	203	109	90	214	86	93

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2010-2015

3. Pekerjaan Umum

Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum sebagian sudah diuraikan dalam urusan kesehatan di antaranya akses sanitasi layak dan akses air minum layak. Selanjutnya indikator pelayanan jalan pada urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31

**Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2010-2014**

No	Indikator	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Panjang jalan menurut status jalan:	94.67	94.67	94.86	94,86	94,86
	- Negara	12.67	12.67	11.14	11,14	11,14
	- Propinsi	0.00	0.00	0.00	0	0
	- Kota	82.00	82.00	83.72	83,72	83,72
2	Panjang jalan menurut kondisi jalan:	94.67	94.67	94.86	94,86	94,87
	- Baik	64.19	71.04	79.38	84,37	86,39
	- Sedang	9.94	6.86	4.53	2,54	2,76
	- Rusak	1.86	2.09	3.50	2,10	0,42
	- Rusak berat	18.68	18.45	7.45	5,85	5,92
3	Panjang jalan menurut jenis jalan:	94.67	94.67	94.86	94,31	94,86
	- Aspal	81.74	81.74	86.07	88,04	87,86
	- Kerikil	3.68	3.91	1.21	0,41	0,41

- Tanah	9.25	9.02	7.58	5,86	6,6
---------	------	------	------	------	-----

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2010-2015

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jalan di Kota Padang Panjang secara keseluruhan pada tahun 2014 adalah sepanjang 94,86 km yang terdiri atas 11,14 km jalan Negara dan 83,72 km jalan kota. Sedangkan menurut kondisi jalan terlihat bahwa 86,39 km jalan berada dalam kondisi baik, 2,76 km sedang, 0,42 km rusak dan 5,92 km rusak berat. Ditinjau dari jenis jalan terlihat bahwa 87,86 km jalan aspal, 0,41 km jalan kerikil dan 6,6 km jalan tanah. Di samping itu urusan pekerjaan umum juga mendukung pembangunan urusan lainnya, khusus dalam hal bersifat teknis bangunan fisik prasarana.

Adapun panjang jalan yang memiliki draenase dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32

**Panjang Jalan Yang Memiliki Draenase
Kota Padang Panjang Tahun 2014-2015 (km)**

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Panjang Jalan Yang memiliki Draenase (km)	n/a	n/a	n/a	n/a	64,515

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang

Untuk irigasi pada umumnya di Kota Padang Panjang sudah sepenuhnya berupa irigasi teknis. Tidak ada lagi irigasi non teknis. Meskipun demikian masih terdapat sawah yang bersifat non irigasi. Hal ini terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33

**Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan
Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014**

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Non Teknis	-	-	-	-	-
2	Teknis	65.800	65.800	65.800	65.750	65.800
	1) Primer	-	-	-	-	-
	2) Sekunder	35.725	35.725	35.725	35.725	35.725
	3) Tersier	30.075	30.075	30.075	30.025	30.075
3	Luas Irigasi	1239	1212	1130	950	937
4	Luas Irigasi Dalam Kondisi	583	639	687	710	743,11

	Baik					
5	Luas Sawah Non Irigasi	123	120	113	95	93

Sumber : SIPD Kota Padang Panjang Tahun 2015

4. Perumahan dan Pemukiman

Pada urusan perumahan ini selama kurun waktu 2008 - 2012, penanganan perumahan difokuskan pada upaya untuk mendorong pembangunan perumahan melalui pengembang, sedangkan aspek penataan lingkungan dan kawasan kumuh, termasuk pengembangan kasiba/lisiba perlu ditingkatkan melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Upaya ini dirasakan telah cukup mampu untuk mendorong penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kualitas lingkungan perumahan oleh masyarakat, serta pengembangan kawasan permukiman baru yang lebih tertata. Namun demikian, percepatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu segera dilakukan dan pelibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pengembangan perumahan perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, implementasi pengembangan kasiba/lisiba masih cukup rendah sehingga upaya-upaya untuk mendorong percepatan pengembangan kasiba/lisiba sangat diperlukan.

Pembangunan perumahan dan permukiman juga menitikberatkan pada sarana dan prasarana lingkungan, yang dilakukan melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase, rehab rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi lingkungan berupa MCK plus, septiktank komunal dan prasarana persampahan serta peningkatan layanan air bersih melalui PDAM.

Untuk kondisi rumah tinggal yang bersanitasi belum tersedia datanya. Namun dari hasil studi ehra yang dilakukan untuk mendukung kegiatan sanitasi dapat terlihat kebiasaan buang air besar masyarakat sebagai berikut.

Tabel 2.34

**Persentase Masyarakat yang Buang Air Besar
di Sarana yang Memenuhi Syarat Kota Padang Panjang
Tahun 2009-2011**

Uraian	Tahun		
	2009	2010	2011
Persentase Masyarakat yang Buang Air Besar di Sarana yang Memenuhi Syarat	66,5%	66,45	78,43

Sumber : Studi Ehra Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

Jumlah pelanggan listrik selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2014 jumlah pelanggan listrik sebanyak 13.036 pelanggan, sementara di tahun 2013 sebanyak 12.066 pelanggan. Data mengenai jumlah pelanggan ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.35

Jumlah Pelanggan PLN Menurut Kecamatan / Kelurahan

NO	Kecamatan / Kelurahan	Jumlah pelanggan
I	<u>Padang Panjang Barat</u>	7.710
	Silaing Bawah	1.186
	Silaing Atas	663
	Pasar Usang	1.040
	Kampung Manggis	884
	Tanah Hitam	834
	Pasar Baru	1.365
	Bukit Surungan	768
	Balai-Balai	970
II	<u>Padang Panjang Timur</u>	4.356
	Koto Panjang	708
	Koto Katik	289
	Ngalau	588
	Ekor Lubuk	446
	Sigando	306
	Ganting	506
	Guguk Malintang	1.151
	Tanah Pak Lambik	362
	Jumlah Total	2013 12.066
		2012 11.368
		2011 10.684

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka, 2014

5. Penataan Ruang

Pola dan pemanfaatan ruang merupakan hal yang strategis dalam pengembangan kota, termasuk Kota Padang Panjang. Dalam kaitan ini Kota Padang Panjang telah berhasil menetapkan Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032. Peruntukan setiap ruang di Kota Padang Panjang harus ditata dengan rapi agar kota tidak menjadi semrawut. Beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang meliputi:

- a. peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan;
- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
- d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
- e. perwujudan kawasan budi daya yang berbasis mitigasi bencana
- f. perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- g. perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat;
- h. pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. perwujudan kawasan strategis wilayah kota; dan
- j. pengendalian fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut telah ditetapkan pola dan pemanfaatan ruang yang merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana kawasan lindung dengan luas lebih kurang 1.459,9 Ha (49,10%) ; dan rencana kawasan budi daya dengan luas lebih kurang 1.521,64 Ha (50,90%). Rencana kawasan lindung terdiri atas : kawasan perlindungan setempat; kawasan hutan lindung dan penyangga hutan lindung; kawasan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; dan ruang terbuka hijau kota.

Sedangkan rencana kawasan budi daya di Kota Padang Panjang terdiri atas : kawasan peruntukan perumahan; kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; kawasan peruntukan perkantoran; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; ruang terbuka non hijau; ruang evakuasi bencana; kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan kawasan peruntukan pelayanan umum. Secara teknis masing-masing kawasan tersebut di atas telah ditetapkan dalam Perda RTRW Kota Padang Panjang tahun 2012-2032.

Hasil Perbandingan antara kondisi penggunaan lahan pada tahun 2002 dan hasil perhitungan secara planimteris (penggunaan lahan tahun 2010), maka kawasan terbangun telah bertambah luasnya sebesar 6,63% menjadi 439,47 Ha dan kawasan tidak terbangun berkurang luasnya sebesar -1,70% menjadi 2.534,07 Ha. Jenis penggunaan lahan yang besar pertumbuhannya (> 5%) adalah kawasan peribadatan, perikanan, perkantoran, perkebunan dan permukiman, sedangkan yang paling besar pertumbuhannya (> 5%) adalah kawasan peribadatan, perikanan, perkantoran, perkebunan dan permukiman, sedangkan yang paling besar -4,35%. Hal ini mengindikasikan pola penggunaan lahan Kota Padang Panjang sudah menuju kearah pola penggunaan lahan perkotaan, dimana kawasan non pertanian akan lebih dominan daripada kawasan pertanian. Secara lebih jelas mengenai perkembangan penggunaan lahan Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.36

**Perkembangan Penggunaan Lahan
Kota Padang Panjang Tahun 2002-2010**

No	Jenis Penggunaan	Klasifikasi Kawasan	Luas (Ha)		Pertumbuhan
			2002	2010	(%)
1	Hutan	Tidak Terbangun	1.079,26	1.071,09	-0,76
2	Kawasan Militer	Tidak Terbangun	11,62	11,62	0,00
3	Lapangan Olahraga	Tidak Terbangun	6,59	6,77	2,73
4	Pariwisata	Terbangun	11,69	11,69	0,00
5	Pemukiman	Tidak Terbangun	3,37	3,46	2,67
6	Pendidikan	Terbangun	27,38	28,69	4,78
7	Perdagangan dan Jasa	Terbangun	6,13	6,13	0,00
8	Peribadatan	Terbangun	1,58	1,96	24,05
9	Perikanan	Tidak Terbangun	7,09	8,79	23,98
10	Perkantoran	Terbangun	6,85	8,23	20,15
11	Perkebunan	Tidak Terbangun	117,50	145,52	23,85
12	Permukiman	Terbangun	278,18	299,36	7,61
13	Tanaman Campuran	Tidak Terbangun	502,04	489,07	-2,58
14	Sawah	Tidak Terbangun	832,43	796,26	-4,35
15	Sungai	Tidak Terbangun	3,32	3,32	0,00
16	Sungai	Tidak Terbangun	13,11	13,11	0,00
17	Badan Jalan	Terbangun	65,40	68,47	
Jumlah			2.973,54	2.793,54	102,14
Jumlah Kawasan Terbangun			412,15	439,47	6,63
Jumlah Kawasan Tidak Terbangun			2.561,39	2.534,07	-1,07

Sumber : Hasil Perhitungan Tim RTRW 2010

Sedangkan kondisi bangunan ber IMB di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37

**Banyaknya Ijin Membuat Bangunan (IMB) yang dikeluarkan
Menurut Kecamatan/Kelurahan
Kota Padang Panjang Tahun 2011-2014**

No	Kecamatan/Kelurahan	Banyaknya IMB yang dikeluarkan			
		2011	2012	2013	2014
I	Padang Panjang Barat	75	114	113	85
1	Silaing Bawah	29	31	32	20
2	Silaing Atas	1	2	4	3
3	Pasar Usang	12	6	5	21
4	Kampung Manggis	14	51	51	29
5	Tanah Hitam	2	2	1	1
6	Pasar Baru	1	1	1	-
7	Bukit Surungan	12	16	9	8
8	Balai-Balai	4	5	10	3
II	Padang Panjang Timur	71	56	76	77
1	Koto Panjang	12	7	8	4
2	Koto Katik	3	3	3	1
3	Ngalau	4	5	15	12
4	Ekor Lubuk	4	5	4	4
5	Sigando	9	4	14	6
6	Ganting	3	-	-	5
7	Guguk Malintang	1	27	21	45
8	Tanah Pak Lambik	35	5	11	-
	Jumlah	146	170	189	162

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2015

6. Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*), dengan pendekatan perencanaan yaitu : Politik; Teknokratik; Partisipatif; Atas bawah (*top-down*); dan Bawah atas (*bottom-up*). Sedangkan perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni, Penyusunan rencana, Penetapan rencana, Pengendalian pelaksanaan rencana dan Evaluasi pelaksanaan rencana.

Tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Beberapa produk perencanaan umum pembangunan Kota Padang Panjang dalam mendukung percepatan pembangunan, antara lain RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS.

7. Perhubungan

Salah satu yang menentukan lancarnya perekonomian suatu kota adalah kondisi arus barang dan orang yang akan didistribusikan dari daerah sumber daya ke lokasi – lokasi pusat perekonomian. Kondisi perhubungan di Kota Padang Panjang dapat terlihat dari :

a. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum yang dilayani melalui terminal angkutan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 sebanyak 1.090.320 orang, tahun 2011 sebanyak 1.106.084 orang dan pada tahun 2012 naik menjadi 1.080.110 orang.

b. Perkembangan kendaraan bermotor

Perkembangan kendaraan bermotor di Kota Padang Panjang cukup pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 jumlah kendaraan bermotor tercatat 14.533 unit, naik menjadi 15.958 unit tahun 2010, naik menjadi 17.465 unit tahun 2011 dan 18.119 tahun 2012.

c. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Jumlah uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor baik yang dibuat dan atau dirakit didalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pada tahun 2010 jumlah uji kir angkutan umum sebanyak 317 kendaraan, turun menjadi 290 kendaraan tahun 2011 dan menjadi 273 tahun 2012.

8. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan demikian lingkungan hidup merupakan bagian integral dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan.

Setiap aktifitas kehidupan berpengaruh terhadap keadaan lingkungan hidup termasuk diantaranya adalah timbulnya dampak pencemaran baik udara, air maupun tanah. Lingkungan hidup saat ini merupakan salah satu isu yang sangat krusial karena

salah satu tujuan pembangunan adalah perbaikan lingkungan. Secara umum kualitas udara, debu dan kebisingan Kota Padang Panjang masih di bawah baku mutu. Sumber pencemaran antara lain berasal dari aktifitas rumah tangga (sumber domestik), fasilitas umum, pembakaran sampah, sumber yang bergerak seperti transportasi serta dari pertanian dalam arti yang luas. Beberapa program dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup sudah dilaksanakan antara lain pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, pengelolaan sampah dan tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk.

9. Pertanahan

Sesuai dengan ketentuan berlaku, maka pada urusan pertanahan yang dilakukan adalah pelayanan pertanahan seperti pelayanan hak atas tanah, penyelesaian sengketa pertanahan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh BPN Kota Padang Panjang.

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan urusan pertanahan di Kota Padang Panjang selama lima tahun terakhir antara lain yaitu keterbatasan lahan yang cocok untuk pembangunan, keterbatasan dana untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sering ditemuinya ketidakcocokan penetapan besaran ganti rugi tanah dengan pemilik tanah, sulitnya memperoleh kelengkapan data seperti bukti atas hak sehingga menghambat proses pengurusan sertifikat dan belum tersedianya sistem informasi pertanahan tentang persil tanah (status tanah, luasan, penggunaan lahan dan *zoning site*) sehingga memperlambat pengambilan keputusan.

Khusus penyelenggaraan urusan pertanahan oleh Pemko Padang Panjang, selain menyelesaikan persoalan pertanahan juga dilakukan pengadaan tanah untuk pembangunan selama tahun 2008-2012 antara lain seperti:

- a) Pengadaan Tanah Lanjutan Pembangunan SMU Super Unggul Provinsi Sumbar di Kelurahan Ganting dan Kelurahan Sigando
- b) Pengadaan Tanah Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Gajah Tanang Kelurahan Ekor Lubuk
- c) Pengadaan Tanah Pengembangan Pasar Sayur/Los Sayur di Terminal Bukit Surungan
- d) Penggantian Tanah Masyarakat yang Terkena Pelebaran di Jalan H. Miskin Gajah Tanang
- e) Pengadaan tanah Jalan 2 Jalur di MTsN Bukit Surungan
- f) Penggantian Tanah yang terkena Pelebaran Gelanggang Pacuan Kuda Bancak Laweh di Kelurahan Koto Panjang
- g) Pengadaan Tanah Balai Benih Ikan
- h) Pengadaan Tanah Perluasan MTsN Ganting
- i) Penggantian tanah dan bangunan masyarakat yang terkena pelebaran jalan di RT.5 Kelurahan Silaing Bawah
- j) Pengadaan Tanah untuk lokasi Puskesmas Terpadu di Kelurahan Bukit Surungan
- k) Pengadaan Tanah dan Penggantian Bangunan untuk Jalan Layang Simpang 8 dari arah Terminal Bukit Surungan ke arah Kacang Kayu
- l) Pengadaan Tanah untuk Lokasi Sentra Industri Kulit
- m) Pengadaan Tanah untuk Lokasi Kantor Lurah Sigando
- n) Pengadaan Tanah untuk Lokasi Kantor Lurah Guguk Malintang
- o) Pengadaan Tanah untuk Perluasan Lokasi Industri Kulit di Kel.Silaing Bawah
- p) Pengadaan Tanah Lokasi MAN 3 di Kelurahan Kampung Manggis

- q) Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Perumahan Pemda di Kelurahan Ngalau
- r) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan MTsN 2 di Kelurahan Ngalau
- s) Pengadaan Tanah untuk Jalan Kamarullah di Kelurahan Bukit Surungan
- t) Pengadaan Tanah Lokasi Kantor Lurah Silaing Bawah
- u) Pengadaan Tanah Lanjutan Jalan Layang Simpang 8
- v) Pembebasan Tanah Jalan Rao - Rao Koto Katik
- w) Pembebasan Tanah RT.19, RT.20 dan RT.21 di Kelurahan Balai - Balai
- x) Pembebasan Tanah untuk Jalan Simpang 8 Arah Timur
- y) Pembebasan Tanah untuk Lanjutan Jalan Samping Rumah Delfian
- z) Pengadaan Tanah untuk lanjutan pembuatan jalan di RT.19, RT.20 dan RT.21 di Kelurahan Balai - Balai.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksanaan program peningkatan administrasi kependudukan yang baik dan terkonsep mempunyai peranan yang sangat strategis bagi perkembangan pembangunan kependudukan dimasa datang. Database yang lengkap dan akurat akan sangat membantu tugas-tugas pemerintahan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil daerah yang meliputi pendaftaran/pencatatan kependudukan dan pelayanan umum. Kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2010 sampai dengan 2014 membawa dampak meningkatnya penerbitan dokumen kependudukan dan akta-akta catatan sipil seperti terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel 2.38

Penerbitan Dokumen dan Akta pada tahun 2010-2014 Kota Padang Panjang

No	Uraian	2010 (Lembar)	2011 (Lembar)	2012 (Lembar)	2013 (Lembar)	2014 (Lembar)
1.	Akta Kelahiran	2079	2379	1911	3092	4325
2.	Akta Kematian	5	5	6	10	27
3.	Akta Perkawinan	13	2	5	2	9
4.	Akta Perceraian					
5	Akta Pengakuan dan Pengangkatan Adopsi Anak	0	0	1	2	0
6	Akta Ganti Nama	1	4	0	2	2

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2015

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Arah pembangunan yang dirumuskan dalam inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dengan jelas menempatkan pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan pembangunan yang terimplementasikan dalam program dan strategi pembangunan ditingkat Kabupaten dan Kota, dimana dikuatkan dan dipertegas kembali dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan dengan pendekatan Gender merupakan pendekatan pembangunan yang saat ini digunakan oleh Indonesia dan

terumuskan dalam kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan 108able dan teknis. Pendekatan Pembangunan ini dalam implementasinya menekankan kepada proses penyusunan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pembangunan yang mengintegrasikan aspirasi, kepentingan dan peranan laki-laki dan perempuan didalamnya, serta memperhatikan akses, manfaat dan dampak pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan.

Pendekatan pembangunan Gender and Development tidak hanya dilihat dalam arti peningkatan akses pada sumber daya dan perbaikan tingkat kesejahteraan, tetapi juga menyangkut proses bagaimana manfaat pembangunan tersebut diperoleh. Artinya bagaimana akses, manfaat, dan dampak pembangunan dapat dirasakan oleh laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan, aspirasi dan kepentingannya.

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2008-2012 dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang.

Dengan berbagai program yang telah dilaksanakan, maka terlihat bahwa capaian dari akseptor KB secara fluktuatif terus berkembang di Kota Padang Panjang seperti terlihat pada 108able berikut ini :

Tabel 2.39
Target dan Realisasi Akseptor KB
Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2010	1602	1524	36,84
2011	1483	2200	148,35
2012	3664	1350	95,01
2013	1300	1766	137,20
2014	1113	1527	136,20

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2015

13. Sosial

Kota Padang Panjang dikenal sebagai Kota Serambi Mekah dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Kehidupan di Kota ini diwarnai oleh falsafah Adat *Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Sarana ibadah yang dominan adalah Mesjid dan Mushalla. Jumlah tempat ibadah di Kota Padang Panjang pada tahun 2012 hingga tahun 2014 tidak mengalami perubahan yakni mesjid sebanyak 37 buah, langgar/musholla 57 buah dan gereja 1 buah.

Tabel 2.40

Jumlah Tempat Beribadah Menurut Kecamatan/Kelurahan

Kota Padang Panjang Tahun 2014

NO	Kecamatan / Kelurahan	Mesjid	Langgar / Musholla	Gereja	
I	<u>Padang Panjang Barat</u>	22	24	1	
	Silaing Bawah	2	4	0	
	Silaing Atas	1	2	0	
	Pasar Usang	4	4	0	
	Kampung Manggis	4	3	0	
	Tanah Hitam	1	2	0	
	Pasar Baru	3	1	0	
	Bukit Surungan	4	4	0	
	Balai-Balai	3	4	0	
II	<u>Padang Panjang Timur</u>	15	33	0	
	Koto Panjang	4	3	0	
	Koto Katik	1	0	0	
	Ngalau	1	4	0	
	Ekor Lubuk	2	7	0	
	Sigando	1	3	0	
	Ganting	1	7	0	
	Guguk Malintang	4	8	0	
	Tanah Pak Lambik	1	1	0	
	Jumlah Total	2014	37	57	1
		2013	37	57	1
		2012	37	57	1

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka, 2015

Jumlah Jemaah haji pada tahun 2014 sebanyak 148 orang dengan jumlah jemaah laki-laki 48 orang dan 100 jemaah perempuan. Jemaah yang paling banyak berada pada golongan usia 56-57 tahun yaitu sebanyak 96 orang. Jumlah jemaah haji yang paling banyak jika dilihat berdasarkan jenis pekerjaannya, adalah yang berprofesi PNS dan pensiunan yakni sebanyak 59 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. 2.11

Pembangunan berbagai bidang di Kota Padang Panjang pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun disadari upaya pembangunan tersebut belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masih perlu diupayakan peningkatannya.

Sejalan dengan upaya pemecahan masalah tersebut di atas maka prioritas pembangunan adalah Peningkatan Kesejahteraan Rakyat khususnya PMKS, karena kesejahteraan merupakan dua sisi yang saling terkait satu sama lainnya, dimana semakin tinggi tingkat perekonomian akan menjadi semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan kesejahteraan sosial (PMKS) yang terdapat di Kota Padang Panjang diantaranya adalah kemiskinan, ketunaan, penyandang cacat, lanjut usia, anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Padang Panjang Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.41

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2013

Kota Padang Panjang

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Fakir Miskin	863	
2.	Balita Terlantar	10	
3.	Anak Terlantar	146	
4.	Lanjut Usia Terlantar	202	
5.	Gepeng	24	
6.	Penyandang Cacat	243	
7.	Yatim /Piatu	180	
	Total	1668	

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2014

14. Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2010 sampai tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Untuk Peningkatan Kesempatan Kerja, telah dilaksanakan berbagai pelatihan diantaranya pelatihan cat duko, bordir, dan sepeda motor untuk 30 orang selama 1,5 bulan dilanjutkan dengan magang 1 bulan di berbagai perusahaan di Kota Padang Panjang pada tahun 2010, terlaksananya pelatihan sablon, pelatihan masak, pelatihan pertukangan dan pelatihan pembuatan aksesoris masing - masing sebanyak 2 kelompok. Disamping itu juga telah dilakukan penyiaran informasi peluang kerja melalui radio, televisi dan media lainnya sebanyak 12 kali dan penerbitan buku bursa tenaga kerja masing - masing sebanyak 250 eksemplar, cetak leaflet sebanyak 1.000 lembar dan tersedianya blanko pencari kerja sebanyak 500 lembar.

Untuk peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja juga sudah dilaksanakan pelatihan bagi 30 orang pencari kerja selama 10 hari, terlaksananya pelatihan salon dan gunting rambut sebanyak 20 orang serta pelatihan bengkel kendaraan roda dua sebanyak 20 orang dan pelatihan menjahit kostum untuk 20 orang selama 33 hari dan Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur LPKS sebanyak 25 orang

Untuk mendukung kondusifnya suasana ketenagakerjaan di Kota Padang Panjang maka telah dilakukan upaya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan hasil antara lain:

1. Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan bagi 120 orang pengusaha Kota Padang Panjang
2. Pemeriksaan audio metris untuk 40 pekerja, uji paru untuk 85 pekerja, pemeriksaan limbah 32 perusahaan, dan pengawasan wajib lapor perusahaan untuk 100 pengusaha serta terlaksananya pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan lingkungan, sosialisasi peraturan tentang ketenagakerjaan dan pengawasan wajib lapor perusahaan untuk pengusaha
3. Pengawasan dan pembinaan terhadap 28 perusahaan sebanyak 9 kali kegiatan oleh 17 orang petugas pengawas.
4. Software database ketenagakerjaan dan buku database perusahaan sebanyak 50 eksemplar

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) merupakan lembaga ekonomi yang berbasiskan kerakyatan. Oleh karena itu koperasi dan UKM diharapkan dapat memberdayakan ekonomi rakyat. Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan ekonomi daerah. ekonomi daerah akan tangguh jika pelaku-pelaku ekonomi secara keseluruhan tangguh termasuk didalamnya Koperasi dan UKM. Jika kinerja Koperasi dan UKM tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka kekuatan ekonomi daerah juga akan rapuh. Untuk itu, kekuatan ekonomi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila kekuatan Koperasi dan UKM melakukan mitra usaha dan menggiatkan jaringan usaha Koperasi dan UKM.

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro kecil dan Menengah diwujudkan dalam bentuk, keterlibatan sumber-sumber daya masyarakat, diselenggarakan dan dibawah kendali masyarakat dan bermuara pada hasil yang dinikmati seluruh anggota masyarakat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat Kota Padang Panjang tergabung dalam keanggotaan koperasi dan berusaha pada level Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun gambaran perkembangan koperasi di Kota Padang Panjang tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.42

Perkembangan Koperasi Tahun 2010-2014 Kota Padang Panjang

No	Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota (orang)	Ket
1	2010	66	8074	
2	2011	71	9016	
3	2012	76	9652	
4	2013	77	8112	
5	2014	77	8112	

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2015

Dari tabel di atas terlihat bahwa perkembangan koperasi di Kota Padang Panjang cukup baik yang diiring dengan jumlah anggota. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa

pembinaan dan pembangunan perkoperasian di Kota Padang Panjang telah berjalan dengan baik.

Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Padang Panjang periode 2010-2014 sangatlah dinamis dan kecenderungan meningkat, sedangkan pada Usaha Menengah tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang terjadi, lebih disebabkan kepada mekanisme pasar, seperti persaingan, kehadiran produk sejenis dan daya beli masyarakat.

16. Penanaman Modal

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di Kota Padang Panjang selama periode Tahun 2010 sampai Tahun 2014 dilaksanakan oleh Bappeda Kota Padang Panjang. Dalam kurun lima tahun tersebut telah dilaksanakan pameran investasi baik dalam daerah maupun diluar daerah. Disamping itu sudah tersedia Buku Data Investasi Daerah Kota Padang Panjang sebanyak 5 paket. Penyusunan Buku Profil Investasi Daerah Kota Padang Panjang sebanyak 1000 eksemplar, Buku Rekomendasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Kota Padang Panjang sebanyak 20 eksemplar, dan Buku Laporan Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah Kota Padang Panjang sebanyak 160 eksemplar.

17. Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Panjang. Dibidang kebudayaan ini telah dibentuk Badan Pengkajian Adat Budaya Daerah yang telah melahirkan sejumlah penelitian dan kajian di antaranya tentang Karakter Budaya Daerah Kota Padang Panjang, kajian tentang kedudukan rokok dalam pelaksanaan kegiatan Adat Istiadat Minangkabau bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Selain itu sudah terjalin berbagai kerjasama kebudayaan dengan ISI Padang Panjang di antaranya Kolaborasi Musik Tradisi oleh pada acara Festival Serambi Mekkah tahun 2011.

Untuk Pengelolaan Kekayaan Budaya sepanjang kurun waktu 5 tahun terakhir telah terselenggara:

1. Pertunjukan seni dalam acara penyambutan tamu, shotting TVRI dan Trans TV, pertunjukan luar daerah Pekan Budaya Sumatera Barat di Kabupaten Solok, pertunjukan Seni di Batam Expo, pertunjukan seni dalam acara Pembukaan Kemilau Sumatera di Jambi, pertunjukan seni Maling Kundang di Taman Ismail Marzuki, Parade Lagu Nusantara di TMII.
2. Pelatihan bagi anggota PKK Kelurahan dan PKK Kota Padang Panjang dengan jumlah 40 orang selama 4 hari. Pelatihan bagi 3 group Randai di 3 Nagari dan pelatihan Pasambahan bagi 9 group di Kelurahan. Pelatihan pakaian adat, pelatihan pasambahan manyerak bareh kunyik, pelatihan cara memakai tingkuluak tanduak dan pakaian adat daerah lainnya yang diikuti oleh PKK Kelurahan, Kecamatan dan Pengurus PKK Kota Padang Panjang dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang. Selain itu kegiatan ini juga menghasilkan pengadaan pakaian adat daerah Kota Padang Panjang berupa 1 stel lengkap Pakaian Adat Penganten Perempuan, 1 stel lengkap Pakaian Adat Penganten Pria, 1 stel lengkap Pakaian Bundo Kandung, 1 stel lengkap Pakaian Pasumandan dan 1 stel lengkap Pakaian Panghulu Kota Padang Panjang.
3. Rekaman Tari Piriang Suluah, Tari Bujang Sambilan, Rabano, Salawaik Dulang, Pupuik Baranak, Suliang Bambu, Pidato Adat, Dendang dan Silek Gunuang.
4. Penampilan kesenian luar daerah 2 kali, tingkat Provinsi (pekan budaya) 1 kali dan tingkat Kota 2 kali.
5. Pelatihan Pasambahan sebanyak 16 group, pelatihan Randai sebanyak 3 group, pelatihan Tari dan Musik sebanyak 9 group, pelatihan Silat sebanyak 3 group, workshop Seni dan Budaya sebanyak 30 orang, keikutsertaan

Festival Seni dan Budaya 1 kali, atraksi Seni dan Budaya sebanyak 3 kali dan tersedianya pakaian tari sebanyak 36 stel, Indang sebanyak 40 buah dan Rebana sebanyak 2 buah.

Untuk Pengelolaan Keragaman Budaya juga telah dilaksanakan berbagai hal dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelatihan Tari dan Musik sejumlah 21 grup, pelatihan Randai 6 grup, pelatihan Silat 6 grup, Pelatihan Pasambahan 15 grup, pelatihan Qasidah Rebana 2 grup, pelatihan Nasyid 1 grup, pelatihan Pasambahan Manyerak Barih Kunyit dan adat Budaya Perkawinan Minangkabau untuk PKK, Dharma Wanita dan Bundo Kanduang se Kota Padang Panjang selama 5 tahun.
2. Festival Serambi Mekah, Festival Muharam dan Peringatan Hari Jadi Kota Padang Panjang.
3. Penampilan Paket Khusus di Anjungan Sumatera Barat TMII, mengikuti Pekan Informasi Nasional (PIN) di Solo, mengikuti Festival Pekan Budaya Bali, mengikuti Pekan Budaya Sumatera Barat di Payakumbuh dan pertunjukan kesenian Kota Padang Panjang dalam rangka penyambutan tamu pemerintah serta pelatihan tari, silat, Qasidah Rabana dan Nasyid.
4. Festival Serambi Mekah berupa pertunjukan kesenian tradisi Minangkabau, berupa tari, randai, lagu minang musik modern, pertunjukan dari negara tetangga Malaysia dan kolaborasi musik tradisional oleh ISI Padang Panjang kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari.
5. Pendataan yang bertitik tolak pada bentuk seni dan budaya yang ada di Kota Padang Panjang yaitu Sanggar Randai 3 grup, Sanggar Pasambahan 16 grup, Sanggar Tari dan Musik 12 grup, Sanggar Silat 5 grup, Sanggar Qasidah Rebana 4 grup, Sanggar Nasyid 4 grup, Band 10 grup, Organ Tunggal 14 grup, Benda Cagar Budaya terdiri dari 6 jenis dan Usaha Pelaminan untuk 26 tempat. Selain itu juga dilakukan Penelitian Benda - Benda Peninggalan Bersejarah yang diidentifikasi sebagai Benda Cagar Budaya dan dibuat berbentuk buku sebanyak 56 buah buku.
6. Penelitian Kesenian Asli Daerah Padang Panjang dan langsung diseminarkan dengan jumlah peserta seminar sebanyak 100 orang dengan output 6 eksmplar buku. Kemudian di kegiatan ini terdapat pekerjaan Reproduksi Foto PDIKM dengan hasilnya sebanyak 563 lembar dengan berbagai ukuran (4 R, 10R, 1 M2), Frame foto sebanyak 148 unit, album 40 buku, baliho ukuran kecil 2 unit, baliho ukuran sedang 2 unit dan spanduk 1 unit serta pakaian budaya 36 stel.

18. Pemuda dan Olah Raga

Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

Untuk upaya Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah dilaksanakan:

1. Pelatihan bagi 30 orang mahasiswa - mahasiswa di universitas yang ada di Kota Padang Panjang untuk meningkatkan wawasan pemuda dalam beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikan pemuda tersebut bisa menjadi pemimpin yang beriman.
2. Penyusunan buku pedoman dalam pembinaan pembangunan generasi muda kedepan sebanyak 20 buah buku.

3. Penyusunan buku Pedoman untuk rancangan kegiatan antara generasi muda dan masyarakat.
4. Penelitian dan pengkajian kebijakan pembangunan kepemudaan.
5. penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dan masyarakat.
6. Penyusunan kebijakan kewirausahaan untuk dikembangkan pemuda.

Untuk upaya Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dalam kurun awaktu 5 tahun terakhir juga sudah dilakukan:

1. Seleksi terhadap 9 orang pemuda yang berasal dari unsur mahasiswa, pramuka dan karang taruna. Hasilnya terpilih 4 orang untuk mengikuti seleksi di tingkat Provinsi. Di tingkat Provinsi terpilih 1 orang untuk mengikuti Bhakti Pemuda Antar Provinsi dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Seleksi 200 orang siswa siswi SLTA se Kota Padang Panjang untuk memilih 75 orang guna dilatih sebagai anggota paskibraka, kemudian dipilih 65 orang untuk tingkat kota dan 4 orang untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi Sumatera Barat dan 2 orang terpilih menjadi anggota Paskibraka tingkat Provinsi.
3. Sosialisasi UU Pemuda, Olahraga dan Pramuka kepada Pengurus OSIS SLTA dan Pramuka se Kota Padang Panjang yang dilaksanakan selama 4 hari dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.
4. Pembangunan pentas untuk kegiatan kepemudaan.
5. Seleksi 9 orang pemuda yang berasal dari unsur Mahasiswa, Pramuka dan Karang Taruna, kemudian 4 orang yang terpilih mengikuti seleksi di tingkat Provinsi. Di tingkat Provinsi terpilih 1 orang untuk mengikuti Jambore Pemuda Indonesia di Malang dan Bhakti Pemuda Antar Provinsi di Jambi.
6. Pembinaan terhadap pemuda pelopor sebanyak 3 kelompok yaitu di Kelurahan Balai - Balai, Kelurahan Tanah Pak Lambik dan Kelurahan Ngalau
7. Pelatihan Fasilitasi Sumpah Pemuda yang diikuti oleh 35 orang yang berasal dari siswa SLTA (anggota OSIS).
8. Pembinaan pada organisasi kepemudaan yang diikuti oleh 40 orang peserta dari Unsur Pramuka Penegak (SLTA) se Kota Padang Panjang.
9. Diklat kepemimpinan terhadap berbagai organisasi seperti KNPI, Pramuka, FKKT Kota dan dari Kelurahan sebanyak 35 orang.
10. Fasilitasi aksi bhakti sosial di Lingkungan Pusat Dokumentasi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) yang diikuti oleh 40 orang unsur Pramuka SLTA dan 12 orang Pembimbing Pramuka se Kota Padang Panjang. Kegiatan ini juga mengadakan alat percontohan untuk kegiatan kepramukaan berupa tenda pleton/komando, tenda *dome*, tali - tali dan kelengkapan kegiatan di alam terbuka.
11. Seleksi terhadap 67 orang pemuda yang berasal dari mahasiswa, Pramuka dan Karang Taruna, hasilnya terpilih 2 orang putra dan 2 orang putri untuk mengikuti seleksi di tingkat Provinsi. Di tingkat Provinsi terpilih 2 orang untuk mengikuti Jambore Pemuda Indonesia di Kalimantan Barat dan Bakti Pemuda Antar Provinsi di Bangka Belitung.
12. Pembinaan teknis terhadap 4 orang pemuda pelopor, pembinaan terhadap 35 orang dari unsur OKP, karang taruna dan remaja mesjid, pembinaan terhadap pemuda dari pengurus OSIS SLTA se Kota Padang Panjang sebanyak 40 orang, pembinaan kepada 2 orang pemuda pelopor.
13. Fasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan berupa pengobatan gigi sebanyak 60 orang, donor darah sebanyak 60 orang dan bhakti OSIS sebanyak 40 orang.

14. Pelatihan pengurus organisasi kepemudaan sejumlah 100 orang, pelatihan bagi 40 orang pemuda guna menggerakkan organisasi kepemudaan

Untuk Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda juga telah dibina Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda terhadap 6 kelompok usaha pemuda.

Di bidang keolahragaan telah dilakukan Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga berupa Pelatihan bagi guru olah raga sebanyak 40 orang tentang cara mengatasi cedera pada atlet serta pemberian gizi yang baik dan pemahaman tentang prosedur dana hibah, pelatihan Basket bagi 60 orang yang terdiri dari unsur guru-guru olahraga, unsur pengurus cabang dan unsur masyarakat, pembinaan terhadap guru-guru dan pembina/pelatih olah raga serta pengurus cabang se Kota Padang Panjang sejumlah 60 orang, pelatihan tentang peraturan dan permainan Futsal bagi guru - guru olahraga dan masyarakat Kota Padang Panjang sebanyak 42 orang, pembinaan terhadap pengurus organisasi olahraga sebanyak 30 orang, bintek keolahragaan terhadap pembina/pelatih sebanyak 30 orang dan pembinaan manajemen organisasi olah raga kepada pengurus cabang olah raga sebanyak 60 orang.

Termasuk di bidang keolahragaan ini dalam 5 tahun terakhir juga sudah dilaksanakan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga berupa :

1. Pelaksanaan pertandingan sepakbola antar LPM se Kota Padang Panjang, Atletik tingkat SD, SLTP, SLTA se Kota Padang Panjang, Volly Ball antar klub se Sumbar dan SD se Kota Padang Panjang, Tenis Meja tingkat SLTP dan SLTA se Kota Padang Panjang.
2. Pelatihan senam massal bagi lansia yang dilaksanakan setiap minggu selama 10 bulan.
3. Lomba Maraton 10 K tingkat Sumbar, Sepakbola Usia 35 ke atas dan PSPP All Star, Tenis Meja tingkat Sumbar, Panjat Tebing tingkat Sumbar, Bulu Tangkis antar SKPD se Kota Padang Panjang dan Tenis Lapangan tingkat Kota Padang Panjang.
4. Open turnamen bola voli antar klub di Sumbar dan antar Kelurahan se Kota Padang Panjang, lomba Marathon Padang Panjang 5K (5K tingkat SD se Kota Padang Panjang), LPM Cup III antar SLTP dan SLTA IPABASKO.
5. Pelatihan senam bagi 60 orang lansia selama 10 bulan.
6. latihan untuk 320 atlet dan 64 orang pelatih.
7. Liga Pendidikan Indonesia tingkat SLTA dan SLTP dalam Kota Padang Panjang, Lomba Lari 10 k tingkat Nasional, tingkat SLTP/SLTA dan tingkat SD dan pertandingan silat.
8. Pembinaan cabang - cabang olahraga yang mendapat medali di Pekan olahraga Provinsi Sumatera Barat X di Sijunjung. Hasilnya terbina 7 cabang olahraga yang mendapat prestasi di provinsi Sumbar X.
9. Pertandingan dan lomba yaitu bola kaki, silat, Marathon 5 km tingkat SD, dan gerak jalan jantung sehat. Disamping pemantauan atlet pemasyarakatan olahraga.
10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga berupa pengadaan alat alat olahraga berupa 20 buah bola kaki, 1 paket sarana panjat tebing, 1 set meja pimpong, 8 buah raket tenis, 5 set jaring gawang dan 7 buah net tenis. Penyusunan Master Plan GOR Khatib Sulaiman, pengaspalan GOR Khatib Sulaiman dan rehab sedang/berat GOR Khatib Sulaiman. Pengadaan alat - alat olahraga, seperti bola kaki sebanyak 16 buah, bola voli sebanyak 16 buah, bola basket sebanyak 16 buah, net voli sebanyak 10 buah, bola tenis sebanyak 16 buah, bulu ayam sebanyak 10 buah, net badminton sebanyak 10 buah, bola takraw plastik sebanyak 8 buah, bola takraw rotan sebanyak 8

buah, pluit sebanyak 10 buah, skipping sebanyak 20 buah, net takraw sebanyak 5 buah, matras senam sebanyak 16 buah, stopwacth sebanyak 6 buah, lembing sebanyak 2 buah, tolak peluru sebanyak 2 buah, cakram sebanyak 2 buah, bola futsal sebanyak 16 buah, timbangan badan sebanyak 4 buah, jaring gawang futsal sebanyak 5 buah, bad pimple sebanyak 8 buah, kostum futsal sebanyak 5 stel, bola tenis meja sebanyak 150 buah, raket badminton sebanyak 3 buah, raket tenis sebanyak 4 buah, mistar/tiang lompat tinggi sebanyak 1 buah, balok star sebanyak 4 buah, kostum sepakbola sebanyak 18 stel dan jam catur digital sebanyak 6 buah. Pemeliharaan dan perbaikan gedung olahraga Bancah Laweh dan pemeliharaan gedung olahraga Khatib Sulaiman Bancah Laweh sebanyak 1 unit.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Terpeliharanya stabilitas keamanan dan ketertiban daerah merupakan keberhasilan seluruh elemen baik dari jajaran pemerintah maupun masyarakat, utamanya aparat/perangkat keamanan dan ketertiban. Situasi keamanan dan ketertiban yang sejuak dan kondusif selama ini telah menjadi modal dan kekuatan bagi Kota Padang Panjang dalam melangsungkan praktik penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Keberlangsungan dan kelancaran segala kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang telah dicanangkan Pemerintah Kota Padang Panjang beserta jajarannya sudah tentu memerlukan dukungan suasana yang kondusif dan nyaman dari lingkungan yang melingkupinya. Harmonisasi antar warga dalam interaksi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang telah berjalan serasi selama ini sangat mendukung terhadap berbagai upaya yang dilakukan guna menciptakan dan mengembangkan tenggang rasa, toleransi, hormat menghormati, dan kesetiakawanan sosial antar berbagai unsur yang ada.

Selama periode 2010-2014 urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan pada dua SKPD, yaitu : Kantor Kesbangpol dan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang. Adapun pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat meliputi pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dilaksanakan kegiatan, dengan hasil antara lain, pelatihan bagi tenaga satlak PB dan anggota masyarakat sebanyak 1.050 orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan bencana, pembentukan Lembaga Penanggulangan Bencana di tingkat RT, Kelurahan, Kecamatan dan Kota Padang Panjang.

Di samping itu untuk Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan juga telah terselenggara Pelatihan Linmas bagi 1.066 tenaga Linmas Kota Padang Panjang pada tahun 2008 sampai dengan 2010 dan pengadaan 630 pakaian Linmas untuk tenaga Linmas Kota Padang Panjang pada tahun 2008 sampai dengan 2010, Rapat koordinasi KOMINDA (Komunitas Inteligen Daerah) setiap bulannya dalam rangka memantau situasi perkembangan daerah serta Bimtek dan penguatan kelembagaan FKPM bagi pengurus FKPM dan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan pada tahun 2012 dan pertemuan/Forum Kemitraan Polisi dan Kemasyarakatan agar tercipta stabilitas keamanan yang baik pada tahun 2011.

Untuk pengembangan wawasan kebangsaan sudah tersedia Data dan pengawasan orang asing yang ada di Kota Padang Panjang pada tahun 2010 – 2014 dan sudah terselenggara Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara bagi Pengurus Parpol, Pengurus Ormas, Guru SLTA dan SLTP, Lurah dan Camat sebanyak 196 orang peserta pada tahun 2012, terselenggaranya pelatihan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara yang diikuti oleh perwakilan siswa SLTP dan SLTA beserta guru PKN/PMP di Kota Padang Panjang pada tahun 2011 dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan pada masyarakat Kota Padang Panjang pada tahun 2010. Di samping itu juga sudah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Padang Panjang sebanyak 150 orang pada tahun 2010 dan Rapat forum kerukunan umat beragama sebanyak 3 kali pada tahun 2012 dan terlaksananya FKUB yaitu

pertemuan yang membahas hal terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama pada tahun 2011.

Untuk Pendidikan Politik Masyarakat sudah dilakukan Verifikasi kelengkapan administrasi Parpol yang menerima bantuan setiap tahun selama 5 tahun, Sosialisasi peran Ormas dan LSM Kota Padang Panjang pada tahun 2010 sampai dengan 2011, Sosialisasi Undang - Undang Partai Politik dan bantuan keuangan Partai Politik bagi pengurus Partai Politik pada tahun 2011 dan 2012, Asistensi pengelolaan bantuan keuangan Parpol yang diikuti oleh 9 Partai Politik yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara dan anggota pengurus Parpol pada tahun 2012. Juga sudah tersedia Laporan mengenai perkembangan dan upaya fasilitasi terhadap kelancaran Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur pada tahun 2010. Di samping juga telah ada koordinasi forum - forum diskusi Politik yang menghasilkan beberapa kebijakan dalam upaya menciptakan kamtibmas dan stabilitas yang mantap di Kota Padang Panjang pada tahun 2009 dan monitoring dan fasilitasi terhadap kelancaran pelaksanaan Pemilu 2009 yang dilaksanakan oleh tim koordinasi Pemilu.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan untuk memastikan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat. Pos kamling adalah salah satu penyelenggaraan keamanan masyarakat dengan pola peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) non pemerintah yang bergerak dalam bidang pembangunan bertujuan mengakomodasi aspirasi dan memberdayakan masyarakat. LSM dapat mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu faktor penghambat investasi di suatu daerah adalah angka kriminalitas, perlunya kepastian jaminan keamanan dalam berinvestasi. Dalam hal ini situasi daerah yang tidak aman dan tidak kondusif para investor enggan untuk menanamkan modal di daerah.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Otonomi daerah memberikan peluang kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pemerintah kabupaten dan kota mempunyai kewenangan besar untuk mendorong proses kebijakan menjadi lebih partisipatif, responsif, dan akuntabel karena kendali dari proses kebijakan dan alokasi anggaran sepenuhnya ada di tangan pemerintah daerah. Untuk itu salah satu isu kebijakan umum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersifat *good governance*.

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian semenjak tahun 2010 sampai tahun 2014 dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, DPPKAD, BKD, Inspektorat, Kecamatan dan KPPT. Keberhasilan mewujudkan proses pembangunan kelembagaan politik demokrasi pada jalur dan arah yang benar selama rentang waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2010 - 2014, menuntut tanggung jawab yang tidak ringan pada tahun - tahun mendatang.

Tanggung jawab memelihara proses pembangunan kelembagaan politik demokrasi yang ada agar tetap pada jalur dan arah yang benar sesuai amanat Konstitusi. Meningkatkan kualitas praktek-praktek kelembagaan, agar makin mampu memenuhi harapan perbaikan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, lebih jauh lagi wacana yang cukup mendasar adalah harapan bagi perlunya penajaman pola kerjasama antara eksekutif dan legislatif, sehingga memperbesar kapastian politis dan memperkecil potensi kesalah pahaman yang berimplikasi negatif bagi kinerja kedua lembaga penting tersebut pada setiap persoalan yang timbul. Perlunya mekanisme kontrol politis dari lembaga legislatif seringkali belum mendapatkan keseimbangan dengan harapan bagi peningkatan efektifitas lembaga eksekutif, serta berbagai dimensi perumusan dan penerapan kebijakan kelembagaan lainnya

Penyelesaian berbagai persoalan kelembagaan demokrasi yang ada, serta mempertahankan dan meningkatkan kinerja kelembagaan yang sudah mantap akan membantu menghasilkan dan melaksanakan kebijakan publik yang tepat yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat yang dihadapi. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai fungsi masing-masing sehingga antara kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan sebagai lawan atau pesaing.

21. Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Untuk Peningkatan Kesejahteraan Petani, sudah dilaksanakan pemberdayaan kelembagaan tani untuk peningkatan produksi pertanian, penilaian angka kredit bagi fungsional penyuluh pertanian dan pengadaan papan merk informasi kelompok tani. Untuk Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan juga telah dilaksanakan pelatihan padi tanam sabatang, temu teknis petani, petugas dan peneliti dan terlaksananya temu lapang (Field day). Sedangkan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) telah dilaksanakan Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk kelompok wanita tani, terlaksananya bantuan bibit sayuran dan toga serta terlaksananya bantuan bahan pembuatan kompos, Pelatihan pangan, terlaksananya sosialisasi kewaspadaan pangan anak sekolah, pertemuan SKPG, pengadaan bibit sayuran dan kegiatan pemberdayaan perempuan (P2WKSS), Studi Banding Petugas Teknis dan Penyuluh Pertanian, Sosialisasi Konsumsi Pangan 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang), Pelatihan KWT (Kelompok Wanita Tani), bantuan bahan untuk Lomba Cipta Menu, pembuatan Leaflet Ketahanan Pangan, pembuatan buku analisis konsumsi pangan serta pembinaan dan evaluasi tunda jual/pekarangan.

Untuk Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sudah dilaksanakan magang pengolahan hasil ternak bagi penyuluh pertanian ke usaha susu Lembang Jawa Barat, magang pengolahan limbah ternak bagi penyuluh pertanian ke Cinagara Bogor, magang pengembangan tanaman hias bagi penyuluh pertanian ke Jawa Barat, pelatihan budidaya sayur organik bagi penyuluh pertanian, pengembangan tanaman hias bagi penyuluh pertanian, pelatihan budidaya sapi perah bagi penyuluh pertanian, pelatihan pengolahan hasil ternak bagi penyuluh pertanian, pelatihan pengolahan limbah ternak bagi penyuluh pertanian yang semuanya dilaksanakan di BPP Padang Panjang dan penyusunan buku program Kota dan Kecamatan Penyuluhan.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Berbagai kebijakan dan program pembangunan melalui berbagai pendekatan telah dilakukan agar dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Untuk peningkatan keberdayaan masyarakat telah dilaksanakan Bintek bagi pengurus LPM dalam pembangunan yang berbasis masyarakat dan studi banding untuk 145 orang selama 5 tahun, Up dating data keluarga miskin oleh tim pengumpul, tim penghimpun dan pengolah data dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan buku

Kumpulan Data Keluarga Miskin di Kota Padang Panjang, Bintek peningkatan peran dan fungsi kelompok pemelihara dan pemanfaatan hasil pembangunan bagi 60 orang masyarakat, Pemberian dana operasional LPM kepada 16 LPM Kelurahan dan dana operasional DPD Asosiasi LPM Kota Padang Panjang, studi lapangan LPM Kelurahan Berprestasi Kota Padang Panjang pemberian baju seragam RT dan Ketua LPM, pemberian dana operasional LPM kepada 16 Kelurahan, dana operasional LPM Kecamatan, studi lapangan LPM keluar daerah dengan peserta LPM Kelurahan se Kota Padang Panjang dan Pengurus DPD Asosiasi LPM Kota Padang Panjang, pelaksanaan musyawarah kerja LPM se Kota Padang Panjang dengan peserta pengurus LPM Kelurahan dan pengurus DPD Asosiasi Kota Padang Panjang, Bintek yang diikuti oleh 60 orang peserta, terdiri dari Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan, Pengurus KPP Kelurahan, SKPD terkait dan SPMN, pembentukan Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat Prasarana Air Bersih, Air Minum dan Sanitasi di tiap Kelurahan, serta Pemberian bantuan tunjangan hidup kepada 2 orang SPMN tahun 2012 yang ditempatkan di Kelurahan Kampung Manggis dan Kelurahan Ganting.

Untuk Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan telah dilaksanakan Sosialisasi tentang penggunaan Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) berskala kecil untuk meningkatkan usaha industri rumah tangga dengan peserta sebanyak 60 orang. Bintek untuk meningkatkan pengetahuan wawasan serta informasi kepada 60 orang masyarakat miskin dan aparatur pemerintah tentang pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), pada kegiatan ini juga dihasilkan belanja modal alat - alat TTG yaitu alat bantu perbaikan elektronik dan alat pertukangan. Pelatihan dan peningkatan keahlian pengurus UEM - SP, masyarakat dan aparatur pemerintah yang handal dalam mengelola UEM-SP sebanyak 60 orang. Bintek yang diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari pengurus UEM - SP Kelurahan se Kota Padang Panjang, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se Kota Padang Panjang dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, Magang 8 pengurus Pokja Kredit Mikro Nagari (KMN) ke Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rangka pembentukan Kelembagaan Keuangan Mikro di Kelurahan.

Untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah dilaksanakan Pelatihan bagi 32 orang dan peningkatan partisipasi Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Bintek bagi 60 orang masyarakat dalam pembangunan melalui badan keswadayaan masyarakat (BKM) PNPM Mandiri Perkotaan dan studi banding untuk 25 orang, Pelatihan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya bagi 60 orang masyarakat, Perencanaan program PMT-AS tahun 2012, orientasi pemantapan program PMT-AS bagi 60 orang anggota tim koordinasi, tim pengelola dan tim pelaksana sehingga PMT-AS, bintek yang diikuti oleh 60 orang peserta untuk peningkatan partisipasi masyarakat melalui lembaga lokal dalam melestarikan nilai - nilai budaya masyarakat, Bintek penguatan kelembagaan pokja posyandu Kelurahan, pokjanal posyandu Kecamatan dan Kota dengan peserta sebanyak 60 orang, penilaian kader posyandu dan reward kader posyandu berprestasi yang mengikuti study banding kader posyandu tingkat Provinsi Sumatera Barat ke Provinsi Jawa Barat dengan peserta sebanyak 3 orang, pemberian dana transport kader posyandu se Kota Padang Panjang sebanyak 455 orang, bantuan dana PMT Posyandu untuk 90 posyandu se Kota Padang Panjang dan pengadaan peralatan dan perlengkapan posyandu berupa Tripot, plang nama posyandu, timbangan gantung dan timbangan injak kepada 90 posyandu serta Monitoring dan penilaian dalam kegiatan Kelurahan berprestasi tingkat Kota Padang Panjang, BBGRM dan pelaksanaan dana hibah LPM.

Untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah dilaksanakan Pelatihan dan peningkatan

pemahaman aparaturnya pemerintah Kelurahan dan Kecamatan dalam bidang pembangunan kawasan pedesaan yang terdiri dari Seklur/Sekcam, KPM Kelurahan dan Seksi Lingkungan Hidup LPM dengan peserta 50 orang, Pelatihan aparaturnya desa dan terhimpunnya data profil Kelurahan yang ada dari masing - masing Kelurahan se Kota Padang Panjang dengan peserta 60 orang, Pelatihan dalam bidang pemetaan kawasan kumuh di Kelurahan dengan peserta 270 orang dan tersedianya pemetaan kawasan kumuh/miskin di Kelurahan, Bintek tentang tugas dan fungsi RT dalam pembangunan di Kelurahan dan pembuatan buku Administrasi RT untuk 214 RT se Kota Padang Panjang. Di samping itu juga sudah tersedia Data dasar profil Kelurahan sebagai data dasar yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan dan terlaksana Sosialisasi untuk tim pendataan keluarga miskin sebanyak 233 orang yang terdiri dari 2 orang Kasi Sosial Kecamatan, 215 ketua RT se Kota Padang Panjang dan 16 Kasi Sosial se Kota Padang Panjang dan pencetakan 50 buku diseminasi informasi dan validitas data kemiskinan.

Untuk Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan juga telah dilaksanakan Bintek bagi 60 orang anggota kelompok UP2K, pelatihan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera bagi 60 orang, Pelatihan Perempuan Pedesaan Dalam Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera sebanyak 60 orang peserta. bimbingan teknis yang diikuti oleh 60 orang peserta dari keluarga sasaran/keluarga binaan di Kelurahan Silaing Atas, Bimbingan teknis yang diikuti oleh 56 orang peserta dari Kasi Sosial Kelurahan dan PKK Kelurahan se Kota Padang Panjang, bantuan transportasi untuk kader dasawisma sebanyak 678 kader dan pemberian buku sebanyak 678 kepada masing - masing kader dasawisma, Jambore PKK tingkat Kota Padang Panjang selama 4 hari, pembayaran honor panitia, honor tim penilai lomba dan stimulan peserta jambore @Rp.2.500.000,-/Kelurahan, mengikuti Jambore PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Solok selama 4 hari dengan peserta 100 orang.

23. Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Bappeda melalui program Pengembangan data/Informasi. Beberapa kegiatan dalam pengembangan statistik daerah antara lain penyusunan Buku Indikator Kesra sebanyak 100 buah, Penyusunan Buku Padang Panjang Dalam Angka (PPDA) sebanyak 500 buah, Penyusunan Buku Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Padang Panjang sebanyak 600 buah, Penyusunan Buku Updating Data Kemiskinan sebanyak 60 buah, Penyusunan Buku Updating dan Analisis Statistik Daerah sebanyak 25 buah serta pelaksanaan Updating Sistem Informasi Geografis (SIG) Kota Padang Panjang. Berbagai hasil kegiatan tersebut di atas tentunya digunakan sebagai referensi perencanaan pembangunan ke depan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam berbagai sektor usaha.

24. Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Kearsipan di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Dalam menyelenggarakan urusan kearsipan, telah dilakukan kegiatan antara lain Penyelamatan dan pelestarian dokumen, melaksanakan bimbingan dan sosialisasi mengenai pengelolaan kearsipan kepada pengelola arsip di setiap SKPD sesuai dengan tata cara pengelolaan arsip statis maupun arsip dinamis, sehingga masing-masing SKPD mempunyai penata arsip. Apresiasi Kearsipan terhadap Kepala SKPD, KTU Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebanyak 114 orang pada tahun 2010 serta Tersusunnya dan diterbitkannya naskah sumber arsip sebagai memori daerah yang berisikan kumpulan arsip dan sinopsis proses pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Padang Panjang periode 2008 - 2013, dan sinopsis kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang periode 2004 - 2009 yang diterbitkan pada tahun 2010.

25. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dan Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota. Beberapa hasil yang telah dicapai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah terhubungnya seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang melalui jaringan interkoneksi pada seluruh SKPD dalam rangka mendukung SIPKD, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi untuk peningkatan *website* dan film *documenter* Padang Panjang Siaga Bencana, Penyusunan buku kerja pengembangan aplikasi *E-Government* SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang sebanyak 60 buah, pembinaan bagi pengusaha warnet, penambahan *server* dan pengembangan jaringan W-LAN antar SKPD, pembuatan *website* Pemerintah Kota Padang Panjang, perpanjangan sewa *hosting website* setiap tahunnya dan tersedianya perangkat keras dan perangkat lunak/software aplikasi untuk penunjang SMS Center dan terlaksananya pengadaan alat komunikasi berupa HT (*Handy Talky*) sebanyak 14 buah, Program Kerjasama Informasi dan Mass Media, Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, hasil dari kegiatan ini adalah kerjasama penyiaran dengan media televisi yakni dengan TVRI berupa pemberitaan dan dialog interaktif. Dengan media radio berupa pemberitaan, liputan khusus dan dialog interaktif. Selain itu juga berlangganan media cetak harian dan mingguan serta publikasi/pariwara daerah. Penyebaran Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat, hasil dari kegiatan ini adalah pembuatan spanduk, baliho, agenda dan kalender pemerintah daerah, serta siaran keliling melalui mobil informasi sehingga terpublikasi seluruh kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

26. Perpustakaan

Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Peranan perpustakaan cukup penting dan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyediaan perpustakaan yang memadai dan dapat di akses oleh semua warga masyarakat sebenarnya telah diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Untuk itu tidak perlu diragukan lagi pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara demokratis menuju masyarakat madani, di samping sebagai pelestari nilai budaya dalam masyarakat yang terus berkembang.

Beberapa kegiatan pengembangan perpustakaan di Kota Padang Panjang dilakukan antara lain, pengadaan bahan pustaka berupa berbagai koleksi buku baik fiksi, maupun buku - buku ilmiah dengan jumlah pengadaan selama 5 tahun sejumlah 2.572 eksemplar. Lomba bercerita anak tingkat Sekolah Dasar yang diikuti oleh 78 murid SD se Kota Padang Panjang setiap tahunnya. Pelayanan Pustaka Keliling ke seluruh Kelurahan di Kota Padang Panjang sebanyak 54 kali kunjungan setiap tahunnya (selama 6 hari dalam 1 bulan) sejak tahun 2009. Seminar tentang Strategi Peningkatan Minat Baca yang diikuti oleh 60 orang peserta pada tahun 2009 dan Publikasi dan sosialisasi minat baca melalui pengadaan Baliho, Brosur dan Pamflet pada tahun 2010 dan 2012. Supervisi pembinaan dan stimulasi perpustakaan melalui monitoring/kunjungan ke Perpustakaan Sekolah sebanyak 12 kali pada tahun 2011 dan 36 kali pada tahun 2012, serta Bintek bagi Petugas Perpustakaan Kelurahan selama 2 hari dengan jumlah peserta 25 orang pada tahun 2011 dan Bintek Pengelola Perpustakaan Sekolah pada tahun 2012.

2.3.2. Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

Pada dasarnya Urusan Pilihan meliputi Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Beberapa urusan pilihan yang dilaksanakan di Kota Padang Panjang antara lain :

1. Pertanian

Secara umum potensi pertanian di Kota Padang Panjang cukup beragam seperti sayuran, padi, jagung ubi jalar, cabe, terung, dan tanaman hias merupakan komoditas yang cukup prospektif untuk dikembangkan, baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun luar Padang Panjang. Namun seiring dengan perkembangan Kota, maka telah terjadi alih fungsi lahan atau penyusutan lahan pertanian. Untuk itu berbagai usaha program intensifikasi pertanian seperti penggunaan benih unggul bermutu, pertanian organik dan penerapan teknologi anjuran sudah berkembang. Berikut pada tabel dibawah ini disampaikan produktifitas komoditas pertanian Kota Padang Panjang.

Tabel 2.43
Produktifitas Komoditas Pertanian Kota Padang Panjang
Tahun 2010-2014 (ton/tahun)

No.	Komoditas	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Padi	8302	8945	9443	8630	8074
2.	Jagung	51	163	92	415	436
3.	Ubi Kayu	181	520	667	128	0
4.	Ubi Jalar	524	701	845	847	574,01
5.	Kacang Tanah	8	23	29	10	18

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2015

Tanaman hias mempunyai peluang untuk diberdayakan sebagai komoditas komersial yang penting dan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan petani tanaman hias dan devisa negara. Potensi untuk mengembangkan usaha tanaman hias sangatlah prospek dalam peluang pasar internasional.

Kota Padang Panjang termasuk salah satu daerah potensi pengembangan tanaman hias di Sumatera Barat yang didukung letak ketinggian dari permukaan laut, tipe iklim, curah hujan, tipe tanah, kesuburan tanah, dan temperatur udara. Tanaman hias yang cukup berkembang adalah tanaman hias palem jari/rapis waregu. Selain tanaman hias tersebut di Padang Panjang juga berkembang berbagai usaha bunga dengan berbagai jenis. Untuk pengembangan tanaman hias ini telah dilakukan pembinaan terhadap kelompok atau petani tanaman hias.

2. Perkebunan

Usaha perkebunan di Kota Padang Panjang berskala kecil (perkebunan rakyat) dengan lahan terbatas. Luas areal tanam dan produksi tanaman perkebunan dari tahun ke tahun mengalami penurunan sesuai perkembangan. Beberapa program pengembangan perkebunan telah dilakukan, diantaranya seperti penanaman bibit Kakao sebanyak 9.440 batang dan bibit Kopi 880 batang di Kelurahan Koto Katik untuk Kelompok Tani Mudo Sakato dengan anggota berjumlah 25 orang. Adapun gambaran perkembangan luas dan produksi komoditas perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.44
Perkembangan Luas Tanam dan Produksi Komoditas Perkebunan
Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014

No.	Komoditi	Tahun					Satuan
		2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Kopi						
	Luas area tanam	69,0	69,5	69,5	70	70	Ha
	Produksi	36	33,5	34	34,5	35	Ton
2.	Kulit manis						
	Luas area tanam	165	128	128	130	7	Ha
	Produksi	70	70	68	69	69	Ton
3.	Cengkeh						
	Luas area tanam	9,5	8	8	9	9	Ha
	Produksi	7,12	7,5	7,75	7	7	Ton
4.	Tebu						
	Luas Areal Tanam	2,5	2,5	2,5	1,5	2	Ha
	Produksi	2,8	2,8	2,74	2,5	2,50	Ton
5.	Kapulaga						
	Luas Areal tanam	2,5	2,0	2,0	2	2	Ha
	Produksi	0,75	0,6	0,6	0,6	0,60	Ton
6.	Kelapa						
	Luas area tanam	10	10	10	10	10	Ha
	Produksi	6,5	6,5	6	6,5	6,50	Ton
7.	Coklat						
	Luas area tanam	16,10	17	17	16	16,50	Ha
	Produksi	18,3	25,3	25,3	25,5	25,80	Ton
8.	Pinang						
	Luas Area Tanam	11	12,5	12,5	12,5	12,50	Ha
	Produksi	7,5	5,25	5,25	5,25	5,25	Ton
9.	Jahe						
	Luas Area Tanam	9	6,5	6,5	8	8	Ha
	Produksi	19,25	17,5	17,5	18	15,50	Ton

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka dan Dinas Pertanian Kota Padang Panjang

3. Peternakan

Pembangunan peternakan diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan pengembangan peternakan rakyat, salah satunya yaitu dengan penguatan modal masyarakat. Di samping itu juga dilakukan pelayanan kesehatan ternak secara intensif, bimbingan usaha, temu agribisnis dan berbagai bentuk penyuluhan lainnya. Program pengembangan peternakan utamanya ditujukan pada pengembangan sapi potong dan sapi perah. Adapun gambaran perkembangan populasi ternak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.45

**Perkembangan Populasi Ternak Kota Padang Panjang
Tahun 2010-2014**

No	Jenis Ternak (ekor)	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Sapi Perah	343	282	349	247	292
2.	Sapi Potong	607	371	422	329	375
3.	Kerbau	118	133	147	112	80
4.	Kuda	99	102	103	77	76
5.	Kambing	700	649	746	669	535
8.	Ayam Kampung	13.676	12.645	11.180	10.682	10.229

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2015

4. Perikanan

Pelaksanaan urusan perikanan, kebijakannya diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat petani ikan dengan peningkatan produktifitas dan efisiensi usaha perikanan sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha perikanan. Upaya pengembangan perikanan sesuai dengan potensi yang ada diarahkan untuk pengembangan budidaya ikan air tawar, pengembangan agribisnis perikanan, peningkatan sarana dan prasarana perikanan, pencegahan dan pemberantasan hama penyakit ikan. Pengembangan budidaya perikanan darat di Kota Padang Panjang dilakukan melalui budidaya kolam air deras, kolam air tenang, keramba, dan perairan umum yang dikelola secara terbatas. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan antara lain ikan nila, ikan lele, ikan mas, dan ikan gurami. Adapun perkembangan produksi perikanan di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.46

**Perkembangan Produksi Perikanan Darat
Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014
(Ton/Tahun)**

Jenis Usaha Perikanan	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kolam Air Tenang	368.54	424.38	368.54	647,14	727,14
Perairan Sungai	62.20	56.67	62.20	64,70	46,60
Mina Padi	20.19	29.22	20.19	13,50	15,65
Kolam Air Deras	21.30	30.51	48.35	119,35	43,30

Keramba	10.10	11.99	9.30	52,81	33,25
---------	-------	-------	------	-------	-------

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2015

Dalam peningkatan kegiatan budidaya perikanan untuk peningkatan produksi juga diiringi dengan penyediaan benih unggul yang dikelola melalui Balai Benih Ikan (BBI) Kota Padang Panjang.

5. Kehutanan

Pelaksanaan urusan kehutanan di Kota Padang Panjang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Sesuai dengan potensi yang ada, maka penembangan kehutanan bersifat skala kecil atau hutan rakyat dengan program pemanfaatan potensi hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan dan pembinaan sumber daya hutan. Hal ini bertujuan antara lain untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung lingkungan, mencegah banjir, tanah longsor, erosi, dan sekaligus untuk mendukung produktivitas sumber daya hutan dan lahan serta melestarikan keragaman hayati.

Beberapa hasil yang telah dicapai dalam 5 tahun terakhir antara lain penanaman sebanyak 4.400 batang pada lahan seluas 10 Ha di Kelurahan Koto Panjang, pelatihan petani sebanyak 50 orang, penyemaian bibit tanaman, pembuatan tempat penyemaian dan terlaksananya pengadaan belanja bahan/bibit tanaman, penanaman bibit tanaman sebanyak 9.680 batang, dengan rincian Gaharu sebanyak 4.400 batang, Kemiri sebanyak 880 batang, Surian sebanyak 1.200 batang, Mahoni sebanyak 1.200 batang, Durian sebanyak 600 batang, Petai sebanyak 600 batang, dan Alpokat sebanyak 800 batang pada Kelurahan Kampung Manggis (Kelompok Tani Penghijauan Jembatan Kayu Putih Permai 14 Ha) dan Kelurahan Silaing Bawah (Kelompok Tani Penghijauan Semoga Sukses 8 Ha), pelatihan Sosialisasi Dampak Kebakaran Hutan sebanyak 50 orang, pelatihan kelompok tani penghijauan sebanyak 29 orang, pembuatan Master Plan Kawasan Wisata Hutan dan sosialisasi peraturan kehutanan bagi 130 orang serta pembinaan dan pengawasan hasil hutan oleh tim gabungan

6. Industri

Penyelenggaraan urusan industri di Kota Padang Panjang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Perkembangan industri di Kota Padang Panjang pada umumnya berskala mikro atau home industri, kecil, menengah atau *Home Industry* yang dikelola baik secara formal maupun informal, sehingga rentan sekali untuk beralih usaha ke sektor lain jika ditimpa krisis. Industri rumah tangga (*Home Industry*) yang banyak digeluti masyarakat seperti usaha makanan ringan seperti, jagung goreng, kerupuk talas, kerupuk ubi dan jenis kerupuk lainnya. Sedangkan industri usaha lainnya seperti usaha bordir, industri kulit, batu kapur dan usaha batako. Dalam pengembangan industri telah dilakukan berbagai usaha seperti pelatihan pengembangan usaha, bantuan peralatan dan bantuan modal serta bantuan pemasaran seperti promosi dan lain sebagainya. Beberapa hasil yang sudah dicapai dalam pembinaan usaha industri seperti Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) pada 10 IKM Kota Padang Panjang, pelatihan Kerajinan/Handycraft bagi 20 IKM dan magang bagi 2 pengrajin sepatu ke industri sepatu Cibaduyut Bandung, bantuan peralatan bagi 10 IKM kulit, 6 IKM bordir, 6 IKM makanan ringan, 1 Kelompok Usaha Batako dan 1 Kelompok Usaha Peti Buah, Pelatihan peningkatan keterampilan bordir bagi 57 pengrajin yang dilengkapi dengan alat dan bahan untuk keperluan pelatihan seperti mesin jahit bordir, kain, benang dan lain-lain, pelatihan pembuatan barang jadi kulit bagi 40 pengrajin yang dilengkapi dengan alat dan bahan untuk keperluan pelatihan seperti mesin jahit kulit, mesin seset kulit, kulit asli dan sintesis, benang dan asesoris lainnya, penyediaan mesin peralatan bagi *workshop* kerajinan Kelurahan serta terlaksananya kerjasama produksi dan pemasaran dengan distributor sepatu Bukittinggi. Temu usaha bagi 60 IKM Makanan Ringan, Bordir dan

Kerajinan/Handycraft Kota Padang Panjang dengan Pengusaha Sukses di dalam maupun di luar Provinsi Sumbar. Pembangunan 8 unit workshop kerajinan di Kelurahan. Pelatihan teknologi pengawetan makanan yang diikuti 40 peserta, pelatihan membuat kue kering/basah yang diikuti 60 peserta, pelatihan pembuatan batako yang diikuti 20 peserta serta pelatihan pembuatan sepatu dan tas bagi 48 peserta yang dilengkapi dengan alat dan bahan untuk keperluan pelatihan seperti mesin jahit, mesin press, mesin cangklong, kulit dan lain – lain

7. Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Perdagangan di Kota Padang Panjang semenjak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dilaksanakan oleh Kantor Pengelolaan Pasar dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Dalam pengembangan sektor perdagangan ini terdapat kendala seperti belum terbangunnya pasar yang representatif dan sering terjadinya kebakaran pasar. Namun demikian dengan segala upaya pengembangan berbagai sarana dan prasarana perdagangan terus dilakukan, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh swasta, sehingga usaha perdagangan terus berkembang seperti toko swalayan dan ruko. Sedangkan perkembangan usaha kegiatan perdagangan juga dapat dilihat dari perkembangan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.47
Perkembangan Jumlah Penerbitan SIUP di Kota Padang Panjang
Tahun 2010-2014

Tahun	Perusahaan Kecil (PK)	Perusahaan Menengah (PM)	Perusahaan Besar (PB)	Jumlah
2010	91	21	-	115
2011	46	14	-	60
2012	99	5	-	104
2013	129	15	-	144
2014	115	20	-	136

Sumber : Dinas Kop, UMKM, Indag Kota Padang Panjang, 2015

8. Pariwisata

Pengembangan urusan pariwisata juga merupakan kegiatan yang cukup strategis, sehingga dari tahun ke tahunnya kegiatannya terus mengalami peningkatan. Berbagai usaha pengembangan kepariwisataan terus diupayakan, baik dalam bentuk wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner. Objek wisata yang cukup terkenal di Padang Panjang antara lain adalah: MIFAN, Lubuk Mata Kucing, Goa Batu Batirai dan lainnya. Untuk objek wisata budaya antara lain meliputi PDIKM, berbagai bentuk kesenian tradisional seperti randai, pasambahan, sedangkan untuk wisata kuliner cukup. Disamping itu, perkembangan hotel dan restoran cukup pesat di Kota Padang Panjang. Adapun gambaran perkembangan kepariwisataan di Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.48
Perkembangan Pariwisata di Kota Padang Panjang
Tahun 2010-2014

No	Uraian	Tahun					Satuan
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	351.513	255.208	328.583	762.190	352.116	Orang
2	Jumlah restoran, rumah makan	29	29	36	36	37	Unit

3	Jumlah hotel dan penginapan	12	13	18	19	19	Unit
---	-----------------------------	----	----	----	----	----	------

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2015

Dari tabel di atas dilihat dari jumlah kunjungan wisata terus meningkat secara berfluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2010 jumlah kunjungan wisata sebanyak 351.513 orang, menurun menjadi 255.208 orang pada tahun 2011. Namun pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisata meningkat lagi menjadi 72.190 orang, dan pada tahun 2014 naik menjadi 352.116 orang.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Secara umum daya saing daerah dapat dipandang sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah Kab/ Kota lainnya yang berdekatan dengan daerah, termasuk dalam hal ini persaingan dalam lingkup nasional atau internasional. Untuk melihat daya saing suatu daerah banyak indikator yang dapat dikemukakan, terutama indikator yang berkaitan dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki suatu daerah sehingga mampu berkompetisi dengan daerah lainnya. Dalam konteks ini, beberapa indikator dalam aspek daya saing Kota Padang Panjang yang dapat dikemukakan antara lain:

a. Kemampuan Ekonomi Daerah

Dalam konteks ini, kemampuan ekonomi daerah dimaksudkan adalah dilihat dari tingkat pengeluaran riil perkapita penduduk suatu daerah. Tingkat pengeluaran riil perkapita penduduk Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 pengeluaran riil perkapita Kota Padang Panjang sebesar Rp.646,57 setiap tahun dan terus meningkat menjadi Rp.653,52,- per tahun. Capaiannya ini lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sumatera Barat, dimana untuk tahun 2010 pengeluaran riil perkapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 635,29,-. Adapun perkembangan dan perbandingan pengeluaran riil perkapita Kota Padang Panjang dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.49

**Pengeluaran Riil Perkapita Kota Padang Panjang dan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014**

Nama Daerah	Pengeluaran Riil Perkapita yang disesuaikan (Rp.000,-)				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kota Padang Panjang	646,57	647,98	650,36	653.52	9.369
Sumatera Barat	635,29	638,73	641,85	644.59	9.621

Sumber : Publikasi BPS

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator untuk melihat daya saing yang lain adalah dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut juga dengan **Human Development Indeks (HDI)** adalah akumulasi pengukuran harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara

berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara atau daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Sekaitan dengan itu, angka IPM Kota Padang Panjang cukup baik dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2010, IPM Kota Padang Panjang adalah sebesar 77,45, meningkat menjadi 78,51 pada tahun 2012. Sedangkan tahun 2013, IPM Kota Padang Panjang menurun menjadi 74,54 dan tahun 2014 meningkat menjadi 75,05.

Pencapaian IPM Kota Padang Panjang rata-rata lebih baik atau di atas IPM Provinsi Sumatera Barat, dimana IPM Kota Padang Panjang menempati urutan ketiga setelah Kota Bukittinggi dan Padang di Provinsi Sumatera Barat dan urutan ke 25 dari seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Adapun gambaran perkembangan IPM Kota Padang Panjang dan perbandingan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.50
Indeks Pembangunan Manusia Kota Padang Panjang dan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014

Nama Daerah	IPM				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kota Padang Panjang	77,45	78,12	78,51	74,54	75,05
Sumatera Barat	73,78	74,28	74,70	68,91	69,36

Sumber : Publikasi BPS

c. Kualitas Tenaga kerja

Aspek daya saing daerah Kota Padang Panjang juga dapat dilihat dari aspek analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi dan rasio ketergantungan. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.51
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas
Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi
Kota Padang Panjang Tahun 2012-2014

NO	Uraian	persentase		
		2012	2013	2014
1.	Tidak/belum pernah sekolah	1,06	0,58	0,26
2.	Tidak/belum tamat SD	16,57	16,04	14,26
3.	SD/sederajat	15,15	16,65	19,88

4.	SLTP/ sederajat	21.98	19,97	18,74
5.	SLTA/ sederajat	32.32	35,38	31,22
6.	Diploma I/II/III	4.46	4,65	3,47
7.	Diploma IV/S1	7.45	7,04	10,44
8.	S2/S3	1.01	0,69	1,72
	jumlah	100	100	100

Sumber : Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2015

d. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Tingkat daya saing Kota Padang Panjang juga dapat dilihat dari tingkat ketergantungan atau rasio ketergantungan. Hasil analisis terhadap rasio ketergantungan Kota Padang Panjang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.52
Rasio Ketergantungan Kota Padang Panjang
Tahun 2010 – 2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	15.201	15.380	14.919	14.865	15.457
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	3.267	2.368	2.628	2.632	2.410
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	18.468	17.748	17.547	17.497	17.867
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	28.600	29.871	30.640	31.295	32.331
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0,65	0,59	0,57	0,56	0,55

Sumber data : Padang Panjang Dalam Angka (data diolah)

Dari tabel di atas dapat diamati bahwa, jumlah penduduk usia tidak produktif yang merupakan jumlah penduduk berusia kurang dari 15 tahun ditambah dengan penduduk berusia lebih dari 64 tahun. Sejak tahun 2010 jumlah penduduk kelompok usia ini terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk usia tidak produktif di Kota Padang Panjang mencapai 17.867 jiwa atau 55,26 persen dibandingkan jumlah penduduk usia produktif. Jumlah ini atau turun 0,64 persen dari tahun 2013 yang berjumlah 17.497 jiwa. Penduduk berusia kurang dari 15 tahun mengalami sedikit peningkatan jumlah. Kenaikan yang signifikan terjadi pada penduduk berusia lebih dari 64 tahun, yaitu naik sebesar 1.036 jiwa.

Penduduk usia produktif (penduduk berusia antara 15 – 64 tahun) pada tahun 2012 berjumlah 30.640 jiwa atau 63,59 persen. Jumlah ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2,57 persen dibandingkan tahun 2011. Adapun rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif terhadap penduduk usia produktif tahun 2012 mencapai 0,57. Rasio ini turun dari tahun 2011 yang sebesar 0,59.

a. Perkembangan Investasi

Salah satu upaya untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah adalah melalui pengembangan investasi. Dilihat dari aspek perkembangan investasi di Kota Padang Panjang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, peningkatan nilai investasi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah investor. Secara umum investasi pembangunan di Kota Padang Panjang dapat dikategorikan dalam skala kecil dengan nilai investasi yang juga relatif juga masih kecil dimana secara keseluruhan masih bersifat PMDN. Adapun gambaran perkembangan investasi di Kota Padang Panjang Tahun 2008-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.53
Perkembangan Investasi Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014

No.	Tahun	Jumlah Investor	Nilai (Rp.000)	
			PMDN	PMA
1	2010	48	474.891.384,00	-
2	2011	64	432.732.495,50	-
3	2012	99	490.168.245,79	-
4	2013	121	515.208.576,11	-
5	2014	149	556.991.185,49	-

Sumber: Bappeda Kota Padang Panjang

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pada dasarnya pembangunan yang dilaksanakan harus berdasarkan proses perencanaan, yang disusun sedemikian rupa berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, dengan mendayagunakan segala potensi yang ada pada daerah, seperti potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi keuangan daerah.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pembangunan daerah akan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik apabila ditunjang oleh potensi keuangan daerah yang meliputi sumber-sumber penerimaan yang cukup. Untuk mengetahui potensi keuangan daerah dimaksud, berikut akan dijelaskan tentang gambaran pengelolaan keuangan daerah Kota Padang Panjang, serta kerangka pendanaannya.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Dalam pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan antara lain : (1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (2) Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam sistem terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mentaati azas pengelolaan keuangan daerah, yakni tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan daerah, sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, serta untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dimasa depan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Berikut dijelaskan kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah Kota Padang Panjang tahun 2010-2014.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014 mengalami peningkatan yang cukup berarti, baik rencana maupun realisasi. Salah satu indikasi kenaikan APBD ini dapat dilihat dari meningkatnya pembangunan di Kota Padang Panjang selama periode tahun 2010-2014. Kinerja pelaksanaan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.

A. Pendapatan

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan kata lain Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari beberapa komponen, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Setiap komponen pendapatan terdiri atas beberapa jenis, antara lain :

1. PAD, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Dana Perimbangan, jenisnya meliputi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;
3. Untuk lain-lain pendapatan yang sah, antara lain Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda Lainnya

Pendapatan Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Secara keseluruhan total rencana Pendapatan Daerah tahun 2010-2014 adalah Rp.1.928.866.964.823,72,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.920.378.502.154,97,- (99,42%).Melalui Tabel 3.1 berikut dapat digambarkan realisasi dan pertumbuhan pendapatan Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014.

Tabel 3.1
Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014

No	Uraian	Realisasi					Pertumbuhan Rata-rata (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Pendapatan	306,137,811,132.83	346,247,178,766.03	372,888,777,403.28	417,491,832,600.00	475,280,788,657.33	11,83
1.1	PAD	27,256,576,915.83	30,507,444,998.03	32,420,607,300.28	41.513.488.241,83	46,724,333,148.00	14,70
1.1.1	Pajak Daerah	1,917,440,696.00	3,001,438,960.00	3,514,177,859.00	4.060.955.402.00	5,051,000,000.00	28,39
1.1.2	Retribusi Daerah	14,258,689,299.59	18,347,203,137.65	19,308,185,675.58	5,355.477.609.22	4,307,560,000.00	(14,48)
1.1.3	Hasil Pengelola Keu.Daerah yang dipisahkn	2,225,932,744.99	3,693,671,811.86	4,101,829,156.00	4,259.913.723.00	4,495,824,848.00	21,60
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	8,854,514,175.25	5,465,131,088.52	5,496,414,609.70	27.837.141.507,61	32,869,948,300.00	96,71
1.2	Dana Perimbangan	270,466,319,231.00	292,080,142,121.00	309,022,360,103.00	336.164.737.840.00	386,554,096,950.00	9,39
1.2.1	DBH pajak / bukan pajak	19,412,696,831.00	17,972,631,041.00	20,782,258,103.00	16.268.693.840	12,971,223,950.00	(8,44)
1.2.2	Dana alokasi umum	213,332,947,400.00	239,694,890,000.00	269,610,492,000.00	302,846,549,000.00	341,743,153,000.00	12,50
1.2.3	Dana alokasi khusus	37,720,675,000.00	34,412,621,080.00	18,629,610,000.00	17.049.495.000,00	31,839,720,000.00	5,91
1.3	Lain-lain pendapatn daerah yang sah	8,414,914,986.00	23,659,591,647.00	31,445,810,000.00	39.336.892.600,00	44,941,186,073.00	63,15
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	-	9,147,961,647.00	9,149,168,000.00	9,624.080.000.00	13,595,551,073.00	11,62
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	14,047,292,000.00	22,296,642,000.00	28,620.181.000.00	30,186,585,000.00	23,14
1.3.5	Bantuan Keu. dari Prop/pemlainnya	8,414,914,986.00	334,338,000.00	-	1,092,631,600.00	1,159,050,000,00	(22,49)

Sumber : DPPKAD Kota Padang Panjang.

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang dari tahun 2010 sampai dengan 2014 secara nominal cenderung meningkat, namun realisasi secara rata - rata selama 5 tahun masih dibawah target yaitu 99,42%. Ketidaktercapaian target pendapatan ini disebabkan

karena dana perimbangan yang terealisasi hanya sebesar 98,67%. Hal ini disebabkan karena alokasi yang diterima tergantung dari realisasi Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Selanjutnya disampaikan gambaran perkembangan PAD Kota Padang Panjang periode tahun 2010-2014 yang menunjukkan adanya peningkatan, baik pada rencana maupun realisasi. Rata-rata pencapaian PAD diatas 100%. Hal ini dapat terlihat dari realisasi pencapaian pajak daerah rata-rata diatas 100%. Demikian juga dengan retribusi daerah, dimana pencapaian realisasinya mengalami peningkatan cukup berarti, yakni dengan keseluruhan rata-rata terealisasi sebesar 109,59.

Dari gambaran diatas terlihat bahwa rata-rata realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melebihi target atau diatas 100%. Namun tidak demikian halnya dengan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dimana untuk Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya terealisasi rata-rata sebesar 95,98% dan pertumbuhan rata-rata sebesar 21,60%. Sedangkan untuk Lain-lain PAD terealisasi rata-rata 96,00%. Jika dilihat dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diperoleh dari perusahaan daerah, BUMD dan bagi hasil dana revolving serta Lain - lain Pendapatan Asli daerah yang sah yang diperoleh dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan dari pengembalian serta kontribusi pihak ketiga secara keseluruhan pencapaiannya masih dibawah 100 persen, hal ini disebabkan karena hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah sangat tergantung dari pihak lain seperti BUMD dan kontribusi pihak ketiga.

Dilihat dari komponen Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana bagi hasil pajak, Bagi hasil sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi rata-rata setiap tahunnya adalah 98,67%. Dari empat komponen Dana Perimbangan tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan rata-rata tahunannya adalah 9,39%.

Selanjutnya dari komponen Pendapatan Daerah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi 101,62% dan pertumbuhan rata-rata sebesar 63,15%.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Padang Panjang selama periode 2010-2014, terdapat beberapa permasalahan yang cukup berarti, sehingga menjadi perhatian dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan kedepan. Diantara permasalahan dimaksud antara lain:

1. Terbatasnya Sumber dan Potensi Pendapatan Daerah, terutama berkaitan dengan peningkatan PAD.
2. Belum Optimalnya Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan PERDA di bidang perpajakan dan retribusi daerah dan pengoptimalan pelaksanaannya.
3. Belum optimalnya pelaksanaan administrasi Pendapatan Daerah sebagai piranti dalam mendorong akselerasi penerimaan PAD.
4. Belum optimalnya alokasi penerimaan dana-dana yang berasal dari pusat, berupa dana perimbangan, maupun dana yang berasal dari Provinsi.
5. Relatif masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kesadaran sebagai wajib pajak.

Tingkat kemandirian fiskal Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Derajat Otonomi Daerah dalam 5 tahun terakhir sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 3.2

**Derajat Otonomi Fiskal
Kota Padang Panjang 2010-2014**

No	Uraian	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pendapatan Asli Daerah	27.256.576.915,83	30.507.444.998,03	32.420.607.300,28	41.513.488.241,83	51.601.386.498,33
2	Total Pendapatan Daerah	306.137.811.132,83	346.247.178.766,03	372.888.777.403,28	417.015.118.681,83	475.280.788.657,33
3	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan(%)	8,90	8,81	8,69	9,95	10,86
4	Derajat Otonomi Fiskal	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang

Sumber : APBD Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa derajat otonomi fiskal daerah dari tahun ketahun semakin meningkat dan pada tahun 2014 memasuki derajat sedang.

B. Belanja

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Permendagri 13 Tahun 2006). Belanja daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Secara umum dapat digambarkan bahwa selama periode tahun 2010-2014 Belanja Daerah Kota Padang Panjang menunjukkan peningkatan, seiring dengan terjadinya peningkatan Pendapatan Daerah. Kecenderungan peningkatan jumlah belanja daerah ini merupakan salah satu indikasi meningkatnya program/kegiatan pembangunan di Kota Padang Panjang guna mewujudkan tujuan pembangunan pada periode tersebut. Realisasi dan rata-rata pertumbuhan belanja tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3
Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014**

No	Uraian	Realisasi					Pertumbuhan Rata-rata (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	Belanja Daerah	320,374,956,867.5₂	345,360,001,874.0₁	349,829,174,811.6₈	475,521,180,201.1₇	544.621.698.906.6₄	14,89
1.1	Belanja Tidak langsung	46,401,725,776.52	176,465,692,876.6₈	189,837,053,968.6₈	230,364,990,607.1₇	238.512.756.471.6₄	78,19
1.1.1	Belanja Pegawai	22,338,658,550.00	157,675,980,693.00	172,684,121,472.00	198,875,459,066.00	227.877.017.071.00	132,92
1.1.2	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.1.3	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.1.4	Belanja Hibah	13,456,559,373.00	6,530,975,959.00	12,022,521,290.00	13,163,000,000.00	7.733.000.000,00	-14,33
1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9,420,407,853.52	9,226,021,143.68	2,164,477,000.00	4,663,950,000.00	1.398.030.000,00	-8,29
1.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prop/Kab/Kota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop/Kab/Kota	1,186,100,000.00	847,900,000.00	499,641,143.68	500,000,000.00	500.000.000,00	-31,96
1.1.8	Belanja Tidak Terduga	0.00	2,184,815,081.00	2,466,293,063.00	13,162,581,541.17	1.004.709.400,64	-58,05
1.2	Belanja Langsung	273,973,231,091.0₀	168,894,308,997.3₃	159,992,120,843.0₀	245,156,189,594.0₀	306.108.942.435.0₀	-6,64
1.2.1	Belanja Pegawai	132,717,171,922.00	25,975,974,379.00	31,565,048,496.00	43,763,715,100.00	19.673.665.500,00	-29,95
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	60,824,710,857.00	76,499,856,581.00	81,315,223,119.00	107,802,121,409.00	150.161.931.525,00	-8,49
1.2.3	Belanja Modal	80,431,348,312.00	66,418,478,037.33	47,111,849,228.00	93,590,353,085.00	136.273.345.410,00	4,00

Sumber : DPPKAD Kota Padang Panjang.

C. Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran selanjutnya (Permendagri 13 Tahun 2006). Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Secara umum penerimaan pembiayaan Kota Padang Panjang selama periode 2010-2014 menunjukkan angka yang fluktuatif setiap tahunnya. Dimana dari tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami penurunan namun tahun 2013 dan 2014 kembali mengalami kenaikan. Penerimaan pembiayaan ini umumnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Begitu juga komponen pengeluaran pembiayaan, yang bergerak secara fluktuatif. Pengeluaran pembiayaan Kota Padang Panjang pada umumnya digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Keuangan Daerah disusun dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dengan memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas dana pada tanggal neraca dikeluarkan. Transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Neraca sangat dipengaruhi oleh Belanja Modal dan Pembiayaan. Belanja Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dari tahun 2010 sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi dimana terjadi kenaikan dan penurunan. Neraca Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel. 3.4
Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Padang Panjang
Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Total
ASET						
Aset Lancar						
Kas di Kas Daerah	52,458,022,489.05	52,230,793,311.90	28,205,201,615.17	28,256,694,886.71	92,559,877,830.93	(14.97)
Kas di Bendahara Pengeluaran	363,910,127.50	677,579,813.67	22,491,986.00	19,536,503.00	7,544,470.00	(37.20)
Kas di Bendahara Penerimaan	127,228,520.00	17,592,000.00	26,135,500.00	12,038,349.90	27,756,203.96	202.65
Kas di Bendahara BLUD	0.00	0.00	0.00	3,784,872,437.93	8,148,407,132.04	
Deposito	350,000,000.00	350,000,000.00	39,350,000,000.00	49,350,000,000.00	49,968,676,133.00	2,785.71
Piutang Pajak	126,517,700.00	146,615,066.00	155,491,060.00	221,195,522.00	513,746,286.00	27.60
Belanja Dibayar Dimuka	0.00	0.00	0.00	255,939,750.00	255,939,750.00	
Piutang Pend.Bagi Hasil Pajak	807,969,564.00	1,360,317,003.00	0.00	153,956,985.75	659,212,570.00	(20.61)
Piutang Retribusi	0.00	892,310,748.00	1,096,589,073.00	444,827,241.00	519,745,159.00	(19.28)
Bag.Lancar tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Piutang Lainnya	1,956,688.00	0.00	0.00	1,416,311,853.09	9,543,974,171.70	(50.00)
Persediaan	3,605,808,058.00	3,918,850,411.47	4,027,044,721.27	4,606,878,206.00	4,935,021,269.00	31.66
Jumlah Aset Lancar	57,841,413,146.55	59,594,058,354.04	72,882,953,955.44	88,522,251,735.38	167,139,900,975.63	2.12
Investasi Jangka Panjang						-
Investasi Non Permanen						-
Investasi Non Permanen Lainnya	4,374,105,739.00	4,815,103,352.84	4,848,061,390.98	5,102,825,950.29	3,821,738,600.00	2.69
Investasi Permanen						-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	17,640,323,130.82	20,888,397,646.89	30,980,842,777.14	42,811,910,444.79	42,163,841,239.53	22.87
Jumlah Investasi Jangka Panjang	22,014,428,869.82	25,703,500,999.73	35,828,904,168.12	47,914,736,395.08	45,985,579,839.53	18.76
Aset Tetap						-
Tanah	125,330,553,860.00	158,980,460,043.00	162,804,450,899.00	162,644,904,915.00	169,140,304,915.00	6.71
Peralatan dan Mesin	130,089,899,577.00	95,979,400,490.30	158,364,551,757.63	166,525,353,542.04	180,805,173,012.00	17.38
Gedung dan Bangunan	240,828,310,403.14	220,587,216,981.33	274,646,390,810.04	291,926,434,620.42	314,507,035,562.00	11.79
Jalan, Irigasi dan Jaringan	187,349,064,175.00	172,628,232,475.00	225,789,026,889.00	256,183,201,829.84	279,939,126,933.00	15.15
Aset Tetap Lainnya	7,726,975,335.00	2,821,259,286.00	7,110,425,189.00	7,578,737,417.00	9,380,639,619.00	29.96
Konstruksi dalam Pengerjaan	113,960,700.00	1,861,396,000.00	2,285,315,713.00	8,427,714,935.00	2,639,859,019.00	343.41
Akumulasi Penyusutan	(126,483,115,989.51)	(119,660,002,138.00)	(209,664,617,046.25)	(238,933,395,888.71)	(301,104,817,544.57)	26.13
Jumlah Aset Tetap	564,955,648,060.63	533,197,963,137.63	621,335,544,211.42	654,352,951,370.59	655,307,321,515.43	2.77

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Total
						-
Dana Cadangan						-
Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
						-
Aset Lainnya						-
Tagihan Penjualan Angsuran	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	21,712,278,000.00	21,712,278,000.00	21,712,278,000.00	24,430,557,000.00	24,430,557,000.00	-
Aset Lain-lain	593,267,550.00	1,238,619,059.00	19,559,123,147.02	27,506,966,796.79	21,199,528,346.00	384.48
Jumlah Aset Lainnya	22,305,545,550.00	22,950,897,059.00	41,271,401,147.02	51,937,523,796.79	45,630,085,346.00	20.03
						-
TOTAL ASET	667,117,035,627.00	641,446,419,550.40	771,318,803,482.00	842,727,463,297.84	914,062,887,676.59	4.55
						-
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						-
						-
KEWAJIBAN						-
Kewajiban Jangka Pendek						-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	16,120,499.00	40,283,116.00	1,000.00	9,021,092.00	148,560.00	27.97
Utang Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(25.00)
Utang Bunga Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(25.00)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(25.00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	1,587,761,793.00	3,809,272,616.00	1,429,635,044.00	1,995,440,424.80	5,098,064,399.67	94.28
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1,603,882,292.00	3,849,555,732.00	1,429,636,044.00	2,004,461,516.80	5,098,212,959.67	27.97
						-
Kewajiban Jangka Panjang						-
Utang/ Pinjaman Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
						-
TOTAL KEWAJIBAN	1,603,882,292.00	3,849,555,732.00	1,429,636,044.00	2,004,461,516.80	5,098,212,959.67	27.97
						-
EKUITAS DANA						-
Ekuitas Dana Lancar						-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	53,155,812,117.55	53,218,090,009.57	67,577,692,601.17	81,402,082,735.64	150,065,829,432.97	1.71
Selain SILPA	0.00	0.00	0.00	0.00	618,527,573.00	
Pendapatan yang Ditangguhkan	127,228,520.00	17,592,000.00	26,135,500.00	12,038,349.90	27,756,203.96	202.65
Cadangan Piutang	936,443,952.00	2,399,242,817.00	1,252,080,133.00	2,492,231,351.84	11,492,617,936.70	18.24
Cadangan Persediaan	3,605,808,058.00	3,918,850,411.47	4,027,044,721.27	4,606,878,206.00	4,935,021,269.00	31.66
Penyediaan Dana untuk Utang Jangka Pendek	(1,587,761,793.00)	(3,809,272,616.00)	(1,429,635,044.00)	(1,995,440,424.80)	(5,098,064,399.67)	(70.84)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	56,237,530,854.55	55,744,502,622.04	71,453,317,911.44	86,517,790,218.58	162,041,688,015.96	4.66
						-
Ekuitas dana investasi						-
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	22,014,428,869.82	25,703,500,999.73	35,828,904,168.12	47,914,736,395.08	45,985,579,839.53	18.76
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	564,955,648,060.63	533,197,963,137.63	621,335,544,212.42	654,352,951,370.59	655,307,321,515.43	2.77
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	22,305,545,550.00	22,950,897,059.00	41,271,401,147.02	51,937,523,796.79	45,630,085,346.00	20.03
Penyediaan Dana untuk Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	609,275,622,480.45	581,852,361,196.36	698,435,849,527.56	754,205,211,562.46	746,922,986,700.96	4.97
						-
Ekuitas Dana cadangan						-
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan						-
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
						-
Ekuitas dana Donasi						-
Perolehan Dana Hibah						-
Jumlah Ekuitas Dana Donasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
						-
TOTAL EKUITAS	665,513,153,335.00	637,596,863,818.40	769,889,167,439.00	840,723,001,781.04	908,964,674,716.92	4.77
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	667,117,035,627.00	641,446,419,550.40	771,318,803,483.00	842,727,463,297.84	914,062,887,676.59	4.55

Sumber: DPPKAD Kota Padang Panjang.

Berdasarkan tabel Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Padang Panjang diatas tergambar pertumbuhan nilai aset dari tahun 2010-2014 rata-rata sebesar Rp. 69,859,208,829.00 atau 4,55% dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Rekening Aset lancar yang paling menonjol peningkatannya terdapat pada rekening deposito daerah dari semula hanya sebesar Rp. 350.000.000,- meningkat menjadi Rp. 39.350.000.000,- pada tahun 2012.

2. Hal yang sama juga terdapat peningkatannya pada rekening penyertaan modal pemerintah daerah dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 22,87%.
3. Komposisi terbesar untuk total aset Pemerintah Kota Padang Panjang terdapat pada Aset tetap yaitu 80,55 % dari seluruh total aset yang terdapat di Kota Padang Panjang.

Untuk menganalisis neraca Kota Padang Panjang periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 digunakanlah beberapa analisis rasio, yaitu:

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas (rasio lancar) yaitu Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Dalam analisis neraca Kota Padang Panjang menggunakan rumusan rasio lancar seperti dibawah ini:

$$a. \text{ Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

$$b. \text{ Rasio Quick} = \frac{(\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan})}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

2. Ratio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga Ratio leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva entitas dibiayai oleh hutang, rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun Rasio yang tergabung dalam Rasio Leverage adalah:

a. *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Merupakan Perbandingan antara hutang - hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Total Debt to equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang (Kewajiban)}}{\text{Ekuitas}}$$

b. *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\text{Total Debt to Total Asset Ratio} = \frac{\text{Total Hutang (Kewajiban)}}{\text{Total Aktiva}}$$

Berikut ini adalah gambaran Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Kota Padang Panjang Tahun 2010-2014.

Tabel 3.5
Rasio Likuiditas dan Solvabilitas Kota Padang Panjang
2010-2014

Ratio	Rumus	2010 (Rp. Juta)	2011 (Rp. Juta)	2012 (Rp. Juta)	2013 (Rp. Juta)	2014 (Rp. Juta)
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	57.841	59.594	72.882	88.522	167.139
	Kewajiban Jangka Pendek	1.603	3.849	1.429	2.004	5.098
	Rasio Lancar	36,08	15,48	51,00	44,17	32,79
	Aset Lancar - Persediaan	54.235	55.675	68.855	83.915	162.204
	Kewajiban Jangka Pendek	1.603	3.849	1.429	2.004	5.098
	Quick Rasio	33,83	14,46	48,18	41,87	31,82
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	1.603	3.849	1.429	2.004	5.098
	Total Aset	667.117	641.446	771.318	842.727	914.062
	Rasio Total Hutang (%)	0,24	0,60	0,19	0,24	0,56
	Total Hutang	1.603	3.849	1.429	2.004	5.098
	Total Ekuitas	665.513	637.596	769.889	840.723	908.964
	Rasio Hutang/Modal (%)	0,24	0,60	0,19	0,24	0,56

Sumber: DPPKAD Kota Padang Panjang.

Dari Tabel 3.5 dapat terlihat bahwa rasio likuiditas neraca keuangan Kota Padang Panjang cukup baik, dimana rasio lancar dan quick rasio paling rendah adalah 1.548,08 yang artinya aset lancar jauh melebihi kewajiban jangka pendeknya dengan artian bahwa setiap Rp. 1 hutang jangka pendek dijamin oleh Rp. 1.548,08 aktiva lancar. Sementara itu, rasio solvabilitasnya juga cukup baik yang terlihat dari rasio hutang terhadap aset masih berada di bawah 1% yang artinya jumlah hutang lebih kecil dibandingkan dengan total aset, sedangkan pada tahun 2008 terlihat bahwa perbandingan antara hutang dengan ekuitas yang ada menunjukkan ekuitas yang tersedia lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban yang harus dilunasi sementara untuk 4 tahun berikutnya rasio solvabilitas ini telah menunjukkan peningkatan dengan besarnya jumlah ekuitas dibandingkan dengan total hutang.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang sepanjang Tahun 2008-2013 dapat diketahui dari analisis proporsi Penggunaan anggaran serta Pembiayaan. Besaran proporsi penggunaan anggaran dalam hal ini belanja daerah maupun Pembiayaan daerah merupakan realisasi baik belanja maupun pembiayaan daerah yang terlaksana sepanjang 2010-2014, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah itu sendiri baik menyangkut, pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

a. Alokasi Anggaran Belanja Daerah 2010 – 2014

Terkait Proporsi Penggunaan anggaran, dalam hal ini belanja serta Pembiayaan daerah dapat kita cermati dengan membandingkan target anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai per tahun anggaran sepanjang 2010-2014.

Tabel 3.6
ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2010 – 2014 (Dalam Milyar Rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
	Target	Target	Target	Target	Target
Belanja Daerah	373,17	404,52	419,09	475,64	544,62
Belanja Tidak Langsung	172,93	192,17	207,55	230,42	238,51
Belanja Pegawai	139,87	166,23	185,28	199,45	227,88
Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	15,67	8,00	13,85	13,16	7,73
Bantuan Sosial	13,81	12,01	3,33	4,15	1,40
Belanja Bagi Hasil kpd Prop/Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota	1,26	0,93	0,50	0,50	0,50
Belanja tidak terduga	2,31	5,00	4,59	13,16	1,00
Belanja Langsung	200,24	212,35	211,54	245,21	306,11
Belanja Pegawai	28,64	30,91	35,84	43,76	19,68
Belanja barang dan jasa	73,52	91,67	96,79	107,80	150,15
Belanja Modal	98,08	89,77	78,91	93,66	130,27

Sumber : DPPKAD Kota Padang Panjang (Data diolah)

Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2010 – 2014 terjadi peningkatan alokasi belanja daerah dari Rp. 373,17 Milyar pada Tahun anggaran 2010 menjadi Rp. 544,62 Milyar pada tahun 2014 atau tumbuh 14,50%. Peningkatan terhadap alokasi belanja daerah tersebut meliputi belanja langsung yang meningkat dari Rp.200,24 Milyar pada Tahun 2010 menjadi Rp. 306,11 Milyar pada Tahun 2014, belanja tidak langsung dari Rp. 172,93 Milyar pada Tahun 2010 menjadi Rp. 238,51 Milyar pada Tahun Anggaran 2014. Pada tabel diatas juga dapat dilihat bahwa sebagian besar penyerapan alokasi belanja daerah berada pada belanja langsung dimana penyerapan anggaran untuk alokasi belanja ini mencapai 53,66% dari total anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada Tahun anggaran 2010 serta 46,34% untuk belanja tidak langsung. Sementara pada Tahun anggaran 2014 penyerapan alokasi belanja tidak langsung pada alokasi anggaran adalah sebesar 43,79% dan sisanya sebesar 56,21% dialokasikan untuk belanja tidak langsung.

b. Pertumbuhan Alokasi Anggaran Belanja Daerah 2010– 2014.

Jika dilihat dari pertumbuhan alokasi anggaran dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan, untuk belanja tidak langsung pertumbuhan rata-rata pertahun adalah sebesar 6,73% sedangkan belanja langsung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,46% pertahun. Namun demikian dibebberapa alokasi belanja juga mengalami penurunan tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu belanja bantuan sosial yang pertumbuhan rata-ratanya turun sampai 23,97% pertahun, serta belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kab/kota yang rata-rata turun 20,87% per tahunnya, penurunan dua alokasi belanja ini pada prinsipnya mencerminkan poin positif bagi pembangunan di Kota Padang Panjang.

Tabel 3.7
PERTUMBUHAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010-2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Pert. Rata-rata
	%	%	%	%	%	
Belanja Daerah	5,53	8,40	3,60	13,49	14,50	9,10
Belanja Tidak Langsung	(0,02)	11,12	8,01	11,02	3,51	6,73
Belanja Pegawai	4,26	18,84	11,46	7,65	14,25	11,29
Bunga	-	-	-	-	-	0,00
Subsidi	-	-	-	-	-	0,00
Hibah	(32,92)	(48,99)	73,26	(4,98)	(41,26)	-10,98
Bantuan Sosial	7,18	(13,06)	(72,30)	24,62	(66,27)	-23,97
Belanja Bagi Hasil kpd Prop/Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00
Belanja bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota	(32,15)	(26,04)	(46,18)	0,00	0,00	-20,87
Belanja tidak terduga	226,27	116,08	(8,27)	186,71	(92,40)	85,68
Belanja Langsung	0,86	6,05	(0,38)	15,92	24,84	9,46
Belanja Pegawai	13,78	7,93	15,96	22,10	(55,03)	0,95
Belanja barang dan jasa	(5,24)	24,69	5,58	11,38	39,29	15,14
Belanja Modal	25,94	(8,47)	(12,10)	18,69	39,09	12,63

Sumber : DPPKAD Kota Padang Panjang (Data diolah)

c. Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Gambaran mengenai alokasi anggaran bagi pembangunan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari besarnya realisasi belanja daerah terhadap alokasi anggaran itu sendiri. Dari tabel 3.8 berikut diketahui bahwa realisasi belanja daerah cenderung berfluktuasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dari 85,85% pada Tahun 2010 turun hingga mencapai 74,66% pada tahun 2014 dengan rata-rata realisasi 82,40% per tahunnya yang meliputi belanja tidak langsung dengan rata-rata realisasi pertahunnya 89,44% dan belanja langsung 76,27% pertahun. Berikut tabel realisasi belanja daerah Kota Padang Panjang 5 tahun terakhir.

Tabel 3.8
REALISASI BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2010-2014 (%)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	rata-rata Realisasi
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
Belanja Daerah	85,85	85,38	83,47	82,66	74,66	82,40
Belanja Tidak Langsung	90,66	91,83	91,47	85,48	87,75	89,44
Belanja Pegawai	94,89	94,85	93,20	93,37	89,37	93,14
Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidi	-	-	-	-	-	0,00
Hibah	85,85	81,68	86,78	68,51	52,62	75,09
Bantuan Sosial	68,21	76,84	65,09	23,34	76,67	62,03
Belanja Bagi Hasil kpd Prop/Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00
Belanja bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota	94,24	91,09	99,73	89,93	98,55	94,71
Belanja tidak terduga	0,00	43,68	53,75	2,33	0,00	19,95
						0,00
Belanja Langsung	81,70	79,53	75,63	80,02	64,46	76,27
Belanja Pegawai	78,00	84,04	88,07	86,62	81,58	83,66
Belanja barang dan jasa	82,73	83,45	84,01	83,57	77,63	82,28
Belanja Modal	82,01	73,98	59,70	72,84	47,49	67,20

Sumber : DPPKAD Kota Padang Panjang, Data diolah

d. Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur

Kebijakan penggunaan anggaran untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat dari tabel 4. Secara umum proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2010 s/d 2014 cenderung meningkat namun paling tinggi masih 50% dari total belanja dan pengeluaran pembiayaan dengan rata-rata persentase mencapai 44,42%.

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Padang Panjang Tahun 2010- 2014

NO.	TAHUN	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan aparatur (Rp.)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp.)	Prosentase
1	2010	132.717.372.128,00	323.874.956.867,52	40,98%
2	2011	147.035.027.966,00	346.184.900.874,01	42,47%
3	2012	151.939.145.157,00	358.529.174.811,68	42,38%
4	2013	186.229.468.354,00	403.190.728.547,36	46,19%
5	2014	203.655.166.724,00	406.617.041.960,00	50,09%

Sumber : DPPKAD Kota Padang Panjang (Data diolah)

Persentase proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur yang cenderung meningkat ini bukan berarti kondisi APBD yang tidak sehat namun lebih dipengaruhi oleh kinerja Belanja Langsung yang berfluktuasi bahkan tahun 2014 mencapai hanya 64,46% sehingga jika dibandingkan realisasi Belanja Tidak Langsung dengan realisasi Belanja Langsung hampir mencapai 50%. Ke depan kinerja Belanja langsung inilah yang harus digenjut agar tidak menjadi SILPA sehingga proporsi Belanja belanja pemenuhan kebutuhan aparatur diyakini dapat jauh lebih rendah daripada kondisi tahun 2014.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

a. Analisis sumber Penutupan Defisit.

Komponen pembiayaan merupakan salah satu unsur dalam menutupi defisit anggaran, perkembangan realisasi dan komposisi pembiayaan Kota Padang Panjang dapat dilihat dari tabel 3.10, dalam lima tahun berjalan sepanjang 2010– 2014 Pemerintah Kota Padang Panjang selalu mengalami defisit anggaran yang disebabkan karena belanja dan pengeluaran pembiayaan melebihi pendapatan daerah yang tersedia. Terjadinya defisit anggaran ini ditutup dengan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SILPA Tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran Kota Padang Panjang
Tahun 2010 – 2014 (dalam juta rupiah)

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Realisasi Pendapatan Daerah	306.137,81	346.247,18	372.888,78	417.015,12	475.280,79
	<i>dikurangi Realisasi :</i>					
	Belanja Daerah	320.374,96	345.360,00	349.829,17	393.183,73	406.617,04
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.500,00	824,90	8.700,00	10.007,00	-
A.	Defisit Riil	(17.737,15)	62,28	14.359,60	13.824,39	68.663,75
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
	SILPA T.A Sebelumnya	70.924,75	53.155,81	53.218,09	67.577,70	81.402,09
	Penerimaan lainnya (Koreksi Tahun sebelumnya)	(31,80)	-	-	-	-
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	70.892,96	53.155,81	53.218,09	67.577,70	81.402,09
C.	SILPA Tahun berkenaan	53.155,81	53.218,09	67.577,69	81.402,09	150.065,83

Sumber : DPPKAD Kota Padang Panjang(Data diolah)

b. Analisis Realisasi SILPA

Sebagai salah satu sumber penutup defisit anggran, SILPA memiliki fungsi yang sangat penting. Analisis realisasi SILPA Kota Padang Panjang dapat dilihat dari tabel 3.11. Sepanjang 2010 – 2014 penerimaan SILPA cenderung berfluktuasi, sumber terbesar penyumbang SILPA dalam struktur anggaran Kota Padang Panjang berasal dari Penghematan belanja daerah yang rata-rata menyumbang 101,25 % pertahun.

Tabel 3.11
Realisasi SILPA Kota Padang Panjang
Tahun 2010 – 2014 (Dalam Milyar)

NO.	URAIAN	2010		2011		2012		2013		2014	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
			dari SILPA		dari SILPA		dari SILPA		dari SILPA		dari SILPA
	Jumlah SILPA	53,16		53,22		67,58	15,86	81,40	16,80	150,07	26,96
1	Pelampauan Penerimaan PAD	0,98	1,84	1,88	3,52	(1,10)	(1,62)	3,68	9,74	4,88	10,44
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(2,38)	(4,47)	(6,86)	(12,89)	0,50	0,74	(4,87)	(0,43)	(7,82)	(2,02)
3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	1,79	3,37	(1,03)	(1,94)	(1,09)	(1,61)	0,13	1,18	-	-
4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lain	52,79	99,32	59,16	111,16	69,26	102,49	82,45	101,29	138,00	91,96
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	0,08	0,14	-	-	-	-	-	-
6	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Koreksi tahun lalu	(0,03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : DPPKAD Kota Padang Panjang(Data diolah)

Adapun sumber SILPA yang berasal dari pendapatan yaitu pelampauan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan serta pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga sangat fluktuatif, rata-rata pertahun Pelampauan penerimaan PAD hanya menyumbang 4,78% saja sedangkan dari pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah menyumbang rata-rata 0,20%. Lain halnya dengan pelampauan penerimaan yang bersumber dari dana perimbangan, sumbangan dana perimbangan terhadap SILPA hanya terjadi pada Tahun 2012 yaitu sebesar 0,74%, selama 4 Tahun lainnya target penerimaan Dana Perimbangan selalu tidak tercapai sehingga tidak mampu berkontribusi terhadap SILPA. Kewajiban pada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan juga menjadi sumber SILPA dalam struktur Anggaran, hal ini disebabkan masih terdapatnya tunggakan setoran atas penyertaan modal Pemerintah daerah kepada pihak ketiga.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Pada bagian ini akan dijelaskan analisis kerangka pendanaan yang bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahun kedepan. Identifikasi terhadap seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut dialokasikan merupakan langkah awal yang harus dilakukan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan penerimaan daerah yang dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta program prioritas utama.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja

periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk menganalisis jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena ada perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat. Analisis realisasi pengeluaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.12
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Tahun 2010 -2014

No	Uraian	Realisasi						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
		3	4	5	6	7	8	9
A	Belanja Tidak Langsung	137.369,66	157.695,06	177.269,69	191.145,05	196.971,43	209.288,91	8,87%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	110.459,91	132.717,17	157.675,98	172.684,12	186.229,47	203.655,17	13,14%
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	816,00	914,82	804,00	1.308,00	-	-	-7,46%
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	
4	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	
5	Belanja Hibah	14.746,67	13.456,56	6.530,98	12.022,52	9.017,66	4.069,16	-11,20%
6	Belanja Bantuan Sosial	9.233,99	9.420,41	9.226,02	2.164,48	968,62	1.071,83	-24,24%
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kota/Desa	1.770,00	1.186,10	847,90	499,64	449,64	492,75	-20,60%
8	Belanja Tidak Terduga	343,09	-	2.184,82	2.466,29	306,04	-	-34,94%
B	Belanja Langsung	3.025,70	3.463,05	4.015,15	4.674,69	5.169,42	6.165,58	15,34%
1	Belanja Honorarium PNS Khusus Untuk Guru dan Tenaga Medis	-	-	-	-	-	-	
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	523,70	359,75	354,30	669,83	585,13	808,42	16,35%
3	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	2.451,04	3.051,07	3.612,70	3.949,51	4.530,34	5.302,30	16,79%
4	Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	50,96	52,22	48,15	55,35	53,95	54,86	1,75%
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Dst....	-	-	-	-	-	-	
C	Pengeluaran Pembiayaan	-	3.500,00	824,90	8.700,00	10.007,00	-	
1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-	
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-	
3	Penyertaan modal pemerintah daerah	-	3.500,00	824,90	4.200,00	10.007,00	-	114,20%
4	Balairung Provinsi Sumatera Barat, Jakarta	-	-	-	1.000,00	-	-	
5	PDAM	-	-	-	3.500,00	-	-	
	Total (A+B+C)	140.395,37	164.658,11	182.109,74	204.519,75	212.147,84	215.454,49	

Sumber: DPPKAD Kota Padang Panjang.

Dari persentase rata-rata pertumbuhan belanja wajib mengikat dan prioritas utama Kota Padang Panjang terlihat stabil, tidak terdapat peningkatan yang menonjol setiap tahunnya hanya saja pada tahun 2012 terdapat penambahan pembiayaan pengeluaran dimana adanya penyertaan modal pemerintah Kota Padang Panjang pada Balairung Propinsi Sumatera Barat di Jakarta dan

Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM). Masing-masing sebesar Rp. 1 Milyar dan Rp. 3,5 Milyar.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Dalam perhitungan proyeksi pendapatan Kota Padang Panjang untuk 5 (lima) tahun kedepan digunakan sejumlah metode. Sebagian besar komponen pendapatan diproyeksikan dengan menggunakan pendekatan potensi sedangkan komponen Dana Alokasi Khusus diproyeksikan menggunakan metode pertumbuhan rata-rata. Proyeksi pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.13
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang

No	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Pendapatan	455.313,90	475.280,79	498.156,00	505.238,50	540.851,08	574.346,99	585.091,22	621.569,59	629.366,25	687.800,91
1.1	Pendapatan Asli Daerah	39.156,75	51.601,39	40.989,67	67.104,12	42.675,58	61.395,58	45.906,53	68.180,00	49.172,39	72.765,12
1.1.1	Pajak Daerah	4.978,50	5.388,06	4.999,50	5.556,83	5.184,60	6.148,34	5.303,70	6.770,00	5.432,80	6.838,17
1.1.2	Retribusi Daerah	5.166,25	4.602,13	4.995,85	4.488,80	5.012,35	5.098,00	5.054,90	5.510,00	5.111,85	5.757,93
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	5.042,00	4.453,82	5.042,67	5.760,14	5.963,43	7.035,00	6.884,18	7.740,00	7.804,94	9.030,59
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	23.970,00	37.157,37	25.951,65	51.298,35	26.515,20	43.114,24	28.663,75	48.160,00	30.822,80	51.138,43
1.2	Dana Perimbangan	378.613,77	378.738,22	419.622,95	381.194,55	460.632,12	497.567,13	501.641,30	536.733,59	542.650,48	597.485,41
1.2.1	Dana bagi hasil	5.030,90	13.115,27	5.030,90	11.047,83	5.030,90	11.655,14	5.030,90	12.262,44	5.030,90	12.869,75
1.2.2	Dana alokasi umum	341.743,15	341.743,15	382.752,33	343.008,70	423.761,51	382.149,49	464.770,68	396.040,12	505.779,86	416.243,30
1.2.3	Dana alokasi khusus	31.839,72	23.879,79	31.839,72	27.138,02	31.839,72	103.762,49	31.839,72	128.431,02	31.839,72	168.372,37
1.2.4	Dana dari pemerintah pusat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	37.543,38	44.941,19	37.543,38	56.939,83	37.543,38	15.384,29	37.543,38	16.656,00	37.543,38	17.550,37
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	9.498,60	13.595,55	9.498,60	16.656,00	9.498,60	15.384,29	9.498,60	16.656,00	9.498,60	17.550,37
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	28.044,77	30.186,59	28.044,77	37.681,33	28.044,77	-	28.044,77	-	28.044,77	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah lainnya	-	1.159,05	-	2.602,50	-	-	-	-	-	-

Dari tabel proyeksi pendapatan daerah diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kelompok Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang dilihat dari hasil penghitungan pertumbuhan rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 10% pertahun. Hal ini paling banyak dipengaruhi oleh pendapatan RSUD dan program JPKM-PP yang diterapkan sejak tahun 2008. Dengan berlakunya Program JKN maka program JPKM-PP bergabung dengan JKN. Dengan demikian maka perkiraan Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sampai

dengan tahun 2018 dihitung sesuai potensi sehingga diperkirakan tumbuh 6% setiap tahun.

2. Kelompok Dana Perimbangan

Dalam konteks otonomi dan desentralisasi sumber penerimaan daerah masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan komponen terbesar dari pendapatan daerah Kota Padang Panjang. Jenis pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,12% per tahun. Pertumbuhan pendapatan DAU sangat ditentukan oleh bobot daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

3. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Secara umum pendapatan yang berasal dari kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah juga sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Komponen pendapatan ini berasal dari dana bagi hasil pajak propinsi, dana penyesuaian dan bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah lain.

3.3.2.2. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3.14
Proyeksi Belanja Daerah Kota Padang Panjang

No	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Belanja Daerah	515.313,90	406.617,04	517.558,08	487.420,49	539.851,05	692.346,99	584.091,22	713.752,28	628.366,25	755.401,55
1.1	Belanja Tidak langsung	227.131,10	209.288,91	245.433,34	215.295,75	259.450,64	252.741,23	277.121,02	277.121,02	298.290,23	298.290,23
1.1.1	Belanja Pegawai	215.165,10	203.655,17	230.226,65	214.697,80	246.342,52	250.089,23	263.586,50	263.586,50	282.037,55	282.037,55
1.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Belanja Hibah	9.222,00	4.069,16	12.862,23	35,64	10.891,07	1.092,00	11.190,13	11.190,13	13.939,37	13.939,37
1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.244,00	1.071,83	1.344,46	-	1.217,05	-	1.344,39	1.344,39	1.313,31	1.313,31
1.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Prop/Kab	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada	500,00	492,75	-	562,31	-	560,00	-	-	-	-
1.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.2	Belanja Langsung	288.182,80	197.328,13	272.124,74	272.124,74	280.400,41	439.605,76	306.970,19	436.631,26	330.076,02	457.111,32

Dalam alokasi anggaran belanja daerah khususnya pada belanja langsung perlu dilakukan dengan mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi mengacu pada peraturan perundang-undangan.

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan meliputi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3.15 berikut ini :

Tabel. 3.15
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan
Daerah Kota Padang Panjang (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Pendapatan	455.313,90	475.280,79	498.156,00	505.328,50	540.851,08	574.346,99	585.091,22	621.569,59	629.366,25	687.800,91
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	60.000,00	81.402,08	21.402,08	150.065,83	-	149.000,00	-	92.182,69	-	67.600,64
	Total Penerimaan	515.313,90	556.682,87	519.558,08	655.394,33	540.851,08	723.346,99	585.091,22	713.752,28	629.366,25	755.401,55
	Dikurangi :										
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	232.305,47	215.454,49	253.707,57	222.295,75	267.274,78	260.649,23	285.295,07	286.121,02	307.214,18	309.290,23
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	283.008,42	341.228,38	265.850,51	433.098,57	273.576,30	462.697,76	299.796,15	427.631,26	322.152,07	446.111,32

Asumsi dasar yang digunakan untuk memproyeksikan pendapatan, belanja dan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah ini adalah sebagai berikut. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang diasumsikan harus berada pada kisaran angka 6% sampai dengan 7%, inflasi ada pada kisaran 4% hingga 6% serta nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat berada pada kisaran Rp.12.500,- hingga Rp. 13.500,- per US\$ 1. Pada kondisi tersebut maka proyeksi pendapatan daerah di atas diperkirakan pendapatan, belanja dan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah ini dapat tercapai. Lain-lain asumsi adalah adanya konsistensi kebijakan pemerintah pusat yang mendorong peningkatan transfer dana ke daerah sebagaimana sudah dimulai pada tahun 2014.

Tabel 3.16
ASUMSI MAKRO EKONOMI KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2013-2018

No	Indikator Makro Ekonomi	Asumsi
1	Tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK tahun 2010) (%)	6 - 7
2	Inflasi (%)	4 - 6
3	Nilai Tukar (Rp/US\$)	12.500 - 13.500

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Secara konseptual isu strategis dapat dipandang sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan daerah baik pada waktu sekarang maupun di masa mendatang. Ini mengandung makna bahwa, jika isu-isu strategis ini tidak diantisipasi secara baik, dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karakteristik isu-isu strategis sebagaimana yang dikemukakan tersebut antara lain mencakup kondisi yang mendasar, berjangka panjang dan mendesak serta menentukan pencapaian tujuan pembangunan.

Untuk itu, analisis isu-isu strategis tersebut harus diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan. Selanjutnya isu strategis tersebut disusun berdasarkan prioritas sehingga dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin muncul.

Isu-isu strategis pada dasarnya mencakup berbagai aspek pembangunan daerah yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, dan fisik prasarana. Sedangkan tantangan masa depan merupakan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan untuk dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik. Semua aspek yang dikemukakan ini akan dihadapi dan harus dianalisis serta dipecahkan untuk dapat mewujudkan pembangunan Kota Padang Panjang ke depan yang lebih baik dan diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, analisis ini juga merupakan bagian penting dan perlu dipertimbangkan dalam menentukan visi, misi, arah dan prioritas pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang untuk periode 5 tahun mendatang.

Faktor penting lain yang juga perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sumber lain isu strategis yang berasal dari lingkungan eksternal misalnya dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, termasuk dalam skala regional, nasional dan internasional, juga diperhatikan serta menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah dimaksud. Kriteria yang perlu diperhatikan untuk menjadikan isu strategis adalah :

- 1) Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- 2) Merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- 3) Luasnya dampak yang mungkin ditimbulkannya terhadap publik;
- 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah;
- 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.1. Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta dapat juga diartikan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dengan baik serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan permasalahan pembangunan tersebut penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kota Padang Panjang ke depan, dan untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan serta dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan. Permasalahan pembangunan Kota Padang Panjang diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal, regional, nasional maupun global.

Permasalahan pokok pembangunan Kota Padang Panjang pada dasarnya mencakup beberapa aspek, yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus segera dipecahkan dalam mendorong proses pembangunan daerah di masa depan. Permasalahan tersebut meliputi beberapa bidang yaitu ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana. Kendala dan tantangan bidang ekonomi menyangkut dengan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan untuk dapat mendorong proses pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota. Tantangan bidang sosial menyangkut dengan kendala dan permasalahan dalam bidang sosial yang perlu segera dipecahkan untuk dapat mewujudkan kondisi sosial yang sejahtera dan harmonis dalam masyarakat. Sedangkan kendala dan tantangan bidang fisik prasarana adalah berbagai permasalahan pokok yang harus segera ditanggulangi untuk dapat mendorong proses pembangunan wilayah secara terarah dan berkelanjutan.

Selanjutnya sebagai sebuah kota yang terletak di jalur utama transportasi di Provinsi Sumatera Barat bagian tengah, Kota Padang Panjang memiliki harapan besar untuk bisa bergerak lebih maju dari kondisi saat ini yang sudah berkembang secara baik, hingga pada gilirannya dapat dimanfaatkan secara benar serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam perjalanannya, bisa saja muncul beberapa kendala yang cukup berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan. Berikut ini dijabarkan beberapa permasalahan pembangunan yaitu sebagai berikut :

4.1.1. Permasalahan Birokrasi Pemerintahan

a. Belum optimalnya penerapan program reformasi birokrasi dalam rangka mendukung pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Pada hakikatnya reformasi birokrasi ditujukan untuk peningkatan efisiensi dan produktifitas manajemen pemerintahan sehingga memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan. Adapun permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Padang Panjang adalah sebagian organisasi perangkat daerah yang masih gemuk, tumpang tindihnya uraian tugas antara beberapa SKPD, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur yang masih kurang, kurang inovatif dan cenderung tidak mau untuk melakukan perubahan, rekrutmen yang kurang profesional, belum adanya standar pengukuran kinerja, sistem pemberian tunjangan daerah yang belum berbasis kinerja atau kompetensi. Terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi maka sejak tahun 2011 di Kota Padang Panjang sudah terbentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) sebagai perwujudan dari kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di samping itu Kota Padang Panjang juga

sudah menyelenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan website. Namun ketiga lembaga ini belum optimal dan masih perlu pembenahan disana-sini. Di bidang perencanaan dan penganggaran sudah diupayakan untuk melakukan transparansi melalui poster anggaran, namun ke depan akan diupayakan melalui website kota sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2014-2019.

- b. **Belum optimalnya prosedur dalam pelayanan publik**, sebagian pelayanan belum menerapkan Standar Operasioal Prosedur (SOP) yang jelas, biaya dan waktu yang tidak pasti, sehingga masih terbukanya peluang untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;

4.1.2. Permasalahan bidang sosial budaya, KB, Pendidikan dan kesehatan

- a. Belum optimalnya implementasi penyelenggaraan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) serta pembinaan terhadap lembaga adat dan agama yang masih kurang. Hal ini berakibat pada belum berfungsinya dengan baik lembaga adat yang berpengaruh pada pemahaman sebagian warga Kota Padang Panjang terhadap falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.
- b. Di bidang pemberdayaan perempuan dan KB permasalahan yang ada antara lain pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi yang masih rendah, belum meratanya tingkat partisipasi KB pria. Pasangan usia subur yang tidak mengikuti program KB yang masih cukup tinggi, serta rendahnya kualitas kader penyuluh BKB, BKL dan KBR adalah bagian dari permasalahan yang perlu di cari solusinya.
- c. Untuk bidang kesehatan, saat ini kondisinya belum berada pada tatanan yang ideal, terutama dari aspek kualitas pelayanan kesehatan. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mencerminkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam bidang pelayanan kesehatan. Selain disebabkan oleh kurangnya personil dibidang kesehatan, yang paling krusial adalah masalah kualitas dan dan kuantitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat yang dianggap belum memadai. Di samping itu terkait dengan target MDGs untuk Kota Padang Panjang di bidang kesehatan angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan prevalensi/angka balita kurang gizi dan penyakit menular pada umumnya sudah mencapai angka yang relatif rendah di Kota Padang Panjang dibanding daerah lain di Indonesia. Namun tetap harus menjadi perhatian ke depan untuk dapat ditekan serendah-rendahnya.
- d. Di bidang pendidikan Kota Padang Panjang sudah sejak lama dijuluki sebagai Kota Pendidikan. Namun Kota Padang Panjang masih perlu terus membenahi pendidikan di seluruh satuan pendidikan, baik akses layanan, pemerataan maupun kualitas pendidikan. Upaya pembangunan pendidikan melalui wajar 12 tahun sudah dimulai lima tahun yang lalu dan upaya ini harus terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang. Permasalahan yang diidentifikasi di bidang pendidikan adalah belum meratanya kualitas lulusan pendidikan dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (dunia kerja). Kualitas pendidikan pada seluruh satuan pendidikan yang belum merata menyebabkan tingginya permintaan masyarakat untuk masuk sekolah dengan kualitas bagus di pusat kota, sedangkan di sisi lain masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan siswa terutama sekolah swasta dan sekolah yang berada di lingkup Kementerian Agama. Pemerataan kualitas pendidikan diperlukan sehingga pelayanan pendidikan tidak deskriminatif. Di samping itu pembangunan bidang pendidikan ditengarai belum sepenuhnya dapat membentengi moral siswa, serta belum mampu memunculkan jiwa kewirausahaan terhadap peserta didik. Terlihat jelas di tengah masyarakat mulai lunturnya pengetahuan peserta didik

terkait dengan kebudayaan lokal. Gejala menurunnya moral siswa terhadap lingkungannya maupun terhadap manusia-manusia di sekitarnya menjadi momok yang menghantui setiap orang tua murid di Kota Padang Panjang saat ini. Pendidikan Islami yang mengintegrasikan imtaq dan iptek, berwawasan lingkungan, berbudaya serta mengandung unsur enterprenuership menjadi sangat diperlukan dalam dunia pendidikan di Kota Padang Panjang saat ini.

4.1.3. Permasalahan Pengembangan Pasar dan Kawasan Perdagangan.

- a. Kondisi Pasar Pusat yang dahulu bernama Pasar Serikat Padang Panjang Batipuh X Koto yang berada di Kelurahan Pasar Baru yang sudah mengalami 3 (tiga) kali kebakaran di Tahun 2011 dan 2012, terlihat semakin semrawut, kotor dan tidak layak untuk disebut sebagai pasar yang higienis. Genangan air dimana-mana, saluran limbah yang tersumbat, batasan antara pedagang kaki-5 dan areal perparkiran yang tidak tertata baik, hingga minimnya lahan bagi parkir kendaraan pengunjung, semakin membuat Pasar Pusat tidak lagi menarik untuk dikunjungi sehingga berakibat pada berkurangnya transaksi. Upaya pembangunan pasar sudah dirintis sejak beberapa tahun terakhir, namun masih terus mengalami penundaan.
- b. Kondisi eksisting Pasar Induk Hasil Pertanian di Bukit Surungan tidak jauh berbeda dengan pasar pusat. Permasalahan utama di pasar ini adalah belum adanya kejelasan mengenai pengelolaan pasar tersebut. Disamping itu lahan untuk bongkar muat barang yang menjadi syarat utama bagi sebuah pasar induk masih sangat terbatas, areal bagi pedagang kaki-5 atau pedagang musiman/petani yang menggelar hasil panennya masih minim dan belum tertata rapi sehingga kesan semrawut masih dominan.
- c. Pasar Induk Hasil Pertanian yang didepannya berdiri terminal angkutan penumpang, dan disekitarnya telah berdiri beberapa bangunan pertokoan, merupakan sebuah kawasan yang semula direncanakan sebagai kawasan perdagangan. Namun penetapan sebagai sebuah kawasan belum didukung oleh sebuah regulasi formal apakah itu dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan Walikota, sehingga dimasa datang dikhawatirkan peruntukan lahan menjadi tidak terkontrol dan bisa saja berkembang untuk aktifitas yang tidak berkaitan dengan kawasan perdagangan.

4.1.4. Permasalahan dalam Pengembangan Kepariwisata.

Secara umum, keberadaan kawasan wisata air di areal Perkampungan Minangkabau di Kelurahan Silaing Bawah, telah mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Padang Panjang. Hal ini tentu berdampak positif bagi pengembangan kepariwisataan di Kota Padang Panjang. Untuk pengembangan dimasa datang, beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kepariwisataan di Kota Padang Panjang yaitu :

a. Pengembangan kawasan strategis pariwisata.

Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang juga merupakan tujuan akhir pembangunan ekonomi kepariwisataan pada dasarnya adalah meningkatkan jumlah wisatawan dan meningkatkan lama tinggal wisatawan di suatu daerah yang memiliki objek-objek wisata. Keberadaan objek wisata air yang berdampingan dengan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM) perlu didukung dengan menumbuhkan kawasan wisata baru. Kawasan gerbang kota arah ke harus ditata sedemikian rupa dan didukung oleh fasilitas penunjang lainnya sehingga menjadi kawasan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Saat ini dikawasan itu sudah ada gerbang kota yang bagus, jembatan kereta api yang melintang jalan raya, mushalla dan bukit berbunga. Namun belum tersedia rest area yang dilengkapi dengan fasilitas lainnya seperti tempat parkir, toilet umum, taman, gazebo dan tempat kuliner sehingga bisa menjadi salah satu alternatif persinggahan yang indah di jalur Padang – Padang Panjang.

b. Pembenahan objek-objek yang bernilai kepariwisataan.

Kota Padang Panjang memiliki potensi wisata yang cukup bervariasi. Namun belum semua tergarap dengan baik, di antaranya adalah Mesjid Asasi di Sigando sebagai objek wisata agama serta beberapa pesantren ternama yang memiliki historis sebagai tempat mendidik para pejuang dan ulama, kawasan SMA Super Unggul sebagai objek pendidikan. Pemandian Lubuk Mata Kucing di Pasar Usang memiliki air yang mengandung belerang dan sangat baik untuk mengobati penyakit kulit. Namun semua itu belum dikelola secara optimal sebagai objek-objek yang bernilai kepariwisataan.

c. Pembangunan Objek Wisata Baru.

Peluang untuk menumbuhkan dan membangun objek wisata baru perlu terus dilakukan, sepanjang hal itu memungkinkan dan peluangnya terbuka luas. Sekecil apapun peluang, untuk lokasi-lokasi yang bernilai wisata, perlu dilakukan sentuhan program pembangunan kepariwisataan, supaya lokasi tersebut bernilai dan layak untuk dijadikan sebagai objek wisata. Beberapa lokasi yang memungkinkan diantaranya kawasan sungai andok, yang saat ini menjadi tempat pembuangan sampah akhir. Di pinggang bukit di kawasan tersebut terdapat Goa Batu Batirai, yang sudah memiliki masterplan, namun lagi dibangun sebagai objek wisata yang pantas dikunjungi. Termasuk juga pengembangan dan pembangunan objek wisata air terjun tujuh tingkat di Kelurahan Silaing Bawah yang bisa dicapai dari gerbang kota.

d. Peningkatan Koordinasi Stakeholder Kepariwisataan.

Koordinasi antar pelaku pariwisata perlu terus ditingkatkan. Pemerintah Daerah sebagai pihak pengambil kebijakan perlu melakukan tindakan-tindakan yang akan mendorong keberhasilan pembangunan ekonomi di bidang kepariwisataan seperti mengeluarkan kebijakan kemudahan perizinan, pemberlakuan insentif terhadap proyek-proyek pariwisata (hotel, rumah makan, restoran, dll), meningkatkan kemitraan dengan biro-biro wisata atau kerjasama dengan masyarakat dan unsur pemerintah lainnya dalam mendukung tercapainya peningkatan kunjungan wisata, dengan menciptakan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat, sehingga Kota Padang Panjang menjadi kota yang nyaman dan aman untuk dikunjungi.

e. Menggalang kemitraan dengan daerah hinterland.

Sebagai sebuah kota yang terletak diantara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang harus mampu meningkatkan kemitraan dan kerjasama saling menguntungkan dengan daerah hinterland, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah.

Potensi kepariwisataan banyak terletak di lokasi yang berbatasan dengan daerah lain. Secara ekonomis hal ini sebenarnya akan sangat menguntungkan bagi Kota Padang Panjang, sebab kota ini sudah menjadi pusat perekonomian bagi daerah perbatasan. Bila Kota Padang Panjang ditata dengan lebih baik akan lebih menarik untuk dikunjungi oleh orang-orang dari luar Kota Padang Panjang. Menurut catatan sementara hampir 20 lokasi yang berpotensi untuk kepariwisataan berada di daerah perbatasan/hinterland, yang kalau dikelola dengan baik melalui kemitraan akan sangat menguntungkan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan dunia kepariwisataan di Kota Padang Panjang.

4.1.5. Permasalahan dalam Pengembangan Pertanian.

Mengelola usaha di bidang pertanian merupakan kegiatan yang cukup dominan dilakukan oleh masyarakat Kota Padang Panjang. Kondisi yang ada saat ini adalah tingginya tingkat kebutuhan akan lahan pertanian, sementara areal yang

layak untuk diolah sangat terbatas. Berikut adalah permasalahan yang muncul dalam pengembangan pertanian.

a. Perubahan fungsi lahan Pertanian.

Setiap tahun luas lahan pertanian di Kota Padang Panjang terus mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan. Diperkirakan lahan pertanian mengalami penyusutan rata-rata sebesar 6,6 Ha setiap tahun. Menurut data yang tercantum di RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032, pada tahun 2013 lahan sawah yang tersisa berkisar pada angka 556 Ha. Sebagian besar diantaranya berada di Kecamatan Padang Panjang Timur. Sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Barat, keberadaan lahan pertanian terutama sawah mulai hilang. Perubahan fungsi lahan ini, hendaknya menjadi pemikiran untuk mengembangkan usaha-usaha pertanian yang bernilai ekonomi tinggi, seperti pertanian organik untuk beberapa produk pangan atau palawija, pengembangan tanaman hias, atau jenis-jenis lain yang memang secara ekonomi akan menguntungkan bagi petani.

b. Peningkatan Pengetahuan Petani.

Minat generasi muda untuk berusaha di bidang pertanian, makin lama makin turun. Walaupun ada yang berminat, maka mereka terkendala dengan kepemilikan lahan yang sangat terbatas, sehingga kurang menguntungkan untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan. Sedangkan jika mereka menjadi petani pekerja, upah yang diterima belum sebanding dengan hasil panen yang akan diperoleh. Pada sisi lain, pengetahuan petani akan ilmu bertani modern masih minim, sehingga perlu dilakukan pembinaan, pembekalan, dan pelatihan-pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan sumber daya petani dalam merespons kemajuan usaha tani, salah satunya dengan meningkatkan peran kelembagaan tani.

c. Peningkatan Penggunaan Sarana Produksi Pertanian.

Pemanfaatan sarana produksi pertanian merupakan suatu keharusan untuk memenuhi standar pengelolaan produksi pertanian 6T, yaitu tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat cara, tepat dosis dan tepat sasaran. Sarana produksi tidak hanya bermasalah dari segi jenis dan jumlah, juga bermasalah dari segi kemampuan petani dalam mengoperasionalkannya.

d. Peningkatan Keanekaragaman Pangan.

Setiap tahun Kota Padang Panjang mengalami defisit beras sebanyak 700 Ton. Berarti cita-cita swasembada beras sudah lama tidak pernah tercapai. Kekurangan beras disubsidi oleh daerah-daerah tetangga. Bila dilihat dari kondisi lahan, memang setiap tahun terjadi penyusutan luas lahan pertanian. Untuk itu, ke depan perlu dilakukan pola keaneka ragaman pangan, untuk memperkecil ketergantungan masyarakat terhadap beras. Pola keanekaragaman pangan, sudah banyak berhasil dikembangkan di daerah lain, namun untuk Kota Padang Panjang perlu pembinaan dan penyuluhan yang intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat. Paling tidak mengurangi pola konsumsi pangan, dan tidak tergantung kepada beras.

e. Pengembangan Usaha Peternakan.

Usaha peternakan yang realistis untuk Kota Padang Panjang, adalah usaha peternakan yang memang sudah banyak digeluti masyarakat. Diantaranya usaha peternakan sapi perah, dengan produk ikutan susu segar dan produk hilir berbagai produk yang dihasilkan dari susu sapi. Kemudian peternakan itik, baik itik kering maupun itik basah, perlu digalakkan untuk menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga-keluarga miskin. Sedangkan untuk usaha peternakan kambing, memang butuh penanganan khusus, karena perlu strategi yang pas bila ingin hasilnya maksimal.

f. Pengembangan Usaha Perikanan.

Keberadaan Balai Benih Ikan hendaknya menjadi pelopor berkembangnya usaha perikanan darat di masyarakat, baik melalui usaha perikanan di kolam, maupun melalui pengembangan usaha perikanan air deras dengan memanfaatkan berbagai saluran air yang ada (saluran irigasi, bendang, sungai dengan karamba dan sejenisnya). Diharapkan bidang ini dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Dengan sasaran masyarakat miskin, beberapa model peternakan ikan bisa dilakukan, antara lain dalam bentuk kolam terpal, karamba atau bentuk lainnya.

4.1.6. Permasalahan dalam Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Bidang Industri.

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional seharusnya dapat menjadi rujukan terhadap berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan dunia usaha. Terlebih bagi para anggotanya yang mendukung keberadaan koperasi, sehingga berbagai masalah yang berkaitan dengan pengembangan usaha setidaknya dapat diakomodir oleh koperasi.

Untuk saat ini keberadaan koperasi di Kota Padang Panjang masih belum berani melakukan ekspansi usaha di luar bidang usaha yang digelutinya. Padahal peluang untuk menambah unit-unit usaha baru terbuka luas. Keberadaan koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional sangat jelas yakni untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan beberapa dorongan, penguatan permodalan, maupun perluasan kesempatan usaha bagi koperasi agar mampu berkembang dengan baik

Sedangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang juga merupakan salah satu tugas pokok pemerintah untuk melakukan pembinaan. Keberadaan industri kapur dan kulit di Kota Padang Panjang, juga belum optimal hasilnya, sehingga belum begitu berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Berikut permasalahan dibidang UMKM, Koperasi dan Industri antara lain :

a. Rendahnya Tingkat Penguasaan Teknologi

Penerapan teknologi untuk mendukung aktifitas produksi tidak dapat diabaikan. Walaupun sektor UMKM sangat banyak menyerap tenaga kerja, penyerapan teknologi dalam proses produksi harus dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dengan tetap mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja. Pemakaian mesin produksi akan mampu mempercepat proses produksi, dan akan dapat meningkatkan tampilan produksi.

b. Keterbatasan Jangkauan Pemasaran Produk

Pelaku UMKM dengan modal yang terbatas belum mampu menyerap dan menerapkan strategi pemasaran yang agresif. Keterbatasan penyerapan ini muncul dari berbagai faktor, diantaranya pengetahuan yang terbatas, kemampuan finansial yang minim, dan kemampuan membuka jaringan yang belum dikuasai secara baik. Untuk itu masih dibutuhkan peran pemerintah dalam memperluas jangkauan pemasaran untuk produk UMKM yang layak pasar.

c. Pengelolaan Administrasi Keuangan

Pengelolaan administrasi keuangan di kalangan UMKM disadari belum maksimal. Akibatnya akan sulit bagi UMKM untuk mengetahui perkembangan usaha yang dilakoninya. UMKM yang ada sulit mengetahui berapa sebenarnya profit yang sudah diperoleh untuk mengembangkan usahanya.

d. Keterbatasan Akses Permodalan

Meskipun saat ini cukup banyak skema kredit modal usaha yang dikembangkan pemerintah maupun swasta, namun secara umum pelaku UMKM, menjadikan persoalan permodalan sebagai hal yang harus dicarikan solusinya. Kredit modal usaha yang disertai bunga komersial, jelas tidak akan sanggup dipikul oleh pelaku UMKM. Namun modal usaha secara cuma-cuma yang akan dikucurkan

akan membuat pelaku usaha UMKM menjadi pihak yang akan terus tergantung dengan pemerintah.

e. Pengembangan industri kapur

Pengembangan industri batu kapur untuk Kota Padang Panjang merupakan tugas utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kembali potensi industri ini di kalangan dunia usaha. Kondisi lapangan, hanya ada 8 (delapan) tungku kapur yang masih terus beraktifitas, sementara belasan yang lain tidak ada kegiatan. Dilemanya adalah dalam Perda RTRW, hanya sekitar 2 Ha lahan yang dibolehkan untuk mengembangkan industri batu kapur, yaitu di lokasi tungku kapur yang ada saat ini. Upaya untuk mendatangkan bahan baku industri kapur dari daerah sekitar Kota Padang Panjang, yang secara fisik dan kandungan kimianya tidak banyak berbeda dengan potensi batu kapur yang ada di Bukit Tui, juga terkendala dengan belum jelasnya legalitas penambangan di lokasi-lokasi daerah tetangga tersebut.

f. Pengembangan Industri Kulit

Keberadaan UPTD Pengolahan Kulit dengan sumber daya manusia yang memadai dan aktifitas pengrajin kulit di dalam sentra Kerajinan Kulit di Kota Padang Panjang hendaknya dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Pengolahan kulit basah menjadi kulit siap pakai bagi industri kerajinan kulit dapat dimanfaatkan oleh pengusaha kulit basah yang ada. Begitu juga dengan sentra kerajinan kulit, hendaknya dapat meningkatkan kemampuan pengrajin kulit dalam membuat barang-barang jadi dari kulit.

4.1.7. Permasalahan lingkungan hidup, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pencemaran limbah domestik

Sungai sungai di Kota Padang Panjang saat ini berada pada status cemar berat (nilai total dan fecal colli berada diatas baku mutu kelas 4). Pemantauan pada sumber air tanah milik masyarakat memperlihatkan penurunan kualitas, terutama pencemaran bakteri Coli . Sumber pencemar air sungai antara lain limbah domestic pemukiman yang langsung dibuang tanpa pengolahan, limbah domestic pasar, industry dan pencemaran pupuk atau pestisida. Salah satu sumber pencemar air tanah yang dominan adalah septitank system resapan yang letaknya berdekatan dengan sumber air. Hasil pemantauan kualitas lingkungan menunjukkan status cemar berat pada sungai-sungai yang ada di Kota Padang Panjang. Dari segi kepadatan, Batang Bakarek-Karek dan Parik Rumpang yang melewati pusat kota menjadi sungai yang paling banyak menerima beban pencemaran. Kedua sungai ini juga melalui daerah pusat kota.

b. Berkurangnya daerah resapan air

Dengan semakin meningkatnya lahan terbangun, propersi area terbuka sebagai daerah resapan air pun semakin berkurang, tingkat *run off* pun semakin meningkat yang berpotensi menimbulkan genangan.

c. Belum optimalnya Infrastruktur jalan

Pola jaringan jalan di Kota Padang Panjang cenderung kosentrik (memusat) sehingga potensi kongesti cukup besar terutama pada daerah pusat kota. Jaringan jalan kota yang berkondisi baik adalah 83,68%, hal ini masih belum memenuhi arahan kebijakan RPJPD Kota Padang Panjang yaitu 95%. Rasio luas jalan terhadap luas wilayah Kota Padang Panjang adalah 3% dengan asumsi lebar jalan kota 10 meter. Hal ini masih dibawah standar yaitu 5% dari luas wilayah (Kepmen Kimpraswil No. 534 tahun 2001).

d. Belum optimalnya layanan penerangan jalan

Penerangan jalan umum di Kota Padang Panjang belum dapat terlaksana secara maksimal karena beberapa jalur penerangan sudah *overload*. Adanya masyarakat

yang mencuri arus untuk kepentingan pribadi dan golongan serta masih adanya beberapa gardu PJU yang belum memiliki meteran yang seharusnya sudah dipasang oleh pihak PLN. Permintaan lampu jalan banyak berasal dari masyarakat di lingkungan yang memiliki lebar jalan < 3m (tidak dapat dilewati oleh armada lampu jalan) sehingga diperlukan adanya mekanisme penerangan jalan khusus.

e. Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan drainase

Kondisi saluran/ drainase Kota Padang Panjang saat ini belum berfungsi dengan baik antara lain disebabkan oleh perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke saluran, kondisi saluran yang rusak, tersumbatnya gorong-gorong, diameter/dimensi saluran yang tidak sesuai, sedimentasi pada saluran tertutup sehingga dimensi saluran menjadi kecil, pola Aliran yang belum optimal, berkurangnya daerah resapan air dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan drainase.

f. Belum tersedianya gedung kantor yang representatif untuk seluruh SKPD.

Beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang belum memiliki gedung kantor yang representatif seperti BPBD, KLH, Porbudpar, Dinas PU dan Dinas Pendidikan, Dinas Sosnaker, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

g. Belum optimalnya pelayanan air minum.

Cakupan pelayanan air minum Kota Padang Panjang pada tahun 2012 adalah 78,11% (PDAM, 2013) yang sudah melebihi target MDG's, yaitu 68,87%. Cakupan pelayanan dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk. Jika dilihat dari dimensi wilayah, masih ada bagian wilayah Kota Padang Panjang yang belum mendapat layanan air bersih yang memadai. Permasalahan lainnya adalah keruhnya kualitas air PDAM pada saat hujan sebagai akibat dari dampak erosi di sumber mata air dan kemungkinan terjadinya kebocoran instalasi.

h. Belum optimalnya pengelolaan sampah secara 3R

Kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara 3R masih belum optimal dilihat dari belum terlihat adanya pengurangan signifikan dari jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Pemerintah Kota Padang Panjang sudah mulai menyediakan bak sampah terpilah, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Kendala lain adalah bahwa armada angkutan sampah Kota Padang Panjang belum menyediakan bak terpilah, sehingga sampah yang sudah terpilah di TPS pun akan menyatu kembali di armada sampah. Hal terpenting dalam pengelolaan sampah secara 3R ini adalah menciptakan perubahan perilaku masyarakat.

i. Belum tersedianya sarana pasar yang representatif

Kondisi pasar pada saat ini kurang memberi kenyamanan bagi pemakainya akibat tidak tertatanya PKL dan perparkiran, zonasi ruang yang tidak tegas dan sebagainya.

j. Keterbatasan lahan terbangun

Standar yang digunakan dalam analisis topografi ini adalah standar Mabbery (1972), dimana kemiringan lahan yang sesuai untuk kegiatan perkotaan adalah 0 – 15%. Adapun luas lahan yang berkemiringan 0 – 15% di Kota Padang Panjang adalah 548,19 Ha (18,44%) atau lebih kurang 1/5 dari luas wilayah Kota Padang Panjang. Berdasarkan hal tersebut dapat dinilai bahwa lahan potensial untuk pengembangan perkotaan hanya 18,22%. Adapun yang menjadi permasalahan adalah lahan berkemiringan 0 – 15% tersebut tidak dalam satu hamparan atau berupa spot-spot, sehingga akan menyulitkan dalam pengaturan pola ruangnya. Selain itu lahan berkemiringan 0 – 15%, sebagian besar berlokasi di Pusat Kota Padang Panjang yang sudah padat dengan kawasan terbangun.

k. Rendahnya Proporsi RTH

Kondisi existing, luas RTH Padang Panjang (termasuk publik dan privat baru) mencapai + 4%. Dalam RTRW Kota Padang Panjang sudah ditargetkan bahwa pada tahun 2032, proporsi RTH kota adalah 30% dari luas wilayah. Berdasarkan standar SPM PU, pada tahun 2014 25% dari target tersebut sudah harus tercapai.

4.1.8. Permasalahan Perhubungan dan Kominfo

a. Belum tersedianya sarana parkir yang optimal

Hampir seluruh infrastruktur perdagangan dan jasa dan kantor pemerintah di Kota Padang Panjang sudah menyediakan sarana parkir, namun jumlahnya masih belum optimal. Sebagian besar parkir yang ada di Kota Padang Panjang masih bersifat parkir di pinggir jalan (*on street parking*) yang mengganggu lalu lintas kendaraan di jalan raya.

b. Belum optimalnya fungsi terminal

Terminal Bukit Surungan yang direncanakan sebagai terminal tipe B masih belum dimanfaatkan secara optimal.

d. Masih belum optimalnya pengelolaan jaringan teknologi informasi Kota

Belum optimalnya pengelolaan jaringan teknologi informasi Kota menyebabkan website kota belum dapat dioptimalkan. Selain itu, belum semua SKPD memiliki sub domain dari website kota. Jaringan intranet existing masih menggunakan wireless yang memiliki keterbatasan dalam hal transfer data. Beberapa aplikasi seperti teleconference, cctv, dan lain-lain tidak optimal dilaksanakan jika masih menggunakan wireless.

4.1.9. Kesejahteraan Sosial dan Kemiskinan

Pada hakikatnya tujuan akhir pembangunan Kota Padang Panjang adalah mewujudkan masyarakat Kota Padang Panjang yang sejahtera. Pembangunan yang sedang berjalan saat ini memang masih belum sampai pada tujuan akhir yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial, karena sebagian masyarakat Kota Padang Panjang masih berada di bawah garis kemiskinan. Masih terdapat ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah dan berada di bawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan ini perlu menjadi prioritas dalam pembangunan lima tahun ke depan (2013-2018).

4.2. ISU STRATEGIS

Pada hakikatnya isu strategis merupakan unsur penting yang dapat dimanfaatkan guna mendorong proses pembangunan pada suatu daerah. Jika isu strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan optimal maka akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari permasalahan pokok pembangunan Kota Padang Panjang sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, berikut ini beberapa isu strategis Kota Padang Panjang :

1. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu strategis yang pertama di Kota Padang Panjang Paradigma pemerintahan disadari telah bergeser dari *rule government* menjadi *good governance*. Membangun *good governance* bukan hanya semata-mata memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun etika, sikap dan perilaku penyelenggara pemerintahan.

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang dimaksud meliputi aspek transparansi pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik,

ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Reformasi birokrasi adalah upaya pokok yang perlu segera dilakukan dalam periode 5 tahun mendatang.

Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari tata kelola sumber daya manusianya, karena sebaik apapun sistem yang di buat, kalau SDM tidak memadai tetap akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada *output* dan *outcome*. Jadi manajemen sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) haruslah prima. Baru setelah itu pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda sebuah pemerintahan yang tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap pembangunan.

Selanjutnya Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Untuk itu kesiapan beberapa faktor pendukung penerapan teknologi informasi berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi serta partisipasi *stakeholder* lainnya.

Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan kelembagaan pemerintah daerah di Kota Padang Panjang, juga disebabkan oleh struktur organisasi pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menganut sistem hemat struktur kaya fungsi. Kemudian permasalahan yang juga muncul adalah masih adanya sebagian tupoksi antar SKPD yang saling tumpang tindih. Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga masih belum optimal. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, profesionalisme serta kesejahteraan yang terbatas menyebabkan belum optimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, ditunjukkan oleh belum fokus dan optimalnya pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah, belum efektifnya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional.

Akhirnya, reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Reformasi Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir dan pengembangan budaya kerja.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Di bidang pendidikan perlu dilakukan peningkatan kualitas melalui pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur dengan peningkatan manajemen pendidikan, mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat disemua jalur, jenjang dan satuan pendidikan. Pembangunan pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna dan pemerintah daerah untuk mencapai kualitas sumberdaya manusia Kota Padang Panjang yang berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan isu strategis di bidang kesehatan adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara lebih mandiri disamping peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

3. Kemiskinan, Pengangguran dan Peningkatan Daya Saing Kota

Angka pengangguran yang cukup tinggi menyebabkan angka kemiskinan cukup besar. Untuk itu perlu peningkatan efisiensi serta perbaikan dalam penyediaan lapangan kerja guna peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga hal tersebut secara langsung dapat menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan daya saing kota. Selain itu, masalah kemiskinan juga masih menjadi isu strategis baik daerah maupun nasional, karena bagaimanapun juga hingga saat ini masih banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, lima tahun ke depan, kemiskinan tetap menjadi isu strategis Kota Padang

Panjang, sehingga nantinya berbagai program dan kegiatan diluncurkan untuk menekan angka kemiskinan tersebut.

Dari sisi daya saing Kota Padang Panjang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir meskipun dunia mengalami krisis ekonomi yang menakutkan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk asal Kota Padang Panjang masih sulit bersaing di pasar lokal maupun nasional. Keterbatasan modal dan rendahnya kualitas SDM pelaku ekonomi di Kota Padang Panjang diperkirakan menjadi salah satu penyebabnya. Bidang kepariwisataan yang mulai menggeliat dalam beberapa tahun terakhir masih perlu pembenahan disana sini dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing ekonomi Kota ini di tingkat regional, nasional maupun internasional. Di samping itu Kota Padang Panjang juga harus mewaspadai pemberlakuan area perdagangan bebas di kalangan negara-negara ASEAN pada tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang berarti akan terjadi persaingan terbuka produk Indonesia dengan produk negara ASEAN lainnya di pasar-pasar lokal maupun pasar Asia Tenggara mulai tahun 2015. Tidak ada kata lain untuk menghadapinya adalah dengan peningkatan daya saing kota.

4. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh penurunan kualitas air sungai, rendahnya proporsi Ruang Terbuka Hijau, berkurangnya area resapan, rendahnya proporsi Ruang Terbuka Hijau dan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Penurunan kualitas lingkungan di Kota Padang Panjang mengindikasikan pengelolaan lingkungan yang belum optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya terpadu dan perubahan perilaku yang mendasar dari masyarakat. Upaya ini perlu diperkuat dengan mekanisme pengawasan dan Penegakan Peraturan (Perda Trantibum dan Perda Bangunan).

5. Pembenahan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota

Infrastruktur kota dalam konteks ini adalah segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang kegiatan masyarakat Kota Padang Panjang sehingga dapat menekan inefisiensi dari aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur kota yang baik di diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Kondisi saat ini sebagian infrastuktur kota Padang Panjang belum sesuai dengan harapan misalnya dalam hal penyediaan air bersih yang belum menyentuh seluruh warga kota, tempat parkir yang sangat terbatas seeperti di pasar pusat, terminal yang belum berfungsi dengan baik, sistem drainase yang tidak baik sehingga sebagian wilayah kota Padang Panjang tergenang air jika terjadi hujan yang cukup lama, sistem air limbah kota yang belum terpadu, tempat pembuangan sampah yang belum dikelola dengan baik, infrastruktur kawasan perdagangan dan jasa seperti pasar pusat yang tidak layak lagi dan tidak sehat, pasar sayur Bukit Surungan yang belum jelas status pengelolaannya adalah bagian dari isu strategis infrastruktur kota Padang Panjang yang perlu di di benahi 5 tahun kedepan. Khusus untuk infrastruktur sanitasi diperlukan adanya perubahan perilaku mendasar dari masyarakat seperti dalam pengelolaan sampah diperlukan perubahan paradigma “kumpul-angkut-buang” menjadi 3R. Perubahan perilaku tersebut dapat dilakukan melalui edukasi secara berkesinambungan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur adalah ketersediaan master plan untuk masing-masing sektor.

6. Penataan Ruang Kota

Sebagai kota yang cukup strategis dan terletak di jalur perlintasan, namun dibatasi oleh luas wilayah yang sangat kecil, pertambahan penduduk adalah sesuatu yang sulit dihindari. Untuk mendukung hal ini, tentu saja diperlukan kebijakan penataan ruang kota yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh

stakeholder kota. Pemerintah Kota Padang Panjang harus menyediakan sarana dan prasarana perkotaan dan aksesibilitas yang merata ke seluruh wilayah kota. Oleh sebab itu, kedepan diperlukan :

- a. Pengembangan ruang kota yang dapat menampung fungsi kota sekaligus mampu menjadi ciri khas Kota Padang Panjang, baik untuk fungsi komersial, pendidikan, pariwisata, industri, pemerintahan maupun permukiman;
- b. Peningkatan nilai ekonomi kota melalui pengembangan fungsi-fungsi ekonomi khusus seperti pengembangan kawasan industri kapur, kawasan industri kulit, makanan ringan, destinasi wisata baru, sentra oleh-oleh serta pengembangan jasa pendukung pariwisata lainnya.

7. Pemahaman dan implementasi pengamalan agama dan budaya

Sebagai Kota yang berjuluk Serambi Mekah, Kota Padang Panjang perlu didukung oleh kondisi masyarakat yang memiliki pemahaman yang utuh tentang agama, budaya dan adat. Pemahaman agama, budaya dan adat tersebut ditujukan untuk meningkatkan akhlak dan moral masyarakat kota. Ini menjadi isu strategis yang sangat penting untuk ditangani ke depan karena walaupun selama ini kegiatan keagamaan dan budaya telah terlihat berkembang dengan baik di tengah masyarakat, namun dalam implementasinya belum mampu untuk meningkatkan akhlak dan moral semua masyarakat. Aspek ini perlu diberikan penekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah dengan basis sumber daya manusia yang agamais sebagaimana diharapkan dalam jangka panjang.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa setiap Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 20 tahun. RPJPD tersebut disusun mengacu pada RPJP Nasional dan disesuaikan dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah. RPJPD kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang juga merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. RPJMD Kota Padang Panjang 2013-2018 selain merupakan penjabaran visi dan misi Walikota terpilih yang telah dilantik tanggal 1 Oktober 2013, juga mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025. Di samping itu, penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 juga mempedomani capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun sebelumnya baik berupa potensi maupun permasalahan, serta merupakan komitmen Pemerintah Kota Padang Panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.1. VISI

Visi pembangunan jangka menengah pada dasarnya merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka 5 tahun ke depan. Dengan kata lain, visi pembangunan jangka menengah adalah merupakan cita-cita warga Kota Padang Panjang yang diinginkan di masa 5 tahun mendatang.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 mengacu pada visi pembangunan jangka panjang daerah yang tertuang dalam RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2005-2025. Adapun visi pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 adalah "Kota Yang Maju, Lestari dan Islami". RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 adalah merupakan pembangunan jangka menengah ke-2 setelah pembangunan jangka menengah tahun 2008-2013.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. Untuk itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2010-2014, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah. Adapun Visi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan". Sejahtera mencerminkan terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demokrasi mencerminkan terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia, dan keadilan mencerminkan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Sedangkan Misi Pembangunan Nasional adalah 1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, 2) memperkuat pilar demokrasi, dan 3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Visi dan Misi pemerintah Tahun 2010-2014 tersebut dijabarkan lebih operasional ke dalam sebelas Prioritas

Nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, yang merupakan tahap ke dua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 mengusung misi “Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Berbudaya”. Visi ini merupakan penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2025 yaitu “Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025”.

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJP Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan pula 5 misi utama pembangunan daerah, meliputi : 1)Mewujudkan Kehidupan Agama dan Budaya Berdasarkan Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; 2)Mewujudkan Sistem Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik; 3)Mewujudkan Sumberdaya Insani yang Berkualitas, Amanah dan Berdaya Saing Tinggi; 4)Mewujudkan Ekonomi Produktif dan Mampu Bersaing di Dunia Global; 5)Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Sedangkan untuk RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 mengusung 5 misi, yaitu : 1)Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”; 2)Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional; 3)Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, dan berkualitas tinggi; 4)Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global; dan 5)Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dengan mempertimbangkan Visi RPJMN, RPJPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RPJPD Kota Padang Panjang tahun 2005-2025, capaian pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya, potensi, kondisi, peluang dan tantangan, maka ditetapkanlah visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 yaitu :

“PADANG PANJANG AMANAH, AMAN DAN SEJAHTERA”

Berikut ini penjabaran dari visi pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang tersebut :

- ☑ Padang Panjang **Amanah** memiliki maknapemerintahan daerah dan masyarakat Kota padang panjang mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku; Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan amanah yang dipercaya masyarakat dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik secara terencana dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang relevan;
- ☑ Padang Panjang **Aman** memiliki maksud tidak hanya aman dari tindak kriminalitas, tapi yang dimaksud dengan aman lebih luas lagi, yaitu : masyarakat sudah terlepas dari persoalan kebutuhan dasar serta lebih mandiri; Pemerintah Kota Padang Panjang dalam melaksanakanpemerintahan terutama terkait dengan hak-hak masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan tujuan pembangunan daerah dilakukan secara aman dan tentram;
- ☑ Kehidupan yang **Sejahtera** menggambarkan kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai; Pemerintah Kota Padang Panjang dalam

melaksanakan pembangunan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian visi Padang Panjang Amanah, Aman dan Sejahtera mengandung makna sebagai kota yang mencerminkan unsur pemerintahan dan masyarakatnya mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan norma, budaya dan aturan yang berlaku, terpenuhinya kebutuhan dasar lebih mandiri sehingga menggambarkan keadaan masyarakatnya yang makmur, sejahtera dan damai.

5.2. Misi

Misi pada dasarnya merupakan upaya yang ditetapkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian visi yang di kemukakan di atas, serta untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditetapkanlah beberapa misi utama yang akan dilaksanakan dalam periode 5 tahun mendatang. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN;
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas dan Islami;
3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
4. Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota; dan
6. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Berbudaya.

5.3. Tujuan

Pada dasarnya tujuan mengandung makna sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Berikut ini adalah penjabaran tujuan dari masing-masing misi.

Misi Pertama adalah Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien
- (2) Mewujudkan aparatur pemerintahan yang amanah dan anti KKN

Misi Kedua adalah Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami memiliki tujuan sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kualitas pendidikan
- (2) Membangun kecerdasan Islami pada usia dini
- (3) Meningkatkan kualitas SDM yang Islami
- (4) Mendorong perkembangan layanan perguruan tinggi
- (5) Mewujudkan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan/Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi, dunia industri

Misi Ketiga yakni Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk :

- (1) Peningkatan pelayanan berbasis masyarakat
- (2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar
- (3) Peningkatan status RSUD dari type C menjadi type B

Misi Keempat yaitu Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah bertujuan untuk :

- (1) Mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan usaha kreatif berbasis industri, perdagangan, pertanian, pariwisata dan jasa
- (2) Meningkatkan daya saing produk daerah untuk menghadapi pasar global.
- (3) Mengembangkan kawasan ekonomi yang terintegrasi.

Misi Kelima yakni Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Meningkatkan infrastruktur kota.
- (3) Meningkatkan kenyamanan kota sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan lahan.

Misi Keenam yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- (2) Peningkatan potensi pemuda dan olahraga.
- (3) Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
- (4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Meningkatkan kepedulian masyarakat mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

5.4. Sasaran

Sasaran mengandung makna sebagai penjabaran dari tujuan, merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan lima tahun ke depan yaitu sebagai berikut :

1. Misi Pertama yaitu Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN diarahkan pada sasaran :

- (a) Meningkatnya tata laksana pengelolaan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien.
- (b) Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dan berkualitas.
- (c) Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku.
- (d) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (e) Dikembangkannya sistem rekrutmen, promosi dan mutasi yang transparan dan kompetitif sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (f) Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi.

2. Misi Kedua yaitu Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami diarahkan pada sasaran :

- (a) Meningkatnya angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas.
- (b) Tuntasnya program wajar 12 tahun.
- (c) Terbangunnya kekuatan pendidikan dengan standar nasional.
- (d) Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- (e) Meningkatnya kecerdasan anak usia dini.
- (f) Terbangunnya jiwa enterpreneurship Islam siswa.
- (g) Terbangunnya konsep pendidikan yang bernuansa Islami.

- (h) Terfasilitasinya layanan pendidikan tinggi.
- (i) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan.

3. Misi Ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat diarahkan pada sasaran:

- (a) Meningkatnya Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (b) Meningkatnya status gizi masyarakat.
- (c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar.
- (d) Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
- (e) Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM RSUD.
- (f) Meningkatnya sarana dan prasarana RSUD.
- (g) Meningkatnya mutu pelayanan

4. Misi Keempat yaitu Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah diarahkan pada sasaran:

- (a) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi
- (b) Meningkatnya pendapatan masyarakat
- (c) Berkembangnya industri pariwisata
- (d) Meningkatnya produktivitas petani
- (e) Berkembangnya sektor UMKM
- (f) Meningkatnya produksi industri kapur
- (g) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
- (h) Meningkatnya nilai investasi
- (i) Pemberdayaan pelaku IKM unggulan
- (j) Meningkatnya kemudahan akses permodalan bagi UMKM dan Koperasi
- (k) Berkembangnya sektor koperasi
- (l) Meningkatnya daya saing industri kulit
- (m) Terbentuknya kawasan strategis pariwisata
- (n) Optimalnya kawasan perdagangan Bukit Surungan
- (o) Berkembangnya kawasan pasar pusat
- (p) Meningkatnya iklim usaha atau perdagangan yang kondusif
- (q) Terbentuknya kawasan pertanian terpadu

5. Misi Kelima yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota diarahkan pada sasaran:

- (a) Terpeliharanya proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap luas wilayah
- (b) Berkurangnya timbulan sampah
- (c) Meningkatnya area resapan air
- (d) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkotaan
- (e) Terwujudnya kawasan perkotaan yang nyaman sesuai dengan peruntukannya
- (f) Meningkatkan ketersediaan perumahan bagi masyarakat

6. Misi Keenam yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya diarahkan pada sasaran:

- (a) Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat
- (b) Meningkatnya kemandirian organisasi pemuda
- (c) Meningkatnya prestasi olahraga
- (d) Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK
- (e) Meningkatnya kegiatan seni dan budaya
- (f) Meningkatnya pemberdayaan perempuan
- (g) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- (h) Menekan angka kelahiran

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan perlu disusun strategi yang berisikan program-program indikatif, serta kebijakan yang merupakan arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan periode 2013-2018.

6.1 MISI 1 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN ANTI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak luput dari keterlibatan seluruh stakeholders. Untuk menjamin terwujudnya pembangunan daerah, perlu adanya komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah, antara lain : partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, dan profesionalisme.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan periode 5 (lima) tahun ke depan, maka perlu penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan profesional, sehingga pembangunan yang dilaksanakan melalui program-program pembangunan dapat dilaksanakan secara amanah dan jauh dari praktek-praktek yang menyimpang dari koridor hukum serta indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

6.1.1 Strategi untuk Misi 1

Untuk mencapai sasaran pada Misi 1 ini, perlu ditetapkan strategi sebagai berikut :

- 1) Penerapan sistem dan prosedur kerja yang mantap dan bersinergi antar SKPD.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta pengembangan aparatur daerah melalui pendidikan dan pelatihan dengan kompetensinya.
- 3) Meningkatkan penegakan hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan daerah
- 5) Pengembangan sistem rekrutmen, promosi dan mutasi aparatur.
- 6) Peningkatan kualitas pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tupoksi.

6.1.2 Arah Kebijakan Untuk Misi 1

Untuk mendukung pelaksanaan strategi pada Misi 1, maka diperlukan rumusan arah kebijakan yang akan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan selama periode 2013-2018.

Arah Kebijakan untuk melaksanakan strategi pada Misi 1 adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan menerapkan SPM, membangun dan mengembangkan sistem dan manajemen pelayanan publik, sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Meningkatkan pengawasan preventif untuk pencegahan tindak korupsi
- 3) Mengembangkan dan memfasilitasi Diklat yang berbasis kompetensi serta menyusun sistem pemberian remunerasi bagi aparatur untuk menumbuhkan disiplin dan etos kerja
- 4) Penegakan perda
- 5) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi yang optimal dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan serta meningkatkan akurasi data dalam setiap proses perencanaan pembangunan
- 6) Mendorong sistem promosi dan mutasi aparatur yang berbasis kompetensi (*the right men on the right job*)
- 7) Menerapkan sistem administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi
- 8) Mendorong penerapan pelaksanaan tupoksi

6.2 MISI 2 : MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN ISLAMI

Manusia sebagai makhluk individu memiliki potensi fisik dan non fisik. Dengan potensi tersebut manusia mampu berkarya sehingga dapat berguna baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat luas. Untuk meningkatkan potensi ini diperlukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Walaupun berdasarkan evaluasi pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang pada periode sebelumnya cukup baik, namun kebutuhan pelayanan akan pendidikan selalu bergerak dinamis seiring dengan perkembangan jaman, karena meyangkut investasi dan kondisi kehidupan dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu pendidikan senantiasa memerlukan upaya peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat.

6.2.1 Strategi untuk Misi 2

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mewujudkan sasaran pada Misi 2, dirumuskan strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Perluasan layanan Pendidikan
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan
- 3) Pemantapan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 standar pendidikan nasional
- 4) Peningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
- 5) Peningkatkan PAUD menyeluruh dan terintegrasi
- 6) Menyediakan layanan pembinaan dan pengembangan enterpreneurship pada seluruh satuan pendidikan
- 7) Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya dan ajaran Islam pada seluruh satuan pendidikan
- 8) Mendorong terwujudnya layanan pendidikan tinggi
- 9) Penguatan peran dan fungsi masyarakat selaku stakeholder pendidikan
- 10) Menyusun regulasi tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan

6.2.2 Arah Kebijakan Untuk Misi 2

Arah kebijakan untuk melaksanakan starategi pada Misi 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Perluasan layanan Pendidikan
- 2) Peningkatkan kepastian layanan penyelenggara pendidikan
- 3) Peniadaan pungutan dalam bentuk apapun di sekolah
- 4) Beasiswa bagi Keluarga Miskin
- 5) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 standar pendidikan
- 6) Mengembangkan kerjasama internasional di bidang pendidikan
- 7) Peningkatan kualifikasi dan kopetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- 8) Perluasan layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan
- 9) Pembinaan dan pengembangan enterpreneurship pada seluruh satuan pendidikan
- 10) Penerapan konsep pendidikan yang bernuansa Islami
- 11) Penyediaan regulasi dan fasilitasi layanan perguruan tinggi
- 12) Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan

6.3 MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Jika tingkat kesehatan masyarakat rendah, maka akan terjadi penurunan kreatifitas dan produktifitas masyarakat, sehingga akan berdampak pada sektor pembangunan lainnya. Untuk itu diperlukan upaya untuk terus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara merata, baik upaya yang bersifat preventif maupun kuratif.

6.3.1 Strategi untuk Misi 3

Untuk mewujudkan sasaran pada Misi 3 ini, perlu dirumuskan strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Meningkatkan penegakkan Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok

- 3) Meningkatkan penegakkan Perda Tata Bangunan
- 4) Meningkatkan peran posyandu balita, lansia dan posbindu PTM dan kelurahan siaga
- 5) Mengoptimalkan forum kota sehat
- 6) Meningkatkan pola pikir dan perilaku sadar gizi masyarakat
- 7) Mengoptimalkan tenaga kesehatan
- 8) peningkatan sarana dan prasarana sesuai standar
- 9) Menambah tenaga kesehatan di RSUD sesuai standar type B
- 10) Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan sesuai kompetensi
- 11) Memenuhi sarana dan prasarana RSUD sesuai standar type B
- 12) Penyusunan SOP yang jelas bagi seluruh jenis pelayanan di RSUD

6.3.2 Arah Kebijakan Untuk Misi 3

Arah kebijakan untuk melaksanakan starategi pada Misi 3 adalah sebagai berikut :

- 1) Mengintensifkan sosialisasi kesehatan pada masyarakat
- 2) Meningkatkan kualitas penyuluhan melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh
- 3) Menegakkan Perda Kawasan Tanpa Rokok
- 4) Menegakkan Perda Tata bangunan
- 5) Menciptakan keluarga sadar gizi masyarakat
- 6) Mengadakan tenaga kesehatan
- 7) On job training
- 8) Relokasi dan tambahan tenaga kesehatan
- 9) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
- 10) Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di RSUD sesuai standar RS type B
- 11) Mengadakan sarana dan prasarana RSUD sesuai standar type B
- 12) Sosialisasi SOP pelayanan RSUD kepada seluruh masyarakat
- 13) Penerapan dan pengawasan pelaksanaan SOP oleh seluruh personil di RSUD

6.4 MISI 4 : MENGOPTIMALKAN POTENSI DAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan upaya yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain arah pembangunan bidang ekonomi adalah mengupayakan agar pendapatan masyarakat meningkat secara merata dan diiringi dengan tingkat taraf hidup dan kesejahteraan yang lebih baik.

Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Kota Padang Panjang, maka perlu dioptimalkan semua potensiyang dimiliki Kota Padang Panjang sehingga mampu meningkatkan daya saing ekonomi daerah Kota Padang Panjang.

6.4.1 Strategi untuk Misi 4

Untuk mewujudkan sasaran pada Misi 4 ini, perlu dirumuskan strategi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat
- 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat
- 3) Mengupayakan peningkatan kunjungan wisatawan
- 4) Mengupayakan peningkatan waktu rata-rata lama menginap wisatawan
- 5) Penerapan inovasi teknologi produksi serta memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha
- 6) Optimalisasi kelembagaan UMKM
- 7) Mendorong berkembangnya sektor UMKM
- 8) Penegasan batas kawasan hutan lindung yang berbatasan dengan lokasi industri
- 9) Menyesuaikan dokumen perencanaan jangka panjang dan tata ruang wilayah
- 10) Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi investor
- 11) Peningkatan kualitas produk, kemasan dan jaringan pemasaran IKM
- 12) Meningkatkan peran lembaga penyaluran dana bergulir

- 13) Mendorong UMKM dan Koperasi mengakses modal dari lembaga penyaluran dana bergulir
- 14) Operasional BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
- 15) Menumbuhkan koperasi-koperasi yang beranggotakan pelaku usaha sejenis (sektor riil)
- 16) Mengoptimalkan kinerja koperasi
- 17) Sinergitas sektor hulu dan hilir industri kulit
- 18) Membangun kawasan strategis pariwisata yang didukung oleh stakeholder terkait dengan berbasis pada wisata alam, budaya lokal, kuliner dan produk unggulan daerah
- 19) Mengoptimalkan pengelolaan PIHP
- 20) Penataan kawasan perdagangan Bukit Surungan yang dititikberatkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung
- 21) Penataan kawasan pasar pusat
- 22) Mengoptimalkan kinerja pengawasan
- 23) Pembentukan UPTD kemetrolagian
- 24) Mensinergikan pengembangan sektor pertanian, perternakan dan perikanan dalam satu kawasan

6.4.2 Arah Kebijakan Untuk Misi 4

Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada Misi 4 adalah sebagai berikut :

- 1) Percepatan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat
- 2) Membangun dan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi kota sesuai RTRW
- 3) Optimalisasi pemasaran pariwisata
- 4) Membenahi objek wisata yang telah ada dan mengembangkan objek wisata baru
- 5) Intensifikasi pertanian
- 6) Peningkatan kelembagaan UMKM
- 7) Fasilitasi pelaku UMKM sesuai bidang usaha
- 8) Intensifikasi koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Propinsi dan Pusat terkait pengembangan industri kapur
- 9) Melaksanakan revisi RPJP dan RTRW
- 10) Menyusun Perda tentang investasi
- 11) Meningkatkan sarana prasarana produksi IKM unggulan
- 12) Meningkatkan motivasi pelaku IKM unggulan
- 13) Mengembangkan desain kemasan untuk berbagai produk kemasan
- 14) Mengembangkan model-model promosi dan mengoptimalkan kerjasama pemasaran
- 15) Mengembangkan pola kemitraan antar pelaku usaha
- 16) Operasional BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
- 17) Penambahan modal BLUD UPTD pengelolaan dana bergulir
- 18) mendorong kelompok UMKM untuk mendirikan koperasi
- 19) meningkatkan pembinaan terhadap koperasi yang telah terbentuk
- 20) Mendorong penerapan pola syariah dalam koperasi
- 21) Optimalisasi UPTD Pengolahan Kulit
- 22) Peningkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit
- 23) Mengintensifkan promosi dan pemasaran produk kulit
- 24) Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan kepariwisataan
- 25) Memberikan insentif investasi sesuai kewenangan daerah
- 26) Meningkatkan peran serta dan fungsi stakeholder dalam pengelolaan PIHP
- 27) Mengoptimalkan fungsi terminal, memperlancar arus lalu lintas orang dan barang
- 28) Menyediakan sarana prasarana pendukung kawasan perdagangan
- 29) Revitalisasi pasar pusat
- 30) Penyempurnaan aturan dan sistem pengelolaan pasar
- 31) Konsistensi penerapan regulasi perlindungan konsumen

- 32) Penyusunan regulasi mengenai pembentukan UPTD Kemetrolgian
- 33) Menyediakan sarana prasarana, SDM serta meningkatkan mutu dan olahan produk pertanian

6.5 MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR KOTA

Infrastruktur merupakan salah satu faktor pendukung dalam pembangunan daerah. Tanpa adanya infrastruktur yang layak dan memadai, maka pembangunan sektor lainpun tidak akan terlaksana dengan optimal. Disamping itu, pesatnya perkembangan jaman, berdampak pada pesatnya pembangunan infrastruktur perkotaan, yang salah satunya ditandai dengan semakin pesatnya pembangunan bangunan, baik bangunan perumahan maupun bangunan gedung lainnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengurangan lahan terbuka, sehingga akan memberi dampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang berupaya untuk meningkatkan infrastruktur kota yang disertai dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta pola ruang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang.

6.5.1 Strategi untuk Misi 5

Untuk mewujudkan sasaran pada Misi 5 ini, dirumuskan strategi sebagai berikut :

- 1) Pengembangan RTH
- 2) Melaksanakan Penghijauan
- 3) Melaksanakan edukasi pengelolaan sampah 3R
- 4) Mengembangkan sistem resapan air
- 5) Meningkatkan aksesibilitas ke seluruh kawasan di wilayah Kota
- 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pemerintahan
- 7) Menerapkan sanitasi yang layak bagi masyarakat
- 8) Peningkatan dan pemeliharaan kualitas prasarana dan sarana sistem irigasi
- 9) Mengembangkan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
- 10) Meningkatkan struktur jaringan jalan yang sistematis
- 11) Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum
- 12) Peningkatan pelayanan dan fasilitas perpajakan
- 13) Peningkatan sarana dan prasarana serta kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- 14) Peningkatan fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya
- 15) Membangun prasarana hunian massal

6.5.2 Arah Kebijakan Untuk Misi 5

Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada Misi 5 adalah sebagai berikut :

- 1) Penambahan RTH
- 2) Pelaksanaan penghijauan
- 3) Pelaksanaan edukasi pengelolaan sampah 3R
- 4) Penyediaan ATM Sampah
- 5) Penambahan area resapan air
- 6) Pengembangan jaringan jalan dan jembatan
- 7) Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan yang representatif
- 8) Pengelolaan air bersih
- 9) Pengelolaan sampah
- 10) Pengelolaan limbah
- 11) Pengelolaan drainase
- 12) Pengelolaan irigasi
- 13) Membangun infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
- 14) Meningkatkan kualitas fasilitas lalu lintas
- 15) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi umum
- 16) Penataan fasilitas perpajakan

- 17) Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- 18) Penyusunan Rencana Pemanfaatan Ruang
- 19) Penyediaan fasilitas umum untuk hunian massal

6.6 MISI 6 :MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERBUDAYA

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya bertujuan untuk : 1) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, 2) Peningkatan potensi pemuda dan olahraga, 3) Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya, 4) Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

6.6.1 Strategi untuk Misi 6

Untuk mewujudkan sasaran pada Misi 6 ini, dirumuskan strategi sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan masyarakat
- 2) Meningkatkan keterpaduan dan ketepatsasaran program penanggulangan kemiskinan
- 3) Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha
- 4) Meningkatkan kemandirian organisasi pemuda dan olahraga
- 5) Meningkatkan pembinaan olahraga
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
- 7) Memperkuat peran kelembagaan keagamaan dan sosial
- 8) Mengembangkan kegiatan seni dan budaya
- 9) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 10) Memberikan stimulan kepada kelurahan dengan tingkat partisipasi yang tinggi dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan
- 11) Mengoptimalkan kelembagaan masyarakat
- 12) Melaksanakan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan (P3MK)
- 13) Memberikan edukasi terhadap keluarga kecil untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera
- 14) mengerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB
- 15) meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB

6.6.2 Arah Kebijakan Untuk Misi 6

Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada Misi 6 adalah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesos
- 2) Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil
- 3) meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan
- 4) Mengganti pola bantuan bergulir sebagai pengganti bantuan lepas untuk meningkatkan kemandirian
- 5) Meningkatkan peran dan fungsi PSKS, kelembagaan sosial dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 6) Menggerakkan organisasi pemuda
- 7) Menggalakkan olahraga ditengah masyarakat
- 8) Membangun pusat kegiatan olahraga
- 9) Mendorong optimalisasi fungsi mesjid
- 10) Meningkatkan peran pemuka agama dan adat dalam masyarakat
- 11) Penyusunan dan penetapan Perda tentang Adat dan Budaya Daerah
- 12) Meningkatkan peran lembaga LK3 dan P2TP2A
- 13) Membangun pusat kegiatan keagamaan
- 14) Mendorong pengembangan kelembagaan seni dan budaya
- 15) Memasukkan muatan seni dan budaya kedalam kurikulum sekolah
- 16) Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
- 17) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak
- 18) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan
- 19) Pembinaan kelembagaan masyarakat

- 20) Menerbitkan perwako tentang P3MK
- 21) Meningkatkan edukasi masyarakat untuk keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- 22) mengoptimalkan gerakan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB
- 23) meningkatkan kualitas penyuluh melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh
- 24) meningkatkan partisipasi keluarga melalui ketahanan keluarga dengan mengaktifkan BKB, BKR, BKL dan UPPKS

Untuk lebih jelasnya, keterkaitan tujuan, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KOTA PADANG PANJANG

Visi : Padang Panjang Amanah, Aman Dan Sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 1: MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN ANTI KKN			
1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien	1. Meningkatnya Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Penerapan sistem dan prosedur kerja yang mantap dan bersinergi antar SKPD	1. Menyusun dan menerapkan SPM, membangun dan mengembangkan sistem dan manajemen pelayanan publik, sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahanan. 2. Meningkatkan pengawasan preventif untuk pencegahan tindak korupsi
	2. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Berkualitas	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta pengembangan aparatur daerah melalui pendidikan dan pelatihan dengan kompetensinya	Mengembangkan dan memfasilitasi diklat yang berbasis kompetensi serta menyusun sistem pemberian remunerasi bagi aparatur untuk menumbuhkan disiplin dan etos kerja
	3. Meningkatnya Kualitas Produk	Meningkatkan penegakan hukum	Penegakan Perda

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang Berlaku	daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku	
	4. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan daerah	Melakukan sinkronisasi dan koordinasi yang optimal dalam proses pembangunan serta meningkatkan akurasi data dalam setiap proses perencanaan pembangunan
2. Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN	1. Berkembangnya Sistem Rekrutmen, Promosi dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Pengembangan sistem rekrutmen, promosi dan mutasi aparatur.	1. Mendorong sistem promosi dan mutasi aparatur yang berbasis kompetensi (the right man on the right job) 2. Menerapkan sistem administrasi kepegawaian yang berbasis Teknologi Informasi
	2. Meningkatnya Pemahaman Aparatur terhadap Tupoksi	Peningkatan kualitas pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas	Mendorong penerapan pelaksanaan tupoksi
MISI 2 : MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN ISLAMI			
1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1. Meningkatnya angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas	Meningkatkan Perluasan layanan Pendidikan	Perluasan layanan Pendidikan
	2. Tuntasnya program wajar 12 tahun	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan	1. Peningkatkan kepastian layanan penyelenggara pendidikan 2. Peniadaan pungutan dalam bentuk apapun di sekolah 3. Beasiswa bagi Keluarga Miskin
	3. Terbangunnya kekuatan pendidikan dengan standar nasional	Pemantapan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 standar pendidikan nasional	1. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 standar pendidikan 2. Mengembangkan Kerjasama internasional di bidang pendidikan
	4. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kopetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga	Peningkatan kualifikasi dan kopetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Membangun Kecerdasan Islami pada Usia dini	Terbangunnya kecerdasan anak usia dini	kependidikan Peningkatkan PAUD menyeluruh dan terintegrasi	Perluasan layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan
3. Meningkatkan Kualitas SDM yang Islami	1. Terbangunnya jiwa entrepreneurship islam siswa	Menyediakan layanan pembinaan dan pengembangan entrepreneurship pada seluruh satuan pendidikan	pembinaan dan pengembangan entrepreneurship pada seluruh satuan pendidikan
	2. Terbangunnya konsep pendidikan yang bernuansa islami	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya dan ajaran islam pada seluruh satuan pendidikan	Penerapan konsep pendidikan yang bernuansa islami
4. Mendorong tersedianya layanan pendidikan tinggi	Terfasilitasinya layanan pendidikan tinggi	Mendorong terwujudnya layanan pendidikan tinggi	Penyediaan regulasi dan fasilitasi layanan pendidikan tinggi
5. Mewujudkan pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan / Organisasi Masyarakat, Organisasi profesi, Dunia Industri	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan	1. Penguatan peran dan fungsi masyarakat selaku stakeholder pendidikan 2. Menyusun regulasi tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan	Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan
MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT			
1. Peningkatan pelayanan berbasis masyarakat	1. Meningkatnya PHBS	1. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatkan penegakkan Perda kawasan tanpa rokok 3. Meningkatkan penegakkan Perda tata Bangunan 4. Meningkatkan peran pos yandu balita, lansia dan posbindu PTM dan kelurahan siaga 5. Mengoptimalkan forum kota sehat	1. Mengintensifkan sosialisasi kesehatan pada masyarakat 2. Meningkatkan kualitas penyuluhan melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh 3. Menegakan perda kawasan tanpa rokok 4. Menegakkan Perda Tata Bangunan
	2. Meningkatnya status gizi masyarakat	Meningkatkan pola pikir dan perilaku sadar gizi masyarakat	Menciptakan keluarga sadar gizi masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar	Mengoptimalkan tenaga kesehatan	1. Mengadakan tenaga kesehatan 2. On job training 3. Relokasi dan tambahan tenaga kesehatan
	2. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana dan sarana sesuai standar	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
3. Peningkatan status RSUD dari type C menjadi type B dan tempat pendidikan	1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM RSUD	1. Menambah tenaga kesehatan sesuai standar type B 2. Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan sesuai kompetensi	Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar RS type B
	2. Meningkatnya sarana dan prasarana RSUD	Memenuhi sarana dan prasarana RSUD sesuai standar type B	Mengadakan sarana dan prasarana RSUD sesuai standar type B
	3. Meningkatnya mutu pelayanan	Penyusunan SOP yang jelas bagi seluruh jenis layanan di RSUD	1. Sosialisasi SOP pelayanan RSUD kepada seluruh masyarakat 2. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan SOP oleh seluruh personil di RSUD
MISI 4: MENGOPTIMALKAN POTENSI DAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH			
1. Mengoptimalkan potensi dan daya saing ekonomi daerah	1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Percepatan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat
	2. Meningkatnya pendapatan masyarakat	Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat	Membangun dan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi kota sesuai RTRW
	3. Berkembangnya industri pariwisata	1. Mengupayakan peningkatan kunjungan wisatawan 2. Mengupayakan peningkatan waktu rata-rata lama menginap wisatawan	1. Optimalisasi pemasaran pariwisata 2. Membenahi objek wisata yang telah ada dan mengembangkan objek wisata baru
	4. Meningkatnya Produktivitas Petani	Penerapan inovasi teknologi produksi serta memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha	Intensifikasi pertanian
	5. Berkembangnya Sektor UMKM	1. Optimalisasi kelembagaan	1. Peningkatan kelembagaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		UMKM 2. Mendorong berkembangnya sektor UMKM	UMKM 2. Fasilitasi Pelaku UMKM sesuai bidang usaha
	6. Terwujudnya legalitas penambangan Kapur	1. Penegasan batas kawasan hutan lindung yang berbatasan dengan lokasi industri 2. Menyesuaian dokumen perencanaan jangka penjang dan tata wilayah	1. Intensifikasi koordinasi dengan instansi terkait di Tingkat Provinsi dan Pusat 2. Melaksanakan revisi RPJP dan RTRW
	7. Meningkatnya nilai investasi	Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi investor	Menyusun Perda tentang investasi
2. Meningkatkan daya saing produk daerah untuk menghadapi pasar global	1. Pemberdayaan pelaku IKM unggulan	Peningkatan kualitas produk, kemasan dan jaringan pemasaran IKM	1. Meningkatkan sarana prasarana produksi dan SDM pelaku IKM Unggul 2. Meningkatkan motivasi pelaku IKM Unggulan 3. Mengembangkan desain kemasan untuk berbagai produk kemasan 4. Mengembangkan model-model promosi dan mengoptimalkan kerjasama pemasaran 5. Mengembangkan pola kemitraan antar pelaku usaha
	2. Meningkatnya kemudahan akses permodalan bagi UMKM dan Koperasi	1. Meningkatkan peran lembaga Penyaluran Dana Bergulir 2. Mendorong UMKM dan Koperasi mengakses modal dari lembaga penyaluran dana bergulir	1. Operasional BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir 2. Penambahan Modal BLUD UPTD pengelolaan dana bergulir
	3. Berkembangnya sektor koperasi	1. Menumbuhkan koperasi yang beranggotakan pelaku usaha sejenis (Sektor Rill) 2. Mengoptimalkan kinerja koperasi	1. mendorong kelompok UMKM untuk mendirikan koperasi 2. meningkatkan pembinaan terhadap koperasi yang telah terbentuk 3. Mendorong penerapan pola syariah dalam koperasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	4. Meningkatnya daya saing industri kulit	Sinergitas sektor hulu dan hilir industri kulit	3. Optimalisasi UPTD Pengolahan Kulit 4. Peningkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit 5. Mengintensifkan promosi dan pemasaran produk kulit
3. Mengembangkan kawasan ekonomi yang terintegrasi	1. Terbentuknya kawasan strategis pariwisata	Membangun kawasan strategis pariwisata yang didukung oleh stakeholder terkait dengan berbasis pada wisata alam, budaya lokal, kuliner dan produk unggulan daerah	1. Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan kepariwisataan 2. Memberikan insentif investasi sesuai kewenangan daerah
	2. Optimalnya kawasan perdagangan Bukit Surungan	1. Mengoptimalkan pengelolaan PIHP 2. Penataan kawasan perdagangan Bukit Surungan yang dititikberatkan pada peningkatan sarpras pendukung	1. Meningkatkan peran serta dan fungsi stakeholder dalam pengelolaan PIHP 2. mengoptimalkan fungsi terminal, memperlancar arus lalu lintas orang dan barang 3. Menyediakan sarana prasarana pendukung kawasan perdagangan
	3. Berkembangnya kawasan pasar pusat	Penataan kawasan pasar pusat	1. Revitalisasi pasar pusat 2. Penyempurnaan aturan dan sistem pengelolaan pasar
	4. Meningkatnya iklim usaha/perdagangan yang kondusif	1. Mengoptimalkan kinerja pengawasan 2. Pembentukan UPTD Kemetrolagian	1. Konsistensi penerapan regulasi perlindungan konsumen 2. Penyusunan regulasi mengenai pembentukan UPTD kemetrolagian
	5. Terbentuknya kawasan pertanian terpadu	Mensinergikan pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan dalam satu kawasan	Menyediakan sarana prasarana, SDM serta meningkatkan mutu dan olahan produk pertanian
MISI 5: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN INFRASTRUKTUR KOTA			
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Terpeliharanya proporsi RTH terhadap luas wilayah	1. Pengembangan RTH 2. Melaksanakan Penghijauan	1. Penambahan RTH 2. Pelaksanaan penghijauan
	2. Berkurangnya	Melaksanakan	1. Pelaksanaan edukasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	timbunan sampah	edukasi pengelolaan sampah 3R	pengelolaan sampah 3R 2. Penyediaan ATM Sampah
	3. Meningkatnya area resapan air	Mengembangkan sistem resapan air	Penambahan area resapan air
2. Meningkatkan infrastruktur kota	1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas ke seluruh kawasan di wilayah Kota 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pemerintahan 3. Menerapkan sanitasi yang layak bagi masyarakat 4. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas prasarana dan sistem irigasi 5. Mengembangkan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi 6. Meningkatkan struktur jaringan jalan yang sistematis 7. Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum 8. Peningkatan pelayanan dan fasilitas perparkiran 9. Peningkatan sarana dan prasarana serta kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan jaringan jalan dan jembatan 2. Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan yang representatif 3. Pengelolaan air bersih 4. Pengelolaan sampah 5. Pengelolaan limbah 6. Pengelolaan drainase 7. Pengelolaan irigasi 8. Membangun infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi 9. Meningkatkan kualitas fasilitas lalu lintas 10. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi umum 11. Penataan fasilitas perparkiran 12. Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Meningkatkan kenyamanan kota sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kawasan perkotaan yang nyaman sesuai dengan peruntukannya 2. Meningkatnya ketersediaan perumahan bagi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya 2. Membangun prasarana hunian massal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Pemanfaatan Ruang 2. Intensifikasi koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pembangunan Rusunawa 3. Penyediaan fasilitas umum

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			untuk hunian masal
Misi 6: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERBUDAYA			
1. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Perbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatkan keterpaduan dan ketepatsasaran program penanggulangan kemiskinan 3. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesos 2. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil 3. meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan 4. Mengganti pola bantuan bergulir sebagai pengganti bantuan lepas untuk meningkatkan kemandirian 5. Meningkatkan peran dan fungsi PSKS, Kelembagaan Sosial dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2. Peningkatan potensi pemuda dan olahraga	1. Meningkatnya kemandirian organisasi pemuda	Meningkatkan kemandirian organisasi pemuda dan olahraga	Menggerakkan organisasi pemuda
	2. Meningkatnya prestasi olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembinaan olahraga 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras OR 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggalakan olahraga ditengah masyarakat 2. Membangun pusat kegiatan olahraga
3. Peningkatan tatanan kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya	1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK	Memperkuat peran kelembagaan keagamaan dan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong optimalisasi fungsi mesjid 2. Meningkatkan peran pemuka agama & adat dlm masyarakat 3. Penyusunan dan penetapan Perda tentang Adat dan Budaya Daerah 4. Meningkatkan peran lembaga LK3 dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			P2TP2A 5. Membangun pusat kegiatan keagamaan
	2. Meningkatnya kegiatan seni dan budaya	Mengembangkan kegiatan seni dan budaya	1. Mendorong pengembangan kelembagaan seni dan budaya 2. Memasukkan muatan seni dan budaya kedalam kurikulum sekolah
4. Peningkatan pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak
	2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Memberikan stimulan kepada kelurahan dengan tingkat partisipasi yang tinggi dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan 2. Mengoptimalkan kelembagaan masyarakat 3. Melaksanakan Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (P3MK)	1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan 2. Pembinaan kelembagaan masyarakat 3. Menerbitkan Perwako tentang Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (P3MK)
5. Meningkatkan kepedulian masyarakat mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera	Menekan angka kelahiran	1. Memberikan edukasi terhadap keluarga kecil untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera 2. mengerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB 3. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB	1. Meningkatkan edukasi masyarakat untuk keluarga berencana dan keluarga sejahtera 2. mengoptimalkan gerakan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB 3. meningkatkan kualitas penyuluh melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh 4. meningkatkan partisipasi keluarga melalui ketahanan keluarga dengan mengaktifkan BKB, BKR, BKL dan UPPKS.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah daerah perlu secara cermat membaca aspirasi yang berkembang, kemudian merespon dan mengakomodasikannya dalam agenda pemerintah daerah serta menuangkan kedalam arah kebijakan serta program pembangunan. Program Pembangunan Daerah Tahun 2013–2018 pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemerintah daerah untuk mencapai tujuan utama pembangunan, yaitu (a) menekan angka kemiskinan dan pengangguran, (b) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (c) meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta (d) meningkatkan stabilitas keamanan daerah. Guna menjabarkan prioritas, sasaran dan arah kebijakan pembangunan dalam menjawab isu dan permasalahan, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari upaya-upaya yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk kebijakan umum dan program pembangunan yang perlu dilaksanakan selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

7.1 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 1

Kebijakan umum untuk pencapaian misi 1 yaitu Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN adalah :

- 1) Menyusun dan menerapkan SPM, membangun dan mengembangkan sistem dan manajemen pelayanan publik, sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Meningkatkan pengawasan preventif untuk pencegahan tindak korupsi
- 3) Mengembangkan dan memfasilitasi Diklat yang berbasis kompetensi serta menyusun sistem pemberian remunerasi bagi aparatur untuk menumbuhkan disiplin dan etos kerja
- 4) Penegakan perda
- 5) Melakukan sinkronisasi dan koordinasi yang optimal dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan serta meningkatkan akurasi data dalam setiap proses perencanaan pembangunan
- 6) Mendorong sistem promosi dan mutasi aparatur yang berbasis kompetensi (the right men on the right job)
- 7) Menerapkan sistem administrasi kepegawaian yang berbasis Teknologi Informasi
- 8) Mendorong penerapan pelaksanaan tupoksi

Berikut adalah tabel kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran misi 1.

Tabel 7.1
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MISI 1
KOTA PADANG PANJANG

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
1 Meningkatkan Tata Laksana Pengelolaan Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien	Penerapan sistem dan prosedur kerja yang mantap dan bersinergi antar SKPD	1. Menyusun dan menerapkan SPM, membangun dan mengembangkan system dan manajemen pelayanan public, sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatkan pengawasan preventif untuk pencegahan tindak korupsi	1 Persentase pencapaian SPM di Kota Padang Panjang	%	25%	100%	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2. Penerapan Road Map Reformasi Birokrasi	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.	Bagian Organisasi Setdako, seluruh SKPD
			2 Jumlah SKPD yang menerapkan ISO 9001	SKPD	0	4	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan 3. Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan/Pelayanan Sistem Informasi Terpadu	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.	KPPT, Dinas Dukcapil, Kecamatan
			3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap mutu pelayanan pemda	Kriteria	Baik	Sangat Baik	1. Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan/Pelayanan Sistem Informasi Terpadu 2. Program peningkatan kualitas pelayanan publik	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.	Bagian Organisasi Setdako, seluruh SKPD
			4 Persentase pengelolaan Arsip berbasis Teknologi	%	0	20	1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip	Urusan Kearsipan	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi, seluruh SKPD

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			Informasi				Daerah 2. Perbaikan Sistem Administrasi kearsipan 3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 4. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan		
			5 Persentase pembangunan Diorama	%	0	100	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Urusan Kearsipan	Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
			6 Persentase penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	0	100	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.	INSPEKTORAT
			7 Persentase penerapan Sisyem Pengawasan Internal Pemerintah di SKPD	%	0	50	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.	INSPEKTORAT, seluruh SKPD
			8 Kriteria penilaian evaluasi LAKIP Kota	Kriteria	C	B	1. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Program Peningkatan	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,	SETDAKO, seluruh SKPD

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
							Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.	
			9 Kriteria penilaian LPPD	Status (Score)	Tinggi (2,6515)	Sangat Tinggi (3,01)	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Perencanaan	SETDAKO
			10 Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Nilai	WTP	WTP	1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.	DPPKAD, seluruh SKPD
			11 Persentase SKPD yang mendapatkan nilai sangat baik dalam evaluasi kinerja	%	75	95	1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.	SETDAKO, Inspektorat, seluruh SKPD
			12 Persentase Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	%	70	100	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 5. Program Publikasi dan Dokumentasi	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Urusan Perencanaan Urusan Kominfo	SETDAKO, Inspektorat, KPPT, Bappeda, DPPKAD

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
							Produk Hukum Daerah 6. Penataan Kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan 7. Program Kerjasama dengan Media Massa 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
							9. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas 10. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan 11. Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan/ Pelayanan Sitem Informasi Terpadu 12. Program Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		
2	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Berkualitas	Mengembangkan dan memfasilitasi Diklat yang berbasis kompetensi serta menyusun sistem pemberian remunerasi bagi aparatur untuk menumbuhkan disiplin dan etos kerja	Jumlah diklat yang dilaksanakan bagi aparatur	Diklat/ tahun	10	15	1. Pendidikan Kedinasan 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.	BKD

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
3 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat dan Peraturan yang Berlaku	Meningkatkan penegakan hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku	Penegakan perda	Jumlah Perda yang ditetapkan	Perda	8	40	1. Penataan Peraturan Perundang-undangan 2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.	SETDAKO dan SET.DPRD
4 Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan daerah	Melakukan sinkronisasi dan koordinasi yang optimal dalam proses perencanaan pembangunan serta meningkatkan akurasi data dalam setiap proses perencanaan pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)	%	30	80	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pengembangan Data/Informasi 3. Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA
5 Dikembangkannya Sistem Rekrutmen, Promosi dan Mutasi yang Transparan dan Kompetitif Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Pengembangan sistem rekrutmen, promosi dan mutasi aparatur	1. Mendorong sistem promosi dan mutasi aparatur yang berbasis kompetensi (the right men on the right job) 2. Menerapkan sistem administrasi kepegawaian yang berbasis Teknologi Informasi	1 Jumlah Peraturan tentang Pedoman penilaian kinerja aparatur	Jml Peraturan	0	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.	BKD DAN SETDAKO
			2 Persentase penerapan sistem promosi&mutasi aparatur yang berbasis kompetensi (the right men on the right job)	%	30	70	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.	BKD

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			3 Persentase penerapan administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi	%	45	80	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Urusan Otda, Pem. Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian	BKD
6 . Meningkatkan Pemahaman Aparatur terhadap Tupoksi	Peningkatan kualitas pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tupoksi	Mendorong penerapan pelaksanaan tupoksi	Persentase pelaksanaan tupoksi sesuai dengan aturan yang berlaku	%	50	90	Penataan kelembagaan dan Penataan Ketatalaksanaan	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.	SETDAKO, seluruh SKPD

7.2 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 2

Kebijakan umum untuk pencapaian misi 2 yaitu Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas dan Islami adalah :

1. Perluasan layanan pendidikan
2. Peningkatan kepastian layanan penyelenggara pendidikan
3. Peniadaan pungutan dalam bentuk apapun di sekolah
4. Beasiswa bagi keluarga miskin
5. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 standar pendidikan
6. Mengembangkan kerjasama internasional di bidang pendidikan
7. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
8. Perluasan layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan
9. Pembinaan dan pengembangan enterpreneurship pada seluruh satuan pendidikan
10. Penerapan konsep pendidikan yang bernuansa islami
11. Penyediaan regulasi dan fasilitasi layanan pendidikan tinggi
12. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan

Berikut adalah tabel kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran misi 2.

Tabel 7.2
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MISI 2
KOTA PADANG PANJANG

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
1 Meningkatkan angka melek huruf pada usia 7 tahun keatas	Meningkatkan Perluasan layanan Pendidikan	Perluasan layanan Pendidikan	Angka melek huruf	%	99,31	99,50	1. Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Pendidikan Non Formal 3. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 4. Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2 Tuntasnya program wajar 12 tahun	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan	4. Peningkatkan kepastian layanan penyelenggara pendidikan 5. Peniadaan pungutan dalam bentuk apapun di sekolah 6. Beasiswa bagi Keluarga Miskin	1. APK SD/MI/SDLB/Paket A	%	117,51	120	1. Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Manajemen Pelayanan Pendidikan 3. Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			2. APM SD/MI/SDLB/Paket A	%	107,12	110	1. Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Manajemen Pelayanan Pendidikan 3. Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			3. APK SMP/MTsN/SMP LB/Paket B	%	130,72	133	1. Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Manajemen Pelayanan Pendidikan 3. Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			4. APM SMP/MTsN/SMP LB/Paket B	%	93,79	98	4. Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 5. Manajemen Pelayanan Pendidikan 6. Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			7. APK SMA/SMK/MA/SM A LB/Paket C	%	235,22	238	1. Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Manajemen Pelayanan Pendidikan 3. Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			8. APM SMA/SMK/MA/SM A LB/Paket C	%	160,22	162	1. Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 2. Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
							3. Pendidikan Non Formal		
			9. Angka putus sekolah :						
			a. SD	%	0.39	0.10	1. Wajar Pendidikan Dasar 2. Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			b. SLTP	%	0.25	0.10	1. Wajar Pendidikan Dasar 2. Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			c. SLTA	%	0.95	0.40	1. Wajar Pendidikan Dasar 2. Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			7. Jumlah Perwako Pendidikan	jml	-	5	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
3	Terbangunnya kekuatan pendidikan dengan standar nasional	Pemantapan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 standar pendidikan nasional	1. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan 8 standar pendidikan 2. Mengembangkan Kerjasama internasional di bidang pendidikan						
			1. Persentase Terpenuhi standar proses, standar Isi, standar Prasarana, standar Penilaian, standar Pengelolaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan	%	60	90	1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Wajar Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Menengah 4. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			2. Persentase Terpenuhi standar tenaga kependidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan	%	78	90	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			3. Persentase terpenuhinya standar pembiayaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan	%	50	70	1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Wajar Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Menengah 4. Pendidikan Non Formal 5. Program Manajemen	Pendidikan	Dinas Pendidikan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
							Pelayanan Pendidikan		
			4. Jumlah SLB	unit	-	1	1. Manajemen Pelayanan Pendidikan 2. Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Pendidikan,	Dinas Pendidikan, Setdako
4 Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (Pusat Musyawarah Guru Mata Pelajaran)	kali	-	100	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
5 Meningkatkan kecerdasan anak usia dini	Peningkatkan PAUD menyeluruh dan terintegrasi	Perluasan layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan	1. APK PAUD	%	78,63	95	Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			2. Persentase PAUD Formal (TK/TKLB) berpendidikan minimal S1/D4	%	36	80	1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			3. Persentase PAUD non formal yang memiliki Tenaga pendidik minimal 1 org berpendidikan S1	%	30	50	1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			4. Persentase lembaga PAUD Nonformal sesuai SPM	%	20	50	1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Manajemen Pelayanan Pendidikan 4. Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
6 Terbangunnya jiwa enterpreneurship islam siswa	Menyediakan layanan pembinaan dan pengembangan enterpreneurship pada seluruh satuan pendidikan	pembinaan dan pengembangan enterpreneurship pada seluruh satuan pendidikan	1. Persentase penerapan kurikulum pengembangan enterprenuership Islam di satuan pendidikan	%	-	100	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			2. Jumlah kerjasama pendidikan dengan lembaga/dunia usaha/industry	Kerjasama	-	5	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
7 Terbangunnya konsep pendidikan yang bernuansa islami	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya dan ajaran islam pada seluruh satuan pendidikan	Penerapan konsep pendidikan yang bernuansa islami	1. Persentase penerapan kurikulum pendidikan bernuansa islami	%	-	100	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			2. Persentase penerapan Peraturan Sekolah Yang Islami	%	-	100	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
8 Terfasilitasinya layanan pendidikan tinggi	Mendorong terwujudnya layanan pendidikan tinggi	Penyediaan regulasi dan fasilitasi layanan pendidikan tinggi	Jumlah kegiatan fasilitasi layanan pendidikan tinggi	Kegiatan	0	2	1. Fasilitasi Layanan Pendidikan Tinggi 2. Penelitian dan Pengembangan	Pendidikan, Penelitian	Dinas Pendidikan BAPPEDA
9 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan	1. Penguatan peran dan fungsi masyarakat selaku stakeholder pendidikan 2. Menyusun regulasi tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan	Peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan	1. Persentase komite sekolah yang memiliki anggaran dasar dan rumah tangga	%	20	100	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			2. Persentase pembentukan dan Pengembangan Dewan Pendidikan Kota	%	0	100	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			3. Persentase Lembaga Profesi Pendidikan yang memperoleh Fasilitas dari pemerintah	%	20	60	Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			4. Persentase sekolah swasta yang diberikan bantuan dalam rangka konsep maju bersama (54 PAUD, 6 SD/MI swasta, 12 SLTP/MTs Swasta, 12 SLTA/MA Swasta.	%	11,90	100	1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan

7.3 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 3

Kebijakan umum untuk pencapaian misi 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat adalah :

1. Mengintensifkan sosialisasi kesehatan pada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas penyuluhan melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh.
3. Menegakkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok
4. Menegakkan Peraturan Daerah Tata Bangunan
5. Menciptakan keluarga sadar gizi masyarakat
6. Mengadakan tenaga kesehatan
7. On job training
8. Relokasi dan tambahan tenaga kesehatan
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
10. Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar rumah sakit Tipe B
11. Mengadakan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar Tipe B
12. Sosialisasi SOP pelayanan RSUD kepada seluruh masyarakat
13. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan SOP oleh seluruh personil di RSUD

Berikut adalah tabel kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran misi 3.

Tabel 7.3
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MISI 3
KOTA PADANG PANJANG

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (O-utcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
1 Meningkatkan PHBS	1. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatkan penegakkan Perda kawasan tanpa rokok 3. Meningkatkan penegakkan Perda tata Bangunan 4. Meningkatkan peran pos yandu balita, lansia dan posbindu PTM dan kelurahan siaga 5. Mengoptimalkan forum kota sehat	5. Mengintensifkan sosialisasi kesehatan pada masyarakat 6. Meningkatkan kualitas penyuluhan melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh 7. Menegakan perda kawasan tanpa rokok 8. Menegakkan Perda Tata Bangunan	1 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	%	67,9	75	1. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 2. Peningkatan pengendalian polusi 3. Pengendalian pemanfaatan ruang 4. Pengembangan lingkungan sehat	Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Kesehatan	Dinas Kesehatan, KLH, DPU, Dinas, Kesehatan
			2 Persentase penduduk yang memiliki akses air bersih	%	92	95	1. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 2. pengembangan kinerja dan pengelolaan air minum dan air limbah	Kesehatan, PU	Dinas Kesehatan, DPU
			3 Persentase penduduk yang tidak merokok dirumah	%	57,1	65	1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Kesehatan,	Dinas Kesehatan,
			4 Tingkat kesembuhan penyakit menular TB Paru	%	64	85	1. pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 2. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			5 Persentase penjarangan penyakit tidak menular	%	15	40	1. Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (O-utcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			6 Jumlah pencapaian Tatanan kota sehat	Tatanan Kota Sehat	8	8	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan, seluruh SKPD
			7 Persentase penyediaan sarana prasarana CTPS di seluruh tingkatan sekolah negeri se Kota Padang Panjang	%	5	75	1. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 2. Pendidikan Dasar 9 Tahun 3. Pendidikan Menengah	Kesehatan Pendidikan Pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Meningkatnya status gizi masyarakat	Meningkatkan pola pikir dan perilaku sadar gizi masyarakat	Menciptakan keluarga sadar gizi masyarakat	Persentase Status gizi kurang	%	5,8	5	1. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Upaya kesehatan masyarakat 3. Perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dasar	Mengoptimalkan tenaga kesehatan	1. Mengadakan tenaga kesehatan 2. On job training 3. Relokasi dan tambahan tenaga kesehatan	1 Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai penempatan	%	60	80	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kepegawaian Otonomi Daerah	Dinas Kesehatan, BKD
4 Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	peningkatan sarana dan prasarana puskesmas sesuai standar	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	1 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas	0	2	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			2 Persentase Operasional Sistim Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)	%	10	40	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			3 Persentase Pembangunan Baru gedung Puskesmas Gunung	%	0	100	1. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 2. Pembangunan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya	Otonomi Daerah, Kesehatan	Bagian APUM Setdako, Dinas Kesehatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (O-utcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
5 Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM RSUD	1 Menambah tenaga kesehatan sesuai standar type B 2 Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan sesuai kompetensi	1 Memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan sesuai standar RS type B	1 Jumlah tenaga medis	org	30	48	1. Kemitraan pelayanan kesehatan 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kesehatan Otonomi Daerah	RSUD BKD
			2 Jenis pelayanan spesialisasi	jenis	14	21	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	RSUD
			3 Rasio perawat terhadap Tempat Tidur	rasio	½	1/1	1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kesehatan Otonomi Daerah	RSUD BKD
			4 Persentase tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan	%	50	80	1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Kesehatan Otonomi Daerah	RSUD BKD
			5 Persentase tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi	%	5	60	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kesehatan	RSUD
6 Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD	1 Memenuhi sarana dan prasarana RSUD sesuai standar type B	1 Mengadakan sarana dan prasarana RSUD sesuai standar type B	1 Persentase kelengkapan fisik gedung RSUD	%	60	100	Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit /rumah sakit jiwa/rumah sakit mata	Kesehatan	RSUD
			2 Persentase ketersediaan alat kesehatan	%	60	100	1. Pengadaan, peningkatan sarana prasarana rumah sakit jiwa/ rumah sakit mata 2. Pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit 3. Peningkatan mutu pelayanan BLUD	Kesehatan	RSUD
7 Meningkatkan mutu pelayanan	Penyusunan SOP yang jelas bagi seluruh jenis layanan	1 Sosialisasi SOP pelayanan RSUD kepada seluruh	1 Tingkat Akreditasi RSUD	tingkat kelulusan	-	madya	Standarisasi pelayanan kesehatan	Kesehatan	RSUD

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (O-utcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
	di RSUD	2 masyarakat Penerapan dan pengawasan pelaksanaan SOP oleh seluruh personil di RSUD	2 Persentase penyelenggaraan SIM RS terintegrasi	%	60	80	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	Kesehatan	RSUD

7.4 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 4

Kebijakan umum untuk pencapaian misi 4 yaitu Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah adalah :

1. Percepatan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat
2. Membangun dan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi kota sesuai RTRW
3. Optimalisasi pemasaran pariwisata
4. Membenahi objek wisata yang telah ada dan mengembangkan objek wisata baru
5. Intensifikasi pertanian
6. Peningkatan kelembagaan UMKM
7. Fasilitasi pelaku UKM sesuai bidang usaha
8. Intensifikasi koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Propinsi dan Pusat terkait pengembangan industri kapur
9. Melaksanakan Revisi RPJP dan RTRW
10. Menyusun Perda tentang investasi
11. Meningkatkan sarana prasarana produksi IKM unggulan
12. Meningkatkan motivasi pelaku IKM unggulan
13. Mengembangkan desain kemasan untuk berbagai produk kemasan
14. Mengembangkan model-model promosi dan mengoptimalkan kerjasama pemasaran
15. Mengembangkan pola kemitraan antar pelaku usaha
16. Operasional BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
17. Penambahan modal BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir
18. mendorong asosiasi/kelompok UMKM untuk mendirikan koperasi
19. meningkatkan pembinaan terhadap koperasi yang telah terbentuk
20. Mendorong penerapan pola syariah dalam koperasi
21. Optimalisasi UPTD pengolahan kulit
22. Peningkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit
23. Mengintensifkan promosi dan pemasaran produk kulit
24. Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan kepariwisataan
25. Memberikan insentif investasi sesuai kewenangan daerah
26. Meningkatkan peran serta dan fungsi stakeholder dalam pengelolaan PIHP
27. mengoptimalkan fungsi terminal, memperlancar arus lalu lintas orang dan barang
28. Menyediakan sarana prasarana pendukung kawasan perdagangan
29. Revitalisasi pasar pusat
30. Penyempurnaan aturan dan sistem pengelolaan pasar
31. Konsistensi penerapan regulasi perlindungan konsumen
32. Penyusunan regulasi mengenai pembentukan UPTD kemetrolagian
33. Menyediakan sarana prasarana, SDM serta meningkatkan mutu dan olahan produk pertanian

Berikut adalah tabel kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran misi 4.

Tabel 7.4
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MISI 4
KOTA PADANG PANJANG

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program	Bidang	SKPD
			(Outcome)		Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)	Pembangunan	Urusan	Penanggung Jawab
							Daerah		
1 Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Percepatan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat	Pertumbuhan PDRB	%	6,24	6,8	1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 2. Pembangunan jalan dan jembatan 3. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 4. Pemberdayaan komunitas perumahan 5. Pengembangan kawasan perdagangan 6. Penataan struktur industri 7. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 8. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 9. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 10. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 11. Peningkatan pelayanan angkutan 12. Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	Ketahanan pangan' Pertanian, Usaha Kecil Menengah, Koperasi, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas PU Bappeda Dinas Perhubungan Kominfo Dinas Sosnaker Dinas Koperindag Setdako Kantor ketahanan, pangan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pertanian, Kantor Pengelolaan Pasar

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program	Bidang	SKPD
			(Outcome)		Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)	Pembangunan	Urusan	Penanggung Jawab
							Daerah		
							13. Pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi 14. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 15. Peningkatan kesempatan kerja 16. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 17. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 18. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 19. Pengembangan kualitas kelembagaan koperasi 20. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 21. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 22. Pembinaan dan pengembangan IKM 23. Peningkatan kemampuan teknologi industri 24. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 25. Peningkatan upaya penambuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda		

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program	Bidang	SKPD
			(Outcome)		Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)	Pembangunan	Urusan	Penanggung Jawab
							Daerah		
							26. Pengembangan pemasaran pariwisata 27. Pengembangan destinasi pariwisata 28. Pengembangan kemitraan 29. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah 30. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 31. Peningkatan kesejahteraan petani 32. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 33. Peningkatan ketahanan pangan 34. Peningkatan pemasaran hasil produksi (pertanian/ perkebunan) 35. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 36. Peningkatan produksi hasil peternakan 37. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 38. Pengembangan budidaya perikanan 39. Pembinaan pedagang kaki lima dan pedagang asongan		

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program	Bidang	SKPD
			(Outcome)		Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)	Pembangunan	Urusan	Penanggung Jawab
							Daerah		
2 Meningkatkan pendapatan masyarakat	Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat	Membangun dan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi kota sesuai RTRW	PDRB perkapita (ADHB)	Rupiah	24.401.864	40.062.023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 2. Pembinaan jalan dan jembatan 3. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 4. Pemberdayaan komunitas perumahan 5. Pengembangan kawasan perdagangan 6. Penataan struktur industri 7. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 8. Pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan 9. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 10. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 11. Peningkatan pelayanan angkutan 12. Pengembangan komunikasi, informai dan media masa 13. Pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi 14. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 15. Peningkatan kesempatan kerja 	Ketahanan pangan, pertanian, Pertanian	Kantor ketahanan pangan, Dinas Pertanian,

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program	Bidang	SKPD
			(Outcome)		Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)	Pembangunan	Urusan	Penanggung Jawab
							Daerah		
							16. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 17. Pengembangan kewirausahaan kompetitif UKM 18. Pengembangan sistim pendukung usaha bagi UMKM 19. Pengembangan kualitas kelembagaan koperasi 20. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 21. Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri 22. Pembinaan dan pengembangan IKM 23. Peningkatan kemampuan teknologi industri 24. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 25. Peningkatan upaya penambuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 26. Pengembangan pemasaran pariwisata 27. Pengembangan destinasi pariwisata 28. Pengembangan kemitraan 29. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi daerah 30. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan		

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program	Bidang	SKPD
			(Outcome)		Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)	Pembangunan	Urusan	Penanggung Jawab
							Daerah		
							31. Peningkatan kesejahteraan petani 32. Pengemabangan lembaga ekonomi pedesaan 33. Peningkatan ketahanan pangan 34. Peningkatan pemasaran hasil produksi (pertanian/ perkebunan) 35. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 36. Peningkatan produksi hasil peternakan 37. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 38. Pengembangan budidaya perikanan 39. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		
3 Berkembangnya industri pariwisata	3. Mengupayakan peningkatan kunjungan wisatawan 4. Mengupayakan peningkatan waktu rata-rata lama menginap wisatawan	1. Optimalisasi pemasaran pariwisata 2. Membenahi objek wisata yang telah ada dan mengembangkan objek wisata baru	1. Jumlah kunjungan wisatawan	orang	328.586	419.365	1. Pengembangan destinasi pariwisata 2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Porbudpar
			2. Jumlah pelaku industri pariwisata	Industri	24	44	1. Pengembangan Kemitraan 2. Pengembangan Pemasaran pariwisata	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Porbudpar
4 Meningkatnya Produktivitas Petani	Penerapan inovasi teknologi produksi serta memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha	Intensifikasi pertanian	1. Produktivitas padi	Ton/ha	4.9	5.4	1. Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ perkebunan	Ketahanan pangan, Pertanian	Kantor ketahanan pangan, Dinas Pertanian
			2. Populasi sapi perah	ekor	251	737	1. Peningkatan produksi hasil peternakan	Pertanian	Dinas Pertanian

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program	Bidang	SKPD
			(Outcome)		Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)	Pembangunan	Urusan	Penanggung Jawab
							Daerah		
			3. Produksi benih ikan	Ekor	750.000	1.500.000	Pengembangan budidaya perikanan	Pertanian	Dinas Pertanian
			4. Produksi ikan konsumsi	Ton/tahun	298	375,5	Pengembangan budidaya perikanan	Pertanian	Dinas Pertanian, Kantor Ketahanan Pangan
			5. Jumlah lembaga tani yang aktif	lembaga	58	90	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	Dinas Pertanian, Kantor Ketahanan Pangan
5 Berkembangnya sektor UMKM	1. Optimalisasi kelembagaan UMKM 2. Mendorong berkembangnya sektor UMKM	1. Peningkatan kelembagaan UMKM 2. Fasiltasi pelaku UMKM sesuai bidang usaha	1. Persentase asosiasi UMKM yang aktif	%	76	100	1. Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	UKM	D. Pertanian, Koperindag, Dinas sosnaker
			2. Jumlah UMKM berdasarkan klasifikasi				1. Pengemb Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	UKM	D. Pertanian / Koperindag Dinas sosnaker,
			- Usaha Mikro	unit	4487	4935			
			- Usaha Kecil	unit	549	603			
			- Usaha Menengah	unit	27	29			

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program	Bidang	SKPD
			(Outcome)		Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)	Pembangunan	Urusan	Penanggung Jawab
							Daerah		
6 Terwujudnya legalitas penambangan kapur	1. Penegasan batas kawasan hutan lindung yang berbatasan dengan lokasi industry 2. Menyesuaikan dokumen perencanaan jangka panjang dan tata ruang wilayah	1. Intensifikasi koordinasi dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan Pusat	1. Jumlah regulasi berkaitan kawasan industri kapur	Dokumen	0	2	1. Penataan Ruang 2. Pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan	UKM	Dinas Koperindag
		2. Melaksanakan revisi RPJP dan RTRW	2. Jumlah dokumen Izin Penambangan Rakyat yang diterbitkan	Dokumen	-	30	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	UKM, Kehutanan	Koperindag,
7 Meningkatnya nilai investasi	Memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi investor	Menyusun Perda tentang investasi	Nilai investasi	Milyar rupiah	515	640	1. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3. Program Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan / Pelayanan Sistem Informasi Terpadu	UKM, Penanaman Modal	Bappeda Koperindag KPPT
8 Pemberdayaan pelaku IKM unggulan	Peningkatan kualitas produk, kemasan dan jaringan pemasaran IKM	1. Meningkatkan sarana prasarana produksi IKM Unggulan	Jumlah IKM unggulan :						
		2. Meningkatkan motivasi pelaku IKM	- bordir	Unit usaha	20	40		UKM	Dinas Koperindag
		3. Mengembangkan desain kemasan	- kulit	Unit usaha	19	30		UKM	Dinas Koperindag
		4. Mengembangkan model-model promosi dan mengoptimalkan kerjasama pemasaran	- Makanan ringan	Unit usaha	110	170	1. Peningkatan kemampuan Industri 2. Pembinaan dan Pengembangan IKM 3. Pengembangan sentra-sentra industri potensial		
		5. Mengembangkan pola kemitraan antar pelaku usaha							

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program	Bidang	SKPD
			(Outcome)		Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)	Pembangunan	Urusan	Penanggung Jawab
							Daerah		
9 Meningkatkan kemudahan akses permodalan bagi UMKM dan Koperasi	1. Meningkatkan peran lembaga Penyaluran Dana Bergulir 2. Mendorong UMKM dan Koperasi mengakses modal dari lembaga penyaluran dana bergulir	1. Operasional BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir 2. Penambahan Modal BLUD UPTD Pengelolaan Dana Bergulir	1. Jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana Bergulir	Org	3722	5097	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	UKM	Koperindag
			2. Jumlah dana bergulir di Masyarakat	Milyar	3.5	8.5	Pengembangan system pendukung usaha	Koperasi	Koperindag
10 Berkembangnya sektor koperasi	1. Menumbuhkan koperasi- yang beranggotakan pelaku usaha sejenis (sektor riil) 2. Mengoptimalkan kinerja koperasi	1. Mendorong kelompok UMKM untuk mendirikan koperasi 2. meningkatkan pembinaan terhadap koperasi yang telah terbentuk 3. Mendorong penerapan pola syariah dalam koperasi	1. Jumlah koperasi usaha-usaha sejenis	unit	2	5	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi	Koperindag
			2. Jumlah koperasi yang aktif	unit	58	68	1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan UKM	Koperasi UKM	Koperindag Koperindag
			3. Jumlah koperasi berpola syariah	unit	16	21	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi	Koperindag
11 Meningkatkan daya saing industri kulit	Sinergitas sektor hulu dan hilir industri kulit	1. Optimalisasi UPTD Pengolahan Kulit 2. Peningkatan keterampilan pengrajin dan desain produk kulit 3. Mengintensifkan promosi dan pemasaran produk kulit	1. Kapasitas produksi penyamakan kulit	Ton/tahun	60	100	1. Penataan Struktur Industri 2. Peningkatan Kemajuan Teknologi Industri	Perindustrian	Koperindag
			2. Persentase operasionalisasi sentra barang jadi kulit	%	25	90	1. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM 4. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 5. Program Pembinaan dan Pengemb.IKM 6. Program Penataan	UKM	Koperindag, Porbudpar

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program	Bidang	SKPD	
			(Outcome)		Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)	Pembangunan	Urusan	Penanggung Jawab	
							Daerah			
							Struktur Industri			
12	Terbentuknya kawasan strategis pariwisata	Membangun kawasan strategis pariwisata yang didukung oleh stakeholder terkait dengan berbasis pada wisata alam, budaya lokal, kuliner dan produk unggulan daerah	1. Meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan kepariwisataan 2. Memberikan insentif investasi sesuai kewenangan daerah	Persentase terwujudnya kawasan strategis pariwisata	%	10 (Masterplan pengembangan Pariwisata)	100 (Terwujudnya kawasan pariwisata terpadu)	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kepemudaan dan olahraga	Porbudpar
13	Optimalnya kawasan perdagangan Bukit Surungan	1. Mengoptimalkan pengelolaan PIHP 2. Penataan kawasan perdagangan Bukit Surungan yang dititikberatkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung	1. Meningkatkan peran serta dan fungsi stakeholder dalam pengelolaan PIHP	1. Persentase Pengalihan pengelolaan PIHP ke Pemko	%	0	100	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Daerah 2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Kantor pasar, Bagian Perekonomian
			2. mengoptimalkan fungsi terminal, memperlancar arus lalu lintas orang dan barang	2. Persentase berfungsinya Terminal Bukit Surungan sebagai terminal Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan	%	50 (berfungsi sebagai terminal AKAP/AKDP)	100 (berfungsi sebagai terminal AKAP/AKDP/Angkot/Angdes)	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2. Peningkatan Pelayanan Angkutan 3. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan	Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika
			3. Menyediakan sarana prasarana pendukung kawasan perdagangan	3. Jumlah Terminal bongkar muat barang	unit	0	1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
14	Berkembangnya kawasan pasar pusat	Penataan kawasan pasar pusat	1. Revitalisasi pasar pusat 2. Penyempurnaan aturan dan sistem	1. Persentase penyelenggaraan kawasan pasar pusat	%	0	100	1. Program Pengembangan Kawasan Perdagangan 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi	Perdagangan	Setdako, Dinas PU, Kantor pasar

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		Program	Bidang	SKPD
			(Outcome)		Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)	Pembangunan	Urusan	Penanggung Jawab
							Daerah		
		pengelolaan pasar	yang representatif				Daerah 3. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		
			2. Jumlah Perda tentang sistem pengelolaan pasar	perda	0	1	Perlindungan konsumen dan pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Kantor pasar
15 Meningkatnya iklim usaha/perdagangan yang kondusif	1. Mengoptimalkan kinerja pengawasan 2. Pembentukan UPTD Kemetrolgian	3. Konsistensi penerapan regulasi perlindungan konsumen 4. Penyusunan regulasi mengenai pembentukan UPTD kemetrolgian	1. Persentase penyelesaian sengketa konsumen	%	100	100	Perlindungan konsumen dan pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Dinas Koperindag
			2. Jumlah UTTP yang ditera per tahun	unit	200	342	Perlindungan konsumen dan pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Dinas Koperindag
16 Terbentuknya kawasan pertanian terpadu	Mensinergikan pengembangan sektor pertanian, peternakan dan perikanan dalam satu kawasan	Menyediakan sarana prasarana, SDM serta meningkatkan mutu dan olahan produk pertanian	Persentase penyelenggaraan kawasan pertanian terpadu	%	0	100% (pengelolaan kawasan pertanian terpadu)	Peningkatan Ketahanan Pangan	Pertanian	Dinas Pertanian, Kantor Ketahanan Pangan

7.5 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 5

Kebijakan umum untuk pencapaian misi 5 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota adalah :

- a) Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- b) Pelaksanaan penghijauan
- c) Pelaksanaan edukasi pengelolaan sampah 3R
- d) Penyediaan ATM Sampah
- e) Penambahan area resapan air
- f) Pengembangan jaringan jalan dan jembatan
- g) Mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan yang representatif
- h) Pengelolaan air bersih
- i) Pengelolaan sampah
- j) Pengelolaan limbah
- k) Pengelolaan drainase
- l) Pengelolaan irigasi
- m) Membangun infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi
- n) Meningkatkan kualitas fasilitas lalu lintas
- o) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi umum
- p) Penataan fasilitas parkir
- q) Pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
- r) Penyusunan Rencana Pemanfaatan Ruang
- s) Intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk pembangunan di Kota Padang Panjang
- t) Penyediaan fasilitas umum untuk hunian massal

Berikut adalah tabel kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran misi 5.

Tabel 7.5
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MISI 5
KOTA PADANG PANJANG

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
1 Terpeliharanya proporsi RTH terhadap luas wilayah	1. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 2. Melaksanakan Penghijauan	1. Penambahan Ruang Terbuka Hijau 2. Pelaksanaan penghijauan	1. Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	6	8	1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tata Ruang	Dinas PU, KLH, Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pertanian, seluruh SKPD
			2. Jumlah Pohon Baru yang ditanam	Batang	0	5000	1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Tata Ruang Lingkungan Hidup	Dinas PU Dinas Pertanian Kantor Ketahanan Pangan
2 Mengurangi Timbulan Sampah	Melaksanakan edukasi pengelolaan sampah 3R	1. Pelaksanaan edukasi pengelolaan sampah 3R 2. Penyediaan ATM Sampah	Persentase sampah yang masuk ke TPA	%	85	75	Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	Pekerjaan Umum, LH	Dinas PU, KLH
3 Meningkatnya area resapan air	Mengembangkan sistem resapan air	Penambahan area resapan air	Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi dengan biopori/sumur resapan	Unit	5	15	1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lingkungan Hidup	KLH, Seluruh SKPD
4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkotaan	1. Meningkatkan aksesibilitas ke seluruh kawasan di wilayah Kota	1. Pengembangan jaringan jalan dan jembatan 2. Mewujudkan	1. Panjang jalan	Km	83	88,1	Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan	PU	Dinas PU, Setdako
			2. Jumlah jembatan yang berkualitas dan terpelihara	Unit	14	14	Pemeliharaan jalan/jembatan	PU	Dinas PU, Setdako

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
	2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras pemerintahan 3. Menerapkan sanitasi yang layak bagi masyarakat 4. Peningkatan dan Pemeliharaan Kualitas prasarana dan sistem irigasi 4. Mengembangkan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi 5. Meningkatkan struktur jaringan jalan yang sistematis 6. Pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum 7. Peningkatan pelayanan dan fasilitas perparkiran 8. Peningkatan sarpras serta kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan yang representatif 3. Pengelolaan air bersih 4. Pengelolaan sampah 5. Pengelolaan limbah 6. Pengelolaan drainase 7. Pengelolaan Irigasi 8. Membangun infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi 9. Meningkatkan kualitas fasilitas lalu lintas 10. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi umum 11. Penataan fasilitas perparkiran 12. Pembangunan sarpras untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	3. Jumlah gedung baru kantor pemerintahan yang representatif	Unit	0	4	1. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2. Peningkatan prasarana dan sarana aparatur	Otonomi Daerah PU	Dinas PU, SKPD terkait, Setdako
			4. Jumlah lokasi Sumber air bersih	Lokasi	5	6	1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum, dan Air Limbah 2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	LH	KLH, PU
			5. Jumlah sarana pengelolaan limbah	Unit	0	9	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum, dan Air Limbah	PU	PU, KLH, SKPD terkait
			6. Persentase Pengelolaan drainase	%	79,3	90	Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong	PU	DPU
			7. Persentase penyediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi	%	30	70	Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi	Kominfo	Dishubkominfo, Humas Setdako
			8. Persentase penyediaan fasilitas lalu lintas yang berkualitas	%	40	60	1. Pengembangan Sarpras Perhubungan 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dishubkominfo, PU
			9. Persentase penyediaan prasarana dan sarana transportasi umum	%	38	54	1. Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan 2. Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	Perhubungan	Dishubkominfo, PU
			10. Persentase ketertiban perparkiran	%	30	60	1. Peningkatan pelayanan Angkutan 2. Pengendalian dan	Perhubungan	Dishubkominfo, PU

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			11. Jumlah Lokasi ruang terbuka untuk evakuasi bencana	Lokasi	6	10	Pengamanan Lalu lintas 3. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 2. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 3. Program Inspeksi Jalan dan Jembatan 4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penanggulangan bencana	BPBD
5 Terwujudnya kawasan perkotaan yang nyaman sesuai dengan peruntukannya	Peningkatan fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya	Penyusunan Rencana Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen perencanaan pemanfaatan ruang	Dokumen RDTR	2	6	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas PU, Bappeda
6 Meningkatnya ketersediaan perumahan bagi masyarakat	Membangun prasarana hunian massal	1. Intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk pembangunan rusunawa di Kota Padang Panjang 2. Penyediaan fasilitas umum untuk hunian masal	Persentase Fasilitas Pembangunan Rusunawa	%	0	100	1. Program pengembangan perumahan 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum, dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	Dinas PU

7.6 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 6

Kebijakan umum untuk pencapaian misi 6 yaitu Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan berbudaya adalah :

1. Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil
3. Meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan
4. Mengganti pola bantuan bergulir sebagai pengganti bantuan lepas untuk meningkatkan kemandirian
5. Meningkatkan peran dan fungsi PSKS, kelembagaan sosial dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
6. Mengerakkan organisasi pemuda
7. Menggalakkan olah raga ditengah masyarakat
8. Membangun pusat kegiatan olahraga
9. Mendorong optimalisasi fungsi mesjid
10. Meningkatkan peran pemuka agama dan adat dalam masyarakat
11. Penyusunan dan penetapan Perda tentang Adat dan Budaya Daerah
12. Meningkatkan peran lembaga LK3 dan P2TP2A
13. Membangun pusat kegiatan keagamaan
14. Mendorong pengembangan kelembagaan seni dan budaya
15. Memasukkan muatan seni dan budaya kedalam kurikulum sekolah
16. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
17. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak
18. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan
19. Pembinaan kelembagaan masyarakat
20. Menerbitkan Perwako tentang Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (P3MK)
21. Meningkatkan edukasi masyarakat untuk keluarga berencana dan keluarga sejahtera
22. Mengoptimalkan gerakan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB
23. Meningkatkan kualitas penyuluh melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh
24. Meningkatkan partisipasi keluarga melalui ketahanan keluarga dengan mengaktifkan BKB, BKR, BKL dan UPPKS

Berikut adalah tabel kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran misi 6.

Tabel 7.6
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MISI 6
KOTA PADANG PANJANG

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
1 Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat 2. Meningkatkan keterpaduan dan ketepatsasaran program penanggulangan kemiskinan 3. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesos 2. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil 3. meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan 4. Mengganti pola bantuan bergulir sebagai pengganti bantuan lepas untuk meningkatkan kemandirian 5. Meningkatkan peran dan fungsi PSKS, kelembagaan sosial dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 	1 Angka kemiskinan	%	6,5	5,5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Manajemen pelayanan Pendidikan 6. Perencanaan Sosial Budaya 7. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 8. Pengembangan Lembaga Ekonomi pedesaan 9. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 10. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya 11. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 12. Pemberdayaan Komunitas Perumahan 	Kesehatan, Pendidikan Perencanaan, Pemberdayaan Masyarakat, Sosial, Perumahan	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda, KPM, Dinas Sosial, Setdako, Dinas Pekerjaan Umum, Kecamatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
			2 Angka pengangguran	%	7,07	6,54	1. Peningkatan kesempatan kerja 2. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja 3. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 4. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 5. Program peningkatan keberdayaan masyarakat	Tenagakerja Pemuda Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Sosnaker, Dinas Porbudpar KPM
			3 Persentase Penurunan jumlah PMKS per lima tahun	%	0	5	1. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya 2. pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 3. pembinaan paa penyandang cacat dan eks trouma 4. pembinaan eks penyandang penyakit social 5. pelayanan dan rehabilitasi sosial 6. pembinaan anak terlantar	Sosial	Dinas Sosnaker
2 Meningkatkan kemandirian organisasi pemuda	Meningkatkan kemandirian organisasi pemuda dan olahraga	Menggerakkan organisasi pemuda	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	organisasi	18	25	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kepemudaan	Dinas Porbudpar

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
3 Meningkatkan prestasi olahraga	1. Meningkatkan pembinaan olahraga 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olah raga	1. Menggalakan olahraga ditengah masyarakat 2. Membangun pusat kegiatan olahraga	1 Jumlah cabang olahraga yang aktif	Cabang	0	18	1. pengemb. kebijakan manajemen olahraga 2. pembinaan dan pemasyarakatan OR 3. peningkatan sarpras olah raga	Olahraga	Dinas Porbudpar
			2 Jumlah Gedung Olah Raga	Unit	2	3	Peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Olahraga	Dinas Porbudpar Dinas PU
4 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK	Memperkuat peran kelembagaan keagamaan dan sosial	1. Mendorong optimalisasi fungsi mesjid 2. Meningkatkan peran pemuka agama dan adat dalam masyarakat 3. Penyusunan dan penetapan Perda tentang Adat dan Budaya Daerah 4. Meningkatkan peran lembaga LK3 dan P2TP2A 5. Membangun pusat kegiatan keagamaan	1 Persentase aktifitas keagamaan yang dilaksanakan di seluruh mesjid (jemaah mesjid, MDA, remaja mesjid, hafiz quran, majelis taklim, forum kajian islam, Desa Sakinah)	%	20	100	1. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 2. Fasilitas peningkatan kegiatan keagamaan kesejahteraan sosial 3. Program pengisian Padang Panjang Kota Serambi Mekkah	Kesbangpol	BPBD kesbangpol Bag. Kesra Setdako
			2 Persentase keaktifan Lembaga Keagamaan, adat dan kemasyarakatan dan keterlibatannya dalam Kegiatan-kegiatan Pemerintahan	%	50	100	1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH 4. Program Pengisian Padang Panjang Kota Serambi Mekkah	Pemberdayaan masyarakat dan desa	KPM, Kecamatan PPB, Kecamatan PPT, Setdako, Sosnaker, BPBD Kesbangpol, Porbudpar, Bappeda
			3 Jumlah zakat, sadakah yang dikumpulkan BAZ	Milyar Rupiah	2.7	3.3	Program pengisian Padang Panjang Kota Serambi Mekkah	Otonomi Daerah	Setdako
			4 Jumlah Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah kasus yang ditangani	4	25	1. Program fasilitasi peningkatan kegiatan keagamaan kesejahteraan sosial 2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan	Sosial PP dan PA	Setdako, KPPKB

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)				
							Gender dan Anak 3. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan			
			5 Jumlah Islamic Centre	unit	0	1	1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2. Program Fasilitasi peningkatan kegiatan keagamaan kesejahteraan social 3. Peningkatan saran dan prasarana aparatur	Pekerjaan Umum Otonomi Daerah dan Sosial	Setdako dan Dinas PU	
5	Meningkatnya kegiatan seni dan budaya	Mengembangkan kegiatan seni dan budaya	1. Mendorong pengembangan kelembagaan seni dan budaya 2. Memasukkan muatan seni dan budaya kedalam kurikulum sekolah	Unit	17	24	1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan, Pendidikan	Dporbudpar, Dinas pendidikan	
			2 Persentase masuknya BAM dalam kurikulum bahan pembelajaran di sekolah	%	0	100	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
6	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak	IPG Kota Padang Panjang	indeks	77,77	80,00	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	PP dan PA	KPPKB
7	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	4. Memberikan stimulan kepada kelurahan dengan tingkat partisipasi yang tinggi dalam perencanaan dan penyelenggaraan	4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan 5. Pembinaan kelembagaan	1 Persentase keterwakilan masyarakat yang hadir musrenbang	%	96,7	99	1. Perencanaan Pembangunan 2. Program pengembangan rencana pembangunan pasar yang partisipatif	Perencanaan pembangunan	Bappeda, Kecamatan PPT, Kecamatan PPB

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					Kondisi Awal (2013)	Kondisi Akhir (2018)			
	5. Mengoptimalkan kelembagaan masyarakat 6. Melaksanakan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan (P3MK)	6. Menerbitkan perwako tentang percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan (P3MK)	2 Persentase usulan musrenbang kec tertampung di APBD	%	59	70	Perencanaan pembangunan	Perencanaan pembangunan	Bappeda
			3 Persentase Partisipasi masyarakat dalam BBGRM	%	450	550	peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	pemberdayaan masyarakat desa	KPM
			4 Partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan	%	20	100	1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	pemberdayaan masyarakat desa	KPM, Kecamatan PPT, Kecamatan PPB
8 Menekan angka kelahiran	1. Memberikan edukasi terhadap keluarga kecil ningkatkan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera 2. mengerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB 3. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB	1. Meningkatkan edukasi masyarakat untuk keluarga berencana dan keluarga sejahtera 2. mengoptimisasi gerakan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB 3. meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluh melalui peningkatan kualitas tenaga penyuluh 4. meningkatkan partisipasi keluarga melalui ketahanan keluarga dgn mengaktifkan BKB, BKR, BKL dan UPPKS.	1 Angka kelahiran	%	2,1	1,8	1. keluarga berencana 2. Program Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	KB dan KS	KPPKB
			2 Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB Baru	%	76,6	80	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	KB dan KS	KPPKB
			3 Cakupan PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun	%	4,5	2,5	Program Pelayanan Kontrasepsi	KB dan KS	KPPKB
			4 Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta aktif KB	%	72	80	1. Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri 2. Pengembangan pusat pelayanan konsultasi dan pelayanan informasi dan konseling KRR	KB dan KS	KPPKB
			5 Cakupan anggota sasaran BKB, BKR, BKL dan sasaran UPPKS untuk ber KB	%	80	95	1. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 2. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	KB dan KS	KPPKB

7.7 Agenda dan Prioritas Pembangunan Daerah

7.3.1 Agenda Pembangunan Daerah

Agenda pembangunan merupakan kegiatan pokok yang akan dilakukan guna mendorong proses pembangunan daerah secara menyeluruh sesuai visi dan misi kepala daerah. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang telah dirumuskan serta mempedomani agenda pembangunan nasional serta Provinsi Sumatera Barat, maka ditetapkan 6 (enam) agenda pembangunan Kota Padang Panjang untuk periode 2013-2018.

Agenda 1: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Perbaikan tata-kelola pemerintah daerah merupakan salah satu cara untuk menciptakan “good governance” yang dicita-citakan. Penekanan dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, pelaksanaan sistem pemerintahan yang partisipatif dan transparansi, perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran, perbaikan sistem rekrutmen dan promosi aparatur.

Agenda 2: Peningkatan Kualitas Pendidikan yang berbudaya Islami

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu maka agenda peningkatan kualitas pendidikan menjadi sangat penting. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan informal, menengah & fasilitasi pendidikan tinggi dan konsep maju bersama dengan lembaga pendidikan swasta.

Agenda 3: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga dipengaruhi oleh derajat kesehatan. Untuk itu agenda pembangunan Kota Padang Panjang ke depan adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat.

Agenda 4: Pengembangan Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Kemakmuran ekonomi merupakan salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat. Karena itu agenda untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah Pembangunan Pasar Pusat, peningkatan pertumbuhan PDRB di semua sektor, peningkatan PDRB Per Kapita, Pengembangan sektor kepariwisataan, agribisnis, kawasan pertanian terpadu, UMKM, industri dan koperasi.

Agenda 5: Perbaikan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Pembangunan ekonomi perlu didukung oleh pengembangan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas serta kondisi lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan. Oleh karena itu, agenda perbaikan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup juga merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan Kota Padang Panjang. Termasuk ke dalam agenda ini adalah peningkatan ruang terbuka hijau, penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas, perkantoran, gedung olahraga, prasarana parkir, persampahan serta ruang terbuka untuk evakuasi bencana.

Agenda 6: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah

Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan masih tetap menjadi sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah. Karena itu agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat ini merupakan salah satu kegiatan yang bersifat strategis yang meliputi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Meskipun demikian, kesejahteraan yang dimaksud bukan kesejahteraan yang sekuler namun kesejahteraan yang berlandaskan ajaran agama dan budaya daerah sehingga dapat mewujudkan proses pembangunan daerah yang

baik sesuai dengan keinginan masyarakat umum. Melalui agenda pembangunan daerah ini diharapkan akan dapat diwujudkan keselarasan antara ajaran agama dan budaya daerah dengan tingkah laku dan kebiasaan hidup masyarakat setempat sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera dan agamais. Termasuk ke dalam agenda pembangunan ini adalah pengembangan pendidikan bernuansa agama, penerapan dan pengembangan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah, pembangunan Islamic Center serta percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan (P3MK)

7.3.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi dan misi Kota Padang Panjang dan agenda pembangunan di atas maka prioritas pembangunan daerah tahun 2013-2018 adalah :

1. Peningkatkan pemahaman dan pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat.
Menjadikan Kota Padang Panjang dengan PDIKM nya sebagai pusat dokumentasi dan informasi kebudayaan Minangkabau yang terlengkap dengan upaya untuk melacak dan menyediakan duplikat benda-benda budaya Minangkabau. Kesenian rakyat tetap terus dibina dan diupayakan terdapat even-even besar di Kota Padang Panjang untuk menampung kreatifitas seni dan budaya masyarakat Kota Padang Panjang, terutama generasi mudanya. Di bidang kebudayaan ini maka adalah prioritas juga untuk memberdayakan nagari (KAN) sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat membantu kelacaran pembangunan di Kota Padang Panjang. Pembangunan Islamic Center menjadi sebuah prioritas juga untuk 5 tahun ke depan, karena kelacaran pembangunan di Kota Padang Panjang. Pembangunan Islamic Center menjadi sebuah prioritas juga untuk 5 tahun ke depan, karena memang sudah menjadi tuntutan bagi sebuah Kota yang menyandang julukan sebagai Kota Serambi Mekah seperti Kota Padang Panjang ini.
2. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih
Meningkatkan kepercayaan terhadap aparatur pemerintahan, pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsi serta ketaatan melaksanakan aturan, meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan dan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur sehingga terwujud pemerintahan yang ekonomis, efektif, efisien, serta dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Peningkatan pendidikan yang berbudaya islami
Meningkatkan kualitas pendidikan yang Islami dengan tetap memperhatikan pemenuhan 8 standar pendidikan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, SLB, serta mengembangkan konsep maju bersama pendidikan negeri dengan swasta serta fasilitasi pengembangan pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas Kota Padang Panjang sebagai Kota Tujuan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.
4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan melalui penyuluhan penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat, sehingga ke depan masyarakat lebih memahami dan menerapkan sikap preventif menghadapi penyakit. Disamping itu kualitas SDM, sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus ditingkatkan baik di puskesmas maupun Rumah Sakit. Secara khusus RSUD Kota Padang Panjang dalam 5 tahun ke depan akan ditingkatkan statusnya dari Rumah Sakit Tipe C menjadi Rumah Sakit Tipe B. Dengan munculnya program Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Pengelola Jaminan Sosial maka Kota Padang Panjang tetap memperhatikan masyarakat tidak mampu sehingga dapat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

- Peningkatan puskesmas tetap jadi prioritas melalui pembangunan SIKDA dan relokasi puskesmas gunung.
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar
Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas baik jalan maupun jembatan serta utilitas kota, menuntaskan pembangunan jalan lingkaran selatan dan lingkaran barat serta pembenahan terminal bukit surungan serta rambu rambu serta perparkiran di Kota Padang Panjang. Termasuk prioritas ini adalah pembangunan gedung olahraga dan prasarana parkir.
 6. Pengembangan Pertanian Berbasis Komoditi Unggulan
Meningkatkan daya saing perekonomian kota melalui sektor pertanian. Pengembangan pertanian diarahkan kepada pengembangan agribisnis melalui konsep kawasan pertanian terpadu, peternakan sapi perah, perikanan, tanaman hias dan pertanian organik yang kesemuanya berasal dari jenis yang unggul dan nomor satu disesuaikan dengan kondisi daerah. Ke depan pengembangan agribisnis ini akan dikerjasamakan dengan berbagai pihak baik Perguruan Tinggi maupun lembaga-lembaga penelitian yang ada.
 7. Pengembangan Industri dan Perdagangan
Meningkatkan daya saing perekonomian kota melalui sektor industri dan perdagangan. Di sektor industri maka industri kulit dan kapur akan terus dioptimalkan disamping industri bordir dan makanan ringan yang memang sudah membudaya dalam masyarakat Kota Padang Panjang. Industri ini nanti akan didukung oleh sebuah perusahaan daerah yang akan memfasilitasi pemasaran hasil-hasil industri masyarakat Kota Padang Panjang. Di bidang perdagangan akan diupayakan untuk membenahi kedua pasar yang ada yaitu Pasar Pusat dan Pasar Induk Hasil Pertanian.
 8. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya
Meningkatkan daya saing perekonomian kota melalui sektor pariwisata. Di bidang pariwisata akan diarahkan pada pembenahan 2 objek wisata yang sudah ada yaitu Pemandian Lubuk Mata Kucing dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau serta pembangunan objek wisata baru yaitu Gua Batu Batirai, Aia Tajun 7 Tingkek dan Kawasan Wisata Bukit Tui
 9. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan
Mengidentifikasi masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin serta faktor-faktor yang menyebabkan kondisi sosial tersebut jatuh pada mereka, menetapkan tindakan yang terencana, terintegrasi dan terawasi untuk mengatasi kondisi masyarakat yang miskin tersebut dan mengupayakan menekan angka kemiskinan serendah rendahnya.
Untuk itu maka peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sangat vital sehingga program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan benar-benar dapat efektif mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Untuk pengangguran maka perlu diberdayakan semua lembaga pelatihan yang ada untuk melatih angkatan kerja yang menganggur dan menyiapkan kelembagaan permodalan yang bisa diakses oleh para pencari kerja. Disamping itu perlu dipikirkan membantu penyaluran tenaga kerja yang sudah dilatih sehingga bisa diserap oleh dunia kerja. Termasuk ke dalam prioritas ini percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan (P3MK).
 10. Mitigasi, Penanggulangan Bencana Alam, dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebencanaan dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat jika terjadi bencana apakah itu kebakaran, gempa bumi ataupun letusan gunung berapi, di samping itu terus melengkapi sarana dan prasarana yang mungkin diperlukan untuk mengatasi bencana di Kota Padang Panjang, termasuk penyediaan jalur dan lokasi evakuasi jika terjadi bencana. Peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang kota, meningkatkan proporsi Ruang Terbuka Hijau serta

mengatasi pembuangan limbah sembarangan yang menimbulkan polusi pada sungai-sungai di Kota Padang Panjang, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah dengan pola 3R (Reduce, Reuse and Recycle).

Hubungan antara Misi, Agenda, dan Prioritas, dapat dilihat pada Tabel 7.7.

Tabel 7.7
Hubungan antara Misi, Agenda, dan Prioritas Pembangunan

NO	MISI	AGENDA	PRIORITAS
1	Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN	1. Perbaiki Tatakelola Pemerintahan Daerah	2. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih
2	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas dan Islami	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan yang berbudaya Islami	3. Peningkatan pendidikan yang berbudaya islami
3	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan masyarakat	4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
4	Mengoptimalkan Potensi dan Daya Saing Ekonomi Daerah	4. Pengembangan Kegiatan Ekonomi Masyarakat	6. Pengembangan Pertanian Berbasis Komoditi Unggulan
			7. Pengembangan Industri dan Perdagangan
			8. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Kota	5. Perbaiki Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	5. Peningkatan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar 10. Mitigasi, Penanggulangan Bencana Alam, dan Pelestarian Lingkungan Hidup
6	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Berbudaya	6. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah serta	1. Peningkatkan pemahaman dan pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat 9. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada Bab terdahulu telah dijelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan rencana pembangunan untuk periode 2013-2018. Untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan tersebut, maka perlu dirumuskan indikasi rencana program yang memuat rencana aksi berupa program dan kegiatan yang lebih terukur, yang disertai dengan indikator kinerja program dan kegiatan serta target-target yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, pada bagian ini juga dihubungkan antara urusan pemerintah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yang berwenang untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

Rincian indikasi rencana program prioritas beserta pendanaannya disajikan pada Tabel 8.1 berikut.

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada Bab terdahulu telah dijelaskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan rencana pembangunan untuk periode 2013-2018. Untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan tersebut, maka perlu dirumuskan indikasi rencana program yang memuat rencana aksi berupa program dan kegiatan yang lebih terukur, yang disertai dengan indikator kinerja program dan kegiatan serta target-target yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Disamping itu, pada bagian ini juga dihubungkan antara urusan pemerintah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, yang berwenang untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

Rincian indikasi rencana program prioritas beserta pendanaannya disajikan pada Tabel 8.1 berikut.

TABEL 8.1

**Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Padang Panjang**

U r u t	Bidang Urusan Pemerin tahan dan Program Prioritas Pemban gunaan	Indikato r Kinerja Program (outcom e)	Ko ndi si Kine rj a Aw al RP JM D (Ta hu n 20 13)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																				Kon disi Kine rja Pada Akhi r Peri ode RPJ MD	SKPD Penang gung Jawab
				Tahun 2014				Tahun 2015				Tahun 2016				Tahun 2017				Tahun 2018					
				Target		Realisasi		Target		Realisasi		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			
				Kin erj a	Keu (Rp0 00)	Ki ne rja	Keu (Rp 000)	Kin erj a	Keu (Rp0 00)	Ki ne rja	Keu (Rp0 00)	Kine rja	Keu (Rp0 00)	Kine rja	Keu (Rp0 00)	Kine rja	Keu (Rp0 00)	Kine rja	Keu (Rp0 00)	Kine rja	Keu (Rp0 00)	Kine rja	Keu (Rp0 00)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																								125. 731. 420	
A	URUSAN WAJIB																								
I	PENDIDI KAN				30.0 47.4 57	13 ,2 1 %	9.8 21. 285		36.2 52.9 25	25 ,8 8 %	23.9 92.8 87		30.7 09.4 85		39.6 95.9 07		30.5 33.7 83		26.5 74.9 77		29.2 89.9 55		25.6 46.3 64	125. 731. 420	DINAS PENDI DIKAN
1	Pelayana n Administ rasi Perkantoran	Persenta se peningka tan pelayana n administ rasi umum perkantoran			5.00 8.91 8	20 ,0 0 %	3.92 1.28 0		5.13 4.14 6	40 ,0 0 %	8.04 1.46 6		5.26 2.50 0		4.95 0.71 9		5.40 5.54 2		5.44 5.79 1		5.52 8.91 2		5.71 8.08 0	28.0 77.3 36	

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			835.855	16,67%	359.267		905.382	30,00%	627.006		333.170		128.675		338.622		141.543		344.211		155.697	<u>1.41</u> <u>2.18</u> <u>7</u>
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			1.033.875	0,00%	-		1.059.722	20,00%	668.959		1.086.215		-		1.113.371		-		1.141.205		-	<u>668.</u> <u>959</u>
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur			107.000	20,00%	69.500		109.675	40,00%	129.350		112.417		70.000		115.228		77.000		118.108		84.700	<u>430.</u> <u>550</u>
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	3.943	20,00%	3.558	baik	4.023	40,00%	6.499	sangat baik	4.104	sangat baik	4.232	sangat baik	4.187	sangat baik	4.655	sangat baik	4.271	sangat baik	4.271	<u>23.2</u> <u>15</u>
6	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase terpenuhinya standar proses, standar Isi, standar Prasarana,	60,00%	66,00%	1.120.444	12,00%	1.356.734	72,00%	811.595	20,00%	3.316.966	78,00%	878.478	78,00%	3.277.995	84,00%	896.770	84,00%	896.770	90,00%	1.321.434	90,00%	1.321.434	<u>10.1</u> <u>69.8</u> <u>99</u>

		standar Penilaian, standar Pengelolaan pada PAUD																							
7	Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Angka melek huruf	99,31%	99,35%	15.593.948	9,00%	1.680.128	99,39%	17.097.564	14,00%	5.800.771	99,42%	14.969.413	99,42%	24.997.965	99,46%	15.369.466	99,46%	15.369.466	99,50%	13.517.119	99,50%	13.517.119	<u>61.365.449</u>	
8	Pendidikan Menengah	Angka putus sekolah tingkat SLTP	0,25%	0,22%	4.176.484	12,26%	1.017.960	0,19%	5.299.772	19,22%	3.173.884	0,16%	2.506.518	0,16%	3.347.244	0,13%	1.688.805	0,13%	1.688.805	0,10%	1.666.651	0,10%	1.666.651	<u>10.894.544</u>	
9	Pendidikan Non Formal	Angka melek huruf	99,31%	99,35%	280.928	5,82%	116.528	99,39%	590.353	14,91%	268.257	99,42%	804.151	99,42%	550.872	99,46%	811.530	99,46%	605.959	99,50%	819.094	99,50%	666.555	<u>2.208.171</u>	
10	Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Terpenuhinya standar proses, standar Isi, standar Prasarana, standar Penilaian, standar Pengelolaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan	60,00%	66,00%	837.334	18,44%	487.080	72,00%	858.270	27,33%	703.821	78,00%	879.728	78,00%	1.056.145	84,00%	901.722	84,00%	901.722	90,00%	924.264	90,00%	924.264	<u>4.073.032</u>	

1	Managem en Pelayana n Pendidik an	Angka melek huruf	99, 31 %	99, 35 %	1.04 8.72 8	11 ,1 1 %	809. 250	99,3 9%	4.38 2.42 3	19 ,2 6 %	1.25 5.90 8	99,4 2%	3.87 2.79 1	99,4 2%	1.31 2.06 0	99,4 6%	3.88 8.54 0	99,4 6%	1.44 3.26 6	99,5 0%	3.90 4.68 6	99,5 0%	1.58 7.59 3	<u>6.40</u> <u>8.07</u> <u>7</u>	
	Total				30.0 47.4 57				36.2 52.9 25				30.7 09.4 85		39.6 95.9 07		30.5 33.7 83		26.5 74.9 77		29.2 89.9 55		25.6 46.3 64	<u>125.</u> <u>731.</u> <u>420</u>	1,40 958E +11
1	KESEHA TAN				11.8 99.4 90	18 6 3 %	7.5 32. 036		12.4 93.7 25	36 ,1 4 %	14.1 91.1 14		14.9 58.1 36		13.7 40.3 37		19.1 97.8 40		10.2 54.0 87		18.7 19.2 89		9.01 8.54 8	<u>54.7</u> <u>36.1</u> <u>23</u>	DINAS KESEH ATAN
1	Pelayana n Administ rasi Perkantoran	Persenta se peningka tan pelayana n administ rasi umum perkantoran			2.06 1.61 1	20 ,0 0 %	1.72 0.73 1		2.16 4.21 5	39 ,6 2 %	3.46 7.04 1		2.27 1.97 5		708. 496		2.35 5.15 0		779. 346		2.47 2.52 0		857. 280	<u>7.53</u> <u>2.89</u> <u>4</u>	
2	Peningka tan Sarana dan Prasaran a Aparatur	Persenta se ketersedi aan biopori/s umur resapan di gedung kantor	-	-	4.84 9.23 5	15 ,7 1 %	2.00 9.76 8	5	4.89 1.71 5	29 ,7 8 %	3.52 7.26 1	-	4.93 6.34 5	-	2.94 7.70 8	-	8.48 3.19 0	-	3.24 2.47 9	-	9.53 2.39 4	-	3.56 6.72 7	<u>15.2</u> <u>93.9</u> <u>42</u>	
3	Peningka tan Disiplin Aparatur	Persenta se peningka tan Disiplin Aparatur			174. 335	20 ,0 0 %	153. 485		183. 055	40 ,0 0 %	331. 366		192. 215		-		21.8 50		21.8 50		22.9 50		22.9 50	<u>529.</u> <u>651</u>	

4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai penempatan	60,00 %	64,00 %	37.350	20,00 %	28.131	68,00 %	39.225	40,00 %	75.684	72,00 %	41.200	72,00 %	30.000	76,00 %	43.280	76,00 %	33.000	80,00 %	45.455	80,00 %	36.300	<u>203.115</u>
5	Peningkatan Pengembangan nilai Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	3.955	16,00 %	3.842	baik	204.160	32,00 %	5.404	baik	254.376	baik	1.608	sangat baik	769.140	sangat baik	769.140	sangat baik	844.355	sangat baik	844.355	<u>1.624.349</u>
6	Obat dan Pembekalan Kesehatan	Persentase peningkatan kesehatan masyarakat			213.703	20,00 %	212.512		224.395	40,00 %	424.623		235.620		-		247.410		247.410		259.785		259.785	<u>1.144.330</u>
7	Upaya kesehatan Masyarakat	Persentase penjarangan penyakit tidak menular	15,00 %	20,00 %	2.675.442	20,00 %	1.490.0160	25,00 %	2.800.8840	39,00 %	2.923.9.203	30,00 %	2.945.9.315	30,00 %	1.224.6.234	35,00 %	3.090.6.810	35,00 %	1.347.8.857	40,00 %	3.255.1.725	40,00 %	1.483.3.743	<u>8.478.198</u>
8	Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase peningkatan kesehatan masyarakat			86.263	20,00 %	85.976		90.600	40,00 %	170.047		95.150		81.547		99.925		89.702		104.930		98.672	<u>525.944</u>

		kat																						
9	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	67,90 %	69,32 %	358.013	20,00 %	348.440	70,74 %	375.930	40,00 %	726.160	72,16 %	394.745	72,16 %	334.905	73,58 %	414.495	73,58 %	368.396	75,00 %	435.225	75,00 %	405.235	<u>2.18</u> <u>3.13</u> <u>6</u>
10	Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Status gizi kurang	5,80 %	5,64 %	74.625	20,00 %	67.159	5,48 %	78.360	40,00 %	141.179	5,32 %	82.285	5,32 %	61.500	5,16 %	86.400	5,16 %	67.650	5,00 %	90.725	5,00 %	74.415	<u>411.</u> <u>903</u>
11	Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah pencapaian tatanan kota sehat	8	8	285.403	15,00 %	236.699	8	299.680	30,00 %	392.414	8	314.670	8	113.149	8	330.415	8	124.464	8	346.940	8	136.910	<u>1.00</u> <u>3.63</u> <u>6</u>
12	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Tingkat kesembuhan penyakit menular TB Paru	64,00 %	68,20 %	202.906	20,00 %	129.705	72,40 %	213.055	40,00 %	321.565	76,60 %	223.710	76,60 %	403.850	80,80 %	234.905	80,80 %	234.905	85,00 %	246.660	85,00 %	246.660	<u>1.33</u> <u>6.68</u> <u>5</u>
13	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	-	-	245.710	10,00 %	508.501	-	258.000	23,33 %	759.915	1	2.270.900	1	6.956.875	1	2.284.445	1	2.284.445	-	298.670	-	298.670	<u>10.8</u> <u>08.4</u> <u>06</u>

14	Peningkatan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jenis pelayanan RSUD Kota Padang Panjang	14	15	285.000	20,00%	261.445	16	299.250	20,00%	261.445	18	314.215	18	-	19	329.930	19	329.930	21	346.430	21	346.430	<u>1.199.250</u>		
15	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Status gizi kurang	5,80%	5,64%	63.821	20,00%	62.613	5,48%	67.015	40,00%	132.054	5,32%	70.370	5,32%	25.595	5,16%	73.890	5,16%	28.155	5,00%	77.585	5,00%	30.970	<u>279.386</u>		
16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase peningkatan kesehatan masyarakat			224.250	20,00%	192.625		235.465	40,00%	420.570		247.240		197.600		259.605		217.360		272.590		239.096	<u>1.267.251</u>		
17	Peningkatan Keselamatan Melahirkan dan Anak	Persentase peningkatan kesehatan masyarakat			57.868	20,00%	20.244		60.765	40,00%	105.183		63.805		651.270		67.000		67.000		70.350		70.350	<u>914.047</u>		
	Total				11.899.490				12.493.725				14.958.136		13.740.337		19.197.840		10.254.087		18.719.289		9.018.548	54.736.123		
2	KESEHATAN				27.668.611	14,23%	28.149.610		35.779.527	23,65%	69.662.182		39.312.982		59.788.280		45.245.846		41.228.230		46.136.872		41.835.233	240.663.534	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Catatan : Kegiatan yang dibiayai

	Aparatur	dengan kompetensi																							
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	3.060	20,00%	3.060	baik	3.156	40,00%	3.408	baik	3.383	baik	775	sangat baik	3.657	sangat baik	3.657	sangat baik	3.991	sangat baik	3.991	<u>14.891</u>	
6	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan kesehatan masyarakat			35.490	20,00%	28.723		35.490	40,00%	106.848		37.265		-		39.128		39.128		41.085		41.085	<u>215.784</u>	
7	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jenis pelayanan spesialisasi	14	15	112.025	5,00%	4.215	16	1.166.050	10,00%	9.365	18	1.174.353	18	428.410	19	1.183.071	19	471.251	20	1.192.225	20	518.376	<u>1.431.617</u>	
8	Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana RS/ RS Jiwa/RS paru-paru/RS mata	Persentase kelengkapan fisik gedung RSUD	60,00%	68,00%	5.569	8,24%	2.287.870	76,00%	9.537.343	14,12%	6.044.361	84,00%	10.109.122	84,00%	24.762.320	92,00%	13.870.273	92,00%	13.870.273	100,00%	11.541.348	100,00%	11.541.348	<u>58.506.172</u>	

9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS	Persentase ketersediaan alat kesehatan	60,00 %	68,00 %	305.325	10,00 %	192.041	76,00 %	312.295	10,00 %	192.041	84,00 %	633.410	84,00 %	-	92,00 %	670.081	92,00 %	670.081	100,00 %	708.085	100,00 %	708.085	<u>1.76</u> <u>2.24</u> <u>8</u>	
10	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah tenaga medis	30	33	814.800	10,00 %	524.750	37	964.800	30,00 %	1.393.404	40	1.200.000	40	960.700	44	1.250.000	44	1.250.000	48	1.300.000	48	1.300.000	<u>5.42</u> <u>8.85</u> <u>4</u>	
11	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Rasio perawat terhadap Tempat Tidur	½	½	16.500.000	20,00 %	21.425.661	½	19.000.000	40,00 %	55.674.172	1/1	20.000.000	1/1	32.000.000	1/1	22.500.000	1/1	22.500.000	1/1	25.000.000	1/1	25.000.000	<u>156.</u> <u>599.</u> <u>833</u>	
		Jumlah Total/tahun			27.668.611				35.779.527				39.312.982		59.788.280		45.245.846		41.228.230		46.136.872		41.835.233	<u>240.</u> <u>663.</u> <u>534</u>	
	PEKERJAAN UMUM				60.088.045	13,32 %	46.948.121		114.954.992	25,93 %	106.664.683		96.699.788		186.341.625		89.927.936		306.434.698		62.961.064		76.174.746	745. 562. 324	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			4.341.812	20,00 %	3.730.596		4.562.272	40,00 %	9.085.620		4.791.500		6.739.180		5.035.240		5.035.240		5.292.764		5.292.764	<u>29.8</u> <u>83.4</u> <u>00</u>	

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan biopori/sumur resapan di gedung kantor	-	-	12.677.785	15,84%	9.699.626	15	31.119.955	28,31%	15.719.145	-	14.660.410	-	35.980.424	-	13.403.131	-	197.552.072	-	807.300	-	18.307.300	<u>277.258.567</u>
		Jumlah gedung baru kantor pemerintahan yang representatif	-	-			-				-				3		3		1		1			
		Jumlah Islamic Centre	-	0,00%			20,00%				50,00%		50,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
		Persentase ketertiban perparkiran													1				1					
		Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur																						
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan Disiplin Aparatur			71.000	20,00%	67.000		41.500	40,00%	108.450		41.500		-		45.000		45.000		45.000		45.000	<u>265.450</u>
4	Peningkatan Kapasitas Sumber	Persentase peningkatan sumber			75.000	20,00%	37.025		77.000	40,00%	133.895		79.000		47.500		82.000		82.000		85.000		85.000	<u>385.420</u>

	Daya Aparatur	daya aparatur																						
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	4.551	20,00%	4.523	baik	4.830	40,00%	6.558	baik	5.050	baik	2.369	sangat baik	5.300	sangat baik	2.606	sangat baik	5.550	sangat baik	2.866	<u>18.922</u>
		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																						
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Prasarana Transportasi yang memadai	83,00	83,00	5.083.920	12,27%	2.408.455	84,00	4.600.000	32,27%	7.931.607	85,00	16.932.000	85,00	17.265.030	86,00	18.503.000	86,00	18.991.533	88,10	7.500.000	88,10	7.500.000	<u>54.096.625</u>
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
7	Pembangunan Saluran Drainase Gorong-Gorong	Persentase pengelolaan drainase	79,30%	81,44%	3.166.155	20,00%	2.858.818	83,58%	1.450.000	40,00%	4.757.551	85,72%	1.100.000	85,72%	2.747.980	87,86%	1.100.000	87,86%	1.100.000	90,00%	1.050.000	90,00%	1.050.000	<u>12.514.349</u>
8	Pembangunan Turab/Talud/Bronjong	Persentase pelayanan kepada masyarakat dibidang			864.530	20,00%	855.027		800.000	40,00%	1.963.915		850.000		1.986.480		850.000		850.000		900.000		900.000	<u>6.555.422</u>

		sarana dan prasarana turab/talud/bronjong																							
9	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah jembatan yang berkualitas dan terpeliharaan	14	14	14.348.962	20,0%	13.109.434	14	9.650.000	36,67%	28.792.426	14	10.070.000	14	18.213.860	14	10.700.000	14	10.700.000	14	11.330.000	14	11.330.000	<u>82.145.720</u>	
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%			
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023			
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase keamanan jalan raya pada malam hari			357.660	10,0%	349.794		700.000	30,0%	1.316.762		700.000		949.150		500.000		500.000		500.000		500.000	<u>3.615.706</u>	
11	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi			4.671.098	19,8%	3.411.857		3.950.000	29,0%	9.682.788		3.950.000		14.973.275		3.950.000		3.950.000		3.950.000		3.950.000	<u>35.967.920</u>	
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%			
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023			

			64	96																					
1 2	Pengembangan Kinerja Pengelola Air Minum dan Air Limbah	Persentase penduduk yang memiliki akses air bersih	92,00 %	92,60 %	2.185.062	20,0 %	1.983.988	93,20 %	2.065.000	40,0 %	4.488.224	93,80 %	2.065.000	7.717.350	94,40 %	2.070.000	94,40 %	2.070.000	95,00 %	2.070.000	95,00 %	2.070.000	2.070.000	<u>18.329.562</u>	
		Jumlah pengelola sumber air bersih	5 lokasi	5 lokasi				5 lokasi				6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi			
		Jumlah sarana pengelolaan limbah	5 unit	6 unit				6 unit				7 unit		7 unit		8 unit		8 unit		9 unit		9 unit			
1 3	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Angka kemiskinan	6,50 %	6,30 %	153.624	10,0 %	93.985	6,10 %	70.000	20,0 %	174.478	5,90 %	70.000	5,90 %	87.900	5,70 %	75.000	5,70 %	75.000	5,50 %	75.000	5,50 %	75.000	<u>506.363</u>	
		Pertumbuhan PDRB	6,24 %	6,35 %				6,46 %				6,58 %		6,58 %		6,69 %		6,69 %		6,80 %		6,80 %			
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023			
1 4	peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ru	Persentase kelengkapan fisik gedung RSUD	60,00 %	68,00 %	1.318.206	20,0 %	1.275.173		-	29,7 %	3.592.058		-		-		-		-		-		-	<u>4.867.231</u>	

	mah sakit mata																							
15	Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen perencanaan pemanfaatan ruang	2 dokumen	1 dokumen	1.200.130	15,0%	1.066.365	1 dokumen	1.148.000	25,0%	1.898.166	1 dokumen	748.000	1 dokumen	145.195	1 dokumen	148.000	1 dokumen	148.000	-	148.000	-	148.000	<u>3.405.726</u>
16	Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang termasuk kawasan penambangan kapur	0,00%	25,00%	55.335	20,0%	40.410	50,00%	65.000	40,0%	94.897	75,00%	60.000	75,00%	-	100,00%	60.000	100,00%	60.000	100,00%	60.000	100,00%	60.000	<u>255.307</u>
17	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	67,90%	69,32%	48.885	10,0%	45.135	70,74%	150.000	20,0%	108.135	72,16%	150.000	72,16%	19.735	73,58%	150.000	73,58%	150.000	75,00%	250.000	75,00%	250.000	<u>573.005</u>
18	Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan	Persentase sarana dan prasarana pengelola persampahan			4.137	6,67%	3.705		10.065	19,40%	11.507		7.135		7.767		5.365		9.365		6.945		18.965	<u>51.362.099</u>

19	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ruang Terbuka Hijau	6,00%	6,00%	1.752.735	13,35%	1.434.770	6,00%	3.120.000	27,60%	3.733.336	7,00%	2.410.000	7,00%	550.620	7,00%	960.000	7,00%	605.682	8,00%	980.000	8,00%	666.250	<u>6.990.658</u>
		Jumlah penanaman Pohon yang Baru	-	500				1.000				1.500		1.500		2.000		2.000		2.500		2.500		
20	Penataan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70,00%	76,00%	797.978	20,00%	766.785	82,00%	837.870	20,00%	766.785	88,00%	879.763	88,00%	-	94,00%	923.700	94,00%	500.000	100,00%	969.885	100,00%	-	<u>2.033.570</u>
21	Pengembangan Perumahan	Persentase fasilitasi pembangunan rusunawa			0	0,00%	-		0	0,00%	0		0		227.770		0		2.000.000		20.000.000		3.000.000	<u>5.227.770</u>
22	Pengembangan Kawasan Perdagangan	Persentase penyelenggaraan Kawasan pasar pusat yang representatif	-	10,00%	2.780.000	0,00%	-	70,00%	40.000.000	10,00%	731.480	85,00%	30.000.000	85,00%	70.863.950	100,00%	26.000.000	100,00%	48.000.000	100,00%	0	100,00%	1.000.000	<u>120.595.430</u>
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896			30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		-	

23	Penataan Struktur Industri	Persentase operasi nalisasi sentra barang jadi kulit	0	-	0	0,00%	-	100,00%	500.000	0,00%	0	-	0	-	59.650	0	0	0	0	0	0	59.650	
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%			6,46%				6,58%	6,58%		6,69%	6,69%		6,80%	6,80%					
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896			30.665.928				33.797.959	33.797.959		36.929.991	36.929.991		40.062.023	40.062.023				-	
24	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah gedung olah raga	0,00%	0,00%		0,00%	-	20,00%	-		70,00%	-	70,00%	-	100,00%	-	100,00%	4.650.000	100,00%	-	100,00%	1.000.000	5.650.000
																							-
25	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase ketersediaan lahan untuk pembangunan rusunawa	0,00%	0,00%		0,00%	-	0,00%			0,00%		0,00%	7.618.310	52.000.000		8.380.141	8.000.000		7.000.000		7.000.000	22.998.451
		Persentase ketersediaan lahan untuk Jalan Lingkar Barat dan Jalan Lingkar Selatan																					-
		Persentase ketersediaan lahan untuk																					-

		RTH																						
		Jumlah Total/tahun			60.088.045				114.954.992				96.699.788		186.341.625		89.927.936		306.434.698		62.961.064		76.174.746	745.562.324
	PERENCANAAN PEMBA NGUNAN				3.316.628	17,36%	3.225.926		3.735.945	32,54%	5.881.735		3.813.411		3.965.069		3.847.214		3.217.613		3.708.394		3.491.035	19.781.378
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			1.191.484	20,0%	1.111.710		1.228.028	38,1%	2.085.695		1.252.707		1.364.888		1.284.024		1.284.024		1.316.123		1.316.123	<u>7.162.440</u>
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi biopori/sumur resapan	10	-	220.110	13,3%	423.099	10	517.770	30,0%	767.618	-	189.040	-	822.580	-	226.839	-	226.839	-	130.839	-	130.839	<u>2.370.975</u>
		Persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur																					-	
																							-	

3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan Disiplin Aparatur			30.400	20,00%	30.400		30.400	40,00%	61.900		33.600		-		33.600		33.600		35.200		35.200	<u>161.100</u>
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	3.495	20,00%	3.495	baik	3.495	40,00%	4.440	baik	3.495	baik	-	sangat baik	3.495	sangat baik	3.495	sangat baik	3.495	sangat baik	3.495	<u>14.925</u>
		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																						
5	Pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data pendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	30,00%	40,00%	243.711	13,33%	184.396	50,00%	225.805	23,33%	283.780	60,00%	373.169	60,00%	154.250	70,00%	425.041	70,00%	169.675	80,00%	333.642	80,00%	186.643	<u>978.744</u>
6	Kerjasama Pembangunan	Persentase Kerjasama Pembangunan			32.275	20,00%	29.300		52.275	40,00%	59.600		52.275		46.213		47.540		47.540		47.540		47.540	<u>230.193</u>

7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku.	30,00 %	40,00 %	98.600	13,3 %	61.100	50,00 %	152.600	33,3 %	198.712	60,00 %	122.171	60,00 %	45.000	70,00 %	122.852	70,00 %	49.500	80,00 %	156.415	80,00 %	54.450	<u>408.762</u>
8	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70,00 %	76,00 %	1.028.940	32,3 %	947.277	82,00 %	786.044	45,7 %	1.617.009	88,00 %	769.401	88,00 %	924.765	94,00 %	757.244	94,00 %	757.244	100,00 %	1.031.880	100,00 %	1.031.880	<u>5.278.175</u>
		Persentase ketepatan dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan peraturan yang berlaku.	30,00 %	40,00 %				50,00 %				60,00 %		60,00 %		70,00 %		70,00 %		80,00 %		80,00 %		
		Persentase keterwakilan masyarakat yang hadir	96,70 %	97,16 %				97,62 %				98,08 %		98,08 %		98,54 %		98,54 %		99,00 %		99,00 %		

		musrenbang																						
		Jumlah usulan musrenbang kecamatan tertampung di APBD	59,00%	61,20%				63,40%				65,60%		65,60%		67,80%		67,80%		70,00%		70,00%		
		Jumlah regulasi kawasan industri kapur (Revisi RPJPD)	-	-				-				100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
9	Perencanaan Sosial Budaya	Angka kemiskinan	6,50%	6,30%	35.600	13,33%	43.148	6,10%	16.775	30,00%	55.321	5,90%	17.775	5,90%	60.388	5,70%	18.500	5,70%	18.500	5,50%	20.450	5,50%	20.450	<u>197.807</u>
10	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen AMPL	0,00%	100,00%	24.850	20,00%	24.627	-	-	20,00%	24.627	-	-	32.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u>82.154</u>
11	Pelayanan dan Rehabilitasi Pelayanan Sosial	Angka kemiskinan	6,50%	6,30%	53.760	20,00%	50.260	6,10%	53.760	40,00%	98.980	5,90%	55.000	5,90%	57.625	5,70%	55.000	5,70%	55.000	5,50%	55.000	5,50%	55.000	<u>316.865</u>
12	Perencanaan Tata Ruang	Jumlah regulasi kawasan industri kapur (Revisi RTRW)			59.815	10,00%	42.766		65.796	20,00%	87.166		472.376		49.475		179.613		54.423		87.575		59.865	<u>293.694</u>

13	Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi	Jumlah nilai investasi	Rp. 515 milyar	Rp. 540 milyar	293.588	10,0%	274.348	Rp. 565 milyar	570.977	22,5%	536.887	Rp. 590 milyar	427.402	Rp. 590 milyar	288.885	Rp. 615 milyar	643.466	Rp. 615 milyar	317.774	Rp. 640 milyar	435.235	Rp. 640 milyar	349.551	<u>1.76</u> <u>7.44</u> <u>4</u>	
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%			
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023			
14	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah kerjasama penelitian dengan pendidikan tinggi	-	-				1	40.000			1	45.000	1	118.100	1	50.000	1	200.000	1	55.000	1	200.000	<u>518.</u> <u>100</u>	
	Total				3.316.628				3.735.945				3.813.411		3.965.069		3.847.214		3.217.613		3.708.394		3.491.035	19.781.378	
	PERHUBUNGAN				3.965.127	14,74%	3.501.259		5.508.607	31,97%	7.393.336		5.524.213		3.295.627		5.515.108		3.536.098		7.563.088		3.758.047	21.484.367	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perkantoran	0,00%	0,00%	974.799	18,46%	1.000.767	20,00%	1.010.119	35,38%	2.073.185	30,00%	1.052.903	30,00%	1.180.023	40,00%	1.081.303	40,00%	1.081.303	50,00%	1.114.937	50,00%	1.114.937	<u>6.45</u> <u>0.21</u> <u>5</u>	

		Terwujudnya penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan SPIP																							
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase biopori/sumur resapan di gedung kantor	-	-	183.938	20,0 %	173.108	25	295.000	40,0 %	407.072	25	325.000	25	87.709	25	325.000	25	96.480	25	385.000	25	106.128	<u>870.497</u>	
		Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur																							
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan Disiplin Aparatur			74.185	20,0 %	70.964		125.000	40,0 %	149.909		125.000		-		125.000		125.000		125.000		125.000	<u>470.873</u>	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur			50.000	20,0 %	24.325		65.000	40,0 %	46.075		80.000		12.000		90.000		13.200		105.000		14.520	<u>110.120</u>	

5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	2.375	20,00%	2.261	baik	2.614	40,00%	3.137	baik	2.626	baik	-	sangat baik	2.631	sangat baik	2.631	sangat baik	2.636	sangat baik	2.636	10,665
		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																						
6	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase kualitas fasilitas lalu lintas	40,00%	44,00%	708.745	5,71%	478.009	48,00%	487.600	8,57%	729.388	52,00%	937.600	52,00%	285.035	56,00%	502.600	56,00%	313.539	60,00%	1.502.600	60,00%	344.892	2,150863
		Persentase ketersediaan prasarana dan sarana transportasi umum	30,00%	37,00%				44,00%				51,00%		51,00%		58,00%		58,00%		65,00%		65,00%		
		Jumlah Terminal bongkar muat barang di pasar induk hasil pertanian	-	-				-				1		1		-		-		-		-		
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		

7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase kualitas fasilitas lalu lintas	40,00 %	44,00 %	304.185	13,3 %	284.369	48,00 %	395.000	33,3 %	655.980	52,00 %	355.000	52,00 %	108.725	56,00 %	445.000	56,00 %	119.598	60,00 %	395.000	60,00 %	131.557	<u>1.30</u> <u>0.22</u> <u>9</u>
		Pertumbuhan PDRB	6,24 %	6,35 %			6,46 %				6,58 %		6,58 %		6,69 %		6,69 %		6,80 %		6,80 %			
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896			30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023			
8	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase ketertiban perparkiran	30,00 %	36,00 %	591.800	13,3 %	520.506	42,00 %	1.154.326	28,3 %	1.059.823	48,00 %	996.259	48,00 %	509.450	54,00 %	1.037.784	54,00 %	560.395	60,00 %	2.126.063	60,00 %	616.435	<u>3.26</u> <u>6.60</u> <u>9</u>
		Persentase ketersediaan prasarana dan sarana transportasi umum	30,00 %	37,00 %			44,00 %				51,00 %		51,00 %		58,00 %		58,00 %		65,00 %		65,00 %			
		Pertumbuhan PDRB	6,24 %	6,35 %			6,46 %				6,58 %		6,58 %		6,69 %		6,69 %		6,80 %		6,80 %			
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896			30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023			
9	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase kualitas fasilitas lalu lintas	40,00 %	44,00 %	745.650	16,0 %	671.394	48,00 %	1.008.948	28,0 %	1.162.325	52,00 %	829.825	52,00 %	405.255	56,00 %	1.100.790	56,00 %	445.781	60,00 %	966.852	60,00 %	490.359	<u>3.17</u> <u>5.11</u> <u>3</u>
		Persentase ketersediaan prasarana dan sarana	30,00 %	37,00 %			44,00 %				51,00 %		51,00 %		58,00 %		58,00 %		65,00 %		65,00 %			

		transportasi umum																						
		Persentase peningkatan ketertiban perparkiran	30,00%	36,00%				42,00%				48,00%		48,00%		54,00%		54,00%		60,00%		60,00%		
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
10	Pengembangan Komunikasi dan Media Massa	Persentase pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70,00%	76,00%	299.310	20,0%	245.809	82,00%	850.000	40,0%	977.737	88,00%	725.000	88,00%	693.725	94,00%	710.000	94,00%	763.098	100,00%	745.000	100,00%	745.000	<u>3.42</u> <u>5.36</u> <u>9</u>
		Persentase ketersediaan infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi	30,00%	38,00%				46,00%				54,00%		54,00%		62,00%		62,00%		70,00%		70,00%		-
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
																								-

1	Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi			-	0,00%	-		50.000	20,00%	55.430		25.000		13.705		25.000		15.076		25.000		16.583	<u>100.794</u>	
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%			
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023			
1	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70,00%	76,00%	30.140	10,00%	29.747	82,00%	65.000	30,00%	73.275	88,00%	70.000	88,00%	-	94,00%	70.000	94,00%	-	100,00%	70.000	100,00%	50.000	<u>153.022</u>	
		Jumlah Total/tahun			3.965.127			5.508.607				5.524.213		3.295.627		5.515.108		3.536.098		7.563.088		3.758.047	21.484.367		
	LINGKUNGAN HIDUP				3.450.3987	15,60%	949.715		3.148.469	32,62%	3.007.440		3.798.660		1.725.809		3.330.328		2.103.639		3.695.327		2.567.958	10.354.562	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum			627.383	20,00%	429.480		627.056	38,46%	890.036		691.694		497.868		726.280		547.655		762.594		602.420	<u>2.967.459</u>	

		perkantoran																							
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi biopori/sumur resapan	10	-	295.205	16,00%	103.613	10	309.966	36,00%	158.512	-	325.464	-	29.246	-	341.738	-	32.171	-	358.826	-	35.388	<u>358.929</u>	
		Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur																						-	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan Disiplin Aparatur			19.775	20,00%	16.680		20.764	40,00%	28.580		21.802		-		22.893		22.893		24.037		24.037	<u>92.190</u>	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur			40.000	20,00%	22.725		42.000	40,00%	40.225		44.100		15.000		46.305		16.500		48.621		18.150	<u>112.600</u>	
5	Peningkatan Pengembangan Sistem	Persentase peningkatan nilai SKPD	baik	baik	2.076	20,00%	2.068	baik	2.181	40,00%	2.528	baik	2.290	baik	-	sangat baik	2.405	sangat baik	2.405	sangat baik	2.525	sangat baik	2.525	<u>9.526</u>	

10	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi dengan biopori/sumur resapan	5	7	-	0,00 %	-	9	200.000	20,00 %	13.982	11	200.000	11	4.285	13	200.000	13	200.000	15	200.000	15	200.000	200.000	<u>418.267</u>	
		Jumlah lokasi pengelolaan sumber air bersih	5 lokasi	5 lokasi				5 lokasi				6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi		6 lokasi				
		Jumlah Total/tahun				3.453.987			3.148.469				3.798.660		1.725.809		3.330.328		2.103.639		3.695.327		2.567.958	10.354.562		
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1.737.533	18,36 %	1.210.900		2.194.725	34,70 %	2.769.347		2.614.725		1.490.416		2.137.675		1.352.143		2.079.958		1.453.257	8.276.062	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perkantoran			855.279	20,00 %	637.839		1.036.950	34,80 %	1.339.665		1.079.900		583.820		1.127.400		642.202		1.143.400		706.422	<u>3.909.948</u>		
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jumlah SKPD yang menerapkan ISO 9001	0,00%	0,00%	309.345	19,50 %	152.693	30,00%	423.000	33,85 %	422.797	60,00%	603.000	60,00%	416.650	100,00%	130.000	100,00%	130.000	100,00%	104.000	100,00%	104.000	<u>1.226.140</u>		

	n																								
		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																							
6	Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerapan ISO 9001	0,00%	0,00%	510.252	10,63%	344.164	30,00%	665.625	19,68%	866.788	60,00%	862.675	60,00%	474.620	100,00%	796.125	100,00%	522.082	739.408	574.290	<u>2.78</u> <u>1.94</u> <u>4</u>			
		Kriteria kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah daerah berdasarkan kriteria hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat	kriteria	baik				baik				baik		baik		baik		baik		sangat baik		sangat baik			
		Jumlah Total/tahun			1.73 7.53 3				2.19 4.72 5				2.61 4.72 5		1.49 0.41 6		2.13 7.67 5		1.35 2.14 3		2.07 9.95 8		1.45 3.25 7	8.27 6.06 2	
	PEMBER DAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIN DUNGAN				3.61 1.32 5	15,4 2 %	3.1 54. 671		3.98 2.97 8	31,8 2 %	7.06 0.14 7		4.04 1.78 7		2.77 8.46 6		4.18 1.01 1		3.11 3.99 9		4.37 4.26 9		3.41 8.38 7	19.5 25.6 69	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

ANAK																							DAN KB	
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			622.498	18,33%	467.497		653.704	35,00%	1.184.520		686.802		636.120		721.594		699.732		785.519		769.705	<u>3.75</u> <u>7.57</u> <u>4</u>
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			130.250	12,00%	127.754		43.550	24,00%	195.143		99.978		12.350		81.477		13.585		88.051		14.944	<u>363.</u> <u>776</u>
		Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi biopori/sumur resapan	-	-			20			20		20		-		-		-		-		-	-	-
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan Disiplin Aparatur			19.400	20,00%	14.550		20.370	40,00%	28.350		21.389		-		22.458		22.458		23.581		23.581	<u>88.9</u> <u>39</u>

4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur			30.000	20,00%	29.970		31.500	40,00%	59.860	0,00%	33.075	0,00%	22.500		34.729		24.750		36.466		27.225	<u>164.305</u>
5	Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	3.250	20,00%	3.188	baik	3.413	35,00%	4.851	baik	3.585	baik	1.581	sangat baik	3.765	sangat baik	1.739	sangat baik	3.952	sangat baik	1.913	<u>13.272</u>
		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																						
6	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	4 kasus	5 kasus	278.495	13,33%	281.428	10 kasus	358.422	33,33%	693.773	15 kasus	376.343	15 kasus	121.905	20 kasus	395.160	20 kasus	134.096	25 kasus	414.919	25 kasus	147.505	<u>1.378.707</u>
		IPG Kota Padang Panjang	77,77%	78,22%			78,66%				79,11%		79,11%		79,55%		79,55%		80,00%		80,00%			

7	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	4 kasus	5 kasus	38.865	20,0%	38.768	10 kasus	85.000	20,0%	38.768	15 kasus	89.250	15 kasus	65.315	20 kasus	93.713	20 kasus	71.847	25 kasus	98.399	25 kasus	79.031	<u>293.729</u>
8	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi kelembagaan masyarakat	20,00%	36,00%	383.490	20,0%	353.832	52,00%	355.000	40,0%	657.343	68,00%	372.750	68,00%	65.890	84,00%	391.388	84,00%	72.479	100,00%	410.958	100,00%	79.727	<u>1.229.271</u>
		Persentase Partisipasi kelembagaan masyarakat	20,00%	36,00%				52,00%				68,00%		68,00%		84,00%		84,00%		100,00%		100,00%		
9	Keluarga Berencana	Angka kelahiran	2,10%	2,04%	1.533.288	16,20%	1.278.216	1,98%	1.570.465	36,20%	2.834.918	1,92%	1.602.866	1,92%	1.397.900	1,86%	1.643.189	1,86%	1.537.690	1,80%	1.679.210	1,80%	1.691.459	<u>8.740.183</u>
10	Kesehatan Reproduksi	Persentase cakupan sasaran	76,60%	77,28%	334.670	20,0%	329.695	77,96%	351.405	40,0%	645.270	78,64%	368.975	78,64%	199.820	79,32%	387.424	79,32%	219.802	80,00%	406.795	80,00%	241.782	<u>1.636.369</u>

	Remaja	PUS menjadi peserta KB Baru																							
11	Pelayanan Kontrasepsi	Persentase cakupan PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun	4,50%	4,10%	59.775	20,00%	52.974	3,70%	62.764	40,00%	119.122	3,30%	65.902	3,30%	75.030	2,90%	69.198	2,90%	69.198	2,50%	72.657	2,50%	72.657	<u>388.981</u>	
12	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Angka kelahiran	2,10%	2,04%	177.344	16,00%	176.799	1,98%	322.385	32,00%	538.436	1,92%	274.622	1,92%	180.055	1,86%	288.353	1,86%	198.061	1,80%	302.771	1,80%	217.867	<u>1.311.217</u>	
		persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta aktif KB	72,00%	73,60%				75,20%				76,80%		76,80%		78,40%		78,40%		80,00%		80,00%			
		persentase cakupan anggota sasaran BKB,BKR,BKL dan sasaran UPPKS untuk ber KB	80,00%	83,00%				86,00%				89,00%		89,00%		92,00%		92,00%		95,00%		95,00%			

13	Pengembangan Pusat Pelayanan Konsultasi dan Pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta aktif KB	72,00 %	73,60 %	-	0,00 %	-	75,20 %	100,000	10,00 %	40.38	76,80 %	20,000	76,80 %	-	78,40 %	21,000	78,40 %	21,000	80,00 %	22,050	80,00 %	22,050	<u>83.388</u>	
14	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase cakupan anggota sasaran BKB,BKR,BKL dan sasaran UPPKS untuk ber KB	80,00 %	83,00 %	-	0,00 %	-	86,00 %	25,000	20,00 %	19.455	89,00 %	26,250	89,00 %	-	92,00 %	27,563	92,00 %	27,563	95,00 %	28,941	95,00 %	28,941	<u>75.959</u>	
		Jumlah Total/tahun							3.611.325				3.982.978						3.113.999				3.418.387	19.525.669	
	SOSIAL					14,85 %	2.883.205		4.052.379	30,18 %	5.956.616		4.052.984		2.402.176	4.014.342		3.071.211		4.117.411		3.360.301	17.673.509	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	19799299422
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perkantoran			890.542	20,00 %	796.146		927.715	38,18 %	1.640.081		971.875		880.265		1.019.428		968.292		1.069.113		1.065.121	<u>5.349.904</u>	

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			272.323	16,0%	255.486		438.690	23,3%	462.263		406.143		85.600		163.951		94.160		145.784		103.576	<u>1.00</u> <u>1.08</u> <u>5</u>
		Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi biopori/sumur resapan	-	-			10				10		10		-		-		-		-		-	-
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			20.200	20,0%	20.140		25.000	40,0%	41.412		26.250		-		27.563		27.563		28.941		28.941	<u>118.</u> <u>056</u>
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			30.000	20,0%	19.100		30.000	40,0%	39.175		31.500		15.000		33.075		16.500		34.729		18.150	<u>107.</u> <u>925</u>
5	Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	3.334	20,0%	3.178	baik	3.503	40,0%	3.760	baik	3.679	baik	-	sangat baik	3.861	sangat baik	3.861	sangat baik	4.055	sangat baik	4.055	<u>14.8</u> <u>54</u>

		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																							
6	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Angka kemiskinan	6,50%	6,30%	994.278	14,00%	527.769	6,10%	918.041	28,9%	1.005.660	5,90%	922.943	5,90%	548.840	5,70%	958.839	5,70%	603.724	5,50%	996.032	5,50%	664.096	<u>3.350.089</u>	
		Jumlah PMKS per lima tahun	0,00%	1,00%				1,00%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%			
7	Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Angka kemiskinan	6,50%	6,30%	55.337	13,3%	45.045	6,10%	168.104	28,2%	214.199	5,90%	121.010	5,90%	112.012	5,70%	154.060	5,70%	123.213	5,50%	127.263	5,50%	127.263	<u>621.732</u>	
		Jumlah PMKS per lima tahun	0,00%	1,00%				1,00%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%			
8	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase ketersediaan ruang terbuka untuk evakuasi bencana	6 lokasi	-	114.698	11,40%	340.558	1 lokasi	210.433	28,7%	646.128	1 lokasi	220.955	1 lokasi	185.700	1 lokasi	232.003	1 lokasi	204.270	1 lokasi	243.604	1 lokasi	243.604	<u>1.620.260</u>	
		Angka kemiskinan	6,50%	6,30%				6,10%				5,90%		5,90%		5,70%		5,70%		5,50%		5,50%			
		Jumlah PMKS per lima tahun	0,00%	1,00%				1,00%				1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%			
9	Pembinaan anak terlantar	Jumlah PMKS per lima tahun	0,00%	1,00%	79.179	20,0%	43.937	1,00%	83.138	30,0%	62.786	1,00%	87.295	1,00%	43.149	1,00%	91.660	1,00%	47.464	1,00%	96.243	1,00%	52.210	<u>249.546</u>	

10	Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah PMKS (Penyandang Cacat dan Eks Trauma) per lima tahun	0,00%	1,00%	20.005	10,00%	17.703	1,00%	-	10,00%	17.703	1,00%	70.000	1,00%	-	1,00%	-	1,00%	-	1,00%	70.000	1,00%	70.000	<u>105.406</u>
11	Pembinaan penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya) per lima tahun	Jumlah PMKS (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya) per lima tahun	0,00%	1,00%	84.000	10,00%	11.175	1,00%	84.000	20,00%	61.801	1,00%	88.200	1,00%	126.050	1,00%	92.610	1,00%	138.655	1,00%	97.241	1,00%	97.241	<u>434.922</u>
12	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Angka kemiskinan	6,50%	6,30%	422.998	11,40%	340.558	6,10%	425.991	28,73%	646.128	5,90%	430.983	5,90%	-	5,70%	434.282	5,70%	434.282	5,50%	437.746	5,50%	437.746	<u>1.858.714</u>
13	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Angka kemiskinan	6,50%	6,30%	511.160	10,00%	400.379	6,10%	631.909	30,00%	948.166	5,90%	562.254	5,90%	290.385	5,70%	688.867	5,70%	319.424	5,50%	646.810	5,50%	351.366	<u>2.309.719</u>
14	Peningkatan kesempatan kerja	Angka pengangguran	5,20%	5,00%	31.988	20,00%	29.352	4,80%	33.588	40,00%	61.807	4,60%	35.267	4,60%	67.200	4,40%	37.031	4,40%	37.031	4,20%	38.882	4,20%	38.882	<u>234.272</u>
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		

		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
15	Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Penurunan Angka pengangguran	5,20%	5,00%	25.968	6,67%	32.679	4,80%	72.267	26,67%	105.547	4,60%	74.630	4,60%	47.975	4,40%	77.112	4,40%	52.773	4,20%	80.968	4,20%	58.050	<u>297.023</u>
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
																								-
		Jumlah Total/tahun			3.556.010				4.052.379				4.052.984		2.402.176		4.014.342		3.071.211		4.117.411		3.361.031	17.673.509
	KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH				7.709.999	16,18%	4.868.508	9.869.575	29,42%	10.664.501		8.369.174	8.945.339	10.413.546		6.637.191		9.624.209		6.910.032	38.025.571	DINAS KOPERASI, UMKM DAN INDAG		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			1.823.315	18,46%	1.616.716	1.962.825	35,38%	3.196.633		1.310.376	2.022.717	1.457.495		1.457.495		1.585.609		1.585.609			<u>9.879.170</u>	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase peningkatan pelayanan sarana			258.375	16,67%	244.637	350.786	30,00%	741.926		490.528	630.150	1.420.081		693.165		335.039		335.039			<u>2.644.917</u>	

	Aparatur dan prasarana aparatur																							
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			53.550	20,0%	39.397		32.000	40,0%	81.142		35.200		-		38.720		38.720		42.592		42.592	<u>201.851</u>
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			90.000	10,0%	70.500		159.000	20,0%	139.200		100.000		20.000		175.000		175.000		100.000		100.000	<u>504.700</u>
5	Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	3.228	20,0%	3.224	baik	3.228	40,0%	4.101	baik	3.460	baik	1.100	sangat baik	3.460	sangat baik	1.210	sangat baik	3.825	sangat baik	1.331	<u>10.966</u>
		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																						
6	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase operasional sentra barang jadi kulit	25,00%	38,00%	185.585	5,67%	158.539	51,00%	285.000	19,00%	243.695	64,00%	210.000	64,00%	19.450	77,00%	610.000	77,00%	21.395	90,00%	220.000	90,00%	23.535	<u>466.614</u>
		Persentase asosiasi UMKM yang	76,00%	80,00%				85,00%			90,00%		90,00%		95,00%		95,00%		100,00%		100,00%			

		aktif																						
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
7	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase operasional sentra barang jadi kulit	25,00%	38,00%	210.643	19,60%	186.508	51,00%	165.000	23,60%	216.332	64,00%	177.500	64,00%	-	77,00%	188.000	77,00%	188.000	90,00%	201.000	90,00%	201.000	<u>791.840</u>
		Jumlah koperasi yang aktif	58 unit	60 unit				62 unit				64 unit		64 unit		66 unit		66 unit		68 unit		68 unit		
		Meningkatnya klasifikasi UMKM																						
		- Usaha Mikro	4487	4576				4666				4755		4755		4845		4845		4935		4935		
		- Usaha Kecil	549	559				570				581		581		592		592		603		603		
		- Usaha Menengah	27	27				27				28		28		28		28		29		29		
		Jumlah asosiasi UMKM baru	-	1				2				3		3		4		4		5		5		
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		

8	Kemitraan UMKM	Persentase Peningkatan kemitraan dan kualitas promosi pemasaran	0	30 UMKM	18.0 00			40 UMKM	22.5 00			40 UMKM	25.0 00	40 UMKM	-	40 UMKM	25.0 00	40 UMKM	25.0 00	40 UMKM	25.0 00	40 UMKM	25.0 00	50.0 00
9	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Persentase operasional sentra barang jadi kulit	25,00 %	38,00 %	688.660	20,00 %	612.425	51,00 %	1.033.770	40,00 %	1.275.391	64,00 %	1.203.270	64,00 %	486.547	77,00 %	1.265.020	77,00 %	535.202	90,00 %	1.328.340	90,00 %	588.722	3.49 8.28 7
		Jumlah dana bergulir di Masyarakat	Rp. 3,5 milyar	Rp. 4,5 milyar				Rp. 5,5 milyar				Rp. 6,5 milyar			Rp. 7,5 milyar			Rp. 7,5 milyar			Rp. 8,5 milyar			
		Jumlah UMKM yang memanfaatkan Dana Bergulir	372 orang	399 orang				427 orang				4547 orang			4547 orang			4822 orang			509 orang			509 orang
		Jumlah klasifikasi UMKM																						
		- Usaha Mikro	448 7	457 6				466 6				4755			4755			4845			493 5			493 5
		- Usaha Kecil	549	559				570				581			581			592			603			603
		- Usaha Menengah	27	27				27				28			28			28			29			29
		Jumlah asosiasi UMKM baru	-	1				2				3			3			4			4			5
		Pertumbuhan PDRB	6,2 4%	6,3 5%				6,46 %				6,58 %			6,58 %			6,69 %			6,69 %			6,80 %

		PDRB perkapita (ADHB)	24.01.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023			
10	Pengembangan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang tidak aktif	19 unit	17 unit	258.210	16,00%	187.680	15 unit	302.000	28,00%	420.065	13 unit	296.200	13 unit	52.799	11 unit	147.500	11 unit	58.079	9 unit	300.000	9 unit	63.887	<u>782.510</u>	-
		Jumlah koperasi yang aktif	58 unit	60 unit				62 unit				64 unit		64 unit		66 unit		66 unit		68 unit		68 unit			
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%			
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023			
11	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Jumlah regulasi kawasan industri kapur (Perijinan)	24.000 ton/tahun	24.000 ton/tahun	20.000	6,67%	18.517	24.000 ton/tahun	293.000	20,00%	174.930	100,00%	75.000	100,00%	-	100,00%	28.000	100,00%	28.000	100,00%	30.000	100,00%	30.000	<u>251.447</u>	
		Jumlah regulasi kawasan industri kapur (Perijinan)	-	-				-				100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%			
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%			
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023			
12	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase rumah tangga miskin yang tidak memiliki	6,50%	6,30%	109.835	20,00%	106.810	6,10%	150.000	40,00%	212.465	5,90%	157.500	5,90%	-	5,70%	165.000	5,70%	165.000	5,50%	172.500	5,50%	172.500	<u>656.775</u>	

		listrik																						
13	Pembinaan dan Pengembangan Energi Alternatif	Persentase perkembangan energi Surya			50.625	20,00%	34.275		0	20,00%	34.275		0	-		0		0		0		0		<u>68.5</u> <u>50</u>
14	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah UTPP yang ditertahankan	200 unit	228 unit	2.069.979	11,80%	216.226	256 unit	2.096.326	23,80%	401.999	284 unit	2.126.826	284 unit	1.204.845	312 unit	2.159.826	312 unit	1.325.330	342 unit	2.195.826	342 unit	1.457.862	<u>4.60</u> <u>6.26</u> <u>2</u>
		Persentase penyelesaian sengketa konsumen	100,00%	100,00%				100,00%				100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
15	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%	52.538	12,67%	45.583	6,46%	208.500	32,67%	137.373	6,58%	65.000	6,58%	88.562	6,69%	72.500	6,69%	72.500	6,80%	80.000	6,80%	80.000	<u>424.</u> <u>018</u>
		Jumlah nilai investasi	Rp. 515 milyar	Rp. 540 milyar				Rp. 565 milyar				Rp. 590 milyar		Rp. 590 milyar		Rp. 615 milyar		Rp. 615 milyar		Rp. 640 milyar		Rp. 640 milyar		
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		

		PDRB perkapita (ADHB)	24.01.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
16	Pembinaan dan Pengembangan IKM	Persentase operasional sentra barang jadi kulit	25,00%	38,00%	726.030	18,40%	350.719	51,00%	711.000	28,40%	493.298	64,00%	701.510	64,00%	810.024	77,00%	580.500	77,00%	580.500	90,00%	810.000	90,00%	810.000	<u>3.04</u> <u>4.54</u> <u>1</u>
		Jumlah IKM unggulan :																						
		- bordir	20	24				28				32		32		36		36		40		40		
		- kulit	19	21				23				25		25		27		27		30		30		
		- Makanan ringan	110	122				134				146		146		158		158		170		170		
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
17	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya operasional sentra barang jadi kulit	25,00%	38,00%	758.366	19,33%	652.327	51,00%	1.738.000	29,50%	1.994.592	64,00%	1.000.500	64,00%	769.320	77,00%	1.651.100	77,00%	846.252	90,00%	1.732.400	90,00%	930.877	<u>5.19</u> <u>3.36</u> <u>8</u>
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
18	Penataan Struktur Industri	Persentase operasional sentra barang jadi kulit	25,00%	38,00%	333.060	19,80%	324.425	51,00%	356.640	29,80%	897.084	64,00%	391.304	64,00%	2.839.825	77,00%	426.344	77,00%	426.344	90,00%	462.078	90,00%	462.078	<u>4.94</u> <u>9.75</u> <u>6</u>

		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%			6,46%			6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%					
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896			30.665.928			33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023					
		Jumlah Total/tahun			7.709			9.869.575			8.369.174		8.945.339		10.413.546		6.637.191		9.624.209		6.910.032	38.025.571			
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				6.897.595	12,03%	4.377.455			11.191.923	27,20%	9.912.055			23.909.601	17.270.473			13.580.274	12.168.413	14.288.206	13.179.006	56.907.401	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA	56.907.401
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perkantoran			1.304.871,00	18,46%	1.336.559			1.228.448,00	35,38%	2.839.977			1.307.125,00	1.704.984,00			1.373.421,00	1.373.421,00	1.429.660,00	1.429.660,00	<u>8.684.601</u>		
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			216.765	16,00%	214.541			255.370	28,00%	373.815			276.650	215.469			257.990	237.016	61.890	61.890	<u>1.102.731</u>		
		Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi biopori/s			-	-		20				20		20		-		-		-	-		-		

7	Peningkatan Upaya Penambuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Angka pengangguran	5,20%	5,00%	-	0,00%	-	4,80%	80.000	10,00%	19.135	4,60%	84.000	4,60%	-	4,40%	88.225	4,40%	88.225	4,20%	92.679	4,20%	92.679	<u>200.039</u>
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
8	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang aktif	-	3 cabang	-	0,00%	-	4 cabang	165.000	11,00%	70.281	4 cabang	125.000	4 cabang	-	4 cabang	181.500	4 cabang	181.500	3 cabang	151.250	3 cabang	151.250	<u>403.031</u>
9	Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga	Jumlah cabang olahraga yang aktif	-	3 cabang	155.415	2,86%	141.067	4 cabang	814.300	20,00%	786.672	4 cabang	856.450	4 cabang	802.521	4 cabang	889.687	4 cabang	882.773	3 cabang	924.053	3 cabang	924.053	<u>3.537.086</u>
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang aktif	-	3 cabang	765.630	15,00%	666.675	4 cabang	325.788	21,20%	830.142	4 cabang	6.732.277	4 cabang	1.050.300	4 cabang	497.624	4 cabang	497.624	3 cabang	2.211.848	3 cabang	2.211.848	<u>5.256.589</u>
11	Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah sanggar seni yang aktif	17 unit	1 unit	140.382	20,00%	39.813	1 unit	891.787	40,00%	105.271	1 unit	613.164	1 unit	-	2 unit	716.893	2 unit	716.893	2 unit	675.105	2 unit	675.105	<u>1.537.082</u>
12	Pengelolaan Keragaman	Jumlah sanggar seni yang	17 unit	1 unit	856.850	6,67%	117.150	1 unit	1.491.450	21,33%	259.254	1 unit	1.574.125	1 unit	1.009.775	2 unit	1.660.975	2 unit	1.110.753	2 unit	1.752.175	2 unit	1.221.828	<u>3.718.759</u>

	Budaya	aktif																						
13	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah pelaku industri pariwisata	24 pelaku	28 pelaku	1.294.475	10,0%	1.146.641	32 pelaku	1.738.430	26,7%	2.492.737	36 pelaku	1.751.625	36 pelaku	1.029.435	40 pelaku	1.795.208	40 pelaku	1.132.379	44 pelaku	1.839.980	44 pelaku	1.245.616	<u>7.046.808</u>
		Jumlah kunjungan wisatawan	328.586	346.742				364.898				383.053	383.053		401.209		401.209		419.365		419.365			
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%	6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%			
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896			30.665.928					33.797.959	33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023			
14	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Terwujudnya kawasan strategis pariwisata	10,00%	20,00%	1.576.150	13,3%	156.506	40,00%	3.120.000	19,2%	622.950	60,00%	9.500.000	60,00%	10.620.744	80,00%	5.000.000	80,00%	5.000.000	100,00%	4.000.000	100,00%	4.000.000	<u>20.400.200</u>
			8 objek	fs cabale car, rehab PDI KM				DE D 2 objek wisata				pembangunan objek wisata aia tajun 7 tkt		pembangunan objek wisata aia tajun 7 tkt dan kawasan pariwisata bukit tui		pembangunan objek wisata gua batu batir ai		pembangunan objek wisata gua batu batir ai						-
							rehab LMK dan peni					rehab sedang/erat		rehab sedang/erat		rehab sedang/erat		rehab sedang/erat		rehab sedang/erat		rehab sedang/erat		

		rasi umum perkantoran																						
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana gedung Kantor	Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			221.045	16,00%	228.627		253.404	32,00%	472.414		252.360		393.905		280.831		280.831		277.931		277.931	<u>1.653.708</u>
		Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi biopori/sumur resapan	-	-			20				20		20		-		-		-		-			
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			105.750	19,48%	86.943		118.200	39,48%	152.093		127.500		-		138.000		138.000		150.000		150.000	<u>527.036</u>
4	peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			70.000	20,00%	33.675		80.500	40,00%	42.675		91.000		20.000		102.000		22.000		112.000		24.200	<u>142.550</u>
5	peningkatan pengembangan nilai sistem pelaporan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam	baik	baik	1.616	20,00%	1.614	baik	2.144	40,00%	2.043	baik	2.360	baik	428	sangat baik	2.591	sangat baik	471	sangat baik	2.850	sangat baik	518	<u>5.074</u>

	n capaian kinerja dan keuangan	evaluasi kinerja																						
			Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																					
6	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah lokasi ruang terbuka untuk evakuasi bencana	6 lokasi	6 lokasi	1.795.698	11,71%	494.192	7 lokasi	1.883.313	26,13%	990.912	8 lokasi	2.270.751	8 lokasi	1.138.021	9 lokasi	2.912.275	9 lokasi	1.251.823	10 lokasi	2.835.613	10 lokasi	1.377.005	<u>5.251.954</u>
7	Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah lokasi ruang terbuka untuk evakuasi bencana	6 lokasi	6 lokasi	1.919.483	16,67%	776.963	7 lokasi	1.013.115	33,33%	1.825.707	8 lokasi	1.137.277	8 lokasi	1.263.104	9 lokasi	2.372.623	9 lokasi	1.389.414	10 lokasi	1.393.573	10 lokasi	1.393.573	<u>6.648.761</u>
8	Inspeksi jalan dan jembatan	Jumlah lokasi ruang terbuka untuk evakuasi bencana	6 lokasi	6 lokasi	-	0,00%	-	7 lokasi	110.000	20,00%	35.085	8 lokasi	-	8 lokasi	14.170	9 lokasi	-	9 lokasi	-	10 lokasi	85.000	10 lokasi	85.000	<u>134.255</u>
9	pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase peningkatan wawasan kebangsaan			68.450							110.485		-		123.753		123.753		137.520		137.520	<u>261.273</u>	

10	kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase aktifitas keagamaan di seluruh mesjid (jemaah mesjid, MDA, remaja mesjid, hafiz quran, majelis taklim, forum kajian islam, Desa Sakinah)	20,00%	30,00%	32.000	20,00%	29.816	50,00%	36.801	40,00%	59.272	70,00%	42.393	70,00%	11.400	90,00%	50.194	90,00%	12.540	100,00%	52.003	100,00%	13.794	<u>126.822</u>	
11	pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat			202.160	17,75%	163.653		232.486	27,25%	303.219		265.938		144.700		296.350		159.170		327.339		175.087	<u>945.829</u>	
12	pendidikan politik masyarakat	Persentase kemampuan politik masyarakat			249.305	15,00%	188.394		306.202	35,00%	330.893		72.702		6.688		82.295		7.357		362.684		8.092	<u>541.424</u>	
		Jumlah Total/tahun			6.369.465				6.408.955				6.395.694		4.353.754		8.586.291		4.882.831		8.079.831		5.289.940	23.701.460	
2	KESATUAN BANGSA DAN				3.848.928	18,28%	3.115.715		4.340.3413	37,30%	7.534.188		3.407.555		3.944.554		3.472.795		3.357.711		4.211.510		4.149.006	22.101.174	KANTOR SATUAN

	POLITIK DALAM NEGERI																							POLISI PAMO NG PRAJA
1	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			21.221	20,0%	73.126		21.221	40,0%	156.306		50.000		95.000		50.000		50.000		50.000		50.000	<u>424.432</u>
2	Pemeliharaan kantranti bmas dan pencengahan tindak kriminal	Persentase kantranti bmas			23.152	16,67%	263.147		23.152	33,33%	565.925		23.152		109.595		23.152		23.152		23.152		23.152	<u>984.971</u>
3	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Persentase berkurangnya penyakit masyarakat			153.025	16,0%	164.649		183.026	32,0%	345.463		185.048		112.470		185.048		123.717		185.048		136.089	<u>882.388</u>
4	Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase partisipasi masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan			399.735	13,3%	227.321		647.245	33,3%	684.407		30.000		-		30.000		30.000		700.000		700.000	<u>1.641.728</u>

5	Pencegahan Dini & Penanggulangan Bencana Alam se Kota Padang Panjang	Persentase kewaspadaan masyarakat menghadapi Bencana Alam			1.168.71	20,0%	712.933			1.160.550	40,0%	2.252.838			1.160.550			2.288.900			1.160.550			1.160.550			1.160.550			1.160.550			7.575.771	
6	Pemeliharaan kantranti bmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase kantranti bmas			104.400	16,7%	263.147			104.400	33,3%	565.925			-				-			-			104.400			104.400			933.472			
7	Pemeliharaan kantranti bmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase kantranti bmas			269.971				265.972						265.972				-			265.897			265.897			265.897			265.897		531.794	
8	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase berkurangnya penyakit masyarakat			23.675				23.675						23.675				-			23.675			23.675			23.675			23.675		47.350	
9	Pelayanan Adm. Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			1.322.141	18,4%	1.065.519			1.282.988	38,3%	2.142.924			1.385.488				1.297.469			1.385.488			1.385.488			1.385.488			1.385.488		7.276.888	

10	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			144.220	20,00%	161.937		407.514	40,00%	459.114		60.000		40.000		95.685		44.000		60.000		48.400	<u>753.451</u>
		Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi biopori/sumur resapan	-	-				20					20		20		-		-		-		-	
																								-
11	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			125.370	20,00%	107.510		125.370	40,00%	200.680		125.370		-		155.000		155.000		155.000		155.000	<u>618.190</u>
12	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			90.000	20,00%	73.126		95.000	40,00%	156.306		95.000		-		95.000		95.000		95.000		95.000	<u>419.432</u>
13	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	3.300	20,00%	3.300	baik	3.300	40,00%	4.300	baik	3.300	baik	1.120	sangat baik	3.300	sangat baik	1.232	sangat baik	3.300	sangat baik	1.355	<u>11.307</u>

		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																					
		Jumlah Total/tahun			3.84			4.34			3.40		3.94		3.47		3.35		4.21		4.14	22.1	
					8.92			3.41			7.55		4.55		2.79		7.71		1.51		9.00	01.1	74
					8			3			5		4		5		1		0		6	74	
1	OTONO MI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				62.7	12		54.9	26	61.0		48.5	15.7	35.9	26.2	34.3	27.7	157.633.	072		157.633.	072	SEKRETARIAH DAERAH KOTA
					74.2	1		34.8	9	10.1		25.5	25.7	29.9	40.7	39.3	05.8	633.	072		633.	072	
					08	%		17	%	09		79	90	99	59	81	37	072			072		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			7.95	18,6		8.29	38,4	15.2		9.74	6.23	8.71	6.85	9.00	7.54	43.9		7.54	43.9		
					0.97	4		7.73	1	60.1		9.67	6.21	0.94	9.83	8.52	5.81	69.3		5.81	69.3		
					6	%		4	%	78		6	0	3	1	1	4	70		4	70		
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase peningkatan pelayanan			7.15	15,0		5.66	31,6	9.48		4.83	1.88	5.98	2.07	5.01	2.27	22.1		2.27	22.1		
					7.16	2		9.03	0	9.31		9.73	3.08	9.21	1.39	2.60	8.53	46.3		8.53	46.3		
					0	%		0	%	7		2	5	3	4	2	3	35		3	35		

	a Aparatur	n sarana dan prasaran a aparatur																						
		Jumlah gedung pemerint ah daerah yang dilengka pi biopori/s umur resapan	-	-			20				20		20		-		-		-		-		-	
3	Peningka tan Disiplin Aparatur	Persenta se Peningka tan Disiplin Aparatur			187. 970	20 ,0 0 %	170. 729		206. 767	40 ,0 0 %	285. 979		226. 289		37.6 00		247. 763		41.3 60		271. 384		45.4 96	<u>581. 164</u>
4	Peningka tan Kapasita s Sumber Daya Aparatur	Persenta se Peningka tan Kapasita s SDM Aparatur			343. 627	20 ,0 0 %	122. 879		446. 027	25 ,0 0 %	301. 679		388. 700		50.0 00		468. 313		55.0 00		398. 041		60.5 00	<u>590. 058</u>
5	Peningka tan Pengemb angan Sistim Pelapora n Capaian Kinerja dan Keuanga n	Persenta se peningka tan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	bai k	bai k	10.2 40	14 ,0 0 %	4.45 0	baik	34.5 17	29 ,0 0 %	4.45 0	baik	37.3 79	baik	-	sang at baik	40.3 05	sang at baik	-	sang at baik	47.1 15	sang at baik	47.1 15	<u>56.0 15</u>
		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																						

6	Peningkatan Pelayanan Kedinasaan KDH/WK DH	Persentase aktifitas Lembaga Keagamaan, adat dan kemasyarakatan dan keterlibatan dalam Kegiatan-kegiatan Pemerintahan	50,00 %	60,00 %	626.021	20,00 %	477.886	70,00 %	631.046	40,00 %	1.026.999	80,00 %	636.748	80,00 %	585.801	90,00 %	642.467	90,00 %	644.381	100,00 %	643.203	100,00 %	643.203	3.378.270
7	Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase peningkatan Kesehatan Masyarakat			220.305	20,00 %	127.779		129.225	30,00 %	216.636		134.225		102.825		139.225		113.108		144.225		124.418	684.766
8	fasilitasi peningkatan kegiatan keagamaan kesejahteraan sosial	Persentase aktifitas keagamaan di seluruh mesjid (jemaah mesjid, MDA, remaja mesjid, hafiz quran, majelis taklim, forum kajian islam, Desa Sakinah)	20,00 %	30,00 %	1.503.615	6,67 %	1.466.795	50,00 %	4.418.813	19,78 %	5.041.636	70,00 %	2.578.882	70,00 %	2.736.633	90,00 %	4.898.933	90,00 %	3.010.296	100,00 %	3.465.053	100,00 %	3.311.326	15.566.686

		Jumlah Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	4 kasus	5 kasus			10 kasus				15 kasus		15 kasus		20 kasus		20 kasus		25 kasus		25 kasus			
		Persentase Fasilitasi Pembangunan Islamic Centre	0,00%	20,00%			40,00%				60,00%		60,00%		80,00%		80,00%		100,00%		100,00%			
9	Pengisian Padang Panjang Kota Serambi Mekkah	Persentase aktifitas keagamaan di seluruh mesjid (jemaah mesjid, MDA, remaja mesjid, hafiz quran, majelis taklim, forum kajian islam, Desa Sakinah)	20,00%	30,00%	818.273	12,50%	650.328	50,00%	966.562	30,00%	1.380.540	70,00%	964.972	387.107	90,00%	1.009.972	90,00%	425.818	100,00%	1.045.972	100,00%	468.399	<u>3.312.192</u>	

		Persentase aktifitas Lembaga Keagamaan, adat dan kemasyarakatan dan keterlibatan dalam Kegiatan-kegiatan Pemerintahan	50,00 %	60,00 %				70,00 %				80,00 %		80,00 %		90,00 %		90,00 %		100,00 %		100,00 %		
		Jumlah zakat, sadakah yang dikumpulkan BAZ	Rp. 2,7 milyar	Rp. 2,8 milyar				Rp. 2,9 milyar				Rp. 3,0 milyar		Rp. 3,0 milyar		Rp. 3,1 milyar		Rp. 3,1 milyar		3,30 %		3,30 %		
10	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70,00 %	76,00 %	277.950	4,00 %	97.905	82,00 %	250.000	8,00 %	327.499	88,00 %	215.000	88,00 %	638.405	94,00 %	250.000	94,00 %	250.000	100,00 %	215.000	100,00 %	215.000	<u>1.528.809</u>
		Jumlah penetapan perda setiap tahun sesuai kebutuhan	8	8				16				24		24		32		32		40		40		
11	Publikasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Persentase pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70,00 %	76,00 %	128.700	16,67 %	96.164	82,00 %	135.000	36,67 %	177.348	88,00 %	135.000	88,00 %	88.437	94,00 %	135.000	94,00 %	97.281	100,00 %	135.000	100,00 %	107.009	<u>566.238</u>

1 2	Peningkatan Jaminan Hukum dan HAM	Persentase peningkatan Jaminan Hukum dan HAM			93.1 80	13, 3 %	74.7 11		80.0 00	33, 3 %	157. 070		115. 000		-		80.0 00		80.0 00		115. 000		115. 000	<u>426.</u> <u>781</u>
1 3	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase Pelayanan Bantuan Hukum			191. 825	9, 00 %	36.7 00		170. 000	18, 5 0 %	249. 650		170. 000		479. 820		170. 000		170. 000		170. 000		170. 000	<u>1.10</u> <u>6.17</u> <u>0</u>
1 4	Fasilitasi Perlindungan HAM	Persentase peningkatan Perlindungan HAM			50.6 73	10, 0 %	10.4 73		55.0 00	10, 0 %	10.4 73		55.0 00		-		55.0 00		55.0 00		55.0 00		55.0 00	<u>130.</u> <u>946</u>
1 5	Penataan kelembagaan dan Penataan Ketataksanaan	Persentase pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70, 00 %	76, 00 %	-	0, 00 %	-	82,0 0%	125. 000	0, 00 %	-	88,0 0%	156. 000	88,0 0%	139. 235	94,0 0%	-	94,0 0%	-	100, 00%	80.0 00	100, 00%	80.0 00	<u>219.</u> <u>235</u>
-		Persentase pelaksanaan tupoksi sesuai dengan aturan yang berlaku	50, 00 %	58, 00 %				66,0 0%				74,0 0%		74,0 0%		82,0 0%		82,0 0%		90,0 0%		90,0 0%		
1 6	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi	Kriteria penilaian evaluasi LAKIP Kota	C	C	362. 320	19, 5 0 %	257. 092	CC	366. 900	35, 5 0 %	443. 024	CC	374. 400	CC	109. 400	CC	381. 900	CC	120. 340	B	389. 900	B	132. 374	<u>1.06</u> <u>2.23</u> <u>0</u>

	Pemerintah																							
17	Perencanaan Pembangunan Daerah	Kriteria penilaian LPPD Kota	Tinggi (2,6515)	Tinggi (2,72)	230.975	8,00%	163.610	Tinggi (2,79)	180.000	16,00%	272.847	Tinggi (2,86)	185.000	Tinggi (2,86)	162.970	Tinggi (2,93)	185.000	Tinggi (2,93)	179.267	Sangat Tinggi (3,01)	520.000	Sangat Tinggi (3,01)	197.194	<u>975.888</u>
18	Penerapan Road Map Reformasi Birokrasi	Persentase pencapaian SPM di Kota Padang Panjang	25,00%	40,00%	60.313	20,00%	41.258	55,00%	62.000	40,00%	89.565	70,00%	64.000	70,00%	-	85,00%	66.000	85,00%	66.000	100,00%	68.000	100,00%	68.000	<u>264.823</u>
19	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase pencapaian SPM di Kota Padang Panjang	25,00%	40,00%	63.246	10,00%	49.588	55,00%	137.000	25,00%	132.933	70,00%	155.000	70,00%	48.233	85,00%	180.000	85,00%	53.056	100,00%	195.000	100,00%	58.362	<u>342.172</u>
		Kriteria kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah daerah berdasarkan kriteria hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat	kriteria	baik				baik				baik		baik		baik		baik		sangat baik		sangat baik		
	-																							

20	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase ketersediaan Data/Informasi/Statistik Daerah			0	0,00%	-		30,00	0,00%	-		50,00		-		50,00		50,00		50,00		50,00	<u>100,000</u>
21	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Angka kemiskinan	6,50%	6,30%	35,529	20,00%	32,692	6,10%	45,00	40,00%	65,568	5,90%	50,00	5,90%	25,601	5,70%	50,00	5,70%	28,161	5,50%	50,00	5,50%	30,977	<u>182,999</u>
22	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase kualitas kelembagaan koperasi			43,844	20,00%	35,517		45,00	40,00%	61,060		60,00		15,500		60,00		17,050		60,00		18,755	<u>147,882</u>
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24,401,864	27,533,896				30,665,928				33,797,959		33,797,959		36,929,991		36,929,991		40,062,023		40,062,023		
23	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase LKM dan terbentunya perusda yang memfasilitasi pemasaran produk daerah			102,185	2,00%	-		260,000	12,00%	240,058		50,00		27,085		50,00		29,794		55,00		32,773	<u>329,709</u>
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24,401,864	27,533,896				30,665,928				33,797,959		33,797,959		36,929,991		36,929,991		40,062,023		40,062,023		

24	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Daerah	Persentase inventarisasi semua dokumen terkait pembangunan pasar pusat	-	10,00%	50.478	20,00%	40.967	-	50.000	40,00%	79.865	-	50.000	-	14.750	-	50.000	-	16.225	-	50.000	-	17.848	<u>169.655</u>
		Persentase pengalihan pengelolaan PIHP ke Pemko	0,00%	20,00%			40,00%					100,00%		100,00%		-		-		-				
25	Fasilitasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			-	0,00%	-		70.000	0,00%	-		70.000		-		70.000		70.000		80.000		80.000	<u>150.000</u>
26	fasilitasi peningkatan pembinaan dan pengendalian pembangunan	Persentase pembinaan dan pengendalian pembangunan			108.055	5,00%	77.749		262.000	24,96%	242.676		262.000		88.833		262.000		97.716		262.000		107.488	<u>614.462</u>
27	Penataan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase kualitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			445.260	15,00%	171.722		200.000	35,00%	662.537		200.000		294.920		200.000		200.000		200.000		200.000	<u>1.529.179</u>

28	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pengadaan tanah untuk SLB	-	-	40.218.250	12,50%	6.662.926	100,00%	30.100.000	19,50%	21.813.105	-	25.000.000	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	-	10.000.000	48.476.031
29	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			14.825	2,00%	864		15.196	22,00%	27.165		15.576		-		15.965		15.965		16.365		16.365	60.359
30	Penataan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah			149.475	7,50%	34.662		125.000	18,83%	76.150		165.000		47.015		100.000		51.717		165.000		56.888	266.432
-																								
31	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70,00%	76,00%	25.900	20,00%	24.716	82,00%	24.000	40,00%	43.490	88,00%	24.000	88,00%	-	94,00%	24.000	94,00%	24.000	100,00%	24.000	100,00%	24.000	116.206
32	Kerjasama dengan Media Masa	Persentase pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70,00%	76,00%	1.303.038	19,00%	1.529.072	82,00%	1.348.000	39,00%	2.830.612	88,00%	1.348.000	88,00%	1.526.325	94,00%	1.348.000	94,00%	1.348.000	100,00%	1.348.000	100,00%	1.348.000	8.582.009

		Jumlah Total/tahun			62.7 74.2 08				54.9 34.8 17				48.5 25.5 79		15.7 25.7 90		35.9 29.9 99		26.2 40.7 59		34.3 39.3 81		27.7 05.8 37	157. 633. 072	
2	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				14.6 22.8 04	16,8 4 %	10. 089 .28 4		13.4 00.0 00	35,3 9 %	22.5 21.4 80		13.2 65.9 54		16.2 21.9 30		13.2 37.8 94		13.0 43.1 57		13.6 37.0 21		13.1 88.8 83	75.0 64.7 33	SEKRETARIAT DPRD
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			3.69 4.16 1	17,1 4 %	2.91 5.66 9		3.67 2.18 2	40,0 0 %	5.93 5.70 7		3.74 2.70 2		3.67 0.84 2		3.81 4.98 4		3.81 4.98 4		3.88 9.07 4		3.88 9.07 4	<u>20.2</u> <u>26.2</u> <u>76</u>	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			1.77 2.77 8	14,0 0 %	1.31 2.98 0		741. 443	34,0 0 %	4.18 4.45 7		328. 966		443. 985		226. 464		226. 464		518. 271		230. 000	<u>6.39</u> <u>7.88</u> <u>6</u>	

		Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi biopori/sumur resapan	-	-				20				20		20		-		-		-		-		
																							-	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			126.685	20,00%	195.060		96.685	40,00%	289.135		96.685		67.600		96.685		74.360		96.685		81.796	<u>707.951</u>
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			195.000	18,00%	97.950		195.000	38,00%	159.450		199.875		-		204.872		204.872		209.994		209.994	<u>672.266</u>
5	Peningkatan Pengembangan nilai Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	2.917	20,00%	2.438	baik	2.917	40,00%	3.084	baik	2.917	baik	648	sangat baik	2.917	sangat baik	713	sangat baik	2.917	sangat baik	784	<u>7.667</u>
		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																						
6	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan	Jumlah Perda yang ditetapkan	8	8	8.199.495	15,56%	5.187.597	4	8.093.005	31,11%	11.203.995	6	8.251.960	6	11.596.905	6	8.261.139	6	8.261.139	8	8.270.547	8	8.270.547	<u>44.520.183</u>

	Rakyat Daerah																								
7	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perda yang ditetapkan	8	8	68.500	10,00%	58.691	4	35.500	20,00%	116.609	6	65.500	6	58.700	6	39.050	6	39.050	8	42.955	8	42.955	<u>316.005</u>	
8	Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Persentase kerjasama informasi dengan media massa			563.268	20,00%	318.899		563.268	40,00%	629.043		577.349		383.250		591.783		421.575		606.578		463.733	<u>2.216.500</u>	
		Jumlah Total/tahun			14.622.804				13.400.000				13.265.954		16.221.930		13.237.894		13.043.157		13.637.021		13.188.883	75.064.733	
3	OTONO MI DAERAH , PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH , PERANGKAT DAERAH , KEPEGAWAIAN DAN PERSONALIAN				7.021.273	17,39%	4.498.053		6.939.009	35,18%	10.129.365		5.889.904		5.368.469		6.231.383		4.781.383		6.225.558		4.914.752	29.692.022	DINAS PENDA PATAN , PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perkantoran			3.26 4.04 7	19 ,2 5 %	2.63 3.35 9		3.29 3.83 2	38 ,0 0 %	5.63 3.63 2		3.17 1.39 0		3.89 8.77 1		3.17 1.39 0		3.17 1.39 0		3.17 1.39 0		3.17 1.39 0	<u>18.5</u> <u>08.5</u> <u>42</u>		
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			398. 600	13 ,7 5 %	168. 168		507. 350	27 ,5 0 %	1.06 6.24 3		172. 800		257. 250		235. 300		235. 300		235. 300		235. 300		<u>1.96</u> <u>2.26</u> <u>1</u>	
		Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi biopori/sumur resapan	-	-			20					20		20		-		-		-		-		-		
																								-		
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			41.0 00	15 ,0 0 %	21.2 50		41.0 00	35 ,0 0 %	62.4 70		41.0 00		-		41.0 00		41.0 00		41.0 00		41.0 00		<u>165.</u> <u>720</u>	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			100. 000	20 ,0 0 %	2.15 0		100. 000	40 ,0 0 %	41.9 00		100. 000		35.0 00		100. 000		38.5 00		100. 000		42.3 50		<u>159.</u> <u>900</u>	

5	Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dipertahankannya opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	198.728	19,75%	91.035	WTP	197.713	39,75%	200.785	WTP	213.926	WTP	77.743	WTP	219.926	WTP	85.517	WTP	225.926	WTP	94.069	<u>549.149</u>
		Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik				baik				baik		baik		sangat baik		sangat baik		sangat baik		sangat baik		
		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																						
6	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	3.018.898	16,58%	1.582.091	WTP	2.799.114	30,81%	3.124.335	WTP	2.190.788	WTP	1.099.705	WTP	2.463.767	WTP	1.209.676	WTP	2.451.942	WTP	1.330.643	<u>8.346.450</u>
		Penerapan Inpres tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70,00%	76,00%				82,00%				88,00%		88,00%		94,00%		94,00%		100,00%		100,00%		
		Jumlah Total/tahun			7.021.273			6.939.009				5.889.904		5.368.469		6.231.383		4.781.383		6.225.558		4.914.752	29.692.022	

4	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSONDIAN				5.52 2.91 1	15, 6 0 %	3.3 33. 219		7.93 0.87 9	30, 8 6 %	7.24 0.17 4		7.87 5.35 9		2.91 3.84 0		8.45 3.94 4		3.25 3.08 2		9.47 2.14 6		3.68 8.95 4	20.4 29.2 68	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			879. 083	20, 0 %	898. 743		995. 428	38, 3 %	1.63 1.93 7		1.05 1.63 9		915. 072		1.10 9.03 7		1.00 6.57 9		1.16 8.39 2		1.10 7.23 7	<u>5.55</u> <u>9.56</u> <u>8</u>	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			131. 335	12, 0 %	124. 786		601. 264	32, 0 %	733. 462		230. 016		293. 555		206. 788		206. 788		348. 730		348. 730	<u>1.70</u> <u>7.32</u> <u>1</u>	
		Jumlah gedung pemerintah daerah yang	-	-			20				20		20		-		-		-		-		-	-	

7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah diklat yang dilaksanakan akan bagi aparatur dalam 1 tahun	9	10	604.651	12,00%	360.830	5	473.777	24,00%	930.440	3	1.357.858	3	442.470	4	1.879.179	4	486.717	5	2.377.496	5	535.389	<u>2.75</u> <u>5.84</u> <u>6</u>
		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai penempatan	60,00%	64,00%			68,00%				72,00%		72,00%		76,00%		76,00%		80,00%		80,00%			
8	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Peraturan tentang Pedoman penilaian kinerja aparatur	-	-	2.068.334	8,70%	750.804	1	1.934.711	17,59%	1.296.918	1	2.254.666	1	688.485	1	2.120.556	1	757.334	1	2.273.884	1	833.067	<u>4.32</u> <u>6.60</u> <u>7</u>
		Persentase penerapan sistem promosi dan mutasi aparatur yang berbasis kompetensi (the right men on the right job)	30,00%	38,00%			46,00%				54,00%		54,00%		62,00%		62,00%		70,00%		70,00%			
		Jumlah tenaga medis	30	33			37				40		40		44		44		48		48			

		Rasio perawat terhadap Tempat Tidur	½	½				½			1/1		1/1		1/1		1/1		1/1		1/1			
		Persentase tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan	50,00 %	56,00 %				62,00 %			68,00 %		68,00 %		74,00 %		74,00 %		80,00 %		80,00 %			
9	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase pengelolaan Arsip kepegawaian berbasis Teknologi Informasi	45,00 %	52,00 %	57.203	20,00 %	41.503	59,00 %	69.834	40,00 %	118.525	59,00 %	77.351	59,00 %	53.553	73,00 %	85.847	73,00 %	58.908	80,00 %	95.462	80,00 %	64.799	<u>337.288</u>
10	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Persentase kesiapan Pindah/Purna Tugas PNS			62.000	20,00 %	-	65.100	20,00 %	-	50.000			-	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	<u>100.000</u>
		Jumlah Total/tahun			5.522.911			7.930.879			7.875.359			2.913.840	8.453.944		3.253.082		9.472.146		3.688.954		20.429.268	
5	OTONO MI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANG				1.806.811	14,70 %	1.336.376		2.237.041	33,16 %	2.645.171		2.104.414		1.626.301	1.965.035		1.557.741		1.959.715		1.726.011	8.891.601	INSPEKTORAT KOTA

	AN DAERAH , PERANG KAT DAERAH , KEPEGA WAIAN DAN PERSAN DIAN																							
1	pelayana n adminstr asi perkanto ran	Persenta se peningka tan pelayana n administ rasi umum perkanto ran			573. 345	18 ,3 8 %	586. 737		587. 729	38 ,2 5 %	1.12 8.59 2		601. 340		526. 781		615. 251		579. 459		629. 530		629. 000	<u>3.45</u> <u>0.56</u> <u>9</u>
2	Peningka tan Sarana & Prasaran a Aparatur	Persenta se peningka tan pelayana n sarana dan prasaran a aparatur			152. 556	12 ,0 0 %	148. 987		430. 631	24 ,0 0 %	226. 794		387. 615		348. 250		117. 350		117. 350		180. 350		180. 350	<u>1.02</u> <u>1.73</u> <u>1</u>
		Jumlah gedung pemerint ah daerah yang dilengka pi biopori/s umur resapan	-	-			20					20		20		-		-		-		-		
3	Peningka tan Disiplin Aparatur	Persenta se Peningka tan			34.5 35	20 ,0 0 %	30.5 25		34.5 35	40 ,0 0 %	61.8 60		34.5 35		-		34.5 35		34.5 35		34.5 35		34.5 35	<u>161.</u> <u>455</u>

		Disiplin Aparatur																						
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	2.987	20,00%	2.987	baik	2.987	40,00%	3.641	baik	2.987	baik	689	sangat baik	2.987	sangat baik	758	sangat baik	2.987	sangat baik	834	<u>8.909</u>
		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																						
5	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	0,00%	0,00%	816.623	16,61%	479.468	20,00%	861.464	33,94%	955.985	30,00%	866.447	30,00%	553.556	40,00%	883.422	40,00%	608.912	50,00%	900.823	50,00%	669.803	<u>3.267.723</u>
		Persentase penerapan SPIP di SKPD																						
		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP Kota	C	C				CC				CC		CC		CC		CC		B		B		

		Persentase pelaksanaan Penerapan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70,00%	76,00%				82,00%				88,00%		88,00%		94,00%		94,00%		100,00%		100,00%		
6	penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	20,00%	8.205	20,00%	8.077	30,00%	-	30,00%	-	40,00%	-	40,00%	-	50,00%	-	50,00%	-	<u>8.077</u>
		Persentase penerapan SPIP di SKPD																						
		Persentase pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70,00%	76,00%				82,00%				88,00%		88,00%		94,00%		94,00%		100,00%		100,00%		
7	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase penerapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	0,00%	0,00%	226.765	15,94%	87.672	20,00%	311.490	35,94%	260.222	30,00%	211.490	30,00%	197.025	40,00%	311.490	40,00%	216.728	50,00%	211.490	50,00%	211.490	<u>973.137</u>

		Persentase penerapan SPIP di SKPD																						
		Persentase pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70,00%	76,00%				82,00%				88,00%		88,00%		94,00%		94,00%		100,00%		100,00%		
		Jumlah Total/tahun			1.806.811			2.237.041				2.104.414		1.626.301		1.965.035		1.557.741		1.959.715		1.726.011	8.891.601	
6	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				3.097.630	18,51%	2.811.774	3.344.528	36,32%	6.253.413		3.421.429		6.080.209		3.595.397		8.017.236		3.815.027		9.350.470	32.513.102	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi			1.334.009	20,00%	1.178.782	1.384.151	38,46%	2.624.470		1.373.765		1.925.626		1.475.088		1.475.088		1.586.383		1.586.383	<u>8.790.349</u>	

		umum perkantoran																						
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah SKPD yang menerapkan ISO 9001	0,00%	0,00%	489.450	16,00%	473.057	30,00%	593.923	32,00%	972.721	60,00%	609.619	60,00%	211.050	100,00%	606.602	100,00%	232.155	100,00%	594.931	100,00%	255.371	<u>2.144.354</u>
		Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi biopori/sumur resapan	-	-				20				20		20		-		-		-		-		-
		Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur																						-
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			86.300	20,00%	87.600		90.615	40,00%	139.650		95.146		-		99.903		99.903		104.898		104.898	<u>432.051</u>
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			25.000	14,00%	19.650		25.000	34,00%	41.150		28.750		59.303		33.063		33.063		38.022		38.022	<u>191.188</u>

5	Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	3.169	20,00%	3.102	baik	3.265	35,00%	3.980	baik	3.447	baik	1.113	sangat baik	3.640	sangat baik	1.224	sangat baik	3.846	sangat baik	1.347	<u>10.766</u>
		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																						
6	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase peningkatan pengetahuan aparatur			13.435	20,00%	10.059		14.107	20,00%	10.059		14.812		-		15.552		15.552		16.330		16.330	<u>52.000</u>
7	Peningkatan Pelayanan Kedinasaan Camat	Persentase Pelayanan Kedinasaan Camat			7.250	20,00%	6.850		7.500	40,00%	19.479		8.625		8.300		9.919		9.130		11.407		10.043	<u>53.802</u>
8	Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kesehatan Masyarakat			20.370	20,00%	20.173		21.388	40,00%	38.546		22.458		19.050		23.581		20.955		24.760		23.051	<u>121.775</u>
9	Peningkatan Pelayanan Kedinasaan Camat	Persentase Pelayanan Kedinasaan Camat			21.775				22.864				24.007		-		25.207		25.207		26.467		26.467	<u>51.674</u>

10	Pengembangan Rencana Pembangunan Yang Partisipatif	Persentase keterwakilan masyarakat yang hadir musrenbang	96,70 %	97,16 %	95.749			97,62%	100.536			98,08%	105.563	98,08%	70.338	98,54%	110.841	98,54%	77.372	99,00%	116.383	99,00%	85.109	<u>232.819</u>
11	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat	Angka kemiskinan	6,50%	6,30%	65.204	20,00%	61.912	6,10%	68.464	40,00%	123.176	5,90%	71.887	5,90%	53.264	5,70%	75.482	5,70%	58.590	5,50%	79.256	5,50%	64.449	<u>361.392</u>
12	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Angka kemiskinan	6,50%	6,30%	54.647	20,00%	51.263	6,10%	57.380	40,00%	139.468	5,90%	60.249	5,90%	227.525	5,70%	63.261	5,70%	63.261	5,50%	66.424	5,50%	66.424	<u>547.941</u>
13	Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase meningkatnya wawasan kebangsaan			97.285	20,00%	65.748		102.150	40,00%	151.140		107.256		44.634		112.620		49.097		118.250		54.007	<u>364.627</u>

14	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase aktifitas Lembaga Keagamaan, adat dan kemasyarakatan dan keterlibatan dalam Kegiatan-kegiatan Pemerintahan	50,00 %	60,00 %	560.460	19,58 %	566.093	70,00 %	588.483	39,58 %	1.369.030	80,00 %	617.907	80,00 %	814.804	90,00 %	648.803	90,00 %	648.803	100,00 %	681.243	100,00 %	681.243	<u>4.079.973</u>
		Persentase Partisipasi kelembagaan masyarakat	20,00 %	36,00 %				52,00 %				68,00 %		68,00 %		84,00 %		84,00 %	100,00 %		100,00 %			
15	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase aktifitas Lembaga Keagamaan, adat dan kemasyarakatan dan keterlibatan dalam Kegiatan-kegiatan Pemerintahan	50,00 %	60,00 %	20.975	20,00 %	86.575	70,00 %	22.023	40,00 %	182.072	80,00 %	23.124	80,00 %	-	90,00 %	24.281	90,00 %	24.281	100,00 %	25.495	100,00 %	25.495	<u>318.423</u>
		Persentase partisipasi masyarakat dalam BBGRM	450,00 %	470,00 %				490,00 %				510,00 %		510,00 %		530,00 %		530,00 %	550,00 %		550,00 %			

16	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase Partisipasi kelembagaan masyarakat	20,00%	36,00%	202.552	9,50%	180.910	52,00%	242.679	29,50%	438.472	68,00%	254.814	68,00%	310.327	84,00%	267.554	84,00%	267.554	100,00%	280.932	100,00%	280.932	<u>1.47</u> <u>8.19</u> <u>5</u>
17	Program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan	Persentase partisipasi kelembagaan masyarakat										60,00%	-	60,00%	1.020.775	65,00%	-	65,00%	2.000.000	70,00%	-	70,00%	2.800.000	<u>5.82</u> <u>0.77</u> <u>5</u>
18	Program Percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase partisipasi kelembagaan masyarakat										60,00%	-	60,00%	1.283.200	65,00%	-	65,00%	2.880.000	70,00%	-	70,00%	3.200.000	<u>7.36</u> <u>3.20</u> <u>0</u>
19	Program peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Persentase partisipasi kelembagaan masyarakat										60,00%	-	60,00%	30.900	65,00%	-	65,00%	36.000	70,00%	40.000	70,00%	30.900	<u>97.8</u> <u>00</u>
		Jumlah Total/tahun			3.097.630				3.344.528				3.421.429		6.080.209		3.595.397		8.017.236		3.815.027		9.350.470	32.513.102

7	OTONO MI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSONALIAN				3.10 6.50 7	15,7 9 %	3.0 42. 714		4.08 3.81 4	33,5 7 %	6.96 2.72 1		3.85 8.85 1		6.39 0.32 5		3.46 6.15 1		8.42 0.95 0		3.49 2.72 8		9.76 4.83 8	34.5 81.5 47	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perkantoran			1.26 3.60 5	20,0 0 %	1.21 7.83 4		1.32 0.56 4	40,0 0 %	2.81 3.56 9		1.38 5.25 7		1.55 9.90 8		1.45 2.65 8		1.45 2.65 8		1.52 3.43 0		1.52 3.43 0	<u>8.56</u> <u>7.39</u> <u>9</u>	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah SKPD yang menerapkan ISO 9001	0,0 0%	0,0 0%	441. 500	10,9 1 %	450. 449	30,0 0%	1.21 0.32 3	25,4 5 %	1.20 5.54 2	60,0 0%	842. 314	60,0 0%	135. 050	100, 00%	299. 885	100, 00%	148. 555	100, 00%	169. 185	100, 00%	169. 185	<u>2.10</u> <u>8.78</u> <u>1</u>	
		Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi biopori/s	-	-			20					20		20		-		-		-		-		-	

6	Pengembangan Rencana Pembangunan Yang Partisipatif	Persentase keterwakilan masyarakat yang hadir musrenbang	96,70 %	97,16 %	89.335	20,00 %	88.836	97,62%	93.802	40,00 %	168.687	98,08%	98.492	98,08%	73.040	98,54%	103.416	98,54%	80.344	99,00%	108.587	99,00%	88.378	<u>499.285</u>
7	Peningkatan Pelayanan Kedinasaan Camat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan			14.200	20,00 %	14.200		14.910	40,00 %	27.188		15.655		15.700		16.438		16.438		17.260		17.260	<u>90.786</u>
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase aktifitas Lembaga Keagamaan, adat dan kemasyarakatan dan keterlibatan dalam Kegiatan-kegiatan Pemerintahan	50,00 %	60,00 %	20.875	20,00 %	12.987	70,00%	21.919	40,00 %	27.469	80,00%	23.015	80,00%	-	90,00%	24.165	90,00%	24.165	100,00%	25.374	100,00%	25.374	<u>89.995</u>
		Persentase Partisipasi kelembagaan masyarakat	20,00 %	36,00 %				52,00%				68,00%		68,00%		84,00%		84,00%		100,00%		100,00%		
		Persentase partisipasi masyarakat	450,00 %	470,00 %				490,00%				510,00%		510,00%		530,00%		530,00%		550,00%		550,00%		

		dalam BBGRM																						
9	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan PAD di Kecamatan			32.950	20,00%	32.025		34.597	40,00%	62.490		36.327		32.577		38.144		35.835		40.051		40.051	<u>202.978</u>
10	Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelaksanaan Lomba UKS			19.350	20,00%	18.418		20.317	40,00%	19.190		21.333		15.720		22.400		17.292		23.519		19.021	<u>89.641</u>
11	Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat	67,90%	69,32%	21.810	20,00%	20.918	70,74%	23.555	40,00%	30.999	72,16%	25.439	72,16%	-	73,58%	27.474	73,58%	27.474	75,00%	29.672	75,00%	29.672	<u>109.063</u>
12	Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba			-	0,00%	-		33.991	0,00%	-		35.691		-		37.475		37.475		39.349		39.349	<u>76.824</u>
13	Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan	Persentase Pelayanan Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan			-	0,00%	-		21.810	20,00%	12.117		22.900		-		24.046		24.046		25.248		25.248	<u>61.411</u>

14	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat	Angka kemiskinan	6,50%	6,30%	61.367	20,00%	57.996	6,10%	64.435	40,00%	112.958	5,90%	67.658	5,90%	36.700	5,70%	71.041	5,70%	40.370	5,40%	74.592	5,40%	44.407	<u>292.431</u>
15	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase pelaksanaan kegiatan MTQ			51.537	20,00%	48.833		54.114	20,00%	48.833		56.820		24.500		59.661		26.950		62.644		29.645	<u>178.761</u>
16	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase pelaksanaan kegiatan Pentas Seni, Budaya, HUT RI dan HUT Kota	-		104.675	13,33%	88.900		109.909	40,00%	187.284		115.404		207.425		121.175		121.175		127.234		127.234	<u>732.018</u>
17	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase aktifitas Lembaga Keagamaan, adat dan kemasyarakatan dan keterlibatan dalam Kegiatan-kegiatan	50,00%	60,00%	881.729	20,00%	896.049	70,00%	925.815	38,86%	2.009.868	80,00%	972.106	80,00%	1.215.288	90,00%	1.020.712	90,00%	1.020.712	100,00%	1.071.747	100,00%	1.071.747	<u>6.213.664</u>

		Pemerintahan																							
19	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase Partisipasi kelembagaan masyarakat	20,00%	36,00%	-	0,00%	-	52,00%	25.000	20,00%	20.425	68,00%	26.250	68,00%	-	84,00%	27.562	84,00%	27.562	100,00%	28.941	100,00%	28.941	<u>76.928</u>	
20	Program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan	Persentase pemberdayaan terhadap lingkungan yang nyaman											-	1.173.050		-		2.000.000		-		2.800.000	<u>5.973.050</u>		
21	Program Percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase pemberdayaan terhadap lingkungan yang nyaman											-	1.584.000		-		2.880.000		-		3.200.000	<u>7.664.000</u>		
22	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase pengelolaan keuangan daerah											-	257.625		-		320.000		-		360.000	<u>937.625</u>		

	an																								
		Jumlah Total/tahun			3.106.507				4.083.814				3.858.851		6.390.325		3.466.151		8.420.950		3.492.728		9.764.838	34.581.547	
8	OTONO MI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				633.599	18,26%	636.454		936.263	35,76%	1.369.235		1.105.407		895.327		1.008.718		793.227		1.030.643		819.500	4.459.008	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			371.612	19,5%	393.238		393.047	39,5%	757.616		394.354		413.925		415.290		415.290		418.190		418.190	<u>2.398.259</u>	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Jumlah SKPD yang menerapkan ISO	0,00%	0,00%	115.171	20,0%	123.995	30,00%	101.600	35,00%	309.039	60,00%	108.500	60,00%	214.179	90,00%	124.000	90,00%	124.000		124.000		124.000	<u>895.213</u>	

	n																							
		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																						
6	Koordinasi Pemberdayaan Kelembagaan/Pelayanan Sistim Informasi Terpadu	Jumlah SKPD yang menerapkan ISO 9001	0,00%	0,00%	103.738	10,00%	83,593	30,00%	393.538	20,00%	230.784	60,00%	555.275	60,00%	198.660	100,00%	417.150	100,00%	218.526	100,00%	436.175	100,00%	240.379	<u>971.942</u>
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan pemerintah daerah berdasarkan kriteria hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat	baik	baik				baik				baik		baik		baik		baik		sangat baik		sangat baik		
		Penerapan Inpres tentang Aksi Pencegahan dan Pembera	70,00%	76,00%				82,00%				88,00%		88,00%		94,00%		94,00%		100,00%		100,00%		

		ntasan Korupsi																					
		Jumlah nilai investasi	Rp. 515 milyar	Rp. 540 milyar			Rp.565 milyar			Rp.590 milyar		Rp.590 milyar		Rp.615 milyar		Rp.615 milyar		Rp.640 milyar		Rp.640 milyar			
	Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat												54.735										
		Jumlah Total/tahun			633.599			936.263				1.105.407		895.327		1.008.718		793.227		1.030.643		819.500	4.459.008
	KETAHANAN PANGAN				1.719.822	14,09%	1.238.092		3.306.620	27,83%	2.702.753		3.835.855		2.189.405	2.879.718		1.881.401		3.142.808		2.018.350	10.030.010
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			496.427	18,46%	460.190		516.440	40,00%	884.656		536.590		742.530	556.740		556.740		576.890		576.890	<u>3.221.006</u>
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase peningkatan pelayanan			111.628	7,33%	62.777		732.380	17,33%	112.750		1.123.010		261.800	92.494		92.494		93.754		93.754	<u>623.575</u>

KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN

6	Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kemampuan penyuluhan pertanian			42.514	20,00%	59.629		45.500	40,00%	98.175		47.700		126.280		48.700		48.700		49.000		49.000	<u>381.784</u>
7	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase kemampuan penyuluhan dan petani dalam penerapan teknologi komoditi unggulan			378.968	17,00%	202.045		605.000	37,00%	503.115		680.000		284.550		730.000		313.005		780.000		344.306	<u>1.647.021</u>
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
8	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Kelembagaan tani yang aktif	58	64	320.999	4,14%	215.053	70	819.540	7,71%	540.052	77	844.215	77	391.477	83	832.354	83	430.625	90	1.006.949	90	473.687	<u>2.050.894</u>
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
9	Perlindungan Konservasi Sumberdaya Hutan	Persentase kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan	0,00%	10,00%	-	0,00%	-	20,00%	20,00%	20,00%	31,024	30,00%	20,00%	30,00%	22,625	40,00%	20,00%	40,00%	20,00%	50,00%	20,00%	50,00%	20,00%	<u>93.649</u>

10	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pertumbuhan PDRB	624,00 %	635,00 %	276.060	14,00 %	198.174	646,00%	493.500	29,00 %	463.357	658,00%	508.500	658,00%	344.143	669,00%	522.000	669,00%	378.557	680,00%	537.200	680,00%	416.413	<u>1.80</u> <u>0.64</u> <u>4</u>	
		Jumlah produktivitas padi	4,9 ton/ha	5 ton/ha				5,1 ton/ha				5,2 ton/ha		5,2 ton/ha		5,3 ton/ha		5,3 ton/ha		5,4 ton/ha		5,4 ton/ha			
		Jumlah Total/tahun			1.719.822				3.306.620				3.835.855		2.189.405		2.879.718		1.881.401		3.142.808		2.018.350	10.030.001	
	PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.269.954	17,58 %	2.800.530		3.311.385	36,6 %	5.691.209		3.419.404		3.411.694		3.537.904		3.439.187		3.664.784		3.623.273	18.965.393	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perkantoran			455.243	16,92 %	491.357		483.166	36,7 %	941.069		505.379		506.754		527.699		527.699		553.186		553.186	<u>3.02</u> <u>0.06</u> <u>5</u>	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			60.975	20,00 %	56.700		63.860	40,0 %	86.726		84.490		7.000		51.213		7.700		35.950		8.470	<u>166.</u> <u>596</u>	

		Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi biopori/sumur resapan	-	-			20				20		20		-		-		-		-		-	
																							-	
3	peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			13,00	20,00%	13,00		16,00	40,00%	27,95		16,80		-		17,64		17,64		18,52		18,52	<u>77,12</u>
4	peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Partisipasi kelembagaan masyarakat	20,00%	36,00%	20,00	20,00%	14,30	52,00%	20,00	40,00%	36,80	68,00%	20,00	68,00%	8,00	84,00%	21,00	84,00%	8,80	100,00%	22,00	100,00%	9,68	<u>77,58</u>
		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur																						
5	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	3,115	20,00%	3,112	baik	3,263	40,00%	4,353	baik	3,425	baik	1,291	sangat baik	3,595	sangat baik	1,420	sangat baik	3,773	sangat baik	1,562	<u>11,738</u>
		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																						

6	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Penurunan Angka pengangguran	5,20%	5,00%	161.213	15,80%	163.086	4,80%	199.646	27,80%	321.685	4,60%	168.600	4,60%	164.970	4,40%	185.295	4,40%	181.467	4,20%	183.930	4,20%	183.930	<u>1.01</u> <u>5.13</u> <u>8</u>
		Persentase aktifitas Lembaga Keagamaan, adat dan kemasyarakatan dan keterlibatan dalam Kegiatan-kegiatan Pemerintahan	50,00%	60,00%			70,00%				80,00%		80,00%		90,00%		90,00%		100,00%		100,00%			
7	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Angka kemiskinan	6,50%	6,30%	122.083	15,00%	90.782	6,10%	200.970	40,00%	216.210	5,90%	126.010	5,90%	109.659	5,70%	132.040	5,70%	120.625	5,50%	138.580	5,50%	138.580	<u>675.</u> <u>856</u>
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%			6,46%					6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896			30.665.928					33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Memban Gun Desa	Persentase aktifitas Lembaga Keagamaan, adat dan kemasyarakatan dan keterlibatan	50,00%	60,00%	1.129.402	16,00%	871.950	70,00%	1.027.480	36,00%	1.729.478	80,00%	1.078.850	80,00%	1.006.540	90,00%	1.132.780	90,00%	1.107.194	100,00%	1.189.419	100,00%	1.189.419	<u>5.90</u> <u>4.58</u> <u>1</u>

		tan dalam Kegiatan-kegiatan Pemerintahan																						
		Persentase partisipasi masyarakat dalam BBGRM	450,00%	470,00%				490,00%				510,00%		510,00%		530,00%		530,00%		550,00%		550,00%		
9	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	1.304.923	14,50%	1.096.243	1.297.000	29,50%	2.326.938	1.415.850	1.607.480	1.466.642	1.466.642	1.519.924	1.519.924	8.016.727									
		Jumlah Total/tahun	3.269.954			3.311.385			3.419.404	3.411.694	3.537.904	3.439.187	3.664.784	3.622.773	18.965.393									
	KEARSI PAN		1.175.514	13,09%	792.136	1.550.276	28,48%	4.300.822	1.609.221	2.187.099	8.162.497	1.187.965	3.147.791	1.215.544	9.683.566									
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	531.051	18,33%	480.157	554.435	40,00%	1.051.035	585.675	701.065	613.651	613.651	631.645	631.645	3.477.553									
																								KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			300.970	11,89%	15.639		346.500	26,17%	2.150.538		102.000		987.530		29.300		29.300		106.600		106.600	<u>3.289.607</u>
		Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi biopori/sumur resapan	18,52%	25,93%			33,33%				40,74%		40,74%		48,15%		48,15%		55,56%		55,56%		-	
																							-	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			16.750	20,00%	16.750		17.500	40,00%	36.700		17.500		-		17.500		17.500		17.500		17.500	<u>88.550</u>
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			50.000	20,00%	23.400		50.000	40,00%	44.000		50.000		10.000		50.000		11.000		50.000		12.100	<u>100.500</u>
5	Peningkatan Pengembangan nilai Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	2.746	20,00%	2.733	baik	2.746	40,00%	3.716	baik	2.746	baik	996	sangat baik	2.746	sangat baik	1.096	sangat baik	2.746	sangat baik	1.205	<u>9.746</u>

		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																						
6	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Angka melek huruf	99,31 %	99,35 %	172.240	17,14 %	165.668	99,39 %	272.045	37,14 %	454.206	99,42 %	183.250	99,42 %	249.018	99,46 %	305.250	99,46 %	273.920	99,50 %	194.250	99,50 %	194.250	<u>1.337.062</u>
7	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase pengelolaan Arsip berbasis Teknologi Informasi	0,00 %	0,00 %	55.790	6,67 %	51.500	5,00 %	128.000	20,00 %	331.803	10,00 %	303.000	10,00 %	129.900	15,00 %	128.000	15,00 %	128.000	20,00 %	128.000	20,00 %	128.000	<u>769.203</u>
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase pengelolaan Arsip berbasis Teknologi Informasi	0,00 %	0,00 %	32.767	10,00 %	24.090	5,00 %	65.000	20,00 %	64.090	10,00 %	175.000	10,00 %	88.590	15,00 %	7.000.000	15,00 %	97.449	20,00 %	2.000.000	20,00 %	107.194	<u>381.413</u>
		Jumlah Museum Diorama													0	-	1	7.000.000	1	2.000.000		2.000.000	<u>9.000.000</u>	
9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Angka melek huruf	99,31 %	99,35 %	-	0,00 %	-	99,39 %	50.000	0,00 %	-	99,42 %	100.000	99,42 %	20.000	99,46 %	-	99,46 %	-	99,50 %	-	99,50 %	-	<u>20.000</u>

10	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase pengelolaan Arsip berbasis Teknologi Informasi	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	5,00%	50,00%	10,00%	139.885	10,00%	75.000	10,00%	-	15,00%	-	15,00%	-	20,00%	-	20,00%	-	<u>139.885</u>	
11	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase pengelolaan Arsip berbasis Teknologi Informasi	0,00%	0,00%	13.200	20,00%	12.199	5,00%	14.000	40,00%	24.849	10,00%	15.000	10,00%	-	15,00%	16.000	15,00%	16.000	20,00%	17.000	20,00%	17.000	<u>70.048</u>	
		Jumlah Total/tahun			1.175.514				1.550.276				1.609.221			2.187.099		8.162.497		1.187.965		3.147.791		1.215.544	9.683.566
	URUSAN PILIHAN																								
	PERTANIAN				10.345.627	16,52%	8.620.403		15.750.177	32,96%	15.888.337		14.601.952		8.526.451		12.485.298		9.711.561		12.557.484		10.025.690	52.772.442	DINAS PERTANIAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi umum perkantoran			1.652.339	18,46%	1.606.636		1.747.782	40,00%	3.175.526		1.819.169		1.998.559		1.883.714		1.883.714		1.973.134		1.973.134	<u>10.637.569</u>	

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			174.995	120%	179.541		1.045.697	240%	339.424		190.256		392.835		302.577		302.577		212.706		212.706	<u>1.427.083</u>
		Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi biopori/sumur resapan	-	-			20				20		20		-		-		-		-		-	-
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			67.800	200%	67.800		71.000	400%	99.250		74.500		-		78.000		78.000		82.000		82.000	<u>327.050</u>
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			30.000	200%	19.715		30.000	400%	39.715		30.000		15.000		30.000		16.500		30.000		18.150	<u>109.080</u>
5	Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	2.941	200%	1.941	baik	2.941	400%	2.532	baik	2.941	baik	591	sangat baik	2.941	sangat baik	650	sangat baik	2.941	sangat baik	715	<u>6.429</u>

		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																							
6	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase kualitas irigasi			57.225	20,0%	56.842		60.086	40,0%	106.888		63.090		-		66.245		66.245		69.557		69.557		<u>299.532</u>
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%			
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023			
7	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Kelembagaan tani yang aktif	58	64	265.890	10,0%	162.349	70	-	20,0%	216.171	77	320.000	77	81.810	83	330.000	83	89.991	90	350.000	90	98.990	<u>649.311</u>	
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%				6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%			
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023			
8	Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase penyediaan kawasan pertanian terpadu	0,00%	10,00%	3.904.014	10,0%	3.373.918	20,00%	3.878.224	21,60%	4.428.056	70,00%	5.603.224	70,00%	3.000.479	85,00%	5.733.224	85,00%	3.300.527	100,00%	5.817.724	100,00%	3.630.580	<u>17.733.559</u>	
		Jumlah produktivitas padi	4,9 ton/ha	5 ton/ha				5,1 ton/ha				5,2 ton/ha		5,2 ton/ha		5,3 ton/ha		5,3 ton/ha		5,4 ton/ha		5,4 ton/ha			
		Pertumbuhan	6,2	6,3				6,46				6,58		6,58		6,69		6,69		6,80		6,80			

		uhan PDRB	4%	5%				%				%		%		%		%		%				
		PDRB perkapita (ADHB)	24.4 01.8 64	27.5 33.8 96				30.66 5.928				33.79 7.959		33.79 7.959		36.92 9.991		36.92 9.991		40.06 2.023		40.06 2.023		
9	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi (Pertanian/Perkebunan)	Persentase Pemasaran Hasil Produksi (Pertanian/Perkebunan)			102.650	10,00%	79.835	106.000	10,00%	79.835		142.000		51.600		142.000		56.760		142.000		62.436	<u>330.466</u>	
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%			6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%			
		PDRB perkapita (ADHB)	24.4 01.8 64	27.5 33.8 96			30.66 5.928				33.79 7.959		33.79 7.959		36.92 9.991		36.92 9.991		40.06 2.023		40.06 2.023			
10	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan	Persentase peningkatan kemampuan petani dan penyuluh			204.195	20,00%	203.153	215.000	40,00%	361.688		225.000		-		236.000		236.000		247.000		247.000	<u>1.047.841</u>	
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%			6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%			
		PDRB perkapita (ADHB)	24.4 01.8 64	27.5 33.8 96			30.66 5.928				33.79 7.959		33.79 7.959		36.92 9.991		36.92 9.991		40.06 2.023		40.06 2.023			
11	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%	290.213	20,00%	302.253	6,46%	219.625	40,00%	525.022	6,58%	219.700	6,58%	227.915	6,69%	224.775	6,69%	224.775	6,80%	230.600	6,80%	230.600	<u>1.510.565</u>
		PDRB perkapita (ADHB)	24.4 01.8 64	27.5 33.8 96			30.66 5.928				33.79 7.959		33.79 7.959		36.92 9.991		36.92 9.991		40.06 2.023		40.06 2.023			

1 2	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	peningkatan produksi hasil peternakan	251 ekor	348 ekor	523. 745	8, 93 %	181. 249	445 ekor	5.26 0.00 0	20 ,5 2 %	882. 871	543 ekor	2.76 5.00 0	543 ekor	1.34 9.98 2	640 ekor	270. 000	640 ekor	270. 000	737 ekor	275. 000	737 ekor	275. 000	<u>2.95</u> <u>9.10</u> <u>2</u>
		Pertumbuhan PDRB	6,2 4%	6,3 5%				6,46 %				6,58 %		6,58 %		6,69 %		6,69 %		6,80 %		6,80 %		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.4 01.8 64	27.5 33.8 96				30.66 5.928				33.79 7.959		33.79 7.959		36.92 9.991		36.92 9.991		40.06 2.023		40.06 2.023		
1 3	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Jumlah penanaman Pohon yang Baru	-	500	107. 395	20 ,0 0 %	94.1 10	1.00 0	112. 500	40 ,0 0 %	158. 361	1.50 0	118. 000	1.50 0	-	2.00 0	124. 000	2.00 0	124. 000	2.50 0	130. 000	2.50 0	130. 000	<u>506.</u> <u>471</u>
1 4	Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Persentase Industri Hasil Hutan			16.2 80	20 ,0 0 %	16.0 40		17.0 00	40 ,0 0 %	36.8 49		18.0 00		-		19.0 00		19.0 00		20.0 00		20.0 00	<u>91.8</u> <u>89</u>
		Pertumbuhan PDRB	6,2 4%	6,3 5%				6,46 %				6,58 %		6,58 %		6,69 %		6,69 %		6,80 %		6,80 %		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.4 01.8 64	27.5 33.8 96				30.66 5.928				33.79 7.959		33.79 7.959		36.92 9.991		36.92 9.991		40.06 2.023		40.06 2.023		
1 5	Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi ikan konsumsi	298 ton/ta hun	313 ,5 ton/ta hun	2.94 5.94 5	18 ,4 5 %	2.27 5.02 1	329 ton/ta hun	2.98 4.32 2	38 ,2 3 %	5.43 6.14 9	344, 5 ton/ta hun	3.01 1.07 2	344, 5 ton/ta hun	1.40 7.68 0	360 ton/ta hun	3.04 2.82 2	360 ton/ta hun	3.04 2.82 2	375, 5 ton/ta hun	2.97 4.82 2	375, 5 ton/ta hun	2.97 4.82 2	<u>15.1</u> <u>36.4</u> <u>94</u>
		Jumlah produksi benih ikan	750 .00 0 eko r	900 .00 0 eko r				1.05 0.00 0 ekor				1.20 0.00 0 ekor		1.20 0.00 0 ekor		1.35 0.00 0 ekor		1.35 0.00 0 ekor		1.50 0.00 0 ekor		1.50 0.00 0 ekor		
		Pertumbuhan	6,2 4%	6,3 5%				6,46 %				6,58 %		6,58 %		6,69 %		6,69 %		6,80 %		6,80 %		

		PDRB																						
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896				30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
		Jumlah Total/tahun			10.345.627				15.750.177					14.601.952		8.526.451		12.485.298		9.711.561		12.557.484	10.025.690	52.772.442
	PERDAGANGAN				1.497.893	15,59%	1.085.286		1.519.321	33,19%	1.985.837		1.710.120		1.484.513		1.400.020		1.447.351		1.573.520	1.699.194	7.702.181	KANTOR PENGELOLAAN PASAR
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			655.227	17,14%	435.875		602.956	38,3%	852.869		638.645		705.759		680.045		776.335		690.045	853.968	<u>3.624.806</u>	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana aparatur			100.420	16,0%	60.185		178.000	24,0%	103.841		246.000		109.232		148.500		120.155		151.000	132.171	<u>525.584</u>	
		Jumlah gedung pemerintah daerah yang dilengkapi biopori/sumur resapan	-	-				20				20		20		-		-		-	-		-	
																							-	

3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur			26.800	20,00%	23.758		26.800	40,00%	46.566		26.800	-		26.800		26.800		26.800		26.800	<u>123.924</u>	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur			20.000	20,00%	5.670		25.000	40,00%	20.670		30.000	10.000		30.000		11.000		30.000		12.100	<u>59.440</u>	
5	Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan nilai SKPD dalam evaluasi kinerja	baik	baik	2.551	20,00%	2.533	baik	2.551	40,00%	3.305	baik	2.551	baik	852	sangat baik	2.551	sangat baik	937	sangat baik	2.551	sangat baik	1.031	<u>8.658</u>
		Kriteria penilaian evaluasi LAKIP																						
6	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah Peraturan Daerah tentang sistem pengelolaan pasar	-	-	692.895	16,00%	557.265	1	662.124	30,00%	941.319	-	741.124	-	658.670	-	487.124	-	487.124	-	648.124	-	648.124	<u>3.292.502</u>
		Persentase penyelenggaraan Kawasan pasar pusat yang representatif	-	-				-				-		-		100,00%		100,00%		100,00%	1.000.000	100,00%	1.000.000	

		Persentase Pengelolaan PIHP oleh Pemko	-	-							100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%				
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%			6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896			30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
7	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan	Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%	0	0,00%	6,46%	21.890	20,00%	17.267	6,58%	25.000	6,58%	-	6,69%	25.000	6,69%	25.000	6,80%	25.000	6,80%	25.000	<u>67.267</u>
		Pertumbuhan PDRB	6,24%	6,35%			6,46%				6,58%		6,58%		6,69%		6,69%		6,80%		6,80%		
		PDRB perkapita (ADHB)	24.401.864	27.533.896			30.665.928				33.797.959		33.797.959		36.929.991		36.929.991		40.062.023		40.062.023		
		Jumlah Total/tahun			1.497.893			1.519.321			1.710.120		1.484.513		1.400.020		1.447.351		1.573.520		1.699.194	7.702.181	

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018 secara terukur diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi : Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi : Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan berdasarkan kondisi tahun 2014, tendensi perkembangan dimasa lalu dan kemampuan keuangan. selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Padang Panjang

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2013	TAHUN									
				2014		2015		2016		2017		2018	
				TAR GET	REAL ISASI	TAR GET	REAL ISASI	TARGET		TARGET		TARGET	
								SBL M PRB HN	STLH PRBH N	SBL M PRB HN	STLH PRBH N	SBL M PRB HN	STLH PRBH N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
FOKUS : KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI													
1	Kesejahteraan dan Pemerataan ekonomi												
1.1	Pertumbuhan ekonomi	%	6,24	6,42	6,10	6,50	6,26	6,60	6,60	6,70	6,70	6,80	6,80
1.2	PDRB perkapita	(Rp/juta)	24,40	27,84	47,09	30,54	51,34	33,32	33,32	36,47	36,47	40,06	40,06
FOKUS : KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
1	Pendidikan												
1.1	Angka Melek Huruf	%	99,30	99,32	99,36	99,36	99,41	99,39	99,39	99,43	99,43	99,50	99,50
1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,74	11,06	10,79	11,21	10,99	11,37	11,37	11,53	11,53	11,69	11,69
1.3	Angka Partisipasi Kasar												
	1.3.1. APK SD/MI/Paket A	%	122	124	121,64	125	125,04	128	128	132	132	135	135
	1.3.2. APK SMP/MTs/Paket B	%	134	136	140,26	136	142,49	137	137	137	137	138	138
	1.3.3. APK SMA/SMK/MA/Paket C	%	241	263	227,13	278	243,58	294	294	309	309	324	324
1.4	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan												
	1.3.1. APT SD/MI/Paket A	Orang	1054	1200	1015	1244		1289	1289	1333	1333	1378	1378
	1.3.2. APT SMP/MTs/Paket B	Orang	1555	2056	1215	2292		2530	2530	2767	2767	3005	3005
	1.3.3. APT SMA/SMK/MA/Paket C	Orang	1935	2705	1951	3039		3374	3374	3708	3708	4043	4043
1.5	Angka Partisipasi Murni												
	1.5.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	96,59	97,00	109,64	98,00	109,01	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.5.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	96,11	98,00	108,74	100,00	108,28	105,00	105,00	110,00	110,00	120,00	120,00
	1.5.3. Angka Partisipasi Murni (APM)MA/SMK/MA/Paket C	%	151,47	153,00	165,79	156,00	181,38	159,00	159,00	162,00	162,00	165,00	165,00
2	Kesehatan												
2.2	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,01	72,86	72,44	73,25	72,71	73,65	73,65	74,04	74,04	74,40	74,40
2.3	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,1	0,1	5,10	0,1	5,00	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
FOKUS :													

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2013	TAHUN									
				2014		2015		2016		2017		2018	
				TAR GET	REAL ISASI	TAR GET	REAL ISASI	TARGET		TARGET		TARGET	
								SBL M PRB HN	STLH PRB N	SBL M PRB HN	STLH PRB N	SBL M PRB HN	STLH PRB N
1	2	3	4	5	6								
SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA													
1	Kebudayaan												
1.1	Jumlah Grup Kesenian	Group	17	19	20	20	20	21	21	23	23	24	24
1.2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Pemuda dan Olah Raga												
2.1	Jumlah Klub Olah Raga	Klub	130	135	29	138	31	141	141	144	144	147	147
2.2	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga	Unit	100	100	81	105	83	105	105	110	110	115	115
II. ASPEK PELAYANAN UMUM													
FOKUS : LAYANAN URUSAN WAJIB													
1	Pendidikan												
1.1	Pendidikan Dasar												
	1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah												
	a. APS 7 -12 Tahun	%	122,64	125,86	131,47	131,52	146,56	137,18	137,18	142,85	142,85	148,51	148,51
	b. APS 13 - 15 Tahun	%	145,25	168,08	169,51	178,24	169,51	188,40	188,40	198,56	198,56	207,71	207,71
	1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	rasio	0,600	0,665	0,56	0,705		0,745	0,745	0,795	0,795	0,825	0,825
	1.1.3. Rasio Guru Terhadap Murid	Rasio	8,8	9,05		9,10		9,15	9,15	9,20	9,20	9,25	9,25
	1.1.4. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	Rasio	14,06	13,58		13,25		12,93	12,93	12,60	12,60	12,28	12,28
1.2	Pendidikan Menengah												
	1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah 16 -18	Rasio	159,67	164,84	213,6	173,26	215,5	181,69	181,69	190,11	190,11	198,53	198,53
	1.2.2. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah	Rasio	0,65	0,6933	0,37	0,7176	0,45	0,7419	0,7419	0,7662	0,7662	0,7905	0,7905
	1.2.3. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata	Rasio	13,04	13,00		12,95		12,90	12,90	12,85	12,85	12,80	12,80
	1.2.4. Penduduk Yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)	%	99,30	99,32		99,36		99,39	99,39	99,43	99,43	99,49	99,49
1.3	Fasilitasi Pendidikan												
	1.3.1. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	1.3.2. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	1,744	1,750	1560	1,800	2.159	1,850	1,850	1,925	1,925	2,000	2,000
1.5	Angka Putus Sekolah												
	1.5.1. Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,39	0,32	0,31	0,25	0,22	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10
	1.5.2. Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,25	0,22	0,20	0,19	0,15	0,16	0,16	0,13	0,13	0,10	0,10
	1.5.3. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	%	0,95	0,85	0,87	0,75	0,67	0,65	0,65	0,55	0,55	0,40	0,40
1.6	Angka Kelulusan												
	1.6.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	1.6.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	97,29	97,83	99,67	98,37		98,92	98,92	99,46	99,46	100,00	100,00
	1.6.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	99,04	99,23	99,54	99,42		99,61	99,61	99,80	99,80	99,99	99,99
	1.6.4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	169,99	173,99	146,33	177,99	160,5	182,00	182,00	186,00	186,00	190,00	190,00
	1.6.5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	159,26	177,41	163,35	195,56	172,80	213,70	213,70	231,85	231,85	250,00	250,00
2	Kesehatan												
2.1	Rasio posyandu per satuan balita	Unit/balita	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Unit/jiwa	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Unit/jiwa	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004
2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	Orang/jiwa	0,00037	0,00039	0,00029	0,00045	0,00029	0,00050	0,00050	0,00055	0,00055	0,00060	0,00060
2.5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Orang/jiwa	0,00039	0,00039	0,0002	0,00045	0,0002	0,00050	0,00050	0,00075	0,00075	0,00100	0,00100
2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	23%	28%	74,21	29%		31%	31%	32%	32%	33%	33%
2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	93%	95%	87,22	96%		97%	97%	98%	98%	99%	99%
2.8	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	81,75%	84%		87%		90%	90%	95%	95%	100%	100%
2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	62,70%	63%	6,32	64%		66%	66%	68%	68%	70%	70%
2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100%	100%	100	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	95%	96%	36,85	97%		99%	99%	99%	99%	99%	99%
2.13	Cakupan kunjungan bayi	%	63%	70%	78,36	75%	93%	80%	80%	85%	85%	90%	90%
2.14	Cakupan puskesmas	%	70%	70%	200	72%	200%	75%	75%	77%	77%	79%	79%
2.15	Cakupan puskesmas pembantu	%	70%	70%	43,75	75%		80%	80%	85%	85%	90%	90%
2.16	Persentase balita gizi kurang	%	5,8	5,7	5,10	5,6	4,73	5,4	5,4	5,2	5,2	5,0	5,0
3	Pekerjaan Umum												
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	79,38	80,00	90,47	83,74	90,47	86,1	86,1	90,47	90,47	95,84	95,84
3.2	Rasio jaringan irigasi	-	5,08	5,50	5,85	7,50		9,50	9,50	11,50	11,50	13,35	13,35
3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	67,90	68,50	77,90	70,00	85,68	71,50	71,50	73,00	73,00	75,00	75,00
3.4	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)	%	9,85	10	4,91	11		12	12	13	13	15	15

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2013	TAHUN									
				2014		2015		2016		2017		2018	
				TAR GET	REAL ISASI	TAR GET	REAL ISASI	TARGET		TARGET		TARGET	
								SBL M PRB HN	STLH PRB N	SBL M PRB HN	STLH PRB N	SBL M PRB HN	STLH PRB N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	per satuan penduduk												
3.7	Panjang Jalan dilalui roda 4	km	94,85	94,85	83,80	94,85		94,85	94,85	94,85	94,85	94,85	
3.8	Panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	km	79,38	80,1	86,39	83,72	88,64	83,72	83,72	83,72	83,72	83,72	
3.10	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	m	46.341,53	39.889		41.989		44.869	44.869	46.269	46.269	48.569	
3.12	Luas irigasi kota dalam kondisi baik	%	75	80	269	85	298	90	90	95	95	99	
4	Perumahan												
4.1	Rumah tangga bersantitas	unit	10.011	10.050		10.075		10.100	10.100	10.125	10.125	10.150	
6	Perencanaan Pembangunan												
6.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6.4	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPd	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7	Perhubungan												
7.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	194.180	195.000	177.660	198.000	201.253	202.000	202.000	207.000	207.000	213.000	
7.2	Rasio Izin Trayek	-	0,407	0,450	0,003	0,500		0,550	0,550	0,600	0,600	0,650	
7.3	Jumlah uji KIR angkutan umum	buah	296	300		350		400	400	450	450	500	
7.4	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	buah	3	3	3	3		3	3	3	3	3	
7.5	Angkutan darat	buah	177	180	158	200		230	230	270	270	320	
7.6	Kepemilikan KIR angkutan umum	buah	296	300		350		400	400	450	450	500	
7.7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	7,5 menit	7,4 menit		7,2 menit		6,9 menit	6,9 menit	6,5 menit	6,5 menit	6,0 menit	
7.8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum												
	a. PNP	Rupiah	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	
	b. Bus dan Barang	rupiah	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	
7.9	Pemasangan rambu-rambu	buah	753	760		765		770	770	775	775	780	
8	Lingkungan Hidup												
8.1	Persentase penanganan sampah	%	99,98	100		100		100	100	100	100	100	
10	Kependudukan dan Catatan Sipil												
10.1	Persentase permohonan dokumen pembuatan akte kelahiran yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10.2	Persentase permohonan pembuatan dokumen akte nikah yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10.3	Persentase permohonan pembuatan KTP/KK yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10.4	Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	%	70	75		80		85	85	90	90	100	
10.5	Ketersediaan SOP dan SPM	Tidak Ada/ Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
10.6	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	80	84		88		92	92	96	96	100	
10.7	Bayi berakte kelahiran	%	37	40	59,78	55		70	70	85	85	100	
10.8	Pasangan berakte nikah	%	-	80		85		90	90	95	95	100	
10.9	Kepemilikan KTP	%	79,99	80,50		85		90	90	95	95	99	
10.10	Kepemilikan akte kelahiran per 100 penduduk	%	51,46	52,5	59,11	55		60	60	67	67	75	
10.11	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	ada	ada	Ada	
10.12	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah	Sudah	sudah	sudah	Sudah	
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	58	58		58		58	58	58	58	58	
11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	20	26		32		38	38	44	44	50	
11.3	Rasio KDRT	Rasio	0,0055	0,0045		0,0040		0,0035	0,0035	0,0030	0,0030	0,0010	
11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	-	80	100	85		90	90	95	95	100	
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera												
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	orang	2,78	2,73	2,08	2,68	2,00	2,63	2,63	2,58	2,58	2,53	
12.2	Rasio akseptor KB	rasio	0,72	0,75	0,56	0,77	0,68	0,79	0,79	0,81	0,81	0,83	
12.3	Cakupan peserta KB aktif	%	69	72	74,69	75	80	76	76	77	77	78	
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	KK	1.647	1.630		1.575		1.520	1.520	1.465	1.465	1.410	
	a. Pra Sejahtera	KK	85	80	303	75	288	70	70	65	65	60	
	b. Keluarga Sejahtera I	KK	1.562	1.550	1591	1.500	1.450	1.45	1.450	1.400	1.400	1.350	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2013	TAHUN									
				2014		2015		2016		2017		2018	
				TAR GET	REAL ISASI	TAR GET	REAL ISASI	TARGET		TARGET		TARGET	
								SBL M PRB HN	STLH PRB N	SBL M PRB HN	STLH PRB N	SBL M PRB HN	STLH PRB N
1	2	3	4	5	6								
								0					
13	Sosial												
13.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	panti	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
13.2	PMKS yang memperoleh bantuan	orang	227	311	97	277	90	177	177	100	100	100	
13.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial/ Penanganan PMKS	orang	227	311	97	277	90	177	177	100	100	100	
13.4	Jumlah PMKS	orang	1.215	1.200	1.064	1.185	1.000	1.170	1.170	1.155	1.155	1.140	
14	Ketenagakerjaan												
14.1	Angkatan kerja (Orang)	Orang	21.125	21.460	20.178	21.802	20.480	22.149	22.149	22.501	22.501	22.859	
14.2	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	kasus	-	8		8		8	8	8	8	8	
14.3	Tingkat partisipasi angkatan kerja	orang	19.576	20.065	19.681	20.494	20.150	20.931	20.931	21.376	21.376	21.945	
14.4	Pencari kerja yang ditempatkan	orang	-	50		50		60	60	60	60	65	
14.5	Tingkat pengangguran	%	7.33	6,50	8,29	6,00	7,36	5,50	5,50	5,00	5,00	4,80	
14.6	Rasio penduduk yang bekerja	%	62.22	65	62	67	68	69	69	71	71	73	
15	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah												
15.1	Persentase koperasi aktif	%	76,32	77,00		80,00		83,00	83,00	87,00	87,00	90,00	
15.2	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	unit	16	16		16		16	16	16	16	16	
15.3	Jumlah BPR/LKM												
	a. BPR/BPRS	unit	3	3	5	3	5	3	3	3	3	3	
15.4	Usaha Mikro dan Kecil	Unit	5,500	5,525	5.379	5,600	5.902	5,700	5,700	5,800	5,800	5,900	
16	Penanaman Modal												
16.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)												
	a. Persetujuan												
	- PMDN	Unit	1	1	173	2		2	2	2	2	2	
	- PMA	Unit	Belum ada	1		1		1	1	1	1	1	
	b. Realisasi												
	- PMDN	Unit	Belum ada	1		1		2	2	2	2	2	
	- PMA	Unit	Belum ada	0		1		1	1	1	1	1	
16.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)												
	a. PMDN (Rp.Juta)	(Rp.juta)	0	9.000	556.991	10.000	663.637	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000	
	b. PMA (US\$ Ribu)	(US\$. ribu)	0	0	0	18.000	0	19.000	19.000	20.000	20.000	21.000	
16.3	a. Rasio Penyerapan Tenaga Kerja												
	- PMDN (Orang)	orang	0	400		500		600	600	700	700	800	
16.4	a. Nilai Realisasi Investasi												
	- PMDN(Rp. Juta)	(Rp.juta)	0	9.000	556.991	10.000	663.637	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000	
	- PMA (US \$ Ribu)	(US\$. ribu)	0	0	0	18.000	0	19.000	19.000	20.000	20.000	21.000	
16.5	Kenaikan/penurunan nilai realisasi												
	- PMDN(Rp.Juta)	(Rp.juta)	0	0		1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	- (%)	%	0	0		11		10	10	9	9	8	
	- PMA (US \$ Ribu)	(US\$. ribu)	0	0		0		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	- (%)	%	0	0		0		6	6	5	5	5	
17	Kebudayaan												
17.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	Kali	3	3	3	5	5	5	5	8	8	8	
17.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	4	4	2	4	3	4	4	5	5	5	
17.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	2	2	4	2	4	2	2	2	2	2	
18	Kepemudaan dan Olahraga												
18.1	Jumlah organisasi pemuda	Buah	17	17	19	17	19	17	17	17	17	17	
18.2	Jumlah organisasi olahraga	Cabang	15	15	29	15	30	20	20	20	20	20	
18.3	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kali	10	10	4	12	6	14	14	16	16	18	
18.4	Jumlah kegiatan olahraga	Kali	12	12	4	14	7	16	16	18	18	20	
18.5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Unit	-	-	1		1	-	-	1	1	1	
18.6	Lapangan olahraga	Unit	82	82	80	83	80	84	84	84	84	84	
18.7	Diklat Pemuda	Kali	1	1	4	2	4	4	4	6	6	8	
19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri												
19.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	kali	2	2		2		2	2	2	2	2	
19.2	Kegiatan pembinaan politik daerah	kali	1	1		1		1	1	1	1	1	
19.3	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap aliran agama	kali	12	12		12		12	12	12	12	12	
19.4	pertemuan LSM,TOMAS,ORMAS	kali	1	1		1		1	1	1	1	1	
19.5	Pemantapan wawasan kebangsaan bagi TOMAS/TOGA/TODAT dan OSIS	Kali	3	3		3		3	3	3	3	3	
19.6	komunikasi serta koordinasi sesama parpol dan pemerintah	kali	1	1		1		1	1	1	1	1	
19.7	Jumlah rapat koordinasi rutin bulanan dan insidental	kali	12	12		12		12	12	12	12	12	
19.8	Jumlah rapat koordinasi keamanan lingkungan	kali	12	12		12		12	12	12	12	12	
19.9	Jumlah sarana dan prasarana penunjang Pemilu-Pilkada	paket	0	-		1		1	1	-	-	1	

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2013	TAHUN									
				2014		2015		2016		2017		2018	
				TAR GET	REAL ISASI	TAR GET	REAL ISASI	TARGET		TARGET		TARGET	
								SBL M PRB HN	STLH PRB N	SBL M PRB HN	STLH PRB N	SBL M PRB HN	STLH PRB N
1	2	3	4	5	6								
19	Penanggulangan Bencana												
19.1	Jumlah siaga bencana	OK	0	-	85		85	85	100	100	100	100	
19.2	Jumlah sosialisasi terhadap bencana	kali	4	4	6		6	6	8	8	8	8	
19.3	Standar Operasional Prosedur	document	2	2	2		2	2	2	2	2	2	
19.3	Jumlah Sarana dan Prasarana tanggap darurat	unit	-	-	60		78	78	100	100	130	130	
19.4	Tim Reaksi Cepat	Orang	50	50	60		75	75	80	80	85	85	
19.4	Jumlah paket perbaikan darurat bencana	paket	1	1	3		3	3	4	4	4	4	
19.5	Jumlah lokasi potensi bencana	lokasi	10	10	10		10	10	10	10	10	10	
19.6	Jumlah Pengkajian Pemulihan Pasca Bencana	kasus	0	3	3		3	3	3	3	3	3	
19.7	Jumlah Pemulihan social psikologis	kali	0	0	1		1	1	1	1	1	1	
19.8	Jumlah Pemeriksaan tabung pemadam kebakaran	set	0	600	750		800	800	825	825	850	850	
19.10	Jumlah siaga pemadam kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran	tahun	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
19.11	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kebakaran	jenis	2	2	2		2	2	2	2	2	2	
19.12	Jumlah sosialisasi kebakaran	kali	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
19.13	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	unit	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
19.14	Jumlah diklat bagi anggota pemadam kebakaran	kali	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian												
20.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	
21	Ketahanan Pangan												
21.1	Regulasi ketahanan pangan	buah	Belum ada	-	1		2	2	3	3	4	4	
21.2	Ketersediaan pangan utama	ton	9.443	9.915	10.411		10.931	10.931	11.478	11.478	12.052	12.052	
22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
22.4	LPM Berprestasi	Kelompok	16	16	16		16	16	16	16	16	16	
22.5	PKK aktif	Kelompok	19	19	19		19	19	19	19	19	19	
22.6	Posyandu aktif	Kelompok	91	91	91		96	96	98	98	100	100	
FOKUS : LAYANAN URUSAN PILIHAN													
1	PERTANIAN												
1.1	Produksi padi	ton	9.443	9.915	8.074	10.411	8.411	10.931	10.931	11.478	11.478	12.052	
1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	8,65	8,60	5,84	8,55	5,8	8,50	8,50	8,45	8,45	8,40	
1.6	Cakupan bina kelompok petani	%	98	98	123	98	123	99	99	100	100	100	
4	Pariwisata												
4.1	Kunjungan wisata mancanegara (orang)	Orang	23.127	24.283	11.155	25.498	15.145	26.772	26.772	28.111	28.111	29.517	
4.2	Kunjungan wisata nusantara (orang)	orang	305.456	320.729	340.961	336.765	350.521	353.604	353.604	371.284	371.284	389.848	
4.2	Kontribusi sektor pariwisata (Hotel, restoran, hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB	%	2,53	2,75	3,00	3,00	3,35	3,35	3,80	3,80	4,35	4,35	
5	Kelautan dan Perikanan												
5.1	Produksi perikanan	ton	508,58	520	868,2	540	870	560	560	580	580	600,00	
5.4	Cakupan bina perikanan (pembudidayaan, nelayan, pengolah dan pemasaran)	%	21	23		26		30	30	35	35	41	
6	Perdagangan												
6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	11,61	11,65	17,97	11,80	18,10	12,00	12,00	12,25	12,25	12,55	
6.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	-	20		40		60	60	70	70	80	
7	Perindustrian												
7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	7,98	8,00	10,85	8,50	10,90	9,00	9,00	9,60	9,60	10,30	
7.2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	%	62,51	62,55		62,75		63,00	63,00	63,35	63,35	63,70	
7.3	Pertumbuhan Industri	%	4,84	4,90	7,43	4,95	7,50	5,00	5,00	5,25	5,25	5,50	
7.4	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH													
FOKUS : KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH													
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian												
I. RETRIBUSI													
	- Retribusi pelayanan kesehatan	Rp. Juta	891,25	935,81	188,15	982,60	200,150	1,031,73	1,031,73	1,083,32	1,083,32	1.137,49	
	- Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Rp. Juta	140,00	147,00	158,11	154,35	193,25	162,07	162,07	170,17	170,17	178,68	
	- Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Rp. Juta	293,50		362,6		406,8						

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA TAHUN 2013	TAHUN									
				2014		2015		2016		2017		2018	
				TAR GET	REAL ISASI	TAR GET	REAL ISASI	TARGET		TARGET		TARGET	
								SBL M PRB HN	STLH PRB N	SBL M PRB HN	STLH PRB N	SBL M PRB HN	STLH PRB N
1	2	3	4	5	6								
				308,18	3	323,58	9	339,76	339,76	356,75	356,75	374,59	374,59
	- Retribusi tempat penginapan	Rp. Juta	11.710	12.295,50	7,08	12.910,28	9.045	13.555,79	13.555,79	14.233,58	14.233,58	14.945,26	14.945,26
	- Retribusi penjualan produksi usaha daerah	Rp. Juta	100.00	105,00	49,37	110,25	71,45	115,76	115,76	121,55	121,55	127,63	127,63
	- Retribusi izin trayek	Rp. Juta	8.00	8,40	11,19	8,82	11,7	9,26	9,26	9,72	9,72	10,21	10,21
FOKUS : SUMBER DAYA MANUSIA													
1	Ketenagakerjaan												
1.1	Rasio lulusan S1/S2/S3	rasio	0,09	0,09	0,12	0,11	0,13	0,12	0,12	0,14	0,14	0,15	0,15
1.2	Rasio ketergantungan	rasio	0,59	0,59	0,62	0,50	0,55	0,45	0,45	0,40	0,40	0	0

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 PEDOMAN TRANSISI RKPD TAHUN 2019

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah daerah pada masa akhir jabatan Walikota Padang Panjang Tahun 2019, maka RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 dapat digunakan sebagai salah satu pedoman masa transisi dan acuan penyusunan RKPD Tahun 2019.

Mengingat berbagai hal, terutama masa transisi batas waktu kepemimpinan Walikota terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 nantinya, maka walaupun RPJMD Tahun 2018-2023 belum ada, Pemerintah Kota Padang Panjang tetap menyusun RKPD Tahun 2019 sesuai

jadwal, dengan memasukan agenda penyelesaian masalah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013-2018.

10.2KAIDAH PELAKSANAAN

Mengingat RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota terpilih pada PILKADA tahun 2013, dimana dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dan RPJMN Tahun 2010-2014 yang akan dilaksanakan dalam periode masa jabatan tahun 2013-2018, maka ditetapkan kaidah pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Agar adanya sinkronisasi dan kesinambungan dalam pembangunan daerah, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan RKPD Kota Padang Panjang 5 (lima) tahun ke depan harus mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018
2. Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Padang Panjang dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di Kota Padang Panjang dan masyarakat termasuk dunia usaha, harus saling bersinergi dan berkewajiban untuk melaksanakan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, sehingga program pembangunan yang direncanakan dalam lima tahunan dapat dicapai secara maksimal.
3. Walikota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan selama periode kepemimpinan 5 (lima) tahun berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 dengan menggerakkan secara optimal semua kekuatan dan potensi yang dimiliki sesuai ketentuan berlaku.
4. Dalam pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018, setiap SKPD perlu mengupayakan penguatan peran *stakeholders* dalam mendukung pelaksanaannya dengan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, instansi terkait maupun masyarakat luas;
5. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 dijadikan salah satu dasar dan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja Kepala Daerah terpilih sesuai dengan periode jabatannya (lima tahun dan tahunan) sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut.

10.3PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Agar pelaksanaan dan pencapaian RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dilaksanakan pengendalian dan evaluasi dengan langkah antara lain sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;
2. Kepala Bappeda Kota Padang Panjang menyusun, menghimpun, mengkoordinasikan dan menganalisis hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Tahun 2013-2018 dari masing-masing Kepala SKPD Kota Padang Panjang sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018;
3. Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud digunakan untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

4. Kepala Bappeda Kota Padang Panjang melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 kepada Walikota